



**PEMBERITAAN POLITIK DALAM
SURAT KABAR DE LOCOMOTIEF
DI HINDIA BELANDA
TAHUN 1901-1940**

SKRIPSI

Oleh

ZEZA DWI AGAM

NIM. 220110301051

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2026



**PEMBERITAAN POLITIK DALAM
SURAT KABAR DE LOCOMOTIEF
DI HINDIA BELANDA
TAHUN 1901-1940**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Humaniora

Oleh

ZEZA DWI AGAM

NIM. 220110301051

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

MOTTO

A soul in tension that's learning to fly.

Pink Floyd, "*Learning to Fly*" (1987)



Karya ini sebagai persembahan untuk:

1. Suminah, sebagai ibu penulis yang selalu mendukung, menyemangati dalam situasi apapun, serta sosok paling penting dan berharga dalam hidup penulis.
2. Agus Priyono, sebagai ayah penulis yang mendukung dalam berbagai situasi.
3. Shofura Triwidaningrum, adik perempuan tersayang yang penulis banggakan yang selalu mendukung dan mendengarkan curhatan penulis.
4. Teman-teman almamater Universitas Jember



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeza Dwi Agam

NIM : 220110301051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Pemberitaan Politik dalam Surat Kabar De Locomotief di Hindia Belanda Tahun 1901-1940" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2026

Yang menyatakan,



Zeza Dwi Agam

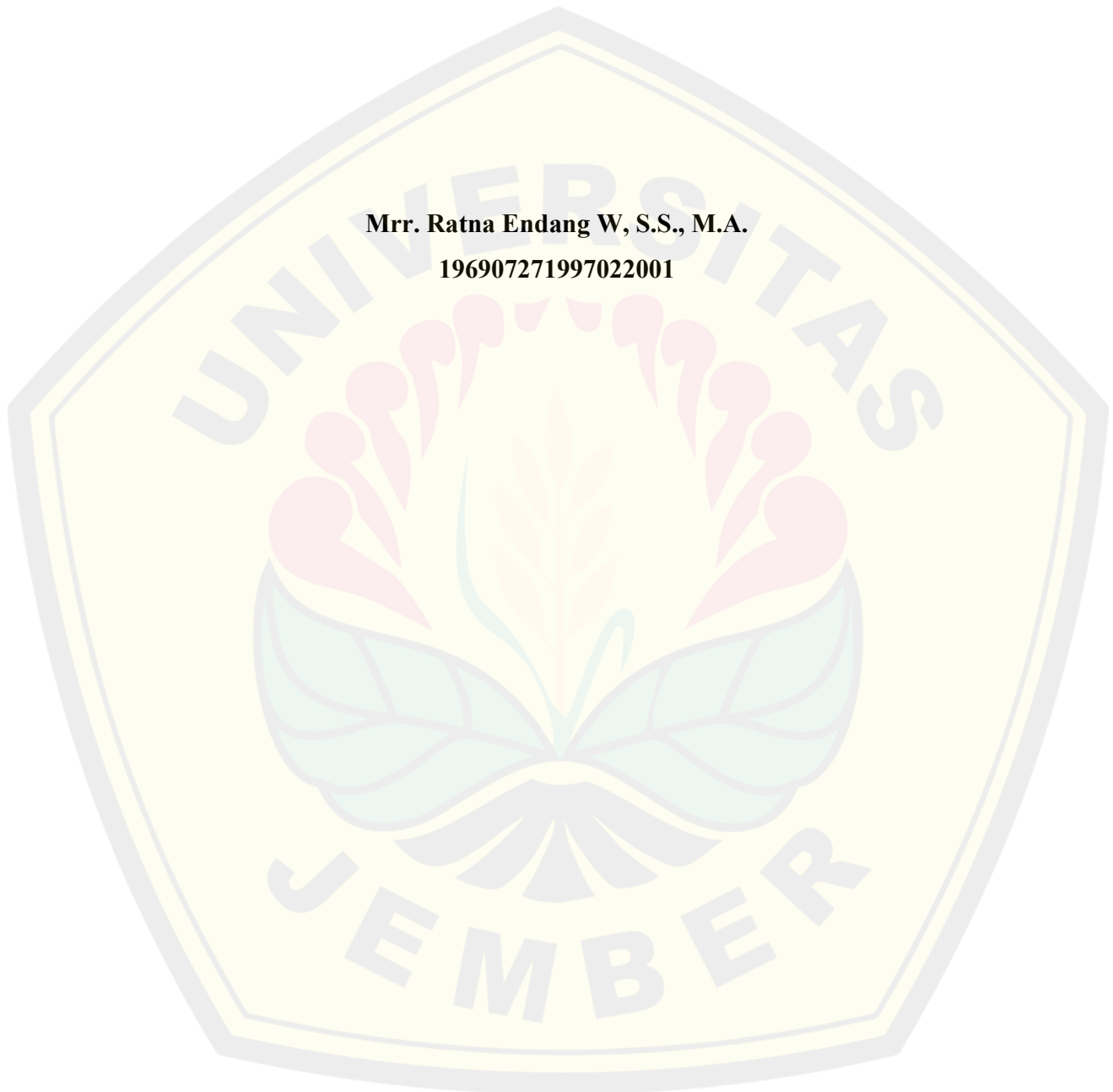
NIM. 220110301051

Skripsi berjudul "Pemberitaan Politik dalam Surat Kabar De Locomotief di Hindia Belanda Tahun 1901-1940" telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember

Dosen Pembimbing,

Mrr. Ratna Endang W, S.S., M.A.

196907271997022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 337188 - Fax. 332738 - email : fib@unej.ac.id
Laman : <http://fib.unej.ac.id>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :

Pemberitaan Politik Dalam Surat Kabar De Locomotief Di Hindia Belanda Tahun
1901-1940

ditulis oleh:

Nama : ZEZA DWI AGAM

NIM : 220110301051

Jurusan/Prodi : Sejarah

Diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2026

telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Sejarah Fakultas ilmu Budaya Universitas
Jember, pada Senin, 29 Juni 2026

Tim Penguji

1. Mrr Ratna Endang Widuatie, S.S., M.A. (196907271997022001) Sebagai Dosen Pembimbing Utama
3. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum. (197108251999031001) Sebagai Dosen Penguji Utama
4. Krisnanda Theo Primaditya S.Pd. M.A. (199705102024061001) Sebagai Dosen Penguji Anggota

Mengetahui Dekan,



Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
NIP. 196612211992011001

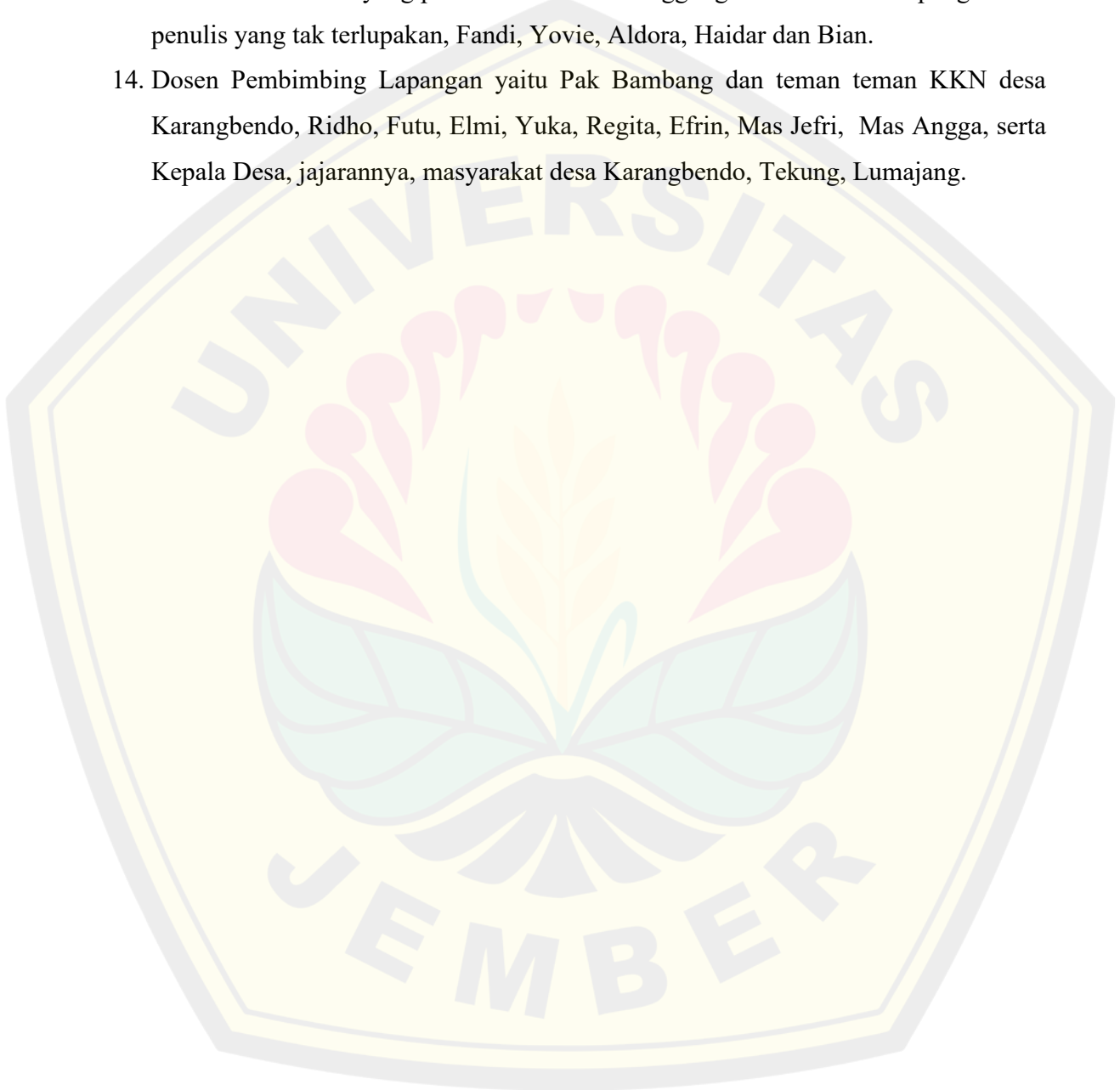
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Pers Kolonial dengan judul *Pemberitaan Politik dalam Surat Kabar De Locomotief tahun 1901-1940 di Hindia Belanda*.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan beberapa penelusuran sumber, akhirnya menetapkan penelitian ini sebagai judul. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari proses untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Nawiyanto M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Sejarah sekaligus dosen penguji I
3. Mrr. Ratna Endang W, S.S., M.A., selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu pikiran dan membantu penulis.
4. Krisnanda Theo Primaditya S.Pd., M.A., selaku dosen penguji II
5. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., selaku dosen pendamping akademik periode semester I hingga VII
6. Tedy Harmawan, M.A., selaku dosen pendamping akademik semester VII hingga tuntas.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan akademik, serta pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Untuk jajaran staf akademik Fakultas Ilmu Budaya dan staf laboratorium Ilmu Sejarah yang membantu mengurus setiap birokrasi dengan sepenuh hati.
9. Cuk Setya Sarsito, sebagai paman penulis yang memberikan pengalaman dan bantuan yang luar biasa dalam 4 tahun selama di Jember untuk tempat tinggal.

10. Fido, sebagai teman SMA, teman dekat, dan partner penulisan jurnal internasional yang selalu memberikan dukungan, menemani di kala senang dan susah sebagai sesama warga Tuban.
11. Teman-teman Ilmu Sejarah Angkatan 2022, yaitu Denis, Ulum, Dika, Daffa, Nathan, Ferdi, Gibran, Yusril, Aldo, Farhan, Dimas, Eko, Rifai, Farid, Jauhari sebagai teman perkuliahan angkatan 22 yang selalu menemani dalam keadaan senang maupun susah.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2022 dari maba hingga sekarang yang belum disebutkan oleh penulis.
13. Teman-teman band yang pernah menemani manggung dan memberikan pengalaman penulis yang tak terlupakan, Fandi, Yovie, Aldora, Haidar dan Bian.
14. Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Pak Bambang dan teman teman KKN desa Karangbendo, Ridho, Futu, Elmi, Yuka, Regita, Efrin, Mas Jefri, Mas Angga, serta Kepala Desa, jajarannya, masyarakat desa Karangbendo, Tekung, Lumajang.

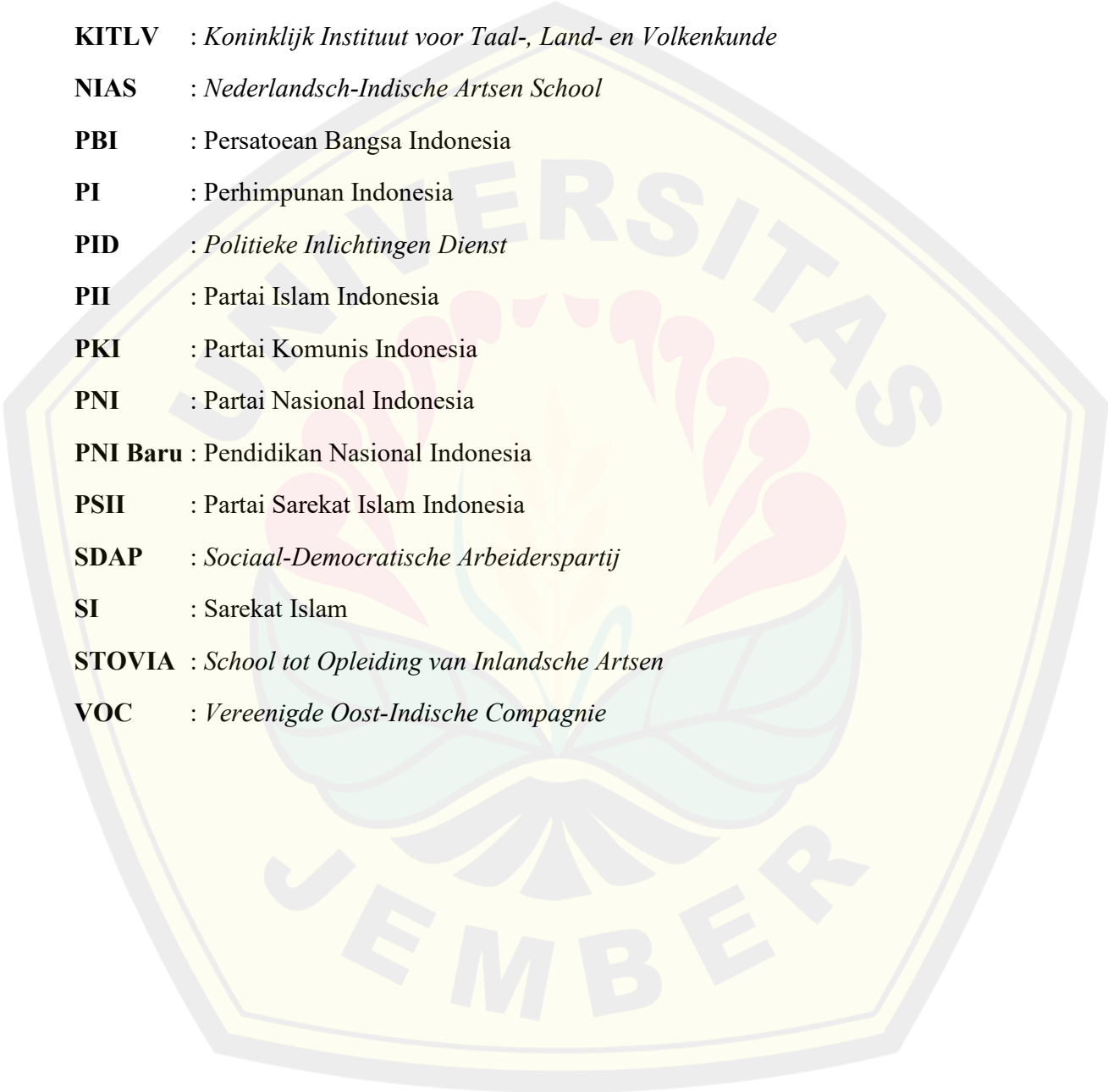


DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
RINGKASAN	xxi
SUMMARY	xxiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
1.3.1 Tujuan	12
1.3.2 Manfaat	13
1.4 Ruang Lingkup	13

BAB 2	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
BAB 3	25
PENDEKATAN, KERANGKA TEORETIS, METODE	25
PENELITIAN SERTA SISTEMATIKA PENULISAN	25
3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoretis	25
3.2 Metode Penelitian	26
3.3 Sistematika Penulisan	28
BAB 4	30
PEMBAHASAN	30
4.1 Kondisi dan pemberitaan <i>De Locomotief</i> di Hindia Belanda Sebelum Tahun 1901	30
4.1.1 Awal mula berdirinya surat kabar <i>De Locomotief</i>	30
4.1.2 Pemberitaan <i>De Locomotief</i> terhadap kebijakan kolonial Hindia Belanda	36
4.1.3 Posisi <i>De Locomotief</i> dalam pers kolonial Hindia Belanda	43
4.2 Isi pemberitaan politik pada surat kabar <i>De Locomotief</i> selama periode 1901-1940	45
4.2.1 Pemberitaan tentang <i>Politik Etis</i> dan kritik terhadap kebijakan kolonial 1901-1907	45
4.2.2 Pemberitaan tentang Gerakan Nasional Pribumi 1908-1917	86
4.2.3 Pemberitaan tentang organisasi komunisme dan radikalisme 1918-1927	118
4.2.4 Pemberitaan tentang Krisis Politik dan Sensor Pers 1928-1940	153
4.3 Dampak Pemberitaan Surat Kabar <i>De Locomotief</i> dalam Bidang Sosial dan Politik	199
4.3.1 Dampak Politik	200
4.3.2 Dampak Sosial	208
BAB 5	212
KESIMPULAN	212





ANETA	: <i>Algemeen Nieuws en Telegraaf-Agentschap</i>
BO	: Boedi Oetomo
CSI	: Centraal Sarekat Islam
GAPI	: Gaboengan Politik Indonesia
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia
ISDV	: <i>Indische Sociaal-Democratische Vereeniging</i>
KITLV	: <i>Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde</i>
NIAS	: <i>Nederlandsch-Indische Artsen School</i>
PBI	: Persatoean Bangsa Indonesia
PI	: Perhimpunan Indonesia
PID	: <i>Politieke Inlichtingen Dienst</i>
PII	: Partai Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNI Baru	: Pendidikan Nasional Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
SDAP	: <i>Sociaal-Democratische Arbeiderspartij</i>
SI	: Sarekat Islam
STOVIA	: <i>School tot Opleiding van Inlandsche Artsen</i>
VOC	: <i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i>

Jurnalistik	: Kegiatan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita kepada publik.
Pers kolonial	: Pers yang terbit pada masa kolonial dan berada dalam lingkungan sosial-politik kekuasaan kolonial.
Surat kabar kolonial	: Surat kabar yang diterbitkan di wilayah kolonial, umumnya memakai bahasa dan sudut pandang kelompok penguasa kolonial.
Politik Etis	: Kebijakan kolonial awal abad ke-20 yang menekankan tanggung jawab moral Belanda terhadap penduduk Hindia Belanda, terutama melalui pendidikan, irigasi, dan perpindahan penduduk.
Hutang Kehormatan	: Gagasan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk membalas keuntungan yang diperoleh dari Hindia Belanda dengan memperbaiki kesejahteraan penduduk pribumi.
Balas Budi	: Istilah populer untuk menjelaskan semangat Politik Etis sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah kolonial.
<i>Cultuurstelsel</i> / Tanam Paksa	: Sistem kolonial abad ke-19 yang mewajibkan penduduk menanam komoditas tertentu untuk kepentingan pemerintah kolonial.
<i>Landrente</i>	: Pajak tanah yang dikenakan kepada penduduk, terutama di Jawa, dalam sistem administrasi kolonial.
Gubernemen	: Sebutan untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda.
<i>Reglement op de Drukwerken</i>	: Peraturan kolonial mengenai penerbitan dan percetakan yang menjadi dasar pengawasan terhadap pers di Hindia Belanda.
Sensor pers	: Pengawasan atau pembatasan terhadap isi media oleh pemerintah sebelum atau sesudah penerbitan.

<i>Persbreidel</i>	: Ordonansi pemberangusan pers yang memberi
<i>Ordonnantie</i>	kewenangan kepada pemerintah kolonial untuk membatasi atau melarang penerbitan tertentu.
Etis-liberal	: Corak pemikiran yang menggabungkan kritik moral terhadap eksploitasi kolonial dengan keyakinan bahwa kekuasaan kolonial masih dapat diperbaiki.
Konservatif kolonial	: Sikap politik yang cenderung mempertahankan ketertiban dan kekuasaan kolonial serta curiga terhadap gerakan radikal.
<i>Volksraad</i>	: Dewan rakyat bentukan pemerintah kolonial yang menjadi forum politik terbatas di Hindia Belanda.
Radikalisme	: Sikap atau gerakan politik yang menuntut perubahan mendasar dan sering dipandang mengancam ketertiban kolonial.
Komunisme	: Ideologi politik yang menekankan perjuangan kelas dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi.
Bolshevisme	: Aliran komunisme revolusioner yang terkait dengan Revolusi Rusia dan sering dipakai dalam wacana kolonial sebagai simbol ancaman politik.
Agitasi	: Upaya membangkitkan emosi atau dorongan politik massa untuk mendukung suatu gerakan.

Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Harga Surat Kabar <i>De Locomotief</i> Tahun 1901 hingga 1940.	209



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Pieter Brooshooft (1845-1921)	32
4.2	Behoorlijk betaalde Arbeid	36
4.3	Een Opstel over Java	38
4.4	Zwakke Zijden van Ons Koloniaal Stelsel	40
4.5	Een Eereschuld	42
4.6	De Landrente op Java	47
4.7	De ethische Koers I	49
4.8	De ethische Koers II	51
4.9	De ethische Koers III	53
4.10	De ethische Koers IV	56
4.11	De eerste step	60
4.12	Een Javaansche roman-hervormings-program	62
4.13	Na het onderzoek	65
4.14	Van dag tot dag	67
4.15	Internationaal Koloniaal Congres	70
4.16	Politiek zonder hart I	72
4.17	Politiek zonder hart II	76
4.18	De Javabode over den landvoogd en de expedities	79
4.19	Van een volk, dat dorst naar kennis	83
4.20	De Javanenbond	86
4.21	Boedi Oetomo	88
4.22	Het Javanencongres	90
4.23	Wanneer krijgen de magangs eindelijk de lang beloofde bezoldiging?	92
4.24	Malaria bestrijding	95
4.25	Een praatje over Cholera	97
4.26	Boedi Oetomo en het Volksonderwijs	99
4.27	Afdeelingen van Boedi Oetomo	102

4.28	Een rumoerige vergadering	104
4.29	De S.I. Leider	106
4.30	De Indier	109
4.31	Organisatie	110
4.32	Het Vierde I.S.D.V. congres	112
4.33	Sarikat Islam contra I.S.D.V.	114
4.34	De S.I. en de stakingen	118
4.35	Derde Nationale Congres der C.S.I	121
4.36	De Centraal Sarekat Islam	123
4.37	Communique van de Politieke Concentratie	125
4.38	Vakcentrale en staking	128
4.39	De Volksraad	130
4.40	De P.K.I.	133
4.41	Het ontslag van resident de stuers	135
4.42	Zedelijke veerkracht en werkelijkheid	138
4.43	Tegen het Communisme	139
4.44	Waar de communisten wapens halen, Singapore als P.K.I., centrum	141
4.45	De eerste schakel	143
4.46	Der organisatie der communisten	144
4.47	Het complot in den Preanger	146
4.48	Dr. Tjipto en de communisten	147
4.49	Een Nieuwe Organisatie Van Communisten	149
4.50	Het eerste congres van de P.N.I.	153
4.51	De Perserikatan Nasional Indonesia	156
4.52	Pemoeda Indonesia	159
4.53	De arrestaties te Jogja	161
4.54	Sterk overdreven voorstelling der Malaise	163
4.55	Persoverzicht	165
4.56	Over Nationalisme	167
4.57	Partij Rakjat Indonesia	169

4.58	Openbare Vergadering P.N.I.	172
4.59	Soekarno	175
4.60	De Politieke Toestand	177
4.61	Haat Gevoelens	179
4.62	Het Indo Vraagstuk	181
4.63	Fusie Congres van Parindra	183
4.64	Parindra	185
4.65	Herleving Partindo?	187
4.66	Eerste Ledenvergadering Gerindo	188
4.67	De Gerindo	190
4.68	Dr. Soetomo te Soerabaia Overleden	192
4.69	Nationale Concentratie	194
4.70	De Koningin en de Prinses te Amsterdam	196

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Perpisahan pemimpin redaksi <i>De Locomotief</i> P. Brooshooft	221
Lampiran B	Paviliun surat kabar harian <i>De Locomotief</i>	222



Penelitian ini membahas pemberitaan politik dalam surat kabar *De Locomotief* di Hindia Belanda tahun 1901-1940. *De Locomotief* merupakan salah satu surat kabar kolonial berbahasa Belanda yang memiliki posisi penting dalam perkembangan pers kolonial, khususnya di Semarang dan Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang pendirian dan pemberitaan *De Locomotief* sebelum tahun 1901, mengidentifikasi isi pemberitaan politiknya selama periode 1901-1940, serta menganalisis dampak sosial dan politik dari pemberitaan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama penelitian ini adalah edisi-edisi surat kabar *De Locomotief*, sedangkan sumber pendukung berupa buku, artikel ilmiah, peraturan kolonial, dan kajian sejarah pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 1901, *De Locomotief* telah memperlihatkan perhatian terhadap persoalan kolonial seperti eksploitasi tenaga kerja, administrasi desa, kemiskinan, dan tanggung jawab moral Belanda terhadap Hindia Belanda. Pada periode 1901-1907, surat kabar ini memperlihatkan corak etis-liberal melalui kritik terhadap kebijakan kolonial dan dukungan terhadap gagasan Politik Etis. Pada periode 1908-1917, *De Locomotief* mulai menyoroti kemunculan organisasi pribumi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV. Pada periode 1918-1927, pemberitaannya semakin defensif terhadap komunisme, gerakan buruh, pemogokan, dan pemberontakan 1926. Sementara itu, pada periode 1928-1940, *De Locomotief* lebih keras terhadap nasionalisme non-kooperatif seperti PNI dan Partindo, tetapi masih dapat menerima organisasi legal dan moderat seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *De Locomotief* mendukung kemajuan pribumi selama tetap berada dalam batas legal, moderat, dan tidak mengancam otoritas kolonial. Dampak sosial-politiknya terlihat dalam pembentukan wacana kolonial mengenai kemajuan pribumi, batas gerakan moderat dan radikal, serta legitimasi pengawasan terhadap pers dan gerakan politik.

Kata kunci: *De Locomotief*, Hindia Belanda, Pemberitaan Politik.

ABSTRACT

This study examines political reporting in the newspaper *De Locomotief* in the Dutch East Indies from 1901 to 1940. *De Locomotief* was a Dutch-language colonial newspaper that played a significant role in the development of the colonial press, particularly in Semarang and Central Java. This study aims to explain the background to *De Locomotief's* founding and reporting before 1901, identify the content of its political reporting from 1901 to 1940, and analyze the social and political impact of this reporting. The method used is historical, encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary source of this research is the editions of the newspaper *De Locomotief*, while supporting sources include books, scholarly articles, colonial regulations, and historical studies of the press. The results indicate that before 1901, *De Locomotief* had shown concern for colonial issues such as labor exploitation, village administration, poverty, and the Dutch moral responsibility towards the Dutch East Indies. During the period 1901-1907, the newspaper displayed an ethical-liberal tone through its criticism of colonial policies and support for the Ethical Policy. In the period 1908-1917, *De Locomotief* began highlighting the emergence of indigenous organizations such as Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, and ISDV. In the period 1918-1927, its reporting became increasingly defensive of communism, labor movements, strikes, and the 1926 rebellion. Meanwhile, during 1928-1940, *De Locomotief* took a more strident stance against non-cooperative nationalists such as the PNI and Partindo, but remained receptive to legal and moderate organizations such as Parindra, Gerindo, and GAPI. This study concludes that *De Locomotief* supported indigenous progress as long as it remained within the bounds of legal, moderate, and non-threatening colonial authority. Its socio-political impact is evident in the formation of colonial discourse on indigenous progress, the boundaries of moderate and radical movements, and the legitimacy of oversight of the press and political movements.

Keywords: *De Locomotief*, Dutch East Indies, political news.

Pemberitaan Politik dalam Surat Kabar *De Locomotief* di Hindia Belanda Tahun 1901-1940, Zeza Dwi Agam ; 220110301051 ; Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Penelitian ini membahas pemberitaan politik dalam surat kabar *De Locomotief* di Hindia Belanda tahun 1901-1940. *De Locomotief* merupakan salah satu surat kabar kolonial berbahasa Belanda yang terbit di Semarang dan memiliki pengaruh penting dalam perkembangan pers kolonial di Hindia Belanda. Surat kabar ini awalnya terbit dengan nama *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad* pada tahun 1852, kemudian berganti nama menjadi *De Locomotief* pada tahun 1863. Dalam perkembangannya, surat kabar ini tidak hanya memuat iklan atau berita umum, tetapi juga menjadi media yang ikut membicarakan kebijakan kolonial, persoalan pribumi, gerakan politik, komunisme, nasionalisme, dan sensor pers.

Permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas tiga hal. Pertama, bagaimana latar belakang pendirian dan pemberitaan *De Locomotief* di Hindia Belanda sebelum tahun 1901. Kedua, bagaimana isi pemberitaan politik pada surat kabar *De Locomotief* selama periode 1901-1940. Ketiga, bagaimana dampak pemberitaan surat kabar *De Locomotief* dalam bidang sosial dan politik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan latar belakang pendirian dan pemberitaan awal *De Locomotief*, mengidentifikasi isi pemberitaan politiknya selama periode 1901-1940, serta menganalisis dampak sosial dan politik dari pemberitaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber utama yang digunakan adalah edisi-edisi surat kabar *De Locomotief* yang memuat pemberitaan politik dari akhir abad ke-19 hingga tahun 1940. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber pendukung berupa buku, artikel ilmiah, peraturan kolonial, dan kajian sejarah pers. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah pers dan sejarah politik, dengan perhatian pada cara surat kabar membentuk wacana, opini, dan pembingkai terhadap peristiwa politik di Hindia Belanda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tahun 1901, *De Locomotief* telah memperlihatkan perhatian terhadap persoalan kolonial. Pemberitaannya menyoroti masalah tenaga kerja, upah, administrasi desa, kemiskinan, serta tanggung jawab moral Belanda terhadap Hindia Belanda. Artikel tentang “Hutang Kehormatan” pada tahun 1899

memperlihatkan bahwa sebelum Politik Etis diberlakukan secara resmi, *De Locomotief* telah ikut memuat wacana mengenai kewajiban moral Belanda terhadap tanah jajahan. Dengan demikian, pemberitaan sebelum tahun 1901 menjadi dasar penting untuk memahami kecenderungan etis-liberal *De Locomotief* pada awal abad ke-20.

Pada periode 1901-1907, *De Locomotief* banyak memberitakan Politik Etis dan kritik terhadap kebijakan kolonial. Pada masa pengaruh Pieter Brooshooft, surat kabar ini menekankan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya boleh mengambil keuntungan dari Hindia Belanda, tetapi juga memiliki kewajiban memperbaiki kesejahteraan penduduk pribumi. Isu seperti sewa tanah, pajak, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan kemiskinan menjadi bagian penting dari kritiknya. Namun, kritik tersebut tetap berada dalam batas kolonial karena *De Locomotief* tidak menolak kekuasaan Belanda, melainkan menuntut agar kekuasaan kolonial dijalankan secara lebih adil dan bertanggung jawab.

Pada periode 1908-1917, pemberitaan *De Locomotief* mulai menyoroti kemunculan organisasi pribumi modern. Boedi Oetomo diberitakan secara simpatik karena dianggap bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial. Akan tetapi, ketika muncul Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV, sikap *De Locomotief* menjadi lebih selektif. Gerakan pribumi masih dapat diterima selama bergerak secara legal, tertib, dan tidak menantang otoritas kolonial. Sebaliknya, gerakan yang membawa politik massa, kritik konfrontatif, atau pengaruh sosialisme mulai dipandang dengan curiga.

Pada periode 1918-1927, perhatian *De Locomotief* banyak tertuju pada gerakan buruh, pemogokan, sosialisme, komunisme, ISDV, PKI, dan pemberontakan 1926. Surat kabar ini masih dapat mengakui adanya persoalan sosial-ekonomi seperti rendahnya upah dan buruknya kondisi kerja. Namun, ketika persoalan buruh dikaitkan dengan komunisme, Bolshevisme, dan jaringan revolusioner, *De Locomotief* mulai menempatkannya sebagai ancaman terhadap ketertiban kolonial. Pemberontakan komunis 1926 menjadi titik penting karena setelah peristiwa tersebut, komunisme semakin kuat dibingkai sebagai bahaya politik.

Pada periode 1928-1940, fokus pemberitaan bergeser dari komunisme menuju nasionalisme non-kooperatif, pengawasan pers, dan situasi menjelang Perang Dunia II. PNI, Partindo, dan gerakan yang berkaitan dengan Soekarno dipandang berbahaya karena menuntut kemerdekaan, menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial, dan membangun kekuatan politik di luar kendali negara kolonial. Penangkapan Soekarno, penyitaan media, pembatasan organisasi, dan sensor pers diberitakan sebagai bagian dari usaha menjaga

ketertiban. Namun, *De Locomotief* tidak menolak semua bentuk nasionalisme. Organisasi seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI masih dapat diberitakan dengan nada lebih wajar karena bergerak secara legal, kolektif, dan lebih moderat.

Dampak politik pemberitaan *De Locomotief* terlihat dalam pembentukan wacana kolonial mengenai batas antara gerakan yang dianggap legal dan moderat dengan gerakan yang dianggap radikal dan berbahaya. Surat kabar ini ikut memperkuat pandangan bahwa kritik sosial masih dapat diterima selama tidak berubah menjadi agitasi massa, komunisme, atau nasionalisme non-kooperatif. Dalam isu pers, *De Locomotief* bahkan menunjukkan dukungan terhadap pembatasan dan pengawasan pers ketika kebebasan tersebut dianggap mengancam stabilitas kolonial.

Dampak sosial pemberitaan *De Locomotief* terlihat dalam cara surat kabar ini membawa persoalan sosial pribumi ke dalam ruang publik kolonial. Isu kemiskinan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, administrasi desa, dan kesejahteraan pribumi dibicarakan di hadapan pembaca Eropa dan elite terdidik. Namun, dampak sosial tersebut bersifat terbatas karena *De Locomotief* merupakan surat kabar berbahasa Belanda dengan pembaca utama dari kalangan Eropa, pegawai kolonial, pengusaha, kaum profesional, serta sebagian kecil pribumi terdidik dan bangsawan Jawa. Dengan demikian, masyarakat pribumi lebih sering menjadi objek pemberitaan daripada pembaca utama surat kabar ini.

Political Reporting in the De Locomotief Newspaper in the Dutch East Indies, 1901-1940, Zeza Dwi Agam; 220110301051; History Study Program, Faculty of Humanities, University of Jember.

This study examines political reporting in the De Locomotief newspaper in the Dutch East Indies, 1901-1940. De Locomotief was a Dutch-language colonial newspaper published in Semarang and had a significant influence on the development of the colonial press in the Dutch East Indies. Initially published as Semarangsch Nieuws en Advertentieblad in 1852, the newspaper changed its name to De Locomotief in 1863. Over time, the newspaper not only published advertisements and general news but also became a medium for discussing colonial policies, indigenous issues, political movements, communism, nationalism, and press censorship.

The research questions are threefold. First, the background to the founding and reporting of De Locomotief in the Dutch East Indies before 1901. Second, the content of political reporting in the newspaper De Locomotief during the period 1901-1940. Third, the impact of De Locomotief's reporting on social and political issues. The objectives of this study are to explain the background to the founding and early reporting of De Locomotief, to identify the content of its political reporting during the period 1901-1940, and to analyze the social and political impact of this reporting.

This research employs historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary sources used are editions of the newspaper De Locomotief, which contained political reporting from the late 19th century to 1940. In addition, this study utilizes supporting sources such as books, scholarly articles, colonial regulations, and studies of press history. The approaches employed are press history and political history, with attention to how newspapers shaped discourse, opinion, and the framing of political events in the Dutch East Indies.

Research indicates that before 1901, De Locomotief had expressed concern about colonial issues. Its reporting highlighted issues of labor, wages, village administration, poverty, and the Dutch moral responsibility towards the Dutch East Indies. An article on "Debts of Honor" in 1899 demonstrates that before the official implementation of the Ethical Policy, De Locomotief had already included discourse on the Dutch moral obligation to the

colony. Thus, reporting before 1901 provides an important basis for understanding De Locomotief's ethical-liberal tendencies in the early 20th century.

Between 1901 and 1907, De Locomotief published extensively on the Ethical Policy and critiqued colonial policies. Under the influence of Pieter Brooshooft, the newspaper emphasized that the colonial government was not only entitled to profit from the Dutch East Indies but also had an obligation to improve the welfare of the indigenous population. Issues such as land rent, taxes, labor, education, health, irrigation, and poverty were central to its critique. However, this criticism remained within colonial boundaries, as De Locomotief did not reject Dutch rule, but rather demanded that colonial rule be exercised more fairly and responsibly.

Between 1908 and 1917, De Locomotief's reporting began to highlight the emergence of modern indigenous organizations. Boedi Oetomo was sympathetically reported on because it was considered active in education, health, and social progress. However, with the emergence of Sarekat Islam, Indische Partij, and ISDV, De Locomotief's stance became more selective. Indigenous movements were still acceptable as long as they operated legally and in an orderly manner and did not challenge colonial authority. Conversely, movements that embraced mass politics, confrontational criticism, or socialist influences began to be viewed with suspicion.

Between 1918 and 1927, De Locomotief's attention focused largely on labor movements, strikes, socialism, communism, the ISDV, the Indonesian Communist Party (PKI), and the 1926 rebellion. The newspaper still acknowledged socio-economic issues such as low wages and poor working conditions. However, when labor issues were linked to communism, Bolshevism, and revolutionary networks, De Locomotief began to frame them as a threat to the colonial order. The 1926 communist rebellion became a pivotal point, as communism was increasingly framed as a political threat.

In the period 1928-1940, the focus of news coverage shifted from communism to non-cooperative nationalism, press surveillance, and the pre-World War II situation. The Indonesian National Party (PNI), Partindo (Partindo), and movements associated with Sukarno were viewed as dangerous because they demanded independence, refused to cooperate with the colonial government, and built political power outside the control of the colonial state. Sukarno's arrest, media confiscation, and restrictions on Organizations and press censorship were reported as part of efforts to maintain order. However, De Locomotief

did not reject all forms of nationalism. Organizations such as Parindra, Gerindo, and GAPI could still be reported in a more reasonable tone because they operated legally, collectively, and in a more moderate manner.

The political impact of *De Locomotief*'s reporting was evident in the formation of colonial discourse regarding the boundaries between movements deemed legal and moderate and those deemed radical and dangerous. The newspaper helped reinforce the view that social criticism was acceptable as long as it did not escalate into mass agitation, communism, or non-cooperative nationalism. Regarding the press, *De Locomotief* even expressed support for press restrictions and oversight when such freedom was deemed a threat to colonial stability.

The social impact of *De Locomotief*'s reporting was evident in the way the newspaper brought indigenous social issues into the colonial public sphere. Issues of poverty, labor, education, health, village administration, and indigenous welfare were discussed before European readers and the educated elite. However, this social impact was limited because *De Locomotief* was a Dutch-language newspaper with a primary readership of Europeans, colonial officials, business people, professionals, and a small minority of educated natives and Javanese aristocrats. As a result, indigenous people were more often the object of news coverage than the paper's primary readership.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers dapat dipahami sebagai sebuah institusi sosial sekaligus sarana komunikasi massa yang berperan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Kegiatan tersebut mencakup proses pencarian, pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyebarluasan informasi. Informasi yang dimaksud dapat disajikan dalam berbagai bentuk baik teks, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, data, maupun grafik serta disampaikan melalui beragam medium, termasuk media cetak, media elektronik, maupun saluran komunikasi lain yang tersedia.¹ Pers tidak jauh dari wartawan dan jurnalistik, jurnalistik adalah kegiatan atau bagian dari pers yang dilakukan oleh wartawan. Setiap wartawan yang melakukan pekerjaannya ini mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.² Kegiatan jurnalistik ini dinaungi oleh perusahaan pers yang merupakan badan penyelenggara usaha pers seperti media cetak, media elektronik, dan kantor berita yang menyalurkan dan memberitakan suatu

¹ Akhir Matua Harahap, *Sejarah Pers di Indonesia: Awal Kebangkitan Bangsa*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023), hlm. 1-10.

² *Ibid.*

informasi.³ Kemerdekaan pers merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, prinsip keadilan, serta supremasi hukum.⁴

Sejarah pers dimulai pada tahun 1624 ketika mesin cetak masuk di Hindia Belanda yang diperkenalkan oleh misionaris Gereja Protestan. Mesin cetak tersebut berasal dari Belanda ini awalnya digunakan untuk kegiatan misionaris dan literatur untuk keperluan agama Kristen. Pada tahun 1659, Cornelis Pijl yang merupakan misionaris dari Belanda ini mengenalkan mesin cetak kepada kongsi dagang di Hindia Belanda, *de Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC).⁵ VOC merupakan organisasi dagang yang dibentuk beberapa perusahaan dagang Belanda pada tahun 1602. Pemerintah Belanda mendukung penuh VOC dengan memberikan hak istimewa (*octrooy*) selama 21 tahun hingga diperpanjang berkali-kali sampai tahun 1795.⁶ Cornelis memanfaatkan media cetak untuk kepentingan menyebarkan Injil pada penduduk pribumi. VOC kemudian memanfaatkan media cetak untuk kepentingan administrasinya.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff ini pertama kalinya menggunakan mesin cetak juga mendatangkan alat cetak dengan kualitas lebih bagus dari Belanda. *Bonggaya*⁷ merupakan produk percetakan pertama VOC, Hendrick Brant

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial di Indonesia", dalam *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. VIII, No. 16, Juli-Desember 2018, hlm. 28.

⁶ Rosmaida Sinaga, *et.al.*, "Masa Pemerintahan VOC di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC", dalam *AR RUMMAN Journal of Education and Learning Evaluation*, Vol. 1, No. 2, 2024. hlm. 392-393.

⁷ *Bonggaya* merupakan kesepakatan damai yang ditandatangani pada 18 November 1667 di Bungaya antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman. Meskipun secara formal disebut sebagai perjanjian perdamaian, substansi dari kesepakatan ini sebenarnya menandai kekalahan pihak Gowa atas VOC dalam Perang Makassar. Selain itu, perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai legitimasi bagi VOC untuk memonopoli perdagangan berbagai komoditas di pelabuhan Makassar yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Gowa. Lihat Hermalian Putri, " Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan

mencetak dokumen tersebut pada pertengahan tahun 1668.⁸ Mesin cetak masa itu masih digunakan untuk mencetak buku dan dokumen untuk kepentingan VOC dan belum terlihat adanya upaya untuk menerbitkan surat kabar hingga J.E. Jordens seorang pengusaha dan juga bekerja pada bagian administrasi pada kantor Sekretariat Jenderal VOC yang kelak menerbitkan surat kabar *Bataviasche Nouvelles*.⁹

Era VOC ini menjadi tonggak awal pers di Indonesia, *Bataviase Nouvelles* adalah surat kabar yang diterbitkan di Hindia Timur tepatnya di Batavia pada tahun 1744.¹⁰ Pribumi di sini masih belum berperan dalam bidang pers, karena keterbatasan dalam menguasai baca dan tulis masih sangat minim. Surat kabar *Bataviase Nouvelles* edisi 29 Agustus 1744 ini terbit sekali seminggu menggunakan bahasa Belanda dengan dua halaman, surat kabar ini masih memuat terkait perdagangan dan kepentingan misionaris pada masa itu.¹¹ Berita-berita yang dimuat ini terkait dengan pejabat VOC, keberangkatan dan kedatangan kapal menuju Batavia. Secara rinci juga disebutkan nama kapal, jenisnya dan volume komoditas yang ada di dalam kapal untuk kepentingan perdagangan.

Surat kabar *Bataviase Nouvelles* ini hanya bertahan dua tahun kemudian, pada tahun 1746 merupakan edisi terakhirnya. Akan tetapi umur surat kabar ini singkat namun pengaruh dan keberadaannya sangat berarti dalam perkembangan media pers di Hindia Belanda.¹² Ada pula surat kabar untuk berita lelang yaitu *Het Vendu Nieuws*. Berita-berita yang dimuat dalam surat kabar mingguan ini tentang pelelangan barang-barang milik pegawai VOC yang kembali ke Negeri Belanda. Surat kabar ini hanya memuat berita lelang hingga akhir

Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669”, dalam *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, 2025. hlm. 240.

⁸ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, *op.cit.* hlm. 29.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Akhir Matua Harahap, *Sejarah Pers di Indonesia: Awal Kebangkitan Bangsa*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023), hlm. 25.

¹¹ *Bataviase Nouvelles*, 29 Agustus 1744.

¹² Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, *loc.cit.*

penerbitannya, surat *Het Vendu Nieuws* ini surat kabar kedua dan terakhir yang diterbitkan oleh VOC.¹³

Kejayaan VOC mulai runtuh sejak tahun 1780-an akibat adanya peningkatan biaya dan penurunan hasil penjualan menjadikan kerugian besar bagi VOC. Kontrak VOC yang habis pada tanggal 31 Desember 1799 dan juga korupsi para pegawai VOC yang membuat kongsi dagang tersebut merugi di berbagai wilayah membuat pemerintah kerajaan Belanda membubarkan perusahaan dagang tersebut di Hindia Timur.¹⁴ Setelah pembubaran, daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels.¹⁵

Pada abad ke-19 muncul surat kabar *Bataviasche Kolonial Courant*, surat kabar ini resmi milik Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Surat kabar tersebut memuat berbagai ketentuan resmi pemerintah, pengumuman penting, serta informasi mengenai perkembangan yang terjadi di Eropa. Publikasi surat kabar ini terus diterbitkan hingga 2 Agustus 1811, sebelum kekuasaan di Hindia Belanda beralih ke tangan Inggris. Pada masa pemerintahan Inggris (1811-1816) surat kabar *Bataviasche Kolonial Courant* berubah nama *Java*

¹³ Kasijanto, "Media dan Monopoli Dagang ; Percetakan dan Penerbitan di Indonesia pada masa VOC", dalam *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2008. hlm. 296-297.

¹⁴ Rosmaida Sinaga, *et.al.*, *op.cit.* hlm. 395-396.

¹⁵ Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak tahun 1808 hingga 1811. Setahun setelah menjabat, ia mengakuisisi Percetakan Kota—yang sebelumnya menerbitkan *Vendu Nieuws*—dan menggabungkannya dengan Percetakan Benteng sehingga terbentuk lembaga percetakan resmi pemerintah yang dikenal sebagai *Landsdrukkerij* atau Percetakan Negara. Lembaga ini terus beroperasi dan mempertahankan eksistensinya hingga berakhirnya masa pemerintahan kolonial. Lihat Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial di Indonesia", dalam *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. VIII, No. 16, Juli-Desember 2018, hlm. 30.

Government Gazette yang berbahasa Inggris.¹⁶ Surat kabar ini terbit pada 29 Februari 1812 hanya berusia selama 2 tahun dan menggunakan bahasa Inggris dalam penulisannya.¹⁷

Setelah kekuasaan Belanda kembali pulih di wilayah Hindia Belanda, Batavia kembali berfungsi sebagai pusat penerbitan media resmi pemerintahan kolonial. Pada 20 Agustus 1816, diterbitkan surat kabar *Bataviasche Courant*, yang kemudian berganti nama menjadi *Javasche Courant* pada tahun 1828. Surat kabar ini berfokus pada pemberitaan seputar aktivitas dan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, dengan target pembaca utama kalangan bangsa Eropa.¹⁸ Terbit dua kali seminggu, setiap Rabu dan Jumat, *Javasche Courant* umumnya memuat informasi mengenai keputusan pemerintah, daftar kepangkatan pejabat kolonial, serta pengumuman terkait pelelangan dan perdagangan.

Surat kabar *Javasche Courant* memuat *Max Havelaar*¹⁹ merupakan novel dari Multatuli atau nama lain Douwes Dekker.²⁰ Kemudian adanya liberalisme di Belanda ini memberikan dampak bagi perkembangan pers di Hindia Belanda pada tahun 1848, Setelahnya surat kabar ini kembali berbahasa Belanda pada pemerintahan Belanda, beberapa surat kabar ini terbit di berbagai kota seperti, Padang, Surabaya, Jogjakarta, Surakarta, Medan,

¹⁶ *Java government gazette*, 29 Februari 1812.

¹⁷ Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 26.

¹⁸ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, *op.cit.* hlm. 31.

¹⁹ *Max Havelaar* merupakan novel yang ditulis oleh Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker, seorang mantan asisten residen di Hindia Belanda. Karya ini diterbitkan pada tahun 1860 dan berisi kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda. Melalui novel tersebut, Multatuli menyoroti praktik pemerintahan kolonial yang menindas dan mengeksploitasi rakyat pribumi, yang diperlakukan semata-mata sebagai objek untuk dieksploitasi tenaga serta sumber dayanya tanpa memperoleh kesejahteraan atau timbal balik yang sepadan. Lihat Ahmad Zaki dan Nabillah Nur, "Analisis Kritik Sosial dalam Novel *Max Havelaar* Karya Multatuli", dalam *APPSI Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024. hlm. 74-75.

²⁰ Miftahul Habib Fachrurozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputera", dalam *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 18-19.

dan Semarang. Batavia, Surabaya, dan Semarang ini menjadi kota yang berpengaruh bagi perkembangan pers di Hindia Belanda.²¹

J. W. Bruining dari Rotterdam ini pada tahun 1851 menerbitkan *Bataviasche Advertentieblad* di Batavia yang berisi mengenai iklan-iklan.²² Kemudian di Surabaya terbit, *Het Soerabajaasch Handelsblad* yang didirikan oleh kaum pengusaha pabrik gula Belanda di Jawa Timur. Dan terakhir kota yang berpengaruh yaitu Semarang, Herman de Groot pada tahun 1852 menerbitkan *Semarangsche Nieuws en Advertentieblad*, adalah nama sebelum menjadi surat kabar *De Locomotief*.

Peraturan mengenai pers di Hindia Belanda ditetapkan pertama kali pada tahun 1856, peraturan ini bernama *Reglement Op De Drukwerken In Nederlandsch-Indie*.²³ Peraturan ini disusun sebagai respons terhadap pertumbuhan pers swasta di Hindia Belanda yang berkembang dalam ideologi liberalisme. Pemerintah kolonial memandang pers semacam itu sebagai ancaman yang berpotensi mengganggu ketertiban umum karena penyampaian beritanya dianggap terlalu lugas dan cenderung menghasut. Undang-undang Pers tahun 1856 kemudian diberlakukan sebagai instrumen untuk membatasi kebebasan pers serta menjadi sarana bagi pemerintah kolonial dalam menindak pihak yang melontarkan kritik terhadap kekuasaan. Ketentuan dalam Pasal 13²⁴ undang-undang tersebut secara jelas menunjukkan bentuk pengawasan preventif terhadap publikasi media. Pihak-pihak progresif, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda, menyampaikan kritik karena peraturan tersebut dinilai menghambat kebebasan pers dan melanggar Konstitusi Belanda yang secara tegas melarang

²¹ Akhir Matua Harahap, *op.cit.*, hlm. 51.

²² Abdurrachman Surjomihardjo, *loc.cit.*

²³ *Reglement Op de Drukwerken*, Pasal 13, tahun 1856.

²⁴ Pasal 13 menyatakan bahwa setiap karya cetak wajib mengirimkan satu eksemplar kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat yudisial, serta *Algemeene Secretarie* (Kesekretariatan Negara) sebelum karya tersebut diterbitkan. Kewajiban pengiriman ini harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbit disertai dengan tanda tangan resmi. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa denda dengan nominal antara f.50 hingga f.1.000. Lihat Dewi Yuliati, "Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia", dalam *ANUVA* Vol. 2, No. 3, 2018. hlm. 256.

praktik sensor pers. Alih-alih mematikan perkembangan media, kebijakan penyensoran ini justru menjadi titik balik penting bagi pertumbuhan pers kolonial dan pers pribumi.

Surat kabar *De Locomotief* ini terbit pada tahun 1852 dengan nama *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad*. Didirikan dan diterbitkan oleh seorang pengusaha percetakan di Semarang yaitu Herman de Groot.²⁵ Surat kabar ini awalnya hanya memuat periklanan dan penerbitannya secara mingguan. Penerbitan surat kabar ini ditujukan untuk semua golongan penduduk Semarang pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga lampiran yang berbeda bahasa yakni Jawa, Arab dan Tionghoa.²⁶

Surat kabar *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad* mengalami pergantian nama menjadi *De Locomotief: Samarangsch Handels- en Advertentie-blad* pada tahun 1863.²⁷ *Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij* yang didirikan pada 27 Agustus 1863 ini menjadi faktor utama terjadinya perubahan nama surat kabar ini. Penambahan nama *De Locomotief* menjadi simbol dan rangka memperingati pembangunan jalur rel kereta api dari Surakarta dan Yogyakarta ke Semarang. Kereta api merupakan simbol kemajuan teknologi yang sedang berkembang kala dan menjadi simbol modernisasi di wilayah Hindia Belanda.²⁸ Surat kabar ini berkembang menjadi surat kabar terpenting di Jawa Tengah dan Yogyakarta.²⁹ *De Locomotief* ini tidak memiliki saingan dari surat kabar lain di kawasan Semarang sejak tahun 1866, sehingga beberapa surat kabar yang terbit tapi kalah bersaing dan berakhir dibeli

²⁵ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah. *op.cit.* hlm 32.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, (Terj. Mien Joebhaar) (Jakarta: Hasta Mitra KITLV, 2003), hlm, 39.

²⁸ von Faber, *A Short History of Journalism in the Dutch East Indies*, (Surabaya: G.Kolff & Co, 1930). hlm. 64.

²⁹ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 40.

oleh *De Locomotief*.³⁰ Adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan informasi masyarakat ini menjadikan penerbitannya menjadi surat kabar harian pada tahun 1870.³¹

Pieter Brooshooft, seorang jurnalis dan penulis asal Belanda, menjabat sebagai redaktur utama pada periode 1886-1896. Pada tahun 1887, ia melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa dan mendokumentasikan berbagai kesulitan yang dialami oleh penduduk asli Hindia Belanda kala itu. Menurut pengamatannya, kerugian yang diderita masyarakat pribumi disebabkan oleh kebijakan budidaya pangan yang merugikan. Hasil dari pengamatannya kemudian dituangkan dalam sebuah buku berjudul *Memorie Over den Toestand in Indie* yang berarti “Catatan tentang Keadaan di Hindia Belanda.” Dalam karyanya tersebut, Brooshooft mengemukakan kritik terhadap praktik perdagangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Brooshooft mengakui bahwa *Politik Etis* telah dirancang dengan tujuan baik, Brooshooft tetap merasa kecewa karena penerapannya sarat kontradiksi dan tidak sesuai dengan semangat awal kebijakan tersebut. Ia akhirnya kembali ke Belanda pada tahun 1904.³² Di bawah pimpinan Brooshooft menjadikan surat kabar ini vokal dalam mendukung *Politik Etis*³³, *De Locomotief* sering mengkritik eksploitasi pada kaum pribumi dan menyoroti tentang politik balas budi. Pada tahun 1887, Brooshooft menulis laporan dan mengelilingi Jawa ini menyoroti tentang kemiskinan akibat adanya kebijakan sistem *tanam*

³⁰ Abdurrachman Surjomihardjo, *op.cit.* hlm. 28.

³¹ *Ibid.*

³² Rosmaida Sinaga, *et.al.*, *op.cit.* hlm. 288.

³³ *Politik Etis* mulai diterapkan pada awal abad ke-20 sebagai kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlandaskan semangat “balas budi” terhadap rakyat pribumi. Kebijakan ini diwujudkan melalui tiga program utama, yakni pengembangan pendidikan, pembangunan irigasi, dan pelaksanaan transmigrasi. Meskipun kebijakan tersebut turut mendorong kemajuan bagi masyarakat Indonesia, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka kekuasaan kolonial Belanda. Pada tahap awal penerapannya, *Politik Etis* dijalankan dengan penuh tanggung jawab, ditandai dengan adanya perhatian dari pemerintah kolonial terhadap kesejahteraan rakyat pribumi serta pemberian bantuan ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Lihat Rosmaida Sinaga, *et.al.*, “*Politik Etis: Dari Eksploitasi Ke Emansipasi di Era Kolonial*”, dalam *AR RUMMAN Journal of Education and Learning Evaluation*, Vol. 1, No. 2, 2024. hlm. 289-290.

*paksa*³⁴. Dibandingkan dengan surat kabar seperti *Bataviasche Nieuwsblad* dan *Nieuws van den Dag* media ini memposisikan sebagai media yang setia mendukung kebijakan kolonial yaitu *Politik Etis*.³⁵

De Locomotief yang mendukung *Politik Etis* ini mendapat dukungan oleh gabungan perusahaan perdagangan impor.³⁶ Jadi selain isu-isu yang berkaitan pemerintah kolonial saja yang dimuat dalam surat kabar ini, tapi juga kadang menyoroti perkembangan situasi pribumi hingga awal kemunculan organisasi-organisasi pribumi. *De Locomotief* adalah salah satu dari dua pers kolonial yang mampu melawan *Algemeen Nieuws En Telegraaf-Agentschaap*³⁷ (ANETA) selain *Indische Courant*.³⁸ ANETA sendiri memegang monopoli di bidang penyebaran dan pembagian berita, karena ANETA ini didukung oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menjadikan *De Locomotief* sebagai contoh perjuangan kebebasan pers dalam melawan monopoli berita dari suatu kantor berita.³⁹

Beberapa surat kabar lain, seperti *Bataviaasch Nieuwsblad* ini mengkritik *De Locomotief* karena sering membawakan berita mengenai *Politik Etis* pribumi. *De Locomotief*

³⁴ Sistem *Tanam Paksa* atau *cultuurstelsel* diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Kebijakan ini diterapkan sebagai pengganti sistem *sewa tanah* atau *landelijk stelsel* yang sebelumnya dirancang namun tidak berhasil dilaksanakan secara optimal. Lihat Alfa Tirza Aprilia, *et.al.*, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870", dalam *JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES "ESTORIA"*, Vol. 1, No. 2, 2021. hlm. 123.

³⁵ Mirjam Maters, *op.cit.* hlm. 43.

³⁶ Abdurrachman Surjomihardjo, *op.cit.* hlm. 36.

³⁷ *Algemeen Nieuws En Telegraaf-Agentschaap* atau ANETA merupakan Keagenan Berita Umum dan Telegram ini didirikan pada 1 April 1917, pendirian kantor berita ini berada ditengah-tengah kecamuk Perang Dunia I. Selama periode Perang Dunia I, ANETA berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting dari medan pertempuran hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah peristiwa terjadi. Seiring berjalannya waktu, ANETA mengalami perkembangan pesat dan menjelma menjadi sebuah kantor berita atau biro pers yang besar serta berorientasi modern. Lihat Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002),. hlm. 39.

³⁸ *Ibid*, hlm. 36.

³⁹ Abdurrachman Surjomihardjo. *op.cit.* hlm. 40

berpusat di Semarang saja, tapi pengaruh dari surat kabar ini menjangkau hingga di Hindia Belanda. *De Locomotief* ini mewakili ideologi Liberalisme 1870 yang memiliki pengaruh luas hingga Hindia Belanda.⁴⁰

Surat kabar di Hindia Belanda pada awal abad 20 ini berlawanan pandangan dan arah dengan di Negeri Belanda, tidak terikat pada partai. Kebanyakan surat kabar di Hindia Belanda berhaluan liberal, meskipun dalam liberalisme ini banyak yang memiliki pandangan berbeda terkait pendidikan dan otonomi penduduk di Hindia Belanda. *De Locomotief* pada awal abad ke 20 memposisikan diri sebagai surat kabar pendukung *Politik Etis*. Saat redaksi *De Locomotief* dipimpin oleh Pieter Brooshooft, surat kabar ini dikenal sebagai media yang membawa narasi *Politik Etis*. Pemikiran-pemikiran Brooshooft ini dimuat dalam *De Locomotief* seperti artikel yang berjudul "*De ethische Koers*". Brooshooft menuliskan pemikiran-pemikirannya terkait kebijakan politik kolonial agar penduduk pribumi Hindia Belanda diperhatikan oleh para penguasa di Negeri Belanda.⁴¹

Seiring dengan haluan *Politik Etis* yang dibawakan dalam narasi artikel *De Locomotief* pada awal abad 20 ini menjadikan surat kabar ini progresif. Berdirinya *Boedi Oetomo* pada 20 Mei 1908 serta persiapan untuk kongres pertama ini juga dimuat dalam pers Belanda dan Melayu. *De Locomotief* memuat mengenai surat edaran kongres organisasi tersebut yang diadakan awal Oktober tahun 1908. Dalam artikel yang berjudul "*De Javanenbond*", memuat informasi dari Sekretaris *Boedi Oetomo* yakni Soewarno ini memiliki gagasan untuk mendirikan perkumpulan yang bertujuan memajukan perkembangan intelektual orang Jawa.⁴²

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. Van Heutsz pernah berdiri sebuah kantor berita setengah resmi, akan tetapi usia kantor berita tersebut tidak lama. Kantor berita ini dibentuk dibawah perintah Gubernur Jenderal, Van Heutsz bisa terlibat dalam urusan pers. Pada tahun 1905, Redaktur *De Locomotief* bersama redaktur surat kabar lain seperti, *Java-*

⁴⁰ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, *op.cit.*, hlm. 33.

⁴¹ *De Locomotief*, 06 Agustus 1901.

⁴² *De Locomotief*, 24 Juli 1908.

Bode, *Soerabaja Courant*, *Soerabaiasch Handelsblad*, dan *Bataviaasch Nieuwsblad* mengirim surat kepada Mr. J Paulus⁴³ untuk menyatakan bahwa mereka menghargai adanya kantor berita pemerintah.⁴⁴ Akan tetapi, kantor berita pemerintah ini menuai banyak kritik karena kinerja yang kurang memuaskan. *De Locomotief* menyampaikan kritik meskipun dengan bahasa yang lebih lunak dibandingkan surat-surat kabar lain.⁴⁵

Pada masa pimpinan redaksi Pieter Brooshooft haluan *Politik Etis* ini melekat dengan *De Locomotief*. A. Lievegoed yang memegang komando redaksi ini dari tahun 1917 sampai dengan 1926 cenderung liberal. Lievegoed ini selama memimpin redaksi tidak melancarkan kebencian terhadap nasionalisme dibandingkan rekannya sesama redaksi yakni Zentgraaff dan Wybrands.⁴⁶ Setelah pergantian pemimpin redaksi *De Locomotief* tahun 1926 dari Lievegoed ke De Keizer ini lebih cenderung konservatif.

Faktor-faktor yang melandasi pemilihan judul penelitian ini, yaitu “*Surat Kabar De Locomotief dalam Pemberitaan Politik di Hindia Belanda Tahun 1901-1940*”, didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. Pertama, adanya kedekatan intelektual penulis yang memiliki minat serta ketertarikan tinggi terhadap bidang pers dan surat kabar, sehingga topik tersebut dianggap relevan untuk dikaji. Kedua, tema penelitian ini belum pernah secara khusus dibahas oleh peneliti terdahulu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian sejarah pers. Ketiga, tersedianya sumber-sumber penelitian yang memadai, baik primer dan sekunder yang mendukung pelaksanaan penelitian ini dalam konteks periode kolonial hingga awal Perang Dunia II di Hindia Belanda.

⁴³ Mr. J Paulus adalah Sekretaris Pertama Gubernemen yang mengirimkan nota pada Desember 1904 kepada redaksi surat-surat kabar Eropa dengan pertanyaan bagaimana pendapat mereka tentang gagasan biaya kantor berita bagi surat kabar. Lihat Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, (Terj. Mien Joebhaar) (Jakarta: Hasta Mitra KITLV, 2003), hlm. 68.

⁴⁴ Mirjam Maters. *op.cit.* hlm.69.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 74.

⁴⁶ Mirjam Maters, *op.cit.* hlm. 254.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk menggambarkan inti persoalan yang diteliti, dengan menampilkan keterkaitan antara setiap aspek permasalahan sebagai bagian yang saling terhubung. Penyusunannya dilakukan dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami sehingga mampu menjelaskan arah kajian berdasarkan judul penelitian.⁴⁷ Adapun penelitian dalam skripsi ini memerlukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pendirian dan pemberitaan *De Locomotief* di Hindia Belanda sebelum tahun 1901?
2. Bagaimana isi pemberitaan politik pada surat kabar *De Locomotief* selama periode 1901-1940?
3. Apa dampak pemberitaan surat kabar *De Locomotief* dalam bidang sosial dan politik?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah terdapat Tujuan dan Manfaat penelitian. Tujuan adalah sebuah keinginan yang diharapkan bisa terwujud oleh penulis, kemudian manfaat penelitian sejarah merupakan lanjutan dari tujuan penelitian yang diharapkan memberikan pengaruh positif bagi penulis maupun pembaca.⁴⁸

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan kajian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan yaitu:

1. Untuk menjelaskan latar belakang berdirinya dan pemberitaan *De Locomotief* di Hindia Belanda sebelum tahun 1901.

⁴⁷ Sunarlan, *et.al.*, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2018), hlm. 30.

⁴⁸ *Ibid.*

2. Untuk mengidentifikasi bentuk pemberitaan *De Locomotief* terhadap berbagai peristiwa-peristiwa politik di Hindia Belanda tahun 1901-1940
3. Untuk Menganalisis dampak sosial dan politik pemberitaan *De Locomotief*.

1.3.2 Manfaat

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai sejarah pers, khususnya yang berfokus pada perkembangan pers pada masa kolonial di Hindia Belanda dengan perhatian utama pada surat kabar *De Locomotief*. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian serupa.
2. Manfaat Praktis, diharapkan kajian ini dapat memberikan refleksi historis mengenai peranan media dalam pembentukan opini publik dan relasinya dengan kekuasaan, sehingga dapat menjadi pijakan dalam menjaga independensi dan etika jurnalistik.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian sejarah ini disusun secara kronologis serta memiliki batasan ruang kajian yang ditetapkan secara jelas. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjaga fokus pembahasan sehingga penulisan sejarah tetap terarah dan tidak melebar.⁴⁹ Ruang lingkup penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang meliputi tiga aspek utama, yaitu batasan spasial (wilayah kajian), batasan temporal (rentang waktu yang diteliti), dan batasan substansi kajian (fokus permasalahan yang dibahas).

Lingkup spasial adalah batasan yang berkaitan dengan geografis maupun administratif tertentu.⁵⁰ Batasan lingkup ini difokuskan pada tempat terjadinya peristiwa sejarah. Pada penelitian ini lingkup spasial yang digunakan adalah Hindia Belanda sebagai

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 33.

⁵⁰ *Ibid.*

lokasi dari pers surat kabar *De Locomotief*, meskipun kantor redaksi *De Locomotief* di Semarang tapi pengaruhnya menyebar hingga Hindia Belanda.

Lingkup temporal merupakan batasan yang berfokus pada waktu dalam kajian sejarah.⁵¹ Batasan temporal yang digunakan pada kajian ini dari awal adanya *Politik Etis* pada tahun 1901 hingga awal perang dunia II yaitu tahun 1940. Pemilihan tahun 1901 ini karena sejak adanya *Politik Etis* awal abad ke-20 ini muncul berbagai kalangan akademisi pribumi dan mulai berkontribusi pada pers era kolonial. Tahun 1940 sebagai batasan temporal karena edisi *De Locomotief* yang edisi terakhir dapat diakses sampai tahun tersebut selain itu, tahun 1940 merupakan terjadi kebijakan pembatasan pers dan sensor karena Hindia Belanda memberlakukan keadaan perang⁵², sehingga secara historis menjadi titik yang relevan untuk mengakhiri kajian pemberitaan politik surat kabar ini.⁵³ Selain itu, aspek temporal ini sebagai salah satu bentuk keunikan dalam kajian sejarah dan pada tahun tersebut dapat dilihat bagaimana *De Locomotief* memberitakan peristiwa-peristiwa politik mulai dari kebijakan *Politik Etis* hingga dinamika menjelang perang dunia II.

Lingkup kajian yaitu lingkup yang membatasi aspek analisis penelitian sejarah.⁵⁴ Batasan kajian yang dipilih dan digunakan merupakan kajian sejarah pers Indonesia. Pers dapat dipahami sebagai sebuah institusi sosial sekaligus sarana komunikasi massa yang berperan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Kegiatan tersebut mencakup proses pencarian, pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyebarluasan informasi. Informasi yang dimaksud dapat disajikan dalam berbagai bentuk baik teks, suara, gambar, kombinasi suara dan gambar, data, maupun grafik serta disampaikan melalui beragam medium, termasuk media cetak, media elektronik, maupun saluran komunikasi lain

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 79, 1940.

⁵³ *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 134, 1940.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 34.

yang tersedia. Sedangkan sejarah merupakan bagian dari rekonstruksi masa lalu.⁵⁵ Dari dua pengertian tersebut Sejarah Pers Indonesia dapat diartikan sebagai media bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi salah satu sarana penting dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan, membentuk opini publik, serta mendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia.⁵⁶ Sejarah Pers Indonesia dipilih sebagai batasan kajian karena objek kajian ini berfokus pada sejarah surat kabar *De Locomotief* era kolonial sebagai bagian dari sejarah Pers Indonesia.

⁵⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2012), hlm. 15.

⁵⁶ Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 15.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini merupakan pembahasan yang berisi ulasan dan tinjauan sumber pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan ditulis. Disini berisi beberapa sumber literatur penelitian yang sudah terpublikasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini bertujuan membandingkan kajian sebelumnya dengan kajian yang akan diteliti¹. Hasil dari perbandingannya akan menghasilkan kebaharuan dan orisinalitas kajian penelitian yang akan penulis lakukan.

Kajian pertama yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah Buku yang berjudul *Sejarah Pers di Indonesia: Awal Kebangkitan Bangsa*² karya Akhir Matua Harahap, diterbitkan oleh Deepublish pada Juli 2023, mengulas perkembangan persuratkabaran di Indonesia sejak era VOC hingga masa kini. Buku ini mencakup peran surat kabar berbahasa Belanda, Melayu/Indonesia, dan bahasa daerah, serta kontribusi individu dari berbagai latar belakang Eropa/Belanda, pribumi, dan Tionghoa sebagai investor, penerbit, dan jurnalis. Harahap menekankan bahwa inisiatif pengembangan pers oleh orang Eropa/Belanda di

¹ Sunarlan, *et.al.*, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2018), hlm. 36.

² Akhir Matua Harahap, *Sejarah Pers di Indonesia: Awal Kebangkitan Bangsa*, (Penerbit Deepublish : Yogyakarta, Tahun 2023).

Indonesia merujuk pada perkembangan pers di Eropa, khususnya Belanda. Seiring waktu, masyarakat Tionghoa dan pribumi mulai berpartisipasi dan belajar mengembangkan pers sendiri, menyadari pentingnya pendidikan dan jurnalistik dalam mencerdaskan bangsa. Bagi jurnalis pribumi, surat kabar menjadi alat perjuangan dalam berbangsa dan bertanah air, berfungsi sebagai sarana pemersatu yang memicu terbentuknya organisasi kebangsaan. Buku ini juga menyoroti peran strategis pers pribumi dalam meningkatkan kesadaran nasional, membangkitkan semangat kebangsaan, dan berjuang untuk kemerdekaan. Para jurnalis menjadi bagian integral dari perjuangan tersebut, menjadikan pers sebagai elemen tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Dengan menyajikan data dan fakta sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan pers dari masa ke masa, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi jurnalis dan publik, tetapi juga bagi akademisi dalam penelitian sejarah pers di Indonesia.

Secara keseluruhan, karya ini memberikan pemahaman komprehensif tentang evolusi pers di Indonesia dan perannya dalam kebangkitan nasional. Dalam penelitian Harahap ini memuat sejarah awal terbitnya surat kabar *De Locomotief*, juga dalam buku ini Harahap banyak mengutip sumber yang berasal dari surat kabar *De Locomotief*. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penelitian yang akan ditulis menyoroti bagaimana pers kolonial *De Locomotief* membentuk opini politik dari awal *Politik Etis* hingga menjelang akhir tahun 1940-an yang tentunya berbeda dari isi dan substansi buku karya Harahap yang membahas sejarah pers secara umum di Indonesia, meskipun didalamnya terdapat penjelasan singkat mengenai sejarah awal surat kabar *De Locomotief*.

Kajian kedua adalah buku yang berjudul *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*³, karya dari Abdurrachman Surjomihardjo ini membahas sejarah pers dalam beberapa bagian. Bab pertama dari buku ini berisikan pendahuluan tentang gambaran umum sejarah pers dan sistematika per-bab dari buku ini. Bab kedua menjelaskan tiga bentuk pers di Indonesia yakni, pers Belanda, pers Melayu-Tionghoa, dan pers Indonesia yang fokusnya sendiri sampai tahun 1945. Bab ketiga lebih spesifik dalam membahas pers lokal dan daerah

³ Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

tertentu, seperti pers di Sulawesi Utara tahun 1869-1942 dan pers di Kalimantan Selatan setelah tahun 1945. Bab keempat lebih menyoroti tentang pembredelan pers seperti masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan fokus utama bab keempat ini pasca Indonesia merdeka. Pada sub-bab kedua buku ini membahas secara umum tentang surat kabar *De Locomotief*. Dalam pembahasan mengenai pers Belanda, *De Locomotief* dijabarkan mengenai awal mula terbitnya dan beberapa pengaruhnya di kota Semarang pada masa kolonial Belanda. Selain itu, dalam buku ini menggunakan beberapa referensi langsung dari surat kabar *De Locomotief* yang digunakan untuk menjelaskan narasinya. Dalam buku ini penulis menggunakannya sebagai referensi karena memuat banyak surat kabar didalamnya yang dibingkai dalam sejarah pers, *De Locomotief* adalah salah satu dari surat kabar yang dibahas secara umum pada buku ini. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis adalah buku ini lebih luas secara umum membahas pers dari awal hingga setelah kemerdekaan, sedangkan penulis fokus pada kajian surat kabar *De Locomotief* yaitu sebagai pers kolonial tahun 1901 hingga 1940.

Literatur ketiga yang membahas mengenai Sejarah Pers dan Jurnalistik yang berkaitan dengan media Surat Kabar adalah Skripsi yang berjudul “Solidaritas Islam dalam Surat Kabar Oetoesan Hindia pada Perang Dunia I Tahun 1914-1918”⁴, karya Rama Narendra bagaimana peran surat kabar *Oetoesan Hindia* dalam menyuarakan solidaritas Islam selama Perang Dunia I. Pada masa itu, Turki Utsmani terlibat dalam konflik global sebagai bagian dari Blok Sentral, yang mendorong reaksi dari komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Hindia Belanda. *Oetoesan Hindia* disini adalah media pers yang menjadi alat utama bagi Sarekat Islam untuk menyebarkan ideologi Pan-Islamisme dan sebagai dukungan terhadap Turki Utsmani atas Solidaritas Islam. Penelitian ini fokus bahasannya pada bentuk-bentuk solidaritas islam yang ditampilkan dalam surat kabar *Oetoesan Hindia*. Bentuk dukungan pertama adalah dukungan moral yang menampilkan bahwa surat kabar ini berisi berita dan opini yang membela Turki Utsmani serta kontra

⁴ Rama Narendra “Solidaritas Islam dalam Surat Kabar Oetoesan Hindia pada Perang Dunia I Tahun 1914-1918”, dalam *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya.

terhadap negara-negara Blok Sekutu. Surat kabar ini juga memuat tentang Sultan Turki Utsmani sebagai pemimpin dunia Islam dan menyajikan laporan perang yang menggambarkan Turki Utsmani. Dukungan kedua adalah dukungan material yang dilakukan melalui penggalangan dana yang dikumpulkan dari masyarakat Muslim di Hindia Belanda untuk disalurkan kepada korban perang di Turki Utsmani. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat perbandingan antara *Oetoesan Hindia* dengan surat kabar lain seperti, *Sinar Djawa* dan *Pantjaran Warta*. Bisa disimpulkan bahwa surat kabar *Oetoesan Hindia* ini bukan hanya sekadar media informasi, akan tetapi juga sebagai alat politik dan penyebaran ideologi bagi umat Islam di Hindia Belanda. Surat kabar ini juga memberikan ruang bagi publik untuk membentuk opini mereka terkait Perang Dunia I, memperkuat hubungan antara umat Islam Hindia Belanda dengan Turki Utsmani, serta penyebaran ideologi sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme.

Oleh karena itu penelitian karya Rama Narendra ini relevan dengan penelitian milik penulis. Sebagian besar tema dan lingkup kajian penelitiannya berdasarkan Sejarah Pers pada masa kolonial. Jika disini karya Rama Narendra menyoroti surat kabar *Oetoesan Hindia* sebagai topik utama maka penelitian penulis memiliki perbedaan dalam topik ini yaitu surat kabar *De Locomotief*.

Penelitian keempat berjudul “Sejarah Pers Kolonial di Indonesia”⁵ karya Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah. Penelitian ini membahas tentang Sejarah pers di Indonesia yang diawali dengan munculnya berbagai media pers yang dipelopori oleh Belanda. Pada awalnya, pers kolonial ini berfungsi sebagai alat komunikasi pemerintah kolonial dan kaum Indo-Belanda untuk kepentingan politik, ekonomi, dan penyebaran agama Kristen melalui misionaris. Disini dijelaskan bahwa media cetak pertama kali ada di Nusantara pada tahun 1624 oleh misionaris Gereja Protestan dengan tujuan menerbitkan literatur Kristen. Namun pers kolonial berkembang pada tahun 1744 dengan terbitnya *Bataviasche Nouvelles* oleh Jan Erdman Jordens di Batavia. Media tersebut bertahan selama

⁵ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah, “Sejarah Pers Kolonial di Indonesia”, dalam *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. VIII, No. 16, Juli-Desember 2018.

tiga karena VOC merasa terancam akan adanya media pers tersebut, akan tetapi disinilah awal mula munculnya pers di Indonesia. Pada masa VOC, pers berfungsi sebagai alat administrasi dan propaganda, seperti *Het Vendu Nieuws* yang memuat berita pelepasan barang. Penelitian artikel keempat ini memuat sumber-sumber yang cukup banyak, serta penulisannya menggunakan pendekatan historis yang sistematis sehingga dari awal hingga akhir tulisan tergambar secara urut dan rinci. Fokus artikel ini adalah awal sejarah pers kolonial di Indonesia hingga berkembang secara perlahan dan penulis artikel menjelaskan secara deskriptif media pers dari rentang waktu yang berurutan.

Dalam artikel ini Danil membahas mengenai surat kabar *De Locomotief* sebagai pers Kolonial. Meski tidak spesifik membahas mengenai *De Locomotief* akan tetapi, disini Danil membahas secara umum gambaran dari awal sejarah surat kabar ini hingga beberapa pembahasan mengenai tokoh *De Locomotief* yakni Pieter Brooshooft yang merupakan penggagas awal *Politik Etis*. Secara keseluruhan, artikel ini adalah landasan atau dasar dalam kajian sejarah pers di Indonesia jadi pembahasannya masih secara garis besar dan belum fokus terhadap pembahasan tertentu seperti dampak dan peran pers pada masa kolonial itu sendiri. Sehingga penelitian ini tentunya akan berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis sebab, artikel ini masih berupa pembahasan pers kolonial secara umum dan belum spesifik pers apa, dimana, dan dampak pers dalam lingkup yang lebih kecil bukan seluruh pers pada masa kolonial Hindia Belanda, sedangkan penulis membahas tentang surat kabar *De Locomotief*.

Artikel kelima berjudul “Fajar Pers Muslim Bumi Putra di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)”⁶, karya Agus Triyanta ini membahas bagaimana majalah Medan Moeslimin digunakan sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme Belanda dengan mengusung wacana Islam dan komunisme. Ada beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam artikel karya Agus Triyanta ini. Diawal tulisan artikel ini dibahas bahwa dunia pers di Hindia Belanda mulai berkembang

⁶ Agus Triyanta, “Fajar Pers Muslim Bumi Putra di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)”, dalam *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juli 2023.

pesat pada awal abad ke-20. Pers bumiputra ini baru muncul bersamaan dengan adanya kebijakan *Politik Etis* yang memberikan akses pendidikan kepada pribumi. Akan tetapi keterbatasan dana dan minimnya tingkat literasi menjadi halangan bagi kaum bumiputera untuk masuk ke dunia penerbitan. Disini pers Islam berkembang dengan menerbitkan surat kabar Al Munir pada tahun 1911 di Padang, Sumatera Barat, dan menjadi titik awal surat kabar Islam.

Secara keseluruhan isi artikel ini membahas bahwa *Medan Moeslimin* bukan hanya majalah keislaman, akan tetapi juga alat propaganda politik bagi umat islam untuk melawan kolonialisme. Fokus penelitian ini adalah surat kabar *Medan Moeslimin* sebagai pers Muslim dan kaitanya terhadap politik, sosial serta keagamaan di Hindia Belanda pada tahun 1915-1926. Oleh karena itu artikel ini menurut penulis cocok untuk dijadikan sebagai rujukan pustaka karena relevan dengan tema yang akan penulis teliti yakni Sejarah Pers Indonesia, selain itu topikny juga hampir serupa yakni surat kabar dan dampaknya berupa apa. Perbedaannya dengan penulis adalah objek kajian antara *Medan Meslimin* dan yang diteliti oleh penulis adalah *De Locomotief* khususnya tahun 1901-1940.

Literatur keenam yang berjudul "Sikap Politik Surat Kabar Fajar Asia: Respon Politis atas Isu Pergerakan Nasional 1927-1930"⁷, karya Arditya Prayogi dan Ardiyan Darutama ini membahas mengenai bagaimana pers Islam berperan dalam perjuangan nasional dan bagaimana Islam digunakan sebagai ideologi politik dalam menentang kolonialisme di Hindia Belanda. *Fajar Asia* merupakan surat kabar yang dibahas di dalam artikel ini. Artikel ini menganalisis bagaimana sikap politik *Fajar Asia* terhadap berbagai peristiwa penting pada masa pergerakan nasional, seperti pemberontakan komunis 1926-1927, penangkapan tokoh Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), Sumpah Pemuda 1928, hingga kondisi sosial-ekonomi kaum pribumi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan bahwa *Fajar Asia* yang merupakan salah satu media pergerakan nasional ini memiliki pengaruh besar dalam membangun

⁷ Arditya Prayogi dan Ardiyan Darutama, "Sikap Politik Surat Kabar Fajar Asia: Respon Politis atas Isu Pergerakan Nasional 1927-1930" , dalam *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 12, No. 2, Juli 2022.

kesadaran politik umat Islam di Hindia Belanda. Penelitian ini juga relevan untuk ditinjau karena memuat Sejarah Pers Indonesia, jika penelitian ini membahas tentang surat kabar *Fadjar Asia* maka pokok bahasan penelitian penulis adalah surat kabar *De Locomotief*.

Artikel ketujuh yang berjudul "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX"⁸, karya Miftahul Habib F ini membahas mengenai awal abad XX yang ditandai rakyat pribumi di Hindia Belanda mengalami kondisi ekonomi dan sosial yang buruk akibat eksploitasi kolonial. Disini ditekankan bahwa pers memiliki peran penting sebagai media untuk membangun kesadaran nasional dan pergerakan nasional kaum pribumi. Pers yang sering dilupakan dibandingkan dengan organisasi politik dalam perannya sebagai penggerak pergerakan nasional, oleh karena itu Miftahul membahas hubungan antara pers dan bangkitnya kesadaran nasional Indonesia pada awal abad XX.

Secara keseluruhan penelitian ini lebih menonjolkan pers ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kesadaran nasional di Indonesia pada awal abad XX. Dalam artikel ini membahas sedikit mengenai tokoh *De Locomotief*, Pieter Brooshooft karena keterkaitannya dengan topik utama artikel ini yakni *Politik Etis*. Dalam artikel ini meskipun tidak spesifik membahas mengenai *De Locomotief* akan tetapi, membahas menyinggung sedikit tentang surat kabar *De Locomotief* dalam kepemimpinan redaktur Brooshooft yang membawakan gagasan tentang *Politik Etis*. Sehingga pembahasan dengan apa yang akan penulis teliti ini berbeda karena artikel ketujuh ini lebih menggambarkan pers yang berkaitan dengan awal mula kesadaran bumiputera dan membahas topik mengenai beberapa surat kabar yang memiliki peranan dalam *Politik Etis*, sedangkan penulis menulis mengenai surat kabar *De Locomotief* dalam memberitakan politik di Hindia Belanda.

Literatur kedelapan berjudul "MR. P. Brooshooft, Een Biografische Schets In Koloniaal-Ethisch Perspektief"⁹, penelitian ini membahas mengenai biografi dari Jurnalis terkenal yakni Pieter Brooshooft. Locher membahas secara kronologis dari lahirnya Pieter

⁸ Miftahul Habib F, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX", dalam *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol. 12, No. 2, Maret 2017.

⁹ E. B. Locher-Scholten, "MR. P. Brooshooft, Een Biografische Schets In Koloniaal-Ethisch Perspektief", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 1976.

Brooshooft dan sepak terjangnya dari negeri Belanda hingga datang ke Hindia Belanda. Pieter Brooshooft merupakan pemimpin redaksi surat kabar di Semarang, *De Locomotief*. Dalam tulisan Locher dijelaskan secara lengkap bagaimana masa kecil Brooshooft kemudian tahun-tahun pertama di Hindia Belanda hingga karirnya sebagai jurnalis, penulis, dan pemimpin redaksi sebuah surat kabar. Locher menjelaskan biografi Brooshooft dalam perspektif etika kolonial. Brooshooft dikenal sebagai salah satu pencetus konsep "*Politik Etis*" yang merupakan kebijakan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Artikel-artikel yang ditulis Brooshooft selama menjadi editorial dan redaktur di *De Locomotief* ini dianalisis secara rinci oleh Locher. Pemikiran dan gagasan milik Brooshooft yang menyoroti tentang politik etika ini dituliskan secara detail oleh Locher. Oleh karena itu literatur ini relevan dengan penelitian penulis, dikarenakan Pieter Brooshooft merupakan salah satu jurnalis dan redaktur terkenal pada surat kabar *De Locomotief*. Biografi dari Pieter Brooshooft ini penulis jadikan referensi karena memiliki keterkaitan erat yakni awal berubahnya arah pemberitaan dalam *De Locomotief* yaitu pada masa kepemimpinan redaksi Pieter Brooshooft. Perbedaan dengan tulisan penulis adalah dalam tulisan Locher membahas detail biografi dari tokoh *De Locomotief* yakni Pieter Brooshooft, sedangkan penulis membahas mengenai surat kabar *De Locomotief* dalam pemberitaan politik di Hindia Belanda.

Literatur kesembilan berjudul, "Penerapan *Hormat Circulaire* 1904 dalam Pandangan Surat Kabar di Hindia Belanda (1904-1906)¹⁰", penelitian yang ditulis oleh Karen ini membahas mengenai *Hormat Circulaire* sebuah kebijakan pemerintah kolonial untuk mengurangi praktik-praktik adat Jawa yang dianggap kuno. Karen membahas mengenai bagaimana respon awal terhadap kebijakan tersebut dan dinamika masyarakat kolonial. Dalam penelitian ini dibahas mengenai beberapa surat kabar pada masa kolonial yang membingkai tentang *Hormat Circulaier* tahun 1904. Karen menganalisis beberapa surat kabar yang membahas kebijakan pemerintah kolonial tersebut di antaranya, *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Locomotief*, *Soerabaijasch Handelsblad*, dan *Het Nieuws van den Dag voor*

¹⁰ Karen Nisrina Qursyah, Achmad Sunjayadi, "Penerapan *Hormat Circulaire* 1904 dalam Pandangan Surat Kabar di Hindia Belanda (1904-1906)", dalam *Multikultura Jurnal Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 3, 2025.

Nederlandsch-Indie. De Locomotief dalam tulisan ini menyoroti bahwa surat kabar ini pro terhadap kebijakan kolonial terkait penghapusan tradisi hormat dalam budaya Jawa. Karen menuliskan bahwa *De Locomotief* menunjukkan adanya resistensi penghapusan tradisi hormat disebabkan kuatnya pengaruh adat dan kepentingan elit lokal yang memiliki kedudukan di pemerintah kolonial. Kesamaan dari tulisan penulis dengan literatur kesembilan adalah surat kabar *De Locomotief* sebagai objek pembahasan untuk dianalisis terkait artikel dan pemberitaan surat kabar tersebut. Perbedaan dengan penulis adalah dalam literatur kesembilan meskipun tidak spesifik membahas *De Locomotief* tapi disini Karen membahas bagaimana sudut pandang pemberitaan kebijakan kolonial *Hormat Circulaire* dalam surat kabar *De Locomotief*, sedangkan penulis membahas mengenai pemberitaan politik di Hindia Belanda pada periode 1901-1940.

Literatur terakhir berjudul, "Berita Koran Belanda Pada Masa Kolonial Tentang Desa Widuri di Kabupaten Pematang" karya Dhiana Putri Larasaty ini membahas mengenai Desa Widuri, Jawa Tengah yang fokus kepada pemberitaan desa ini oleh beberapa surat kabar pada masa kolonial Belanda. Beberapa surat kabar antara lain *De Locomotief*, *Jave Bode*, *Bataviasch Nieuwsblad*, dan *De Preanger Bode*. Surat kabar tersebut disini dibahas mengenai topik desa Widuri pada masa Hindia Belanda oleh Dhiana. Disini Dhiana membahas mengenai pemberitaan desa Widuri pada surat kabar *De Locomotief* berita yang dimuat adalah peristiwa kriminal. Pemberitaan lain oleh *De Locomotief* dalam artikel ini yakni tentang penyelenggaraan kompetisi menembak di Lapangan Widuri pada tahun 1929. Tulisan Dhiana ini tidak secara spesifik membahas mengenai surat kabar *De Locomotief*, akan tetapi menurut penulis ini relevan karena masih membahas mengenai pemberitaan oleh surat kabar *De Locomotief* yang memuat topik desa Widuri. Perbedaan dengan tulisan penulis ialah disini *De Locomotief* membingkai khusus topik mengenai desa Widuri dalam pemberitaannya, sedangkan penulis membahas mengenai pemberitaan politik pada surat kabar *De Locomotief*

¹¹ Dhiana Putri Larasaty, Afiliasi Ilafi, "Berita Koran Belanda Pada Masa Kolonial Tentang Desa Widuri di Kabupaten Pematang", dalam *Jurnal Siginjai (Journal of History Studies Universitas Jambi)*, Vol. 3, No. 2, 2023.

BAB 3

PENDEKATAN, KERANGKA TEORETIS, METODE PENELITIAN SERTA SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoretis

Sejarah sebagai Ilmu bertugas merekonstruksi masa lalu melalui sumber-sumber yang tersedia. Metode sejarah membantu sejarawan dalam proses rekonstruksi peristiwa.¹ tetapi kompleksitas peristiwa masa lalu kerap kali tidak bisa hanya ditulis dengan deskriptif naratif tetapi dengan deskriptif analitis.² Disini pendekatan ilmu ilmu lain menjadi penting untuk membantu sejarawan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini digunakan ilmu politik. Pendekatan ilmu politik digunakan untuk memahami dan menganalisis surat kabar *De Locomotief* dalam sistem pers kolonial.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan paksaan militer ataupun hukum, akan tetapi juga melalui hegemoni. Hegemoni merupakan kontrol atas kesadaran masyarakat melalui media, pendidikan, dan wacana

¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Tirta Wacna, 2018, hlm. 69.

² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 120-121.

publik.³ Dalam konteks kolonial, hegemoni dilakukan dengan membentuk opini masyarakat agar menerima dominasi kekuasaan kolonial sebagai sesuatu yang wajar. Dalam penelitian ini, teori hegemoni digunakan untuk menganalisis surat kabar *De Locomotief* yang berperan sebagai media pembentuk opini publik selama masa kolonial Belanda. Melalui teori Gramsci, pemberitaan *De Locomotief* dapat dipahami sebagai bagian dari hegemoni kolonial, yaitu upaya membangun legitimasi kekuasaan Belanda melalui wacana politik yang disampaikan. Pers kolonial bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menciptakan konstruksi realitas politik yang mendukung struktur kekuasaan kolonial dan memposisikan pergerakan nasional sebagai ancaman terhadap ketertiban dan stabilitas. Dengan ini, teori hegemoni Gramsci memberikan landasan konseptual untuk memahami posisi *De Locomotief* sebagai media kolonial Belanda sekaligus dapat menganalisis isi pemberitaan politik di Hindia Belanda.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Berdasarkan pandangan Louis Gottschalk, metode sejarah mencakup empat tahapan utama. Gottschalk mendefinisikan metode sejarah sebagai suatu proses analisis dan pengujian secara kritis terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu. Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan untuk melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis, yang selanjutnya disebut sebagai historiografi.⁴ Adapun empat tahapan dalam metode sejarah tersebut meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik adalah proses pencarian sumber sesuai dengan tema sejarah yang akan ditulis. Sumber sejarah dapat berasal dari prasasti, dokumen arsip, koran, wawancara dengan pelaku sejarah dan sebagainya. Setelah sejarawan mendapatkan sumber tidak semata-mata sumber itu akan digunakan tetapi harus melalui proses kritik sumber. Kritik sumber berarti meneliti otentisitas keaslian sumber dan kredibilitas sumber. Sumber yang sudah melalui

³ Endah Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", dalam *Jurnal Translitera*, Vol. 5, 2017. hlm . 21-24.

⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011), hlm. 2.

tahap kritik kemudian dapat diinterpretasikan oleh sejarawan dan mulai merekonstruksi kaitan-kaitan antar peristiwa. Kemudian hasil interpretasi dituangkan dalam historiografi atau tulisan sejarah baik skripsi, artikel, atau makalah.⁵

Tahap pertama dalam penelitian sejarah dimulai dengan penentuan topik, yang dipertimbangkan dari dua aspek utama, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.⁶ Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah surat kabar *De Locomotief*, yang dikaji dalam konteks sejarah pers dan jurnalisme. Kedekatan intelektual tercermin melalui relevansi topik dengan bidang keilmuan yang penulis tempuh, yakni Jurusan Sejarah. Sementara itu, kedekatan emosional didasarkan pada minat dan pengalaman penulis dalam bidang pers serta keterlibatan langsung dalam dunia jurnalisme.

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah adalah heuristik, yakni proses pengumpulan berbagai sumber yang akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan kajian. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada kesaksian langsung, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari individu yang mengalami atau menyaksikan secara langsung suatu peristiwa sejarah. Adapun sumber sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terlibat secara langsung maupun tidak berada di tempat ketika peristiwa sejarah tersebut terjadi.⁷ Sumber-sumber yang digunakan dikumpulkan melalui Delpher.nl, KITLV, dan Khastara Perpustnas. Beberapa sumber yang diperoleh dan sebagai referensi adalah *De Locomotief*, *De Locomotief: Samarangsch handels-en advertentie-blad*, *Javasche Courant*, dan beberapa koran kolonial lain, beserta sumber-sumber pendukung lainnya baik buku maupun artikel jurnal yang sesuai.

Tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah setelah kegiatan pengumpulan sumber (heuristik) adalah kritik sumber. Pada tahap ini, seluruh sumber sejarah yang telah diperoleh

⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

⁶ Kuntowijoyo.*op.cit.*, hlm. 70.

⁷ Sunarlan, *et.al.*, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2018), hlm. 39-40.

diverifikasi melalui dua bentuk kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern difokuskan pada pemeriksaan keaslian sumber sejarah, sedangkan kritik intern digunakan untuk menilai tingkat kredibilitas isi yang terkandung dalam sumber tersebut. Tahapan kritik sumber memiliki peranan penting karena verifikasi data sejarah harus dilakukan sebelum proses penafsiran dan penulisan agar diperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸ Dengan demikian, penulisan sejarah dapat terhindar dari kekeliruan, keberpihakan, maupun distorsi informasi. Suatu sumber belum dapat diakui sebagai fakta sejarah apabila belum melalui proses kritik sumber. Tahap berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang telah teruji, melalui proses analisis yakni penguraian data dan sintesis yakni penggabungan data untuk membangun pemahaman utuh.⁹ Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu merekonstruksi peristiwa masa lalu ke dalam bentuk tulisan sejarah secara runtut dan kronologis.

3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peta konsep seluruh bagian isi tulisan secara garis besar.¹⁰ Sistematika dalam penulisan ini terbagi dalam lima bagian bab.

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup. Sub bab pertama ini menjelaskan tentang sejarah pers dan jurnalistik di Hindia Belanda dan merujuk hingga permasalahan kajian tentang Surat Kabar *De Locomotief*.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang berisi kajian terhadap berbagai literatur terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Tinjauan tersebut berfungsi sebagai landasan teoretis sekaligus sebagai pembanding untuk menunjukkan aspek kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan, sehingga posisi penelitian ini dapat terlihat dalam konteks kajian ilmiah yang telah ada sebelumnya.

⁸ *Ibid.* hlm. 42.

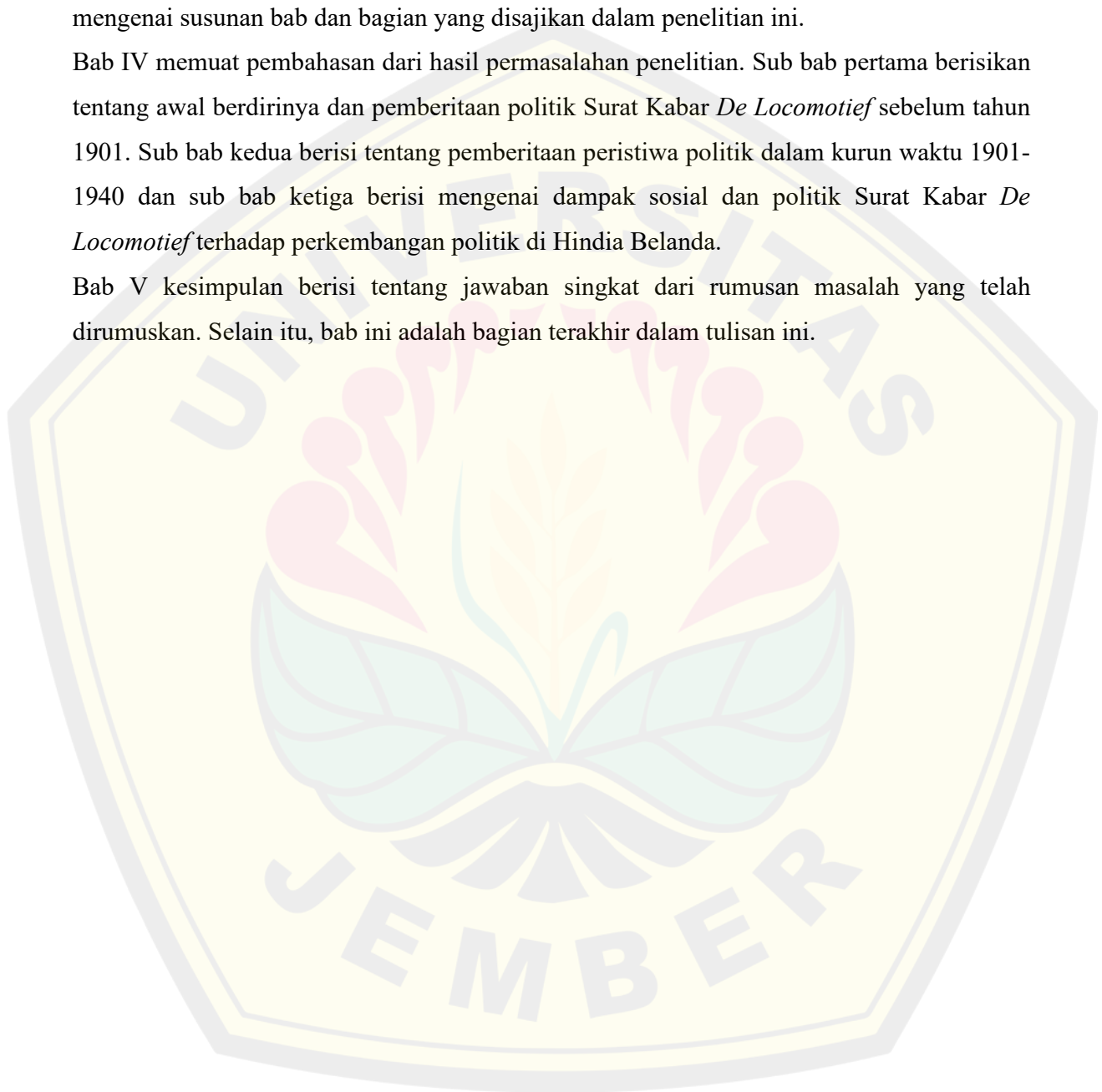
⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 78-79.

¹⁰ Sunarlan, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 43.

Bab III memuat uraian mengenai pendekatan, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pendekatan dan kerangka teori berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sejarah agar hasil yang diperoleh selaras dengan kaidah keilmuan. Bagian metode penelitian menjelaskan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis, sedangkan sistematika penulisan memberikan gambaran umum atau garis besar mengenai susunan bab dan bagian yang disajikan dalam penelitian ini.

Bab IV memuat pembahasan dari hasil permasalahan penelitian. Sub bab pertama berisikan tentang awal berdirinya dan pemberitaan politik Surat Kabar *De Locomotief* sebelum tahun 1901. Sub bab kedua berisi tentang pemberitaan peristiwa politik dalam kurun waktu 1901-1940 dan sub bab ketiga berisi mengenai dampak sosial dan politik Surat Kabar *De Locomotief* terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda.

Bab V kesimpulan berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini adalah bagian terakhir dalam tulisan ini.



BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Kondisi dan pemberitaan *De Locomotief* di Hindia Belanda Sebelum Tahun 1901

4.1.1 Awal mula berdirinya surat kabar *De Locomotief*

Surat kabar *De Locomotief* ini terbit pada tahun 1852 dengan nama *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad*. Didirikan dan diterbitkan oleh seorang pengusaha percetakan di Semarang yaitu Herman de Groot.¹ Surat kabar ini awalnya hanya memuat periklanan dan penerbitannya secara mingguan. Penerbitan surat kabar ini ditunjukkan untuk semua golongan penduduk Semarang pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga lampiran yang berbeda bahasa yakni Jawa, Arab dan Tionghoa.² Akan tetapi, di kalangan pedagang dan petani yang kurang puas, khususnya di Jawa Tengah, *Semarangsch Nieuws en Advertentieblad* (Surat Kabar, Perdagangan, dan Iklan) menemukan mayoritas pembacanya.

Surat kabar ini mengalami pergantian nama menjadi *De Locomotief: Samarangsch Handels- en Advertentie-blad* pada tahun 1863. *Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij* yang didirikan pada 27 Agustus 1863 ini menjadi faktor utama terjadinya perubahan nama surat kabar ini. Penambahan nama *De Locomotief* menjadi simbol dan

¹ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah. *op.cit.* hlm 32.

² *Ibid.*

rangka memperingati pembangunan jalur rel kereta api dari Surakarta dan Yogyakarta ke Semarang. Kereta api merupakan simbol kemajuan teknologi yang sedang naik kala dan menjadi simbol modernisasi di wilayah Hindia Belanda.³

Surat kabar ini berkembang menjadi surat kabar terpenting di Jawa Tengah dan Yogyakarta.⁴ *De Locomotief* ini tidak memiliki saingan dari surat kabar lain di kawasan Semarang sejak tahun 1866, sehingga beberapa surat kabar yang terbit tapi kalah bersaing dan berakhir dibeli oleh *De Locomotief*.⁵ Adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan informasi masyarakat ini menjadikan penerbitannya menjadi surat kabar harian pada tahun 1870.⁶ Koneksi kereta api antara Semarang dan Tanah-tanah Kepangeranan berganti nama dan berkembang di bawah kepemimpinan pemilik C. van Kesteren dan editor-editor seperti P. A. Daum. Surat kabar ini menjadi surat kabar para penyewa tanah di Tanah-tanah Kepangeranan dan juga dibaca di kalangan Pemerintahan Dalam Negeri.⁷

Pada awal abad ke-20, kehidupan masyarakat Belanda terpusat pada menyelesaikan permasalahan untuk perencanaan pembangunan kota Semarang. Sejak Undang-Undang Desentralisasi diumumkan, pemerintahan kota berada di tangan Dewan Kotapraja (*Gemeenteraad*) dan Wali Kota (*Burgemeester*). Dibandingkan kota lain, Semarang lebih peka akan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, terutama permasalahan sistem sewa tanah dalam sistem feodal dan memiliki upah yang sangat rendah untuk diterima oleh para pekerja atau penggarap tanah. *De Locomotief* ini membawakan suara "politik etika", yang didukung oleh gabungan perusahaan dagang impor. Sebaliknya, para perusahaan eksportir hingga kantor-kantor administrasi perkebunan menolak kebijakan politik etika yang berisikan

³ von Faber, *A Short History of Journalism in the Dutch East Indies*, (Surabaya: G.Kolff & Co, 1930). hlm. 64.

⁴ Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, (Terj. Mien Joebhaar) (Jakarta: Hasta Mitra KITLV, 2003), hlm. 40.

⁵ Abdurrachman Surjomihardjo, *op.cit.* hlm. 28.

⁶ *Ibid.*

⁷ von Faber, *op.cit.*, 65.

peningkatan kemakmuran penduduk bumiputra dan lebih minat untuk membaca *Soerabajaasch Handelsblaad*.⁸



Gambar 4.1 Pieter Brooshooft (1845-1921)

Sumber: Koleksi KITLV Leiden No. 4516

Pieter Brooshooft merupakan salah satu pemimpin redaksi dan jurnalis yang paling berpengaruh di *De Locomotief*. Brooshooft lahir pada Oktober 1845 di Giessendam, Belanda.⁹ Brooshooft sebenarnya bukan berasal dari ilmu jurnalistik, tetapi menempuh pendidikan ilmu hukum Universitas Leiden tahun 1874.¹⁰ Pada tahun 1877 Brooshooft menginjakkan kaki pertama kali di Hindia Belanda yang sedang mengalami ledakan ekonomi pada periode liberal. Meskipun disebut liberal akan tetapi secara ekonomi dan politik, arahnya masih belum berpihak pada kebijakan yang bersifat liberal. Administrasi di Hindia Belanda tetap otokratis dan sentralistik. Puncak hierarki administratif mengarah ke Batavia dan Buitenzorg, dan akhirnya ke Plein dan parlemen di Den Haag.¹¹

⁸ Abdurrachman Surjomihardjo., *op.cit.*, hlm. 36.

⁹ E. B. Locher-Scholten, "MR. P. Brooshooft, Een Biografische Schets In Koloniaal-Ethisch Perspektief", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 1976. hlm. 307.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ E.B. Lochter-Scholten, *op.cit.*, hlm. 309.

Pada tahun 1877, Brooshooft yang merupakan seorang pejabat kolonial ini menangani urusan-urusan kolonial seperti bahasa, negara dan masyarakat kepulauan Hindia Belanda sudah tidak asing baginya, Brooshooft membaca karya Multatuli juga mengetahui hukum tata negara dari buku-buku teks terkait Hindia Belanda. pada tahun 1877, dua bulan setelah kedatangannya, Brooshooft, menanggapi proposal pajak, menerbitkan ulang artikel-artikel di *Semarangse Courant* dengan judul yang agak kurang informatif : *Geef Indie wat Indie's is! De "Bijdrage" als sluitpost verdwijne van de Indische begroting, het Indisch "Batig Slot" uit de Nederlandsche schatkist. Koloniaal-staat-kundige beschouwingen*. Setelah meninjau secara historis hubungan keuangan yang ada dan penilaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum konstitusional dan pajak modern, ia juga menganjurkan pemisahan antara kedua kas negara dan kontribusi tahunan dari koloni kepada negara induk untuk pengeluaran yang dilakukan atas nama koloni.¹²

Pada Februari 1887, setelah dua tahun di Belanda sebagai pemimpin redaksi surat kabar harian Semarang, *De Locomotief*, Brooshooft kembali ke koloni.¹³ Selama periode kedua ini (1887-1895), ia dikenal karena upayanya mendirikan Partai Reformasi Hindia Belanda di Belanda. Buku "*Memorie over densituatie in Indië, deel I*" yang dianggap sebagai salah satu indikasi pertama ke arah etika ini.¹⁴ Kedua kegiatan tersebut menggambarkan perkembangannya dan patut mendapat perhatian lebih lanjut.

Studi Brooshooft untuk *Memorie* (Memorial) sekali lagi menarik perhatiannya terhadap kaum tani. Sejak akhir Januari 1888, *De Locomotief* mulai mencurahkan lebih banyak perhatian kepada penduduk Indonesia dalam artikel-artikel tentang sewa tanah dan sewa opium, dan majalah ini memulai perjuangannya melawan mereka yang menganggap penderitaan itu tidak terlalu buruk. Saat itulah Brooshooft secara eksplisit mengaitkan sewa

¹² *Ibid.*, hlm. 312.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ E.B. Lochter-Scholten, *op.cit.*, hlm. 313.

tanah yang menindas dengan "gerakan partai" untuk pertama kalinya.¹⁵ Program kolonis liberal ini menunjukkan pengaruh yang ia berikan di basis-basisnya di Semarang dan Surabaya. Kedua kota pelabuhan tersebut secara ekonomi bergantung pada pertanian dan perdagangan Eropa. Kekhawatiran atas kelalaian finansial Belanda akan tetap menjadi tema yang berulang dalam karyanya hingga akhir hayatnya.¹⁶ Selama sepuluh tahun pertama keberadaannya di Hindia Belanda, Brooshoofn nyaris tidak memperjuangkan kepentingan orang Jawa, kriteria yang kemudian ia gunakan untuk arahan etis. Dalam protesnya yang ekstensif terhadap eksploitasi dan pengabaian koloni, orang Jawa (Pulau-pulau Luar, sebagaimana disebutkan, berada di luar cakupan) merupakan jumlah yang hampir tidak signifikan, paling-paling dianggap sebagai korban bersama penduduk Eropa.¹⁷

Brooshoofn baru saja menerima jabatan barunya pada akhir Februari ketika ia memanfaatkan ketidakpuasan yang ada. Dalam serangkaian artikel yang panjang, ia menempatkan aspirasi politik dan keuangan serta ekonominya sendiri yang disebutkan oleh orang lain dalam satu kerangka tunggal.¹⁸ Tuntutan pertamanya adalah: pemisahan kekuasaan legislatif atas Hindia dari kekuasaan legislatif atas Belanda, seperti di India Britania. Untuk tujuan ini, ia menginginkan seorang menteri koloni di Belanda, sebuah Dewan Kolonial legislatif yang ditunjuk oleh raja, dan hanya kekuasaan pengawasan formal dengan Parlemen. Di Hindia, eksekutif GG, sebuah Dewan Hindia yang ditunjuk, harus memiliki kekuasaan legislatif untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan koloni dan tunduk pada persetujuan pemerintah tertinggi.¹⁹

Kedua, ia menyebutkan desentralisasi: dewan-dewan regional dan kota yang ditunjuk, yang terdiri dari setengah pegawai negeri sipil dan setidaknya sepertiganya "penduduk asli"

¹⁵ *De Locomotief*, 4 Februari 1888.

¹⁶ E.B. Lochter-Scholten, *loc.cit.*, hlm. 309.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 314.

¹⁸ *De Locomotief*, 10 dan 25 Mei 1887.

¹⁹ *De Locomotief*, 17 Maret 1887.

yang berpendidikan, akan memutuskan anggaran daerah dan hal-hal penting lainnya di daerah tersebut.²⁰ Dengan ini, Brooshooft menghidupkan kembali diskusi yang telah diadakan sepuluh tahun sebelumnya. Ketiga dan keempat, Brooshooft mengulangi tuntutan, yang telah diungkapkan pada tahun 1877 dan 1884, untuk pemisahan keuangan dan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan.²¹

Kontraknya berakhir pada 1 Januari 1895. Di bawah kepemimpinannya, *De Locomotief* telah berkembang dua kali lipat dan menarik pelanggan baru, berkat kritiknya yang adil, pembahasan masalah ekonomi, survei pribadi, dan catatan perjalanan yang agak ringan. Polemik yang lazim bagi surat kabar Hindia Belanda praktis telah berlalu begitu saja.²²

Dengan sukacita yang besar, ia dapat melanjutkan tugasnya di *De Locomotief* pada bulan Februari 1898.²³ Bagi Brooshooft, yang kecewa dengan Belanda, perbandingan antara negara induk dan koloni, dalam hal politik, budaya, dan sosial, lebih memihak pada koloni.²⁴ *De Locomotief* menerbitkan teks lengkapnya.²⁵ Van Deventer, yang telah menulis laporan tentang peristiwa budaya di Eropa untuk *De Locomotief* sejak 1898, mengalami perkembangan serupa dengan Brooshooft. Setelah tiba di koloni tersebut pada tahun 1880, ia juga awalnya terpukul oleh pengabaian finansial dan dengan cepat mengganti pandangan liberalnya dengan gagasan yang lebih paternalistik tentang pertanian terarah.²⁶ Ia secara aktif berpartisipasi dalam "gerakan partai" pada tahun 1887 dan 1888. Sebagai pelanggan *De Locomotief* dan teman Brooshooft, ia dipengaruhi oleh Brooshooft selama tahun-tahun

²⁰ *Ibid.*

²¹ *De Locomotief*, 23 Maret 1887.

²² E.B. Lochter-Scholten, *op.cit.*, hlm. 317.

²³ *Ibid.*, hlm. 333.

²⁴ *De Locomotief*, 1 Februari 1898.

²⁵ *De Locomotief*, 30 Agustus 1899.

²⁶ E.B. Lochter-Scholten, *op.cit.*, hlm. 339.

tersebut. Artikelnya menunjukkan hal ini, dan tidak hanya dalam catatannya. Van Deventer juga berfokus pada restitusi sebagai titik awal pembangunan ekonomi koloni. Ia juga menyajikan perhitungan tentang apa yang telah dinikmati Belanda. Ia juga menganjurkan Hindia untuk Hindia. Ia juga percaya bahwa Belanda, dalam karya peradabannya, gagal, orang Indonesia dianggap sebagai korban pertama pengabaian. Namun, tuntutan untuk restitusi dari uang yang dikumpulkan oleh Belanda sejak tahun 1867, pengenalan Undang-Undang Akuntansi, sepenuhnya adalah miliknya sendiri.²⁷

4.1.2 Pemberitaan *De Locomotief* terhadap kebijakan kolonial Hindia Belanda



Gambar 4.2 “Behoorlijk betaalde Arbeid”

Sumber: *De Locomotief* 19 Januari 1897

Dalam artikel tanggal 19 Januari 1897 yang membahas tenaga kerja dengan upah layak, *De Locomotief* menyoroti persoalan budidaya kopi pemerintah dan kewajiban kerja yang masih membebani penduduk pribumi di Jawa. Artikel tersebut memperlihatkan kritik

²⁷ Ibid.

terhadap warisan sistem budidaya yang selama beberapa waktu dianggap menguntungkan negara, tetapi pada saat yang sama menempatkan penduduk pribumi dalam posisi kerja dengan bayaran rendah. Dengan mengangkat persoalan upah layak, *De Locomotief* menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah kolonial dan tenaga kerja pribumi tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan politik kolonial karena menyangkut keadilan, tanggung jawab negara, dan legitimasi kebijakan pemerintah.²⁸

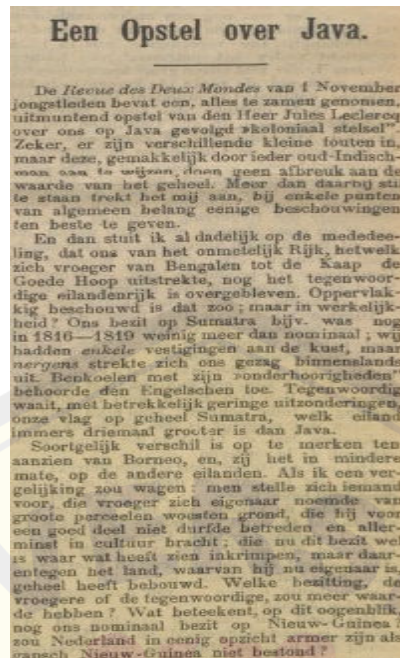
Dalam pemberitaan tersebut, *De Locomotief* juga memperlihatkan keberpihakan pada gagasan liberal kolonial yang sejak lama menuntut agar penduduk pribumi memperoleh pembayaran yang layak atas kerja yang diwajibkan kepada mereka. Kritik diarahkan pada sistem tambahan pembayaran dalam budidaya kopi yang dianggap tidak mampu menjamin upah yang adil bagi petani kopi. Meskipun pemerintah memberikan sejumlah tambahan sebagai imbalan, artikel tersebut menilai bahwa mekanisme tersebut tetap tidak menyelesaikan persoalan utama karena di banyak wilayah hasil yang diterima pekerja masih belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya memberitakan persoalan teknis perkebunan, tetapi juga mengkritik cara negara kolonial mengambil keuntungan dari kerja pribumi.²⁹

Artikel ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1901, *De Locomotief* telah memperlihatkan kecenderungan kritis terhadap kebijakan kolonial yang eksploitatif. Kritik tersebut belum dapat disebut sebagai sikap anti-kolonial, sebab surat kabar ini tidak menolak keberadaan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Namun, pemberitaan tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah kolonial memperlakukan penduduk pribumi secara lebih adil, terutama dalam hal kerja wajib dan pembayaran upah. Isu politik pada masa ini lebih banyak muncul dalam bentuk kritik terhadap kebijakan ekonomi kolonial, hubungan kerja antara negara kolonial dan penduduk pribumi, serta tuntutan moral agar eksploitasi tenaga kerja dikurangi.³⁰

²⁸ *De Locomotief*, 19 Januari 1897.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*



Gambar 4.3 “Een Opstel over Java”

Sumber : *De Locomotief* 29 Desember 1897

Artikel *De Locomotief* tanggal 29 Desember 1897 yang mengulas esai Jules Leclercq dalam *Revue des Deux Mondes* memperlihatkan bahwa sebelum tahun 1901, surat kabar ini telah memuat pembahasan mengenai sistem kolonial Belanda di Jawa dan Hindia Belanda secara lebih luas. Artikel tersebut tidak hanya membicarakan Jawa sebagai pusat kekuasaan kolonial, tetapi juga menyinggung perkembangan kekuasaan Belanda di wilayah lain seperti Sumatra, Borneo, dan Papua. Dalam pemberitaan itu, kekuasaan kolonial Belanda dipahami bukan semata-mata sebagai kepemilikan wilayah secara nominal, melainkan sebagai penguasaan yang semakin nyata melalui administrasi, pengibaran bendera, dan perluasan pengaruh ke wilayah pedalaman.³¹

Selain membahas perluasan kekuasaan kolonial, artikel tersebut juga menyoroti sistem pemerintahan di Jawa. *De Locomotief* mengutip pandangan bahwa administrasi kolonial di Jawa memiliki keunggulan karena penduduk pribumi tetap berada di bawah kepala-kepala mereka sendiri, sementara pejabat Eropa memberikan pengarahan dan

³¹ *De Locomotief*, 29 Desember 1897.

pengawasan. Pandangan ini memperlihatkan adanya pembenaran terhadap sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu penggunaan elite pribumi dalam struktur administrasi kolonial. Dengan cara ini, kekuasaan Belanda dapat dijalankan melalui perantara lokal sehingga tampak lebih sesuai dengan tatanan masyarakat Jawa, meskipun tetap berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.³²

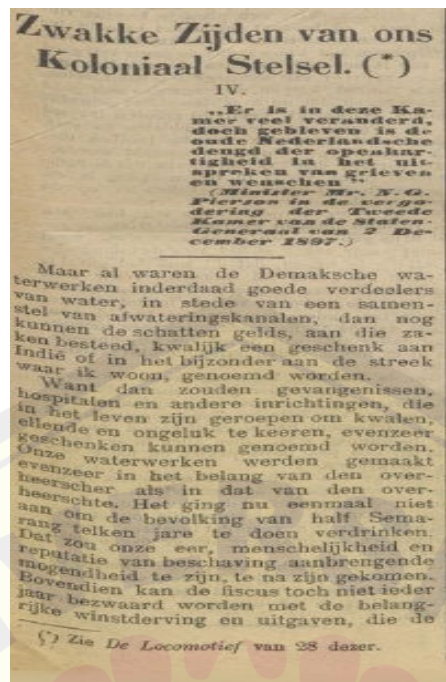
Namun, artikel tersebut juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak menerima sistem kolonial secara sepenuhnya tanpa catatan. Meskipun mengakui keunggulan kebijakan pemerintahan tidak langsung di Jawa, artikel itu juga menyampaikan keraguan apakah kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten dan setia. Keraguan ini memperlihatkan kecenderungan awal *De Locomotief* untuk tidak hanya memuji sistem kolonial, tetapi juga menilai pelaksanaannya. Dengan demikian, kritik yang muncul bukan diarahkan pada keberadaan kolonialisme itu sendiri, melainkan pada cara kekuasaan kolonial dijalankan dalam praktik pemerintahan.³³

Sebelum memasuki masa *Politik Etis*, surat kabar ini sudah memperlihatkan perhatian terhadap isu-isu politik kolonial seperti perluasan kekuasaan, sistem administrasi, kedudukan elite pribumi, dan legitimasi pemerintahan Belanda. Sikap tersebut menunjukkan bahwa *De Locomotief* bergerak dalam kerangka liberal kolonial: ia dapat memberikan penilaian kritis terhadap praktik pemerintahan, tetapi tetap memandang kekuasaan Belanda sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*



Gambar 4.4 “Zwakke Zijden van Ons Koloniaal Stelsel”

Sumber: *De Locomotief* 31 Januari 1898

Artikel *De Locomotief* tanggal 31 Januari 1898 memperlihatkan perhatian surat kabar ini terhadap persoalan administrasi kolonial di tingkat desa. Artikel tersebut menyoroti bahwa pembangunan dan kebijakan pemerintah kolonial tidak selalu memberi manfaat langsung kepada penduduk pribumi. Kritik diarahkan pada kecenderungan pemerintah yang lebih menampilkan proyek-proyek besar sebagai tanda kemajuan, sementara persoalan dasar di desa, seperti kemiskinan, keamanan, pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan, belum diselesaikan secara serius. Dengan demikian, pemberitaan ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1901, *De Locomotief* telah membahas isu politik kolonial melalui kritik terhadap praktik pemerintahan di tingkat lokal.³⁵

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah rangkap fungsi kepala desa atau lurah sebagai aparat keamanan sekaligus pemungut pajak. Menurut artikel tersebut, penggabungan fungsi kepolisian dan pemungutan pajak membuka ruang besar bagi penyalahgunaan

³⁵ *De Locomotief*, 31 Januari 1898.

kekuasaan. Kepala desa yang seharusnya melindungi penduduk justru dapat menggunakan kewenangannya untuk menekan masyarakat, menutupi kekurangan pajak, atau bekerja sama dengan kelompok kriminal. Kritik ini memperlihatkan bahwa persoalan keamanan dan keadilan di desa tidak dapat dilepaskan dari struktur administrasi kolonial yang memberikan kekuasaan besar kepada aparat lokal, tetapi tanpa pengawasan yang memadai.³⁶

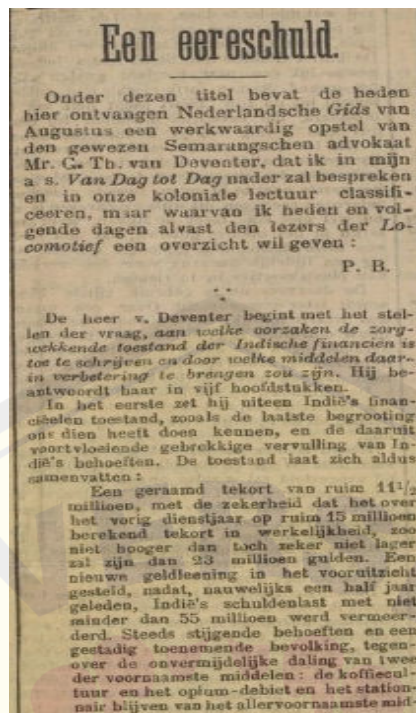
Artikel tersebut juga menekankan bahwa kerusakan administrasi desa berdampak langsung pada kehidupan penduduk pribumi. Penduduk kecil digambarkan hidup dalam kemiskinan, sulit menabung, rentan menjadi korban pencurian, pemerasan, hutang, dan ketidakadilan hukum. Dalam keadaan demikian, kemiskinan pribumi tidak dipahami semata-mata sebagai akibat kemalasan atau kebiasaan hidup, tetapi sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang tidak melindungi mereka. Kritik ini penting karena menunjukkan bahwa *De Locomotief* mulai melihat penderitaan penduduk desa sebagai persoalan struktural dalam pemerintahan kolonial.³⁷

Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa sebelum Politik Etis tahun 1901, *De Locomotief* telah mengangkat isu-isu yang kemudian menjadi bagian penting dalam wacana etis, yaitu kemiskinan pribumi, lemahnya perlindungan hukum, penyalahgunaan aparat lokal, dan perlunya reformasi administrasi. Meskipun kritik tersebut tidak menolak kekuasaan kolonial Belanda, artikel ini menunjukkan tuntutan agar pemerintahan kolonial memperbaiki dasar-dasar administrasinya.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*



Gambar 4.5 “Een Eereschuld”

Sumber: *De Locomotief* 30 Agustus 1899

Artikel *De Locomotief* tanggal 30 Agustus 1899 yang membahas tulisan G. Th. van Deventer berjudul *Een Eereschuld* atau “Hutang Kehormatan” memperlihatkan semakin jelasnya arah kritik politik kolonial sebelum tahun 1901. Artikel tersebut menyoroti keadaan keuangan Hindia Belanda yang memburuk, ditandai dengan defisit anggaran, meningkatnya beban utang, kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi, serta menurunnya sumber pendapatan penting seperti budidaya kopi dan opium. Persoalan keuangan ini tidak dipahami hanya sebagai masalah administratif, tetapi sebagai akibat dari sistem kolonial yang selama bertahun-tahun mengeksploitasi sumber daya Hindia Belanda untuk kepentingan negeri induk.³⁹

Dalam pemberitaan tersebut, *De Locomotief* memperlihatkan bahwa persoalan utama Hindia Belanda terletak pada cara Belanda memperlakukan tanah jajahannya sebagai sumber

³⁹ *De Locomotief*, 30 Agustus 1899.

keuntungan. Van Deventer menilai bahwa keadaan keuangan dan ekonomi Hindia Belanda akan lebih baik apabila sejak awal pendapatan dari wilayah kolonial digunakan untuk kepentingan wilayah dan penduduknya sendiri. Gagasan ini penting karena menggeser cara pandang terhadap Hindia Belanda: dari wilayah yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan negeri induk menjadi wilayah yang memiliki kebutuhan sosial, ekonomi, dan administratif yang harus dipenuhi. Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa sebelum Politik Etis secara resmi menguat pada awal abad ke-20, *De Locomotief* telah memuat kritik terhadap sistem eksploitasi kolonial dan menuntut pertanggungjawaban moral dari pemerintah Belanda.⁴⁰

Artikel tentang “Hutang Kehormatan” juga menjadi jembatan penting menuju munculnya wacana Politik Etis. Kritik terhadap defisit, utang, rendahnya pemenuhan kebutuhan penduduk, serta penggunaan pendapatan Hindia Belanda untuk kepentingan Belanda menunjukkan adanya perubahan wacana politik kolonial pada akhir abad ke-19. *De Locomotief* tidak menolak kekuasaan kolonial Belanda, tetapi melalui pemberitaan ini surat kabar tersebut ikut menegaskan bahwa pemerintahan kolonial harus dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap penduduk pribumi.⁴¹

4.1.3 Posisi *De Locomotief* dalam pers kolonial Hindia Belanda

Kebebasan pers adalah kebebasan setiap individu untuk menyampaikan, mengungkapkan pikiran dalam surat kabar dan majalah, dan kebebasan untuk mencetak dan menerbitkan secara berkala. “*Free market place of ideas and information*” adalah slogan dari ideologi pers liberal, bahwa pihak pemerintah sebaiknya tidak membatasi dan mencampuri urusan dunia pers terkait isi ataupun tentang perekonomiannya.⁴²

Negeri Belanda dalam parlemennya ini terdapat kubu progresif dan konservatif. Menurut golongan konservatif pers ini harus dikendalikan oleh pemerintah. Kaum liberal

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 24-25.

tentunya menentang bahwa pers seharusnya memiliki kebebasan, setiap orang Belanda di negeri Hindia Belanda memiliki hak yang sama seperti di negeri Belanda. Juga kaum liberal berpikir bahwa surat kabar pribumi juga bisa terbit jika adanya kebebasan pers diberlakukan.

43

Surat kabar Eropa di Hindia Belanda pada tahun 1900 ini berlawanan dengan surat kabar di Negeri Belanda, yang tidak terikat oleh partai. Mayoritas penduduk Eropa ini tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah politik.⁴⁴ Surat kabar di Hindia Belanda ini banyak yang beraliran liberal, meskipun sesama berhaluan liberal banyak perbedaan dalam pandangan terkait hak yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan serta otomoni kepada kaum pribumi.⁴⁵ *De Locomotief* ini merupakan surat kabar berhaluan "etis" yang bertujuan mengangkat derajat penduduk pribumi di Hindia Belanda dan ingin otonomi khusus atau pemerintahan sendiri untuk Hindia Belanda. Dibawah redaktur Pieter Brooshooft, *De Locomotief* gencar mendukung kebijakan kolonial yaitu *Politik Etis*. Kemajuan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan merupakan narasi-narasi yang sering digunakan dalam surat kabar ini.⁴⁶

Pemikiran-pemikiran politik Brooshooft dengan mudah dapat dipelajari melalui *De Locomotief*. Dalam salah satu edisi surat kabar mengemukakan itu, tuntutanannya Brooshooft tentang agregasi antara kekuasaan legislatif di Hindia Belanda dan di negeri Belanda.⁴⁷ Ia menghendaki adanya menteri untuk daerah koloni di Belanda dan Dewan Kolonial dengan kekuasaan legislatif diangkat oleh raja dan hanya mempunyai otoritas kontrol formal di parlemen. Ia juga menghendaki Gubernur Jenderal Hindia Belanda melaksanakan undang-

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rusmiani Umairah. *op.cit.*, hlm. 33.

undang yang telah dibuat oleh Raad van Indie untuk melaksanakan masalah-masalah di daerah koloni yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.⁴⁸

Surat kabar kolonial di Hindia Belanda seperti *Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indie* di Batavia dan *Soerabaiasch Handelsblaad* merupakan surat kabar berhaluan konservatif yang cenderung kontra terhadap perjuangan kemerdekaan di Hindia Belanda.⁴⁹ Surat kabar beraliran konservatif ini cenderung melakukan kecaman terhadap isu-isu nasionalisme, selain itu gubernemen juga tak luput dari kritikan tajam yang merupakan ciri khas surat kabar tersebut. Karena dipimpin oleh tokoh yang sangat getol membela kepentingan kapitalis Belanda, maka *Soerabaiasch Handelsbald* sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional Hindia Belanda. Karena itu pula surat kabar ini sering melontarkan kritik tajam terhadap kebijaksanaan politik Gubernur Jenderal Idenburg yang sangat simpatik memperhatikan pertumbuhan perkembangan organisasi dan pergerakan.⁵⁰

4.2 Isi pemberitaan politik pada surat kabar *De Locomotief* selama periode 1901-1940

4.2.1 Pemberitaan tentang *Politik Etis* dan kritik terhadap kebijakan kolonial 1901-1907

Pada 6 September 1898, Wilhelmina dinobatkan sebagai ratu Belanda yang baru.⁵¹ Situasi ini memberikan angin segar bagi para pendukung *Politik Etis*. Ratu baru ini mendukung penuh gagasan kelompok etis untuk melakukan perubahan kebijakan di Hindia Belanda. Tiga tahun kemudian perubahan kebijakan tersebut benar-benar terlaksana. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menyampaikan seruan pembaruan kebijakan kolonial dalam sebuah pidato kerajaan. Pidato ini kemudian disambut dengan hangat oleh pendukung

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 36.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Miftahul Habib Fachrurozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra", dalam *Jurnal Bihari; Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 2, No. 1, 2019. hlm. 20-25.

Politik Etis. Hal tersebut yang kemudian dianggap sebagai tonggak awal kebijakan *Politik Etis*.⁵²

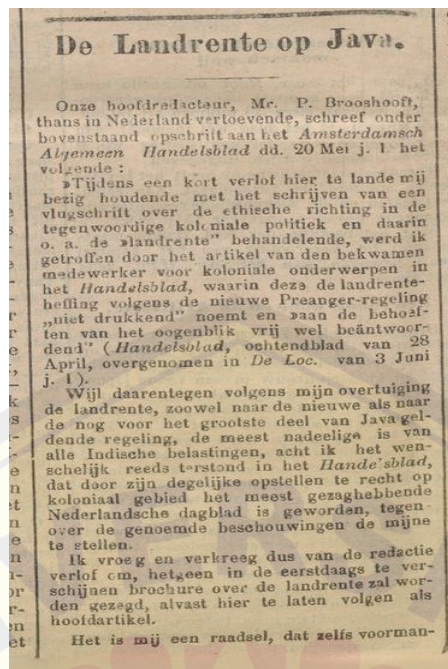
Politik Etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki kondisi kaum bumiputra. Edukasi sering dianggap sebagai program pokok dari *Politik Etis*. Semangat *Politik Etis* ini membuat banyak perubahan terhadap rakyat Hindia Belanda. Perubahan paling besar terjadi pada kaum bumiputra. Edukasi atau pendidikan menjadi program sentral dalam *Politik Etis*. C. T. van Deventer sendiri meyakini jika kaum bumiputra harus ikut berpartisipasi dalam perubahan ini. Pendidikan, terutama pendidikan Barat dianggap sebagai cara yang tepat untuk mulai melibatkan kaum bumiputra. Meskipun demikian, program pendidikan ini dilaksanakan secara sangat terbatas dimana hanya golongan bangsawan atau kalangan priayi saja yang menikmati pendidikan Barat. Lewat program pendidikan ini pula nantinya akan muncul golongan bumiputra terpelajar yang mewacanakan kemajuan kaum bumiputra di Hindia Belanda.⁵³

Politik Etis memang tidak sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya terutama dari sudut pandang kaum bumiputra. Pemerintah kolonial nampak hanya menjadikan kaum bumiputra sebagai obyek dari kebijakan *Politik Etis*. Kaum bumiputra sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan untuk memperbaiki taraf hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, obyektivikasi ini menyebabkan kaum bumiputra sama sekali tidak diajak untuk memahami dan memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi sendiri. Di sisi lain, *Politik Etis* sesungguhnya juga merupakan alat pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*



Gambar 4.6 "De Landrente op Java"

Sumber: *De Locomotief* 17 Juni 1901.

Pada awal abad ke-20, dukungan *De Locomotief* terhadap *Politik Etis* terlihat melalui kritiknya terhadap kebijakan ekonomi kolonial, terutama persoalan sewa tanah di Jawa. Dalam artikel yang diterbitkan pada 17 Juni 1901, *De Locomotief* memuat tulisan Pieter Brooshooft yang saat itu berada di Belanda. Brooshooft menjelaskan bahwa ia sedang menyusun pamflet mengenai arah etis dalam kebijakan kolonial dan secara khusus membahas persoalan sewa tanah. Baginya, sewa tanah merupakan salah satu pajak Hindia yang paling merugikan karena secara langsung membebani sumber penghidupan utama masyarakat Jawa.⁵⁵

Brooshooft menilai bahwa persoalan sewa tanah belum sepenuhnya dipahami bahkan oleh tokoh-tokoh yang berada dalam lingkaran gerakan kolonial etis. Ia mengkritik pandangan E. B. Kielstra yang menganggap sewa tanah tidak menindas dan masih sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sebaliknya, Brooshooft menyatakan bahwa tidak ada pajak atau

⁵⁵ *De Locomotief*, 17 Juni 1901.

tindakan administratif lain yang lebih menghambat peningkatan kemakmuran Jawa dibandingkan sewa tanah yang berlebihan. Dalam pandangannya, beban tersebut tidak berkurang melalui peraturan baru, melainkan justru dapat semakin memberatkan petani yang tanahnya dinilai secara tidak memadai.⁵⁶

Kritik tersebut menunjukkan bahwa *De Locomotief* memosisikan persoalan sewa tanah sebagai bagian dari kegagalan kebijakan ekonomi kolonial. Artikel ini tidak hanya menyampaikan keberatan administratif terhadap sistem pajak, tetapi juga membangun kritik moral terhadap praktik kolonial yang dianggap merampas kesejahteraan petani Jawa secara perlahan. Ungkapan Brooshooft mengenai sewa tanah sebagai bentuk “perampasan fiskal yang lambat terhadap petani Jawa” memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menggunakan bahasa yang tajam untuk menekankan dampak kebijakan kolonial terhadap masyarakat pribumi.⁵⁷

Meskipun demikian, kritik *De Locomotief* tidak diarahkan pada penolakan terhadap kekuasaan kolonial Belanda secara keseluruhan. Brooshooft tetap menawarkan solusi dalam kerangka reformasi kolonial, seperti pembatasan sewa tanah, perbaikan administrasi, serta penggantian sebagian pejabat Eropa yang mahal dengan penduduk asli terdidik.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*



Gambar 4.7 "De ethische Koers I"

Sumber: *De Locomotief* 6 Agustus 1901

Kritik *De Locomotief* terhadap sewa tanah pada Juni 1901 tidak berdiri sebagai persoalan teknis perpajakan semata. Kritik tersebut merupakan bagian dari arah politik yang lebih luas, yakni dorongan agar kebijakan kolonial Belanda dijalankan berdasarkan prinsip etis. Hal ini terlihat lebih jelas dalam rangkaian tulisan Pieter Brooshooft berjudul "*De Ethische Koers*" yang mulai dimuat dalam *De Locomotief* pada 6 Agustus 1901. Melalui tulisan ini, *De Locomotief* tidak hanya mengkritik praktik kolonial yang menindas, tetapi juga membangun legitimasi bagi kelompok etis sebagai kekuatan moral-politik yang dianggap mampu memperbaiki keadaan Hindia Belanda.⁵⁸

Dalam edisi tersebut, Brooshooft menempatkan sejumlah tokoh seperti Van Kol, J.M. Pijnacker Hordijk, E.B. Kielstra, dan C.Th. van Deventer sebagai bagian dari arus pemikiran etis dalam politik kolonial. Penyebutan tokoh-tokoh ini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar tokoh, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan bahwa *Politik Etis* memiliki

⁵⁸ *De Locomotief*, 6 Agustus 1901.

dasar intelektual dan dukungan politik yang lebih luas. Dengan demikian, tuntutan perbaikan terhadap Hindia Belanda tidak ditampilkan sebagai keluhan pribadi Brooshooft, melainkan sebagai bagian dari gerakan pemikiran kolonial yang sedang memperoleh bentuknya.⁵⁹

Pujian terhadap Van Kol memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menghargai keberanian moral dalam membela masyarakat Jawa, terutama ketika pembelaan tersebut menimbulkan tekanan politik. Sementara itu, Pijnacker Hordijk digambarkan sebagai tokoh yang tidak bersifat agitator⁶⁰, tetapi tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat jelata melalui jalur parlemen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* cenderung memberi legitimasi pada kritik kolonial yang disampaikan secara rasional, tertib, dan institusional. Dengan kata lain, koran ini mendukung perubahan, tetapi perubahan yang tetap berada dalam koridor politik kolonial yang dianggap sah.⁶¹

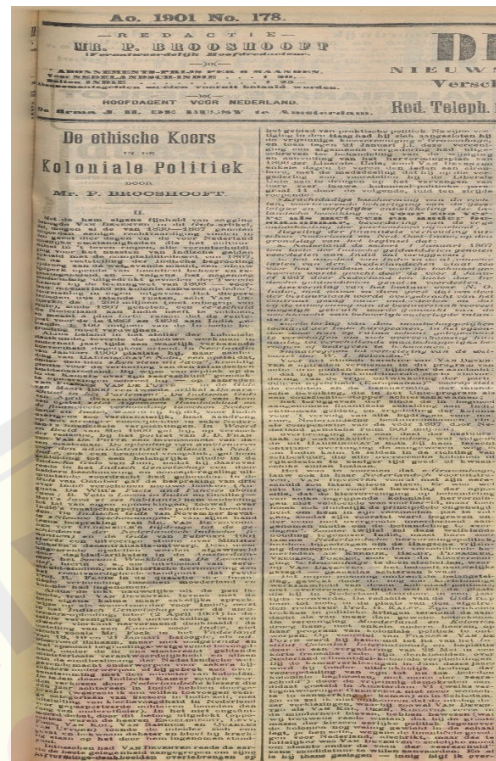
Posisi Van Deventer dalam artikel ini lebih menonjol karena ia ditempatkan sebagai tokoh yang berani mengubah kesadaran tentang ketidakadilan kolonial menjadi tuntutan politik. Brooshooft menilai Van Deventer sebagai figur yang serius, cakap, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan Hindia Belanda. Penekanan ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* membangun ukuran moral bagi politik kolonial: seorang tokoh kolonial tidak cukup hanya mengetahui adanya penderitaan, tetapi harus berani menjadikannya dasar bagi perubahan kebijakan.⁶²

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*



Gambar 4.8 "De ethische Koers II"

Sumber : *De Locomotief* 7 Agustus 1901.

Gagasan etis yang diperkenalkan dalam edisi 6 Agustus 1901 kemudian diperluas dalam lanjutan artikel "De Ethische Koers" yang dimuat pada 7 Agustus 1901. Jika edisi sebelumnya lebih menekankan posisi tokoh-tokoh etis sebagai pembawa kritik moral terhadap kebijakan kolonial, maka edisi ini menunjukkan arah programatik dari kritik tersebut. *De Locomotief* tidak hanya membicarakan penderitaan penduduk pribumi, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan hubungan keuangan antara Belanda dan Hindia Belanda, terutama melalui gagasan "hutang kehormatan" yang dikaitkan dengan pemikiran Van Deventer.⁶³

Dalam artikel tersebut, Van Deventer diposisikan sebagai tokoh yang menuntut pengembalian keuntungan yang telah dinikmati Belanda dari Hindia Belanda sejak 1867. Angka 200 juta gulden, termasuk bunga, tidak hanya tampil sebagai persoalan hitung-

⁶³ *De Locomotief*, 7 Agustus 1901.

hitungan keuangan, tetapi sebagai simbol ketidakadilan kolonial. Dengan menampilkan gagasan ini, *De Locomotief* membingkai relasi antara negeri induk dan koloni sebagai hubungan yang timpang: Hindia Belanda telah menjadi sumber keuntungan bagi Belanda, sementara kesejahteraan penduduk di tanah jajahan justru tertinggal. Narasi ini memperlihatkan bahwa kritik *De Locomotief* tidak berhenti pada kebijakan lokal seperti sewa tanah, tetapi bergerak ke kritik struktural terhadap cara Belanda mengambil manfaat ekonomi dari koloni.⁶⁴

Tuntutan pengembalian dana, penghapusan beban bunga, dan perubahan anggaran tidak diarahkan untuk memutus hubungan kolonial antara Belanda dan Hindia Belanda. Sebaliknya, semua itu diajukan agar kolonialisme dapat dijalankan dengan lebih adil, lebih rasional, dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan corak etis-liberalnya: keras terhadap eksploitasi kolonial, tetapi tetap percaya bahwa perbaikan Hindia Belanda dapat dilakukan melalui mekanisme politik dan administrasi Belanda.

Hal penting lain dalam edisi 7 Agustus 1901 adalah munculnya perhatian terhadap administrasi pribumi. Kutipan mengenai memorandum Hadiningrat, “Suara dari Jawa”, memperlihatkan bahwa *De Locomotief* mulai memberi ruang pada gagasan pemulihan layanan sipil pribumi. Di sini, penduduk pribumi tidak hanya dipandang sebagai objek kesejahteraan, tetapi mulai dibayangkan sebagai bagian dari aparatur administrasi kolonial, terutama melalui kelompok pribumi terdidik. Akan tetapi, ruang tersebut tetap terbatas. Pribumi yang diberi tempat adalah pribumi yang telah melalui pendidikan dan dianggap mampu bekerja dalam sistem administrasi kolonial.⁶⁵

Dengan demikian, gagasan pelibatan pribumi dalam administrasi tidak dapat langsung dibaca sebagai bentuk demokratisasi penuh. Lebih tepatnya, gagasan tersebut menunjukkan bentuk paternalistik dari *Politik Etis*. *De Locomotief* mendukung peningkatan peran penduduk asli, tetapi peningkatan itu tetap diarahkan, dibatasi, dan dikendalikan dalam struktur kolonial. Pribumi terdidik dipandang penting bukan sebagai kekuatan politik

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

merdeka, melainkan sebagai unsur yang dapat membantu memperbaiki efisiensi dan legitimasi pemerintahan kolonial.⁶⁶

Bagian akhir artikel 7 Agustus 1901 semakin memperjelas orientasi tersebut. Gagasan untuk mengalihkan sebagian tugas administrasi dari otoritas pusat ke cabang-cabang lokal, serta penggunaan tenaga penduduk asli yang berpendidikan, menunjukkan adanya bayangan menuju pemerintahan sendiri. Namun, istilah “membimbing Hindia Belanda menuju pemerintahan sendiri” memperlihatkan bahwa otonomi tidak dipahami sebagai hak politik yang harus segera diberikan, melainkan sebagai proses bertahap yang tetap berada di bawah arahan kolonial. Dengan kata lain, *De Locomotief* mengakui kemungkinan masa depan politik Hindia Belanda, tetapi tetap memosisikan Belanda sebagai pihak yang mengatur tempo, arah, dan batas perubahan tersebut.⁶⁷



Gambar 4.9 "De ethische Koers III"

Sumber : *De Locomotief* 8 Agustus 1901.

Setelah menempatkan *Politik Etis* sebagai agenda moral dan administratif dalam edisi 6 dan 7 Agustus 1901, *De Locomotief* pada edisi 8 Agustus 1901 memperluas kritiknya

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

dengan menyoroti beban konkret yang ditanggung penduduk Jawa. Dalam bagian ketiga dari rangkaian tulisan “De Ethische Koers”, Brooshooft mengajukan pertanyaan mendasar: “Apa yang kita tuntut dari penduduk asli?” Pertanyaan tersebut penting karena menggeser pembahasan dari sekadar kewajiban Belanda terhadap Hindia menjadi evaluasi terhadap relasi kuasa antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Dengan membandingkan jumlah penduduk pribumi yang jauh lebih besar daripada penguasa asing, artikel ini memperlihatkan ketimpangan struktural dalam pemerintahan kolonial.⁶⁸

Melalui pertanyaan tersebut, *De Locomotief* membingkai penduduk pribumi bukan sebagai kelompok pasif yang sekadar menerima kebijakan, melainkan sebagai pihak yang selama ini menanggung berbagai tuntutan kolonial. Brooshooft menyebut bahwa pemerintah memiliki kewajiban tinggi terhadap penduduk asli, bahkan digambarkan seperti kewajiban seorang “mertua yang baik”.⁶⁹ Ungkapan ini menunjukkan corak paternalistik dalam pemikiran etis Brooshooft. Di satu sisi, ia mengakui adanya tanggung jawab moral pemerintah kolonial terhadap penduduk pribumi. Namun, di sisi lain, hubungan tersebut tetap dibayangkan secara hierarkis: pemerintah kolonial ditempatkan sebagai pihak yang membimbing, melindungi, dan menentukan arah perbaikan bagi masyarakat Jawa.⁷⁰

Bagian paling penting dari edisi ini adalah daftar panjang beban ekonomi yang disebutkan Brooshooft, seperti sewa tanah, pajak usaha, kerja paksa, upah pertanian yang tidak memadai, pajak kepala, bea impor atas kebutuhan pokok, cukai, opium, pegadaian, penyembelihan ternak, biaya penyeberangan, hingga biaya pintu air.⁷¹ Daftar tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai rincian administratif, tetapi sebagai cara *De Locomotief* menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat Jawa bukan terjadi secara alamiah. Kemiskinan

⁶⁸ *De Locomotief*, 8 Agustus 1901.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

itu dipahami sebagai akibat dari susunan kebijakan kolonial yang membebani hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi penduduk pribumi.⁷²

Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan bahwa kritik *De Locomotief* terhadap kolonialisme bersifat sistemik dalam batas tertentu. Koran ini tidak hanya menyerang satu kebijakan tertentu, tetapi menunjukkan bahwa penderitaan masyarakat Jawa terbentuk melalui akumulasi berbagai pungutan, kewajiban kerja, dan mekanisme ekonomi kolonial. Dalam konteks ini, sewa tanah ditempatkan sebagai beban utama karena berhubungan langsung dengan sumber penghidupan petani Jawa. Ketika Brooshoofst menyebut sewa tanah sebagai bentuk “pengambilalihan fiskal secara perlahan terhadap petani Jawa,” ia sedang membingkai kebijakan tersebut sebagai praktik eksploitasi yang sah secara administratif, tetapi bermasalah secara moral dan ekonomi.⁷³

De Locomotief memang menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan petani Jawa, tetapi keberpihakan itu tidak berarti penolakan terhadap kolonialisme secara keseluruhan. Solusi yang ditawarkan tetap berupa pembaruan kebijakan, pengurangan beban fiskal, dan perbaikan administrasi kolonial. Dengan kata lain, koran ini mengkritik cara kolonialisme dijalankan, bukan keberadaan kolonialisme itu sendiri.⁷⁴

Edisi 8 Agustus 1901 juga memperkuat watak moral dari pemberitaan *De Locomotief*. *Politik Etis* tidak hanya ditampilkan sebagai program pembangunan, melainkan sebagai koreksi terhadap ketidakadilan yang telah lama berlangsung. Dengan menghubungkan sewa tanah, kerja paksa, opium, pegadaian, dan berbagai pungutan lain, Brooshoofst menunjukkan bahwa masalah utama Hindia Belanda bukan semata kurangnya pembangunan, melainkan keberadaan sistem kolonial yang mengambil terlalu banyak dari masyarakat pribumi tanpa memberikan perlindungan yang sepadan. Akan tetapi, karena solusi tetap dirumuskan dari

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

sudut pandang elite kolonial, narasi ini masih mempertahankan posisi pribumi sebagai objek pembelaan, bukan sebagai subjek politik yang menentukan sendiri arah perubahan.⁷⁵



Gambar 4.10 "De ethische Koers IV"

Sumber : *De Locomotief* 9 Agustus 1901.

Setelah membahas beban ekonomi penduduk Jawa dalam edisi sebelumnya, bagian terakhir dari rangkaian tulisan "De Ethische Koers" yang dimuat pada 9 Agustus 1901 memperlihatkan kritik *De Locomotief* yang lebih tajam terhadap struktur sosial-ekonomi kolonial. Brooshooft tidak lagi hanya mempertanyakan apa yang dituntut pemerintah kolonial dari penduduk pribumi, tetapi juga menjawab secara langsung apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap mereka. Jawabannya keras: penduduk pribumi didorong ke jurang penderitaan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* membingkai persoalan kolonial bukan sebagai kegagalan kecil dalam administrasi, melainkan sebagai kegagalan sistemik yang menempatkan masyarakat Jawa dalam posisi tereksplorasi.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *De Locomotief*, 9 Agustus 1901.

Kritik tersebut kemudian diarahkan pada hubungan antara kolonialisme dan kapitalisme. Brooshooft menggambarkan penderitaan penduduk Jawa sebagai bagian dari eksploitasi manusia oleh pemilik modal dan kekuasaan. Dengan demikian, kemiskinan penduduk pribumi tidak dipahami sebagai akibat kemalasan, ketertinggalan budaya, atau kekurangan moral masyarakat Jawa, melainkan sebagai akibat dari struktur ekonomi yang menempatkan tanah dan tenaga kerja pribumi untuk kepentingan modal Eropa.⁷⁷ Ini penting, karena *De Locomotief* sedang melawan narasi kolonial konservatif yang sering menyalahkan penduduk pribumi atas keterbelakangannya sendiri. Di sini, penyebab penderitaan ditempatkan pada kebijakan dan relasi ekonomi kolonial.

Dalam bidang pertanian, kritik *De Locomotief* semakin jelas. Tanah disebut sebagai sumber segala kemakmuran, tetapi hasilnya justru sangat sedikit dinikmati oleh orang Jawa. Setelah monopoli negara berakhir, arah perubahan tidak dianggap menuju kebijakan yang etis, melainkan semakin membuka ruang bagi modal Eropa. Pernyataan bahwa “semuanya untuk modal Eropa, orang Jawa tidak menerima apa pun” menunjukkan bahwa *De Locomotief* melihat liberalisasi ekonomi kolonial tidak otomatis membawa kebebasan atau kesejahteraan bagi penduduk pribumi. Sebaliknya, liberalisasi justru dapat memperkuat penguasaan modal Eropa atas tanah dan tenaga kerja Jawa.⁷⁸

Bagian tentang pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum juga memperlihatkan kritik terhadap ketimpangan kuasa. Brooshooft menyoroti bagaimana perusahaan kereta api dan trem, dengan persetujuan pemerintah serta pejabat Eropa dan pribumi, membayar rakyat kecil dengan harga serendah mungkin.⁷⁹ Di sini *De Locomotief* tidak hanya mengkritik pihak swasta, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan pemerintah kolonial dan elite lokal dalam proses yang merugikan rakyat kecil. Narasi ini penting karena menunjukkan bahwa eksploitasi tidak berjalan sendiri melalui modal, tetapi juga melalui

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

persetujuan administrasi kolonial. Dengan kata lain, kekuasaan negara dan kepentingan modal bekerja bersama dalam menekan masyarakat pribumi.

Kritik Brooshooft terhadap kesehatan, irigasi, pendidikan, dan perlakuan terhadap kuli memperluas cakupan *Politik Etis* dari sekadar persoalan fiskal menuju persoalan kesejahteraan sosial. Ia menunjukkan bahwa penderitaan penduduk Jawa bukan hanya berkaitan dengan pajak atau tanah, tetapi juga dengan buruknya kondisi hidup, terbatasnya tenaga medis, tingginya kematian ibu dan bayi, tidak memadainya irigasi, serta minimnya pendidikan dasar.⁸⁰ Dengan menyatukan isu-isu ini, *De Locomotief* membangun gambaran bahwa kebijakan kolonial telah gagal menjalankan tanggung jawab dasar terhadap masyarakat yang dikuasainya.

Brooshooft mengajukan program perbaikan seperti penyelesaian hutang kehormatan, pembangunan irigasi, penurunan sewa tanah, penghapusan kerja paksa, pengelolaan pegadaian oleh negara, perluasan administrasi pribumi, jaminan upah bagi pekerja, pemisahan peradilan pribumi dan Eropa, perluasan pendidikan, serta peningkatan pelayanan kesehatan.⁸¹ Program ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* menginginkan kolonialisme yang lebih bertanggung jawab dan lebih berpihak pada kesejahteraan penduduk pribumi. Tetapi program tersebut tetap menempatkan pemerintah kolonial sebagai aktor utama perubahan. Artinya, masyarakat pribumi masih dibayangkan sebagai penerima perbaikan, bukan sebagai penentu utama arah politik mereka sendiri.

Bagian paling tajam dari edisi 9 Agustus 1901 adalah kritik terhadap program Partai Anti-Revolusioner yang dipimpin Abraham Kuyper. *De Locomotief* menilai program kolonial partai tersebut terlalu bersifat gerejawi karena hanya menekankan penarikan penduduk Kristen pribumi dari hukum Islam, promosi Kristenisasi, dan pemberantasan opium.⁸² Kritik ini menunjukkan bahwa Brooshooft menolak penyempitan *Politik Etis* menjadi proyek keagamaan. Bagi *De Locomotief*, persoalan utama Hindia Belanda bukanlah

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

kekurangan agama Kristen, melainkan kemiskinan, eksploitasi tanah, rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, dan ketimpangan ekonomi. Sindiran terhadap gagasan bahwa penduduk miskin seolah cukup “diberi hak istimewa” untuk menjadi Kristen memperlihatkan gaya satire yang sangat kuat sekaligus kritik moral terhadap kemunafikan politik Kristen kolonial.⁸³

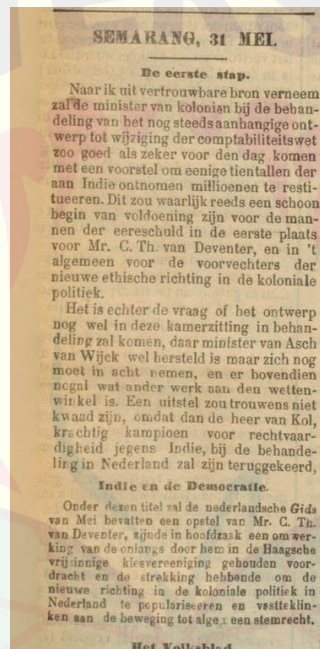
Satire tersebut penting untuk dibaca secara analitis. Brooshooft tidak sedang menyerang agama Kristen sebagai keyakinan, melainkan menyerang penggunaan agama sebagai pengganti tanggung jawab sosial-ekonomi. Dengan kata lain, *De Locomotief* menolak moralitas kolonial yang hanya bekerja dalam bentuk misi keagamaan, tetapi mengabaikan kebutuhan material penduduk pribumi. Ini memperkuat posisi etis-liberal koran tersebut: etika kolonial harus diwujudkan dalam kebijakan konkret seperti irigasi, pendidikan, kesehatan, pengurangan pajak, dan perlindungan tenaga kerja, bukan sekadar dalam retorika keagamaan.

Empat bagian “De Ethische Koers” yang terbit berturut-turut pada 6, 7, 8, dan 9 Agustus 1901 dapat dibaca sebagai manifesto etis *De Locomotief*.⁸⁴ Rangkaian ini membangun argumen secara bertahap. Edisi 6 Agustus membentuk legitimasi moral dan intelektual *Politik Etis* melalui tokoh-tokoh seperti Van Kol, Pijnacker Hordijk, Kielstra, dan Van Deventer. Edisi 7 Agustus mengembangkan gagasan tersebut menjadi tuntutan programatik berupa hutang kehormatan, restitusi keuangan, reformasi administrasi, pelibatan pribumi terdidik, dan bayangan pemerintahan sendiri. Edisi 8 Agustus menurunkan argumen etis ke dalam daftar beban konkret yang menekan masyarakat Jawa, terutama sewa tanah, pajak, kerja paksa, opium, pegadaian, dan pungutan lainnya. Edisi 9 Agustus kemudian menjadi puncak kritik dengan menunjukkan bahwa penderitaan penduduk Jawa berakar pada hubungan antara pemerintah kolonial, modal Eropa, dan kelalaian negara dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, irigasi, serta perlindungan kerja.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *De Locomotief*, 6, 7, 8, 9 Agustus 1901.

Dengan demikian, “De Ethische Koers” memperlihatkan bahwa *De Locomotief* pada awal abad ke-20 berada dalam posisi etis. Koran ini berpihak pada perbaikan kesejahteraan penduduk pribumi dan mengkritik keras eksploitasi kolonial, terutama dalam bentuk sewa tanah, penguasaan modal Eropa, buruknya pelayanan sosial, dan minimnya perlindungan terhadap rakyat kecil. Namun, keberpihakan tersebut tetap memiliki batas kolonial. *De Locomotief* tidak menuntut pembongkaran kekuasaan Belanda, melainkan perbaikan kolonialisme melalui tanggung jawab moral, restitusi, administrasi yang lebih adil, dan pembangunan sosial. Jadi, inti rangkaian ini bukan “anti-kolonial”, melainkan kritik etis terhadap kolonialisme eksploitatif demi membangun kolonialisme yang dianggap lebih bertanggung jawab.



Gambar 4.11 "De eerste step"

Sumber : *De Locomotief* 31 Mei 1902.

Setelah rangkaian tulisan “De Ethische Koers” pada Agustus 1901, gagasan *Politik Etis* dalam *De Locomotief* tidak berhenti sebagai seruan moral, tetapi mulai diarahkan pada kemungkinan pelaksanaan kebijakan konkret. Hal ini tampak dalam artikel yang terbit pada 31 Mei 1902, ketika *De Locomotief* membahas kabar bahwa Menteri Koloni kemungkinan

akan mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Akuntansi. Usulan tersebut dimaksudkan untuk mengganti sebagian dana yang sebelumnya diambil dari Hindia Belanda. Dalam konteks ini, *De Locomotief* membingkai rencana tersebut sebagai “langkah pertama” bagi pemenuhan tuntutan kaum etis, terutama gagasan hutang kehormatan yang sebelumnya banyak dikaitkan dengan C.Th. van Deventer.⁸⁵

Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menempatkan persoalan keuangan antara Belanda dan Hindia Belanda sebagai bagian penting dari agenda *Politik Etis*. Pengembalian dana yang telah dinikmati negeri induk tidak dipahami semata sebagai masalah anggaran, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral Belanda terhadap koloni.⁸⁶ Dengan demikian, koran ini masih mempertahankan garis etisnya: pemerintah kolonial dikritik karena telah mengambil keuntungan dari Hindia Belanda, tetapi penyelesaiannya tetap dibayangkan melalui jalur parlementer dan perubahan hukum di Belanda.⁸⁷

Artikel tersebut juga menunjukkan bagaimana *De Locomotief* melihat peran tokoh-tokoh etis seperti Van Deventer dan Van Kol. Van Deventer ditempatkan sebagai tokoh penting dalam merumuskan gagasan hutang kehormatan, sementara Van Kol disebut sebagai pendukung keadilan yang gigih bagi Hindia Belanda.⁸⁸ Penyebutan kedua tokoh ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* berusaha menghubungkan persoalan kolonial di Hindia dengan dinamika politik di negeri Belanda. Dengan kata lain, penderitaan dan ketimpangan di Hindia Belanda tidak hanya dianggap sebagai masalah lokal, tetapi sebagai persoalan yang harus dibawa ke ruang debat politik Belanda.

Bagian mengenai tulisan Van Deventer berjudul “Hindia Belanda dan Demokrasi” semakin memperjelas arah tersebut. *De Locomotief* menunjukkan bahwa gagasan *Politik Etis* mulai dikaitkan dengan gerakan demokrasi dan perluasan hak politik di Belanda. Hubungan

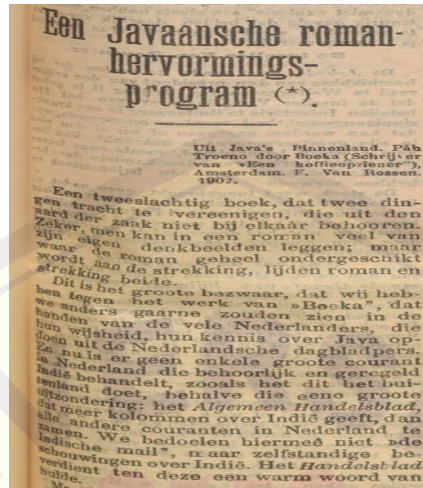
⁸⁵ *De Locomotief*, 31 Mei 1902.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

ini penting karena memperlihatkan bahwa isu kolonial tidak berdiri sendiri, melainkan ditempatkan dalam wacana yang lebih luas tentang keadilan, demokrasi, dan tanggung jawab negara.⁸⁹



Gambar 4.12 "Een Javaansche roman-hervormings-program"

Sumber : *De Locomotief* 12 Juni 1902.

Pemberitaan yang memperlihatkan kesinambungan sikap etis *De Locomotief* adalah artikel yang terbit pada 12 Juni 1902. Berbeda dari tulisan sebelumnya yang secara langsung membahas kebijakan kolonial, artikel ini menggunakan ulasan terhadap buku atau novel sebagai pintu masuk untuk mengkritik cara Hindia Belanda dipahami oleh masyarakat Belanda.⁹⁰ *De Locomotief* menilai karya tersebut ambivalen karena berusaha menggabungkan cerita sastra dengan pesan sosial-politik. Namun, keberatan utama koran ini bukan hanya terletak pada bentuk sastranya, melainkan pada pentingnya karya semacam itu sebagai penyeimbang terhadap gambaran Hindia Belanda yang terlalu dipermanis oleh pers di negeri Belanda.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *De Locomotief*, 12 Juni 1902.

⁹¹ *Ibid.*

Kritik *De Locomotief* terhadap *Algemeen Handelsblad* dan E.B. Kielstra memperlihatkan bahwa koran ini menaruh perhatian besar pada bagaimana opini publik Belanda dibentuk. Menurut artikel tersebut, *Handelsblad* memiliki pengaruh besar dalam membentuk pengetahuan masyarakat Belanda mengenai urusan kolonial, tetapi arah yang diberikan oleh Kielstra dianggap berbahaya karena terlalu menonjolkan sisi terang kebijakan kolonial dan mengecilkan sisi gelapnya.⁹² Di sini, *De Locomotief* tidak hanya sedang menilai sebuah buku, tetapi juga mengkritik mekanisme pembentukan wacana kolonial di negeri induk. Koran ini menolak narasi optimistik yang membuat penderitaan masyarakat Jawa tampak lebih ringan daripada kenyataannya.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa *De Locomotief* memandang pers Hindia Belanda memiliki peran korektif terhadap pers Belanda. Artikel ini menyatakan bahwa pers Hindia Belanda memang kadang dapat keliru atau terlalu tajam dalam mengkritik, tetapi kritik utama mereka terhadap penyalahgunaan kolonial tetap lebih bermanfaat bagi koloni dibandingkan usaha mencari kesalahan kecil dalam detail.⁹³ Pernyataan ini penting karena memperlihatkan pembelaan *De Locomotief* terhadap fungsi kritik pers kolonial di Hindia. Bagi koran ini, tugas pers bukan mempermanis keadaan, melainkan menunjukkan penyalahgunaan yang terjadi dalam praktik kolonial.

Ulasan terhadap karya “Pah Troeno” juga memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menilai pentingnya representasi kehidupan orang Jawa dari dekat. Koran ini mengkritik tradisi “roman Hindia” yang terlalu sering berputar di lingkungan Eropa dan Indo-Eropa, sementara kehidupan penduduk desa Jawa jarang ditampilkan secara sungguh-sungguh.⁹⁴ Meskipun *De Locomotief* masih menilai karya tersebut lemah secara sastra dan terlalu dibebani pesan, koran ini tetap melihat nilainya sebagai upaya menghadirkan kehidupan desa Jawa, pengguna opium, petani, kemiskinan, ketidakadilan hukum, dan kerentanan sosial yang jarang menjadi pusat perhatian dalam tulisan kolonial. Dengan demikian, artikel ini

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

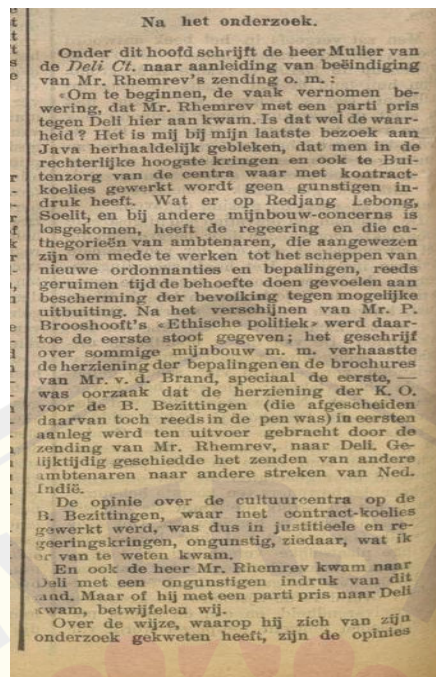
memperluas kritik *Politik Etis* dari ranah kebijakan menuju ranah representasi: siapa yang berhak menggambarkan Jawa, dan apakah penderitaan penduduknya ditampilkan secara jujur atau justru ditutupi oleh optimisme kolonial.

Koran ini mendukung karya yang berani memperlihatkan sisi gelap kehidupan Jawa, tetapi tetap menilai usulan reformasi dalam buku tersebut secara rasional dan selektif. Misalnya, artikel tersebut menganggap beberapa kesimpulan tentang peradilan pribumi terlalu umum jika hanya ditarik dari beberapa kasus. Kritik terhadap rencana pembiayaan reformasi juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak menerima semua gagasan perbaikan begitu saja. Dengan kata lain, koran ini mendukung kritik terhadap penyalahgunaan kolonial, tetapi tetap menuntut reformasi yang dianggap masuk akal, terukur, dan dapat diterapkan.⁹⁵

Artikel 12 Juni 1902 ini memperkuat posisi *De Locomotief* sebagai surat kabar etis-liberal yang berusaha melawan optimisme kolonial di negeri Belanda. Melalui ulasan buku, koran ini menegaskan bahwa persoalan Hindia Belanda tidak boleh direduksi menjadi gambaran cerah tentang kemajuan kolonial. Kemiskinan, opium, ketimpangan hukum, lemahnya administrasi, dan penderitaan masyarakat desa Jawa harus ditampilkan sebagai kenyataan yang memerlukan perhatian politik.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*



Gambar 4.13 "Na het onderzoek"

Sumber : *De Locomotief* 26 November 1903.

Perkembangan wacana *Politik Etis* dalam *De Locomotief* pada tahun 1903 memperlihatkan perluasan perhatian dari persoalan fiskal dan pertanian menuju masalah perlindungan tenaga kerja kolonial. Dalam artikel ini, pembahasan diarahkan pada kondisi pusat-pusat kerja tempat para kuli kontrak dipekerjakan, terutama di wilayah pertambangan dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja kontrak. Penyebutan Redjang Lebong, Soelit, dan beberapa perusahaan pertambangan lain menunjukkan bahwa persoalan eksploitasi buruh tidak dipandang sebagai kasus terpencil, tetapi sebagai masalah yang cukup serius hingga menarik perhatian kalangan peradilan tinggi dan pemerintah kolonial di Buitenzorg.⁹⁷

Artikel tersebut menempatkan munculnya *Politik Etis* sebagai salah satu dorongan awal bagi pemerintah untuk meninjau ulang regulasi mengenai perlindungan penduduk dari kemungkinan eksploitasi. Dengan menyebut "Kebijakan Etika" Pieter Brooshooft sebagai

⁹⁷ *De Locomotief*, 26 November 1903.

salah satu pemicu revisi peraturan, *De Locomotief* secara tidak langsung memperlihatkan bahwa wacana etis tidak berhenti pada kritik moral, tetapi ikut mendorong lahirnya perhatian administratif terhadap praktik kerja paksa, kontrak buruh, dan pengawasan terhadap pusat-pusat produksi kolonial.⁹⁸ Dalam konteks ini, pers diposisikan sebagai salah satu kekuatan yang menekan pemerintah agar lebih memperhatikan penyalahgunaan kekuasaan di lapangan.

Namun, artikel ini juga menunjukkan bahwa perhatian etis tersebut tetap bergerak dalam kerangka perlindungan paternalistik. Kuli kontrak dan penduduk lokal digambarkan sebagai kelompok yang perlu dilindungi dari eksploitasi, sementara aktor utama penyelesaian tetap berada pada pemerintah, pejabat peradilan, dan pembuat regulasi kolonial.⁹⁹ Dengan kata lain, *De Locomotief* mengakui adanya masalah eksploitasi dalam sistem kerja kolonial, tetapi solusi yang dibayangkan tetap berupa revisi peraturan, pengiriman pejabat penyelidik, dan pengawasan administratif. Kritik terhadap eksploitasi hadir dengan jelas, tetapi belum berkembang menjadi tuntutan agar buruh atau penduduk pribumi menjadi subjek politik yang menentukan nasibnya sendiri.¹⁰⁰

Penting juga dicatat bahwa artikel ini menghubungkan kritik pers dengan tindakan pemerintah. Tulisan-tulisan mengenai kegiatan pertambangan tertentu, brosur-brosur v.d. Merek, serta pengiriman Rhemrev ke Deli menunjukkan adanya hubungan antara wacana publik, kritik terhadap eksploitasi, dan upaya pembentukan regulasi baru.¹⁰¹ Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya membangun narasi tentang penderitaan penduduk, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kritik dalam ruang pers dapat berfungsi sebagai tekanan moral terhadap pemerintah kolonial. Ini memperkuat posisi koran tersebut sebagai media etis yang mendorong pembaruan kolonial melalui kritik, penyelidikan, dan regulasi.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*



Gambar 4.14 "Van dag tot dag"

Sumber : *De Locomotief* 13 Mei 1904.

Pada tahun 1904, gagasan *Politik Etis* dalam *De Locomotief* kembali tampak melalui tulisan Pieter Brooshooft dari Den Haag. Dalam artikel berjudul "Hari demi Hari: Dari Belanda", Brooshooft melaporkan kehadirannya dalam ceramah C.Th. van Deventer di perkumpulan "Hou en Trouw" di Amsterdam. Meskipun pada masa ini redaksi *De Locomotief* di Hindia Belanda telah berada di bawah M. Vierhout, tulisan Brooshooft menunjukkan bahwa pengaruh pemikiran etisnya masih tetap hidup dalam surat kabar tersebut.¹⁰² Melalui laporan ini, *De Locomotief* terus menghubungkan persoalan Hindia Belanda dengan ruang debat politik dan ekonomi di negeri Belanda, terutama mengenai hubungan antara industri kolonial dan kesejahteraan penduduk pribumi.

Pokok utama artikel ini adalah pembahasan mengenai industri gula di Jawa dan kedudukannya terhadap penduduk asli. Brooshooft menilai penting bahwa Van Deventer tidak hanya membicarakan industri gula dari sudut keuntungan perusahaan atau kepentingan pengusaha, tetapi juga dari sudut nasib penduduk yang terlibat di dalamnya.¹⁰³ Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan salah satu ciri penting dari narasi etis *De Locomotief*:

¹⁰² *De Locomotief*, 13 Mei 1904.

¹⁰³ *Ibid.*

kemajuan ekonomi kolonial tidak boleh diukur hanya dari besarnya produksi atau jumlah uang yang beredar, melainkan harus dilihat dari seberapa jauh penduduk pribumi memperoleh manfaat nyata. Brooshooft menolak cara berpikir yang menyatakan bahwa industri gula “mendatangkan jutaan” bagi penduduk jika kenyataannya pendapatan itu harus dibagi kepada banyak orang dengan upah yang sangat rendah. Dalam pandangan ini, kesejahteraan tidak dipahami sebagai angka kolektif, tetapi sebagai pengalaman individual buruh dan petani yang hidup dari kerja mereka.¹⁰⁴

Kritik terhadap upah menjadi bagian penting dalam tulisan tersebut. Dengan membandingkan upah buruh pabrik gula dengan buruh di kilang minyak, Brooshooft menunjukkan bahwa standar upah dalam industri gula masih rendah. Rendahnya upah tersebut tidak semata-mata dijelaskan sebagai akibat krisis industri gula sejak 1883, karena pada masa-masa tertentu industri tersebut kembali memperoleh keuntungan tanpa disertai kenaikan upah yang memadai bagi pekerja.¹⁰⁵ Di sini terlihat bahwa *De Locomotief* tidak menolak industri gula secara mutlak. Brooshooft bahkan mengakui bahwa runtuhnya industri gula dapat menjadi bencana bagi pengusaha maupun penduduk. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa keberadaan industri tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat yang lebih adil bagi penduduk pribumi yang tanah dan tenaganya berhubungan langsung dengan proses produksi.¹⁰⁶

Artikel ini juga memperlihatkan kritik *De Locomotief* terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Brooshooft mendukung pandangan Van Deventer bahwa pemerintah perlu mengatur hubungan kerja secara hukum, karena dalam relasi antara pengusaha dan buruh, pihak pribumi berada pada posisi yang lebih lemah.¹⁰⁷ Pengaturan kontrak kerja, perlindungan dari penyalahgunaan, kompensasi atas kerusakan jalan desa akibat kegiatan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

industri, perbaikan irigasi, serta pembangunan kredit pertanian dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi ketimpangan dalam ekonomi kolonial. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tetap berada dalam kerangka reformasi negara kolonial, pemerintah harus hadir sebagai pengawas dan pengatur agar industri tidak sepenuhnya berjalan menurut kepentingan modal.

Gagasan pendidikan juga muncul sebagai bagian dari solusi etis. Van Deventer menekankan pentingnya pendidikan bagi penduduk pribumi agar mereka mampu memahami kepentingan ekonominya dan kelak memperoleh bagian yang lebih besar dalam industri yang selama ini didominasi orang Eropa.¹⁰⁸ Namun, Brooshooft tidak sepenuhnya menerima optimisme Van Deventer terhadap pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan memang dapat membuat seseorang lebih mampu dalam perjuangan ekonomi, tetapi tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Bahkan, pendidikan dapat memperkuat ketimpangan jika hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu, Brooshooft lebih menekankan perlunya campur tangan negara untuk mengarahkan distribusi hasil kerja secara lebih adil.¹⁰⁹ Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa kritik etis *De Locomotief* tidak berhenti pada slogan pendidikan, tetapi juga menyentuh persoalan struktur ekonomi dan pembagian hasil produksi.

Pada bagian akhir, Brooshooft juga menambahkan sisi negatif industri gula yang menurutnya kurang diperhatikan dalam ceramah Van Deventer, yaitu dampak moral dan sosial keberadaan pabrik di desa. Ia menyebut perjudian, meningkatnya penggunaan opium, penari perempuan, serta kerusakan moral yang melibatkan mandor sebagai akibat sosial yang tidak boleh diabaikan.¹¹⁰ Pernyataan ini memperluas kritik *De Locomotief* dari persoalan upah dan kontrak kerja menuju dampak sosial industri kolonial terhadap masyarakat desa.

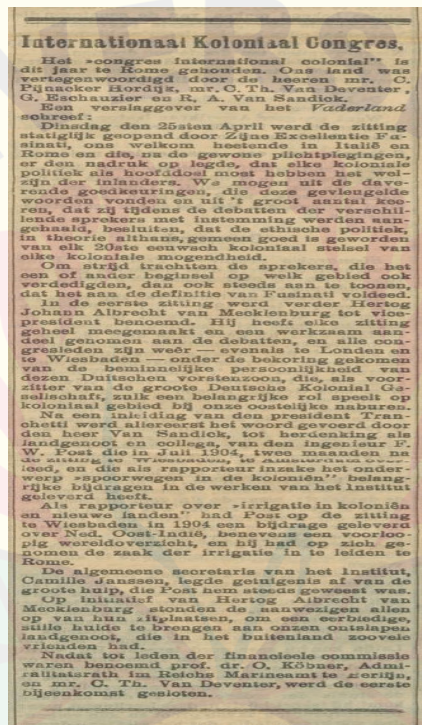
¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Industri gula tidak hanya dilihat sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mengubah kehidupan desa Jawa.¹¹¹

Dengan demikian, artikel tahun 1904 ini memperkuat kesinambungan orientasi etis-liberal *De Locomotief*. Setelah sebelumnya mengkritik sewa tanah, hutang kehormatan, eksploitasi kuli kontrak, dan representasi penderitaan Jawa, Brooshoofd melalui tulisan ini menyoroti industri gula sebagai sektor kolonial yang penting tetapi problematis.¹¹² *De Locomotief* mengakui nilai ekonomi industri gula, tetapi menuntut agar keuntungan ekonomi tidak dibangun di atas upah rendah, lemahnya perlindungan kerja, ketimpangan kontrak, dan kerusakan sosial di desa.



Gambar 4.15 "Internationaal Koloniaal Congres"

Sumber: *De Locomotief* 3 Juni 1905.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

Pada tahun 1905, pemberitaan *De Locomotief* mengenai Kongres Kolonial Internasional di Roma memperlihatkan bahwa wacana *Politik Etis* tidak hanya dibicarakan dalam konteks Hindia Belanda, tetapi juga ditempatkan dalam perdebatan kolonial yang lebih luas. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai negara kolonial, sementara Belanda diwakili oleh tokoh-tokoh seperti C. Pijnacker Hordijk, C.Th. van Deventer, G. Eschauzier, dan R.A. van Sandick.¹¹³ Kehadiran tokoh seperti Van Deventer penting karena ia telah dikenal sebagai salah satu figur utama dalam gerakan etis kolonial. Dengan memuat laporan ini, *De Locomotief* menunjukkan bahwa persoalan kolonial di Hindia Belanda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari arus pemikiran internasional tentang bagaimana kekuasaan kolonial seharusnya dijalankan.

Hal yang paling menonjol dalam pemberitaan tersebut adalah pidato pembukaan Fusinati yang menegaskan bahwa setiap kebijakan kolonial harus menjadikan kesejahteraan penduduk asli sebagai tujuan utama.¹¹⁴ Sambutan meriah terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa gagasan etis telah menjadi semacam bahasa resmi dalam forum kolonial abad ke-20. Namun, hal ini juga perlu dibaca secara kritis. Penerimaan terhadap prinsip kesejahteraan penduduk asli tidak berarti bahwa kolonialisme kehilangan watak dominasinya. Sebaliknya, prinsip tersebut menunjukkan bagaimana kolonialisme modern mulai membangun legitimasi baru: kekuasaan kolonial tidak lagi cukup dibenarkan melalui penaklukan atau kepentingan ekonomi, tetapi harus ditampilkan sebagai proyek yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat jajahan.¹¹⁵

Dalam konteks ini, pemberitaan *De Locomotief* memperlihatkan kesinambungan dengan narasi *Politik Etis* yang telah dibangun sejak awal abad ke-20. Sebelumnya, koran ini menekankan pentingnya hutang kehormatan, reformasi administrasi, pengurangan beban

¹¹³ *De Locomotief*, 3 Juni 1905.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan penduduk Jawa.¹¹⁶ Laporan tentang kongres di Roma memperluas narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa gagasan semacam itu juga memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Dengan kata lain, *De Locomotief* tidak hanya membela *Politik Etis* sebagai gagasan lokal Belanda, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian dari standar baru dalam praktik kolonial modern.



Gambar 4.16 "Politiek zonder hart I"

Sumber: *De Locomotief* 30 Oktober 1905

Pada 30 Oktober 1905, Brooshooft kembali menegaskan kritiknya terhadap arah kebijakan kolonial melalui artikel yang menggunakan istilah "Politik Tanpa Hati". Tulisan ini memperlihatkan bahwa wacana *Politik Etis* dalam *De Locomotief* tidak hanya berkaitan dengan gagasan kesejahteraan penduduk pribumi, tetapi juga dengan kritik terhadap cara

¹¹⁶ *Ibid.*

pemerintah kolonial menyusun prioritas anggaran. Dalam artikel tersebut, Brooshooft menilai bahwa anggaran Hindia Belanda tahun 1906 merupakan bentuk kemunduran dari langkah-langkah etis yang sebelumnya telah mulai dibangun.¹¹⁷ Pemulihan keseimbangan keuangan yang dipuji oleh beberapa surat kabar besar di Belanda, seperti *Algemeen Handelsblad* dan *Nieuwe Courant*, justru dipandang sebagai tindakan reaksioner karena dilakukan dengan mengurangi kebutuhan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki keadaan penduduk Hindia Belanda.¹¹⁸

Kritik utama Brooshooft diarahkan pada cara pandang pers harian utama Belanda yang menjadikan keseimbangan anggaran sebagai ukuran keberhasilan kebijakan kolonial. Bagi Brooshooft, sikap tersebut berbahaya karena membuat masyarakat Belanda merasa seolah-olah persoalan Hindia Belanda telah dikelola dengan baik hanya karena defisit anggaran berhasil ditekan. Ia menyindir pandangan semacam itu sebagai semacam obat penenang yang membuat pers Belanda tertidur dari kegelisahan terhadap tanggung jawab finansial negeri induk di Hindia Belanda. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya mengkritik pemerintah kolonial, tetapi juga mengkritik media Belanda yang ikut membentuk opini publik secara keliru. Pers di negeri induk dianggap terlalu mudah puas pada angka-angka fiskal dan kurang memperhatikan penderitaan nyata penduduk pribumi.

Artikel ini juga memperlihatkan bagaimana Brooshooft menempatkan persoalan anggaran sebagai persoalan moral. Menurutnya, setelah pemerintah sendiri mengakui adanya “kemunduran Jawa” dan membentuk komisi untuk menyelidiki kesejahteraan penduduk, tidak masuk akal jika anggaran berikutnya justru disusun dengan cara mengurangi dana untuk kebutuhan mendesak. Brooshooft mengingatkan bahwa tokoh-tokoh seperti Idenburg, Van Deventer, Fock, dan Kielstra sebelumnya telah mengakui buruknya kondisi ekonomi penduduk pribumi serta perlunya bantuan keuangan dari Belanda.¹¹⁹ Oleh karena itu, pemotongan anggaran tidak dapat dilihat sebagai keberhasilan administrasi, melainkan

¹¹⁷ *De Locomotief*, 30 Oktober 1905.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

sebagai pengabaian terhadap kesaksian dan pengakuan resmi mengenai kemiskinan masyarakat Jawa.

Dalam kritiknya, Brooshooft memakai analogi yang cukup tajam. Ia membandingkan menteri yang menghilangkan defisit anggaran dengan kontraktor yang membuat bangunan tampak selesai dengan cara mencampur pasir ke dalam kapur, mengisi dinding dengan puing, dan memakai batu berkualitas rendah.¹²⁰ Analogi ini penting karena menunjukkan cara *De Locomotief* membingkai anggaran kolonial tahun 1906 sebagai sesuatu yang tampak rapi di atas kertas, tetapi rapuh secara moral dan praktis. Bagi Brooshooft, anggaran yang seimbang tidak berarti baik apabila keseimbangan itu dicapai dengan menunda irigasi, pendidikan, pekerjaan umum, pertanian, dan kebutuhan sosial lain yang langsung berkaitan dengan kehidupan penduduk.¹²¹

Bagian lain yang penting adalah kritik terhadap sistem penyusunan anggaran baru yang memberi kekuasaan besar kepada Gubernur Jenderal. Sekilas, penyusunan anggaran di Hindia Belanda dapat terlihat sebagai bentuk desentralisasi.¹²² Namun, Brooshooft justru melihatnya sebagai penguatan kekuasaan otoriter Gubernur Jenderal, karena kepala departemen hanya diberi ruang untuk memberikan penjelasan lisan dan tidak memiliki posisi yang kuat dalam mempertahankan kebutuhan departemennya. Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan bahwa tidak semua perubahan administratif dapat disebut sebagai kemajuan. Jika perubahan itu hanya memindahkan pusat kekuasaan dari Belanda kepada Gubernur Jenderal tanpa memperkuat kontrol, partisipasi, atau tanggung jawab terhadap kebutuhan penduduk, maka perubahan tersebut tetap tidak sejalan dengan semangat *Politik Etis*.¹²³

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

Artikel ini juga memperlihatkan perhatian *De Locomotief* terhadap dampak konkret pemotongan anggaran. Brooshooft menyebut pemangkasan pada departemen seperti Pertanian, Kehakiman, Pendidikan, dan terutama Pekerjaan Umum sebagai bukti bahwa kebutuhan masyarakat dikorbankan demi angka fiskal.¹²⁴ Pekerjaan umum menjadi contoh penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan pedalaman: air, irigasi, tanggul, pintu air, jembatan, komunikasi, dan bangunan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan menyoroti bagian ini, Brooshooft menegaskan bahwa anggaran kolonial tidak boleh hanya dibaca sebagai dokumen keuangan, tetapi sebagai penentu langsung atas kesejahteraan penduduk. Ketika anggaran dipotong, yang dikorbankan bukan sekadar pos belanja, melainkan kebutuhan hidup masyarakat pribumi.

Dengan demikian, artikel “Politik Tanpa Hati” tahun 1905 memperkuat posisi etis-liberal *De Locomotief* dalam mengkritik kebijakan kolonial. Koran ini menolak cara pandang fiskal yang memprioritaskan keseimbangan anggaran di atas kesejahteraan penduduk.¹²⁵ Bagi Brooshooft, *Politik Etis* tidak boleh berhenti sebagai retorika atau pengakuan moral, tetapi harus diwujudkan dalam keberanian mengalokasikan dana untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Hindia Belanda.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*



Gambar 4.17 "Politiek zonder hart II"

Sumber: *De Locomotief* 31 Oktober 1905.

Dalam lanjutan artikel "Politik Tanpa Hati" bab kedua yang terbit pada 1905, Brooshooff memperdalam kritiknya terhadap anggaran Hindia Belanda tahun 1906 dengan menyoroti pemangkasan besar-besaran pada Departemen Pekerjaan Umum. Jika bagian sebelumnya mengkritik cara pemerintah dan pers Belanda memuji keseimbangan anggaran, maka bagian ini menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut dicapai melalui pengabaian terhadap kebutuhan nyata masyarakat di Hindia Belanda. Brooshooff menilai bahwa pemotongan anggaran oleh Gubernur Jenderal Van Heutsz bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk kebijakan yang mengorbankan pekerjaan-pekerjaan penting seperti pembangunan jembatan, jalan, tanggul, pelabuhan, irigasi, dan normalisasi sungai.¹²⁶ Dengan demikian, *De Locomotief* membongkar anggaran kolonial bukan sebagai dokumen keuangan yang netral, tetapi sebagai cerminan keberpihakan politik pemerintah kolonial.

¹²⁶ *De Locomotief*, 31 Oktober 1905.

Kritik Brooshooft terhadap prosedur pengajuan pekerjaan umum memperlihatkan betapa lambat dan beratnya birokrasi kolonial dalam menjawab kebutuhan daerah. Permohonan pembangunan atau perbaikan harus disusun berdasarkan tingkat urgensi, lalu disaring dan dipangkas berkali-kali hingga sesuai dengan batas anggaran rendah yang telah ditentukan. Dalam pandangan *De Locomotief*, mekanisme seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan penduduk tidak ditempatkan sebagai prioritas utama. Bahkan pekerjaan yang sangat mendesak, seperti perbaikan jembatan di jalan utama atau pembangunan infrastruktur desa, dapat tertunda bertahun-tahun karena alasan kekurangan dana. Akibatnya, penduduk setempat harus menanggung beban melalui perbaikan darurat, tenaga kerja desa, dan pemeliharaan sementara yang justru lebih memberatkan mereka.

Bagian ini juga memperlihatkan bagaimana *De Locomotief* menghubungkan persoalan infrastruktur dengan kesejahteraan penduduk pribumi. Brooshooft menunjukkan bahwa kekurangan jembatan, tanggul, saluran air, perumahan, dan irigasi bukan sekadar masalah teknis, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat desa.¹²⁷ Kasus *Bengawan Djero* menjadi contoh penting. Wilayah tersebut digambarkan mengalami penderitaan akibat banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, sementara proyek waduk yang sebelumnya telah direncanakan terus ditunda. Dengan menampilkan contoh ini, *De Locomotief* menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya menghasilkan keterlambatan pembangunan, tetapi juga membiarkan manusia, ternak, dan tanaman berada dalam kondisi rentan. Satire pahit Brooshooft ketika menyatakan seolah ia akan “dengan tenang” membiarkan manusia dan ternak tenggelam memperlihatkan kemarahannya terhadap sikap pemerintah yang dianggap dingin terhadap penderitaan rakyat.¹²⁸

Kritik serupa juga muncul dalam pembahasan mengenai pencabutan hak perawatan medis gratis bagi pejabat pribumi yang sebelumnya telah disetujui. Brooshooft melihat tindakan Gubernur Jenderal Van Heutsz sebagai bentuk kesewenang-wenangan karena

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

kebijakan yang telah diberi dasar hukum dapat dibatalkan dengan alasan keadaan keuangan.¹²⁹ Dalam konteks ini, *De Locomotief* tidak hanya membela pejabat pribumi sebagai bagian dari administrasi kolonial, tetapi juga menyoroti persoalan kepercayaan politik. Jika janji pemerintah terhadap pejabat pribumi dapat ditarik kembali begitu saja, maka wibawa pemerintah kolonial ikut dipertanyakan. Di sini terlihat bahwa kritik *De Locomotief* tetap berada dalam kerangka etis-liberal: pemerintah kolonial boleh tetap ada, tetapi harus konsisten, bertanggung jawab, dan tidak memperlakukan penduduk maupun pejabat pribumi sebagai unsur yang mudah dikorbankan demi penghematan.¹³⁰

Selain pekerjaan umum dan kesehatan pejabat pribumi, Brooshooft juga menyoroti beberapa bentuk penghematan lain seperti penarikan subsidi untuk pusat kesehatan, pengurangan dana pemberantasan sifilis, dan pemotongan perlengkapan sekolah. Rangkaian contoh ini menunjukkan bahwa yang dikritik *De Locomotief* bukan hanya satu pos anggaran tertentu, melainkan pola umum kebijakan kolonial yang menekan sektor-sektor sosial demi memperkecil defisit. Dengan demikian, istilah “Politik Tanpa Hati” menjadi tepat karena anggaran kolonial dipandang kehilangan dimensi moralnya.¹³¹ Pemerintah berbicara tentang keseimbangan keuangan, tetapi mengabaikan kenyataan bahwa penghematan tersebut dibayar oleh penduduk yang membutuhkan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pada bagian akhir, Brooshooft juga mengkritik kemungkinan peningkatan bea impor yang pada akhirnya akan membebani penduduk pribumi. Kritik ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menolak pemindahan beban krisis keuangan kolonial kepada masyarakat yang sudah berada dalam kondisi lemah. Anggaran 1906 dinilai memberikan “batu sebagai ganti roti” kepada penduduk Hindia Belanda: pemerintah seolah menjanjikan perbaikan,

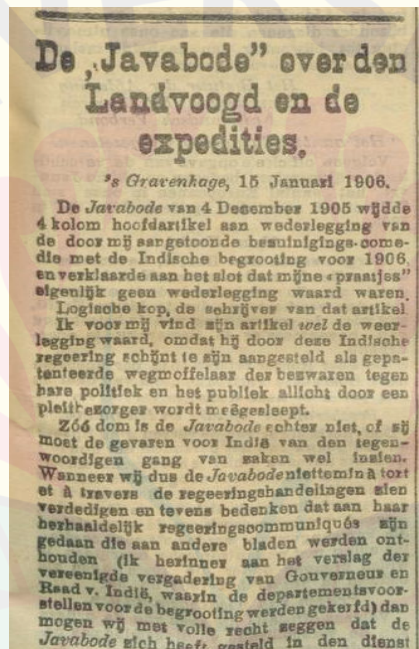
¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

tetapi yang diberikan justru pemotongan, penundaan, dan beban baru.¹³² Melalui kritik terhadap Van Heutsz, Menteri Fock, dan pers utama Belanda yang memuji kebijakan tersebut, *De Locomotief* memperlihatkan bahwa kegagalan *Politik Etis* tidak hanya terletak pada pemerintah kolonial, tetapi juga pada opini publik Belanda yang lebih memuja figur gubernur jenderal daripada memperhatikan kesejahteraan penduduk jajahan.¹³³

Dengan demikian, lanjutan artikel “Politik Tanpa Hati” memperkuat posisi *De Locomotief* sebagai surat kabar etis yang menolak kebijakan kolonial yang hanya mengejar keseimbangan fiskal. Bagi Brooshooft, *Politik Etis* harus diwujudkan melalui anggaran yang berpihak pada kebutuhan konkret penduduk, terutama pekerjaan umum, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kelompok pribumi.¹³⁴



Gambar 4.18 "De Javabode over den landvoogd en de expedities"

Sumber: *De Locomotief*, 15 Januari 1906.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

Kritik Brooshooft terhadap anggaran kolonial kemudian berlanjut dalam tulisan tahun 1906 yang menanggapi pembelaan *Javabode* terhadap kebijakan Gubernur Jenderal Van Heutsz. Dalam tulisan ini, *De Locomotief* tidak hanya mempermasalahkan pemotongan anggaran untuk kebutuhan kesejahteraan, tetapi juga menyoroti bagaimana pemerintah kolonial tetap mengeluarkan biaya besar untuk ekspedisi militer. Dengan demikian, kritik terhadap anggaran tidak lagi hanya menyangkut rendahnya alokasi untuk pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, atau irigasi, tetapi juga menyangkut prioritas politik pemerintah kolonial.¹³⁵ Bagi Brooshooft, penghematan yang dibanggakan pemerintah dan dipuji sebagian pers Belanda bersifat semu karena kebutuhan rakyat dipangkas, sementara biaya kekerasan kolonial tetap berjalan.

Dalam konteks ini, *De Locomotief* menempatkan *Javabode* sebagai surat kabar yang cenderung membela pemerintah Hindia Belanda. Brooshooft menilai bahwa koran tersebut berusaha membantah kritik terhadap anggaran dan kebijakan Van Heutsz, tetapi justru memperlihatkan keberpihakannya pada pemerintah. Perdebatan ini penting karena menunjukkan adanya pertentangan dalam pers kolonial sendiri. *De Locomotief* mengambil posisi sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, sedangkan *Javabode* diposisikan sebagai pembela kebijakan resmi. Dengan demikian, pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pers kolonial tidak bersifat tunggal; di dalamnya terdapat perbedaan orientasi antara surat kabar yang menekankan stabilitas dan surat kabar yang menuntut reformasi etis.¹³⁶

Kritik Brooshooft terhadap Van Heutsz berpusat pada anggapan bahwa gubernur jenderal tersebut tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap reformasi ekonomi Hindia Belanda. Van Heutsz digambarkan lebih menekankan penahanan bantuan keuangan, peningkatan pajak, dan penggunaan ekspedisi militer di wilayah luar daripada menjalankan program kesejahteraan yang sejalan dengan *Politik Etis*.¹³⁷ Dalam kerangka ini, *De Locomotief* melihat kebijakan Van Heutsz sebagai kemunduran dari arah etis yang

¹³⁵ *De Locomotief*, 15 Januari 1906.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

sebelumnya menuntut perhatian terhadap kesejahteraan penduduk pribumi. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa bagi *De Locomotief*, keberhasilan pemerintahan kolonial tidak dapat diukur dari kekuatan militer atau keseimbangan anggaran, melainkan dari kemampuannya memperbaiki kehidupan penduduk yang dikuasainya.¹³⁸

Bagian penting dari tulisan ini adalah kritik terhadap apa yang disebut sebagai penghematan yang hanya tampak di permukaan. Brooshooft menilai bahwa pemerintah menampilkan anggaran seolah-olah lebih hemat dan lebih seimbang, tetapi tidak memperlihatkan secara jujur biaya besar yang berkaitan dengan ekspedisi militer.¹³⁹ Dengan cara ini, *De Locomotief* membingkai anggaran kolonial sebagai alat politik yang dapat menyembunyikan prioritas sebenarnya dari pemerintah. Penghematan dilakukan pada sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan penduduk, sementara pengeluaran untuk operasi militer tetap dipertahankan. Kritik ini memperkuat narasi sebelumnya dalam “Politik Tanpa Hati”, yaitu bahwa kebijakan kolonial kehilangan dasar etis ketika lebih mengutamakan kekuasaan dan ekspansi daripada kebutuhan rakyat.¹⁴⁰

Ekspedisi di Celebes, terutama terkait Boni dan wilayah-wilayah kecil lainnya, digunakan Brooshooft sebagai contoh dari kebijakan kolonial yang mahal secara finansial sekaligus merusak secara moral. Ia menilai bahwa konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perdagangan, hak pungutan, dan sikap pemerintah yang tidak cukup adil terhadap penguasa lokal.¹⁴¹ Menurutnya, sikap yang lebih bijaksana dan murah hati dari pemerintah kolonial mungkin dapat menghindarkan perang. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya mengkritik biaya perang, tetapi juga dasar politik yang melahirkannya. Perang dilihat bukan sebagai keniscayaan, melainkan sebagai akibat dari

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

kebijakan kolonial yang sempit, keras, dan kurang memahami kondisi masyarakat setempat.¹⁴²

Kritik kemanusiaan dalam tulisan ini juga cukup kuat. Brooshoofit menyoroti penderitaan yang ditimbulkan oleh ekspedisi militer terhadap penduduk lokal, termasuk perempuan dan anak-anak yang terdampak oleh penggeledahan, tembakan, dan penghancuran desa. Ia memperingatkan bahwa tindakan kekerasan semacam itu akan menumbuhkan kebencian yang panjang terhadap pemerintahan Belanda.¹⁴³ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai ekspedisi militer bukan hanya sebagai persoalan anggaran atau strategi, tetapi sebagai persoalan moral dan politik. Kekerasan kolonial dianggap merusak legitimasi pemerintahan Belanda karena meninggalkan trauma, kebencian, dan kemungkinan perlawanan baru.¹⁴⁴

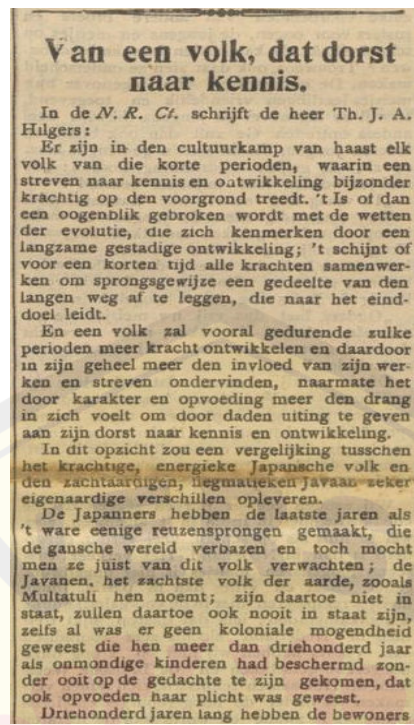
Dengan demikian, sumber tahun 1906 ini memperluas kritik etis *De Locomotief* dari persoalan anggaran kesejahteraan menuju kritik terhadap militerisme kolonial. Jika dalam “Politik Tanpa Hati” Brooshoofit menolak pemotongan anggaran untuk kebutuhan rakyat, maka dalam tulisan ini ia menunjukkan bahwa penghematan tersebut semakin bermasalah karena pemerintah tetap bersedia membiayai ekspedisi militer.¹⁴⁵ Posisi *De Locomotief* tetap konsisten sebagai surat kabar etis mengkritik kebijakan kolonial yang mengabaikan kesejahteraan penduduk, menolak kekerasan yang dianggap tidak perlu, dan menuntut pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*



Gambar 4.19 "Van een volk, dat dorst naar kennis"

Sumber: *De Locomotief* 26 Agustus 1907

Pada tahun 1907, pemberitaan *De Locomotief* mulai menunjukkan pergeseran penting dalam wacana *Politik Etis*, yaitu dari kritik terhadap kebijakan kolonial menuju perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan intelektual penduduk pribumi. Dalam artikel yang membahas "bangsa yang haus akan pengetahuan", penduduk Jawa digambarkan mulai memiliki dorongan untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan.¹⁴⁶ Narasi ini penting karena memperlihatkan bahwa *De Locomotief* tidak lagi hanya membicarakan pribumi sebagai pihak yang menderita akibat sewa tanah, pajak, kerja paksa, atau rendahnya kesejahteraan, tetapi juga sebagai kelompok yang mulai menunjukkan keinginan untuk berkembang melalui pendidikan.

Salah satu unsur utama dalam artikel tersebut adalah pentingnya bahasa Belanda sebagai sarana menuju pengetahuan. Bahasa Belanda dipandang sebagai jalan bagi penduduk

¹⁴⁶ *De Locomotief*, 26 Agustus 1907.

pribumi terdidik untuk mengakses ilmu pengetahuan, memperoleh kedudukan yang lebih baik, dan berpartisipasi dalam kehidupan administrasi kolonial.¹⁴⁷ Namun, artikel ini juga memperlihatkan adanya hambatan sosial dalam proses tersebut. Sebagian orang Eropa masih menolak atau merasa terganggu ketika penduduk pribumi menggunakan bahasa Belanda, karena hal itu dianggap dapat mengganggu jarak sosial dan prestise kolonial.¹⁴⁸ Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi persoalan sekolah atau kurikulum, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kuasa antara orang Eropa dan pribumi.

Kritik terhadap sikap sebagian pejabat dan orang Eropa menjadi bagian penting dari artikel ini. Kisah tentang pemuda pribumi terdidik yang tetap dipaksa menggunakan tata krama lama, seperti berjongkok dan berbicara dalam bahasa Jawa di hadapan pejabat kolonial, memperlihatkan adanya kontradiksi dalam *Politik Etis*.¹⁴⁹ Di satu sisi, pemerintah kolonial mulai mendorong pendidikan dan penguasaan bahasa Belanda. Di sisi lain, struktur sosial kolonial masih mempertahankan hierarki yang merendahkan pribumi, bahkan ketika mereka telah memperoleh pendidikan Barat.¹⁵⁰ Dengan cara ini, *De Locomotief* membingkai persoalan pendidikan sebagai masalah moral sekaligus sosial, kemajuan pribumi tidak akan berarti banyak jika sikap kolonial lama tetap dipertahankan.

Artikel tersebut juga menilai bahwa langkah pemerintah memperkenalkan bahasa Belanda di beberapa sekolah pribumi merupakan awal yang baik, tetapi masih sangat terlambat dan terbatas.¹⁵¹ *De Locomotief* menganggap bahwa Belanda telah terlalu lama menunda pendidikan bagi penduduk jajahan. Keterlambatan tersebut menyebabkan banyak penduduk pribumi yang memiliki keinginan belajar tidak memperoleh kesempatan yang

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

memadai. Kritik ini sejalan dengan corak etis *De Locomotief*: koran ini mendukung pendidikan sebagai sarana kemajuan, tetapi sekaligus menegur pemerintah kolonial karena tidak cukup cepat dan tidak cukup luas dalam menyediakan akses pendidikan bagi pribumi.¹⁵²

Meski demikian, gagasan pendidikan dalam artikel ini tetap memperlihatkan batas paternalistik *Politik Etis*. Penduduk pribumi digambarkan memiliki keinginan besar untuk belajar, tetapi arah perkembangan mereka tetap dibayangkan melalui bahasa, pendidikan, dan bimbingan kolonial Belanda. Bahkan, artikel tersebut menekankan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk “mengikat” penduduk pribumi kepada Belanda selain memenuhi keinginan mereka untuk belajar bahasa Belanda.¹⁵³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang bukan hanya sebagai alat emansipasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan kolonial.

Berdasarkan pemberitaan tahun 1901-1907, *De Locomotief* memperlihatkan posisi sebagai surat kabar kolonial berhaluan etis. Pemberitaannya tidak hanya mendukung *Politik Etis* sebagai gagasan moral, tetapi juga menggunakan kerangka tersebut untuk mengkritik berbagai praktik kolonial yang dianggap menghambat kesejahteraan penduduk pribumi. Kritik itu tampak dalam isu sewa tanah, hutang kehormatan, beban fiskal, eksploitasi tenaga kerja, industri gula, pemotongan anggaran, ekspedisi militer, serta keterlambatan pendidikan bagi masyarakat pribumi.¹⁵⁴ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai kolonialisme Belanda sebagai kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Namun, kritik tersebut tetap berada dalam batas reformasi kolonial. Koran ini tidak menolak keberadaan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, melainkan menuntut agar kekuasaan tersebut dijalankan secara lebih adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi. Pada akhir periode ini, perhatian terhadap pendidikan dan bahasa Belanda menunjukkan pergeseran penting menuju pembentukan

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

kaum pribumi terdidik, yang menjadi pengantar bagi munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo pada 1908.

4.2.2 Pemberitaan tentang Gerakan Nasional Pribumi 1908-1917



Gambar 4.20 "De Javanenbond"

Sumber: *De Locomotief* 24 Juli 1908

Pemberitaan *De Locomotief* pada 24 Juli 1908 mengenai Persatuan Jawa "Boedi Oetomo" memperlihatkan pergeseran penting dalam narasi politik surat kabar ini. Jika pada periode 1901-1907 *De Locomotief* banyak membingkai penduduk pribumi sebagai pihak yang harus dibela melalui *Politik Etis*, maka dalam pemberitaan ini suara pribumi mulai hadir secara langsung melalui surat Soewarno, sekretaris Boedi Oetomo. Ia menjelaskan bahwa para pelajar STOVIA telah lama memikirkan cara memperbaiki keadaan masyarakat Jawa, khususnya rakyat jelata, melalui peningkatan perkembangan intelektual. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa kaum muda terdidik Jawa mulai melihat pendidikan dan organisasi sebagai jalan untuk mengangkat masyarakat dari "kegelapan ketidaktahuan" serta

mempersiapkan mereka menghadapi persaingan dengan kelompok lain.¹⁵⁵ Dalam konteks ini, *De Locomotief* membingkai Boedi Oetomo sebagai hasil dari munculnya kesadaran baru di kalangan pribumi terdidik, yaitu kesadaran bahwa kemajuan masyarakat Jawa tidak cukup hanya menunggu kebijakan pemerintah kolonial, tetapi perlu diusahakan melalui persatuan, pendidikan, dan kerja sama antarkaum terpelajar.¹⁵⁶

Hal penting dari pemberitaan ini adalah cara Boedi Oetomo menempatkan kaum muda terdidik sebagai penggerak awal perubahan. Soewarno menyatakan bahwa mereka sengaja mengarahkan gagasan tersebut kepada para pelajar di sekolah kedokteran, pertanian, keguruan, dan sekolah-sekolah utama karena kelompok muda dianggap lebih mampu memahami kebutuhan zaman dibandingkan sebagian priyayi tua yang masih terikat oleh adat kehormatan dan hierarki feodal.¹⁵⁷ Kritik terhadap pejabat pribumi tingkat bawah yang masih berada dalam “ikatan perbudakan” menunjukkan bahwa Boedi Oetomo tidak hanya lahir sebagai organisasi pendidikan, tetapi juga sebagai kritik halus terhadap struktur sosial Jawa yang dianggap menghambat kemajuan. Namun, gerakan ini tetap bersifat moderat karena tidak menyerukan perlawanan politik langsung terhadap pemerintah kolonial. Fokus utamanya adalah pembangunan intelektual, pendidikan, persatuan, dan pembentukan organisasi yang kuat.¹⁵⁸

Dengan demikian, pemberitaan *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo pada 1908 dapat dibaca sebagai kelanjutan sekaligus perubahan dari narasi *Politik Etis* sebelumnya. Kelanjutannya tampak pada penekanan terhadap pendidikan, kemajuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa. Perubahannya terletak pada munculnya kaum pribumi terdidik sebagai aktor yang berbicara atas nama bangsanya sendiri. *De Locomotief* memberi ruang bagi suara tersebut karena Boedi Oetomo masih bergerak dalam kerangka yang

¹⁵⁵ *De Locomotief*, 24 Juli 1908.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

dianggap aman: pendidikan, moralitas, persatuan, dan kemajuan sosial.¹⁵⁹ Oleh sebab itu, sikap koran ini terhadap Boedi Oetomo cenderung simpatik, sebab organisasi tersebut sesuai dengan imajinasi *Politik Etis* tentang pribumi terdidik yang berkembang secara tertib dan tidak radikal.



Gambar 4.21 "Boedi Oetomo"

Sumber: *De Locomotief* 8 September 1908

Pemberitaan *De Locomotief* pada 8 September 1908 memperlihatkan perkembangan lebih lanjut dari Boedi Oetomo setelah gagasan pendiriannya diberitakan sebelumnya. Dalam berita ini, Boedi Oetomo tidak lagi hanya tampil sebagai inisiatif awal para siswa STOVIA di Weltevreden, tetapi mulai digambarkan sebagai organisasi yang memperoleh dukungan luas dari berbagai lembaga pendidikan pribumi, seperti sekolah pertanian, kedokteran hewan, sekolah kepala, sekolah keguruan, dan sekolah-sekolah lain di Jawa. Jumlah anggota yang disebut telah mencapai lebih dari 900 orang, termasuk pejabat dan individu pribumi, menunjukkan bahwa gagasan organisasi ini mulai bergerak keluar dari lingkungan pelajar menuju kelompok pribumi yang lebih luas.¹⁶⁰ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai Boedi Oetomo sebagai tanda munculnya kesadaran kolektif kaum pribumi terdidik untuk membangun persatuan dan kemajuan masyarakat Jawa.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *De Locomotief*, 8 September 1908.

Hal penting dari pemberitaan ini adalah penekanan pada cita-cita Persatuan Umum Jawa. Boedi Oetomo digambarkan bukan sekadar perkumpulan pelajar, melainkan pendahulu dari organisasi yang lebih luas untuk mendorong pembangunan harmonis bagi tanah dan rakyat Hindia Belanda.¹⁶¹ Seruan untuk menghadiri kongres pertama di Yogyakarta pada 3-4 Oktober 1908 memperlihatkan bahwa organisasi ini mulai memasuki tahap institusional, yaitu membentuk jaringan, menyusun program, dan menghindari fragmentasi gerakan. Dalam konteks ini, *De Locomotief* menampilkan Boedi Oetomo sebagai gerakan yang tertib, rasional, dan berorientasi pada pendidikan serta kemajuan sosial, bukan sebagai gerakan politik yang konfrontatif terhadap pemerintah kolonial.¹⁶²

Pemberitaan ini juga menunjukkan kesinambungan dengan narasi *Politik Etis* yang telah dibangun *De Locomotief* pada periode sebelumnya. Jika pada 1901-1907 koran ini banyak menekankan pentingnya pendidikan, kesejahteraan, dan pembentukan kaum pribumi terdidik, maka kemunculan Boedi Oetomo pada 1908 dapat dibaca sebagai wujud awal dari narasi tersebut.¹⁶³ Namun, terdapat perubahan penting: pribumi tidak lagi hanya hadir sebagai objek pembelaan dalam wacana etis kolonial, tetapi mulai tampil sebagai aktor yang mengorganisasi diri dan menyusun agenda kemajuan. Meski demikian, karena Boedi Oetomo masih bergerak dalam bahasa persatuan, pembangunan, dan harmoni, *De Locomotief* tampak dapat menerimanya sebagai bentuk gerakan pribumi yang sesuai dengan pandangan etis kolonial.¹⁶⁴

Dengan demikian, artikel 8 September 1908 memperkuat kesimpulan bahwa sikap *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo cenderung simpatik. Koran ini memberi ruang bagi pernyataan resmi organisasi dan menampilkan Boedi Oetomo sebagai gerakan pribumi terdidik yang bertujuan memajukan masyarakat melalui pendidikan, persatuan, dan kerja

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

sama. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menerima gerakan pribumi selama gerakan itu tampil moderat, terorganisasi, dan tidak langsung menantang struktur kekuasaan kolonial.¹⁶⁵



Gambar 4.22 "Het Javanencongres"

Sumber: *De Locomotief* 3 Oktober 1908

Pemberitaan *De Locomotief* pada 3 Oktober 1908 mengenai Kongres Pemuda Jawa di Yogyakarta memperlihatkan bahwa Boedi Oetomo mulai dipandang sebagai gejala sosial-politik yang perlu diperhatikan secara serius. Jika pemberitaan sebelumnya menampilkan Boedi Oetomo sebagai organisasi yang sedang membangun jaringan dan mempersiapkan kongres, maka artikel ini memberi penilaian lebih luas terhadap makna gerakan tersebut. *De Locomotief* menekankan bahwa dorongan awal dari kaum muda bukanlah sesuatu yang perlu direndahkan, karena dalam berbagai gerakan sosial di tempat lain gagasan baru sering kali muncul dari kalangan pemuda.¹⁶⁶ Dengan demikian, koran ini menolak pandangan yang mengecilkan Boedi Oetomo hanya karena organisasi tersebut lahir dari lingkungan pelajar dan mahasiswa pribumi. Gerakan ini justru dibingkai sebagai tanda bahwa kaum muda Jawa mulai memiliki kesadaran untuk ikut memikirkan perubahan sosial masyarakatnya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *De Locomotief*, 3 Oktober 1908.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Sikap simpatik *De Locomotief* juga tampak dari pembelaannya terhadap tujuan Boedi Oetomo. Artikel tersebut menanggapi pandangan yang mencurigai bahwa seruan “pembangunan yang lebih harmonis” bagi masyarakat Jawa hanyalah kedok untuk mencari pekerjaan.¹⁶⁸ Bagi *De Locomotief*, agenda kongres Yogyakarta tidak mendukung prasangka tersebut. Pembahasan mengenai dana studi bagi masyarakat Jawa dan Madura, serta kritik terhadap tata perilaku sosial masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa organisasi ini lebih berorientasi pada peningkatan spiritual, pendidikan, dan sosial penduduk pribumi. Dengan cara ini, *De Locomotief* membingkai Boedi Oetomo sebagai organisasi yang memiliki tujuan moral dan sosial, bukan sebagai gerakan oportunis atau ancaman politik langsung.¹⁶⁹

Namun, dukungan tersebut tetap berada dalam pandangan etis kolonial. *De Locomotief* menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya mendekati organisasi seperti Boedi Oetomo dengan simpati, mendukungnya jika diperlukan, dan bekerja sama agar gerakan tersebut tetap berada pada jalur yang “benar dan murni”.¹⁷⁰ Pernyataan ini penting karena memperlihatkan dua sisi sikap koran tersebut. Di satu sisi, Boedi Oetomo diterima sebagai hasil positif dari perkembangan pendidikan pribumi dan sebagai tanda munculnya kehidupan intelektual baru di kalangan pemuda Jawa. Di sisi lain, gerakan tersebut tetap dibayangkan perlu diawasi, diarahkan, dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk mempercepat tujuan mengangkat penduduk asli dari kelesuan sosial dan intelektual.¹⁷¹

Dengan demikian, pemberitaan 3 Oktober 1908 memperlihatkan bahwa *De Locomotief* memandang Boedi Oetomo secara positif selama organisasi itu bergerak dalam kerangka pendidikan, pembangunan sosial, dan kemajuan yang tertib. Koran ini memberi ruang dan legitimasi terhadap kemunculan kaum pribumi terdidik sebagai aktor baru, tetapi

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

belum menempatkan mereka sebagai kekuatan politik yang sepenuhnya otonom.¹⁷² Boedi Oetomo diterima karena sesuai dengan imajinasi *Politik Etis*: pribumi yang terdidik, moderat, rasional, dan dapat bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Di sinilah terlihat kesinambungan dengan periode 1901-1907: *De Locomotief* mendukung kemajuan pribumi, tetapi kemajuan itu tetap dibayangkan berada dalam batas bimbingan kolonial.¹⁷³



Gambar 4.23 "Wanneer krijgen de magangs eindelijk de lang beloofde bezoldiging?"

Sumber: *De Locomotief* 4 Juni 1909

Pemberitaan *De Locomotief* pada 4 Juni 1909 memperlihatkan bahwa perhatian terhadap kemajuan kaum pribumi terdidik tidak berhenti pada pembahasan organisasi seperti Boedi Oetomo, tetapi juga menyentuh persoalan konkret dalam birokrasi kolonial. Artikel ini membahas keterlambatan pemerintah dalam menghapus sistem magang tanpa bayaran

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

bagi para juru tulis pembantu dalam administrasi pribumi.¹⁷⁴ Meskipun dalam anggaran telah disediakan dana untuk penghapusan sistem tersebut, pelaksanaannya terus tertunda. *De Locomotief* menilai penundaan ini sebagai bentuk ketidakadilan karena para pemuda pribumi, terutama dari kalangan keluarga baik-baik yang bercita-cita masuk dinas administrasi, masih harus bekerja dalam posisi tidak dibayar atau dibayar sangat rendah.¹⁷⁵ Dengan demikian, koran ini membingkai persoalan magang bukan sekadar urusan teknis kepegawaian, melainkan sebagai bagian dari masalah moral dalam kebijakan kolonial.

Kritik dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* melihat birokrasi kolonial sebagai ruang yang seharusnya memberi peluang mobilitas sosial bagi kaum pribumi terdidik. Para pemuda Jawa yang bekerja sebagai juru tulis atau asisten administrasi dianggap telah memberikan tenaga dan keterampilan mereka kepada negara, sehingga pemberian upah dan status resmi dipandang sebagai kewajiban yang adil.¹⁷⁶ Koran ini bahkan menegaskan bahwa pegawai yang digaji secara layak akan lebih dapat diharapkan memiliki pengabdian, kedisiplinan, dan integritas dibandingkan pekerja yang tidak dibayar. Dengan cara ini, *De Locomotief* mengaitkan kesejahteraan pegawai pribumi dengan kualitas administrasi kolonial itu sendiri.

Artikel tersebut juga penting karena menghubungkan masalah ini dengan perubahan aspirasi pemuda pribumi. *De Locomotief* mencatat bahwa sebagian pemuda Jawa mulai melihat peluang hidup yang lebih baik di luar Binnenlands Bestuur¹⁷⁷, seperti di perusahaan kereta api, dinas kehutanan, pegadaian, lembaga perbankan, atau kantor dagang, karena

¹⁷⁴ *De Locomotief*, 4 Juni 1909.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Binnenlands Bestuur (sering disingkat BB) adalah struktur birokrasi pemerintahan sipil pada masa Hindia Belanda yang khusus diisi dan dikelola oleh orang-orang Eropa (Belanda). Secara harfiah, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti "Pemerintahan Dalam Negeri". Lihat Ira Sugiarnik, "Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya Pada Tahun 1900-1945 Serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi", dalam *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022. hlm. 150-155.

lembaga-lembaga tersebut tidak lagi memanfaatkan tenaga mereka secara gratis dalam waktu lama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan perkembangan ekonomi mulai membuka pilihan baru bagi kaum pribumi terdidik. Dengan demikian, pemerintah kolonial tidak dapat terus mengandalkan prestise tradisional dinas administrasi jika tetap mempertahankan praktik kerja tanpa bayaran.¹⁷⁸

Dalam kaitannya dengan Boedi Oetomo, artikel ini memperlihatkan bahwa tuntutan kemajuan kaum pribumi memiliki dasar yang nyata. Boedi Oetomo dan kelompok Eropa yang berpikiran etis disebut memiliki alasan untuk merasa kecewa apabila pemerintah terus menunda penghapusan sistem magang tanpa upah.¹⁷⁹ Dengan demikian, *De Locomotief* menempatkan kritik terhadap sistem magang sebagai bagian dari keberpihakannya terhadap pemuda Jawa terdidik. Koran ini mendukung perbaikan posisi mereka dalam birokrasi kolonial, tetapi tetap dalam kerangka reformasi administratif. Artinya, yang dituntut bukan perubahan radikal terhadap struktur kolonial, melainkan agar pemerintah kolonial menjalankan janji etisnya secara konsisten.¹⁸⁰

Pada pemberitaan tahun 1909 koran ini menunjukkan salah satu hambatan konkret yang dihadapi kaum terdidik tersebut dalam praktik kolonial. Sistem magang tanpa bayaran dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang menghambat kemajuan pemuda Jawa dan merusak wibawa kebijakan etis.¹⁸¹ Oleh karena itu, artikel ini memperlihatkan bahwa dukungan *De Locomotief* terhadap kemajuan pribumi tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga diarahkan pada perbaikan posisi sosial dan administratif kaum pribumi terdidik.

¹⁷⁸ *De Locomotief*, 4 Juni 1909.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*



Gambar 4.24 "Malaria bestrijding"

Sumber: *De Locomotief* 30 Juni 1909

Pemberitaan *De Locomotief* pada 30 Juni 1909 mengenai pengendalian malaria memperlihatkan bahwa wacana kemajuan pribumi tidak hanya dikaitkan dengan pendidikan formal atau organisasi seperti Boedi Oetomo, tetapi juga dengan penyebaran pengetahuan praktis yang menyangkut kesehatan masyarakat. Artikel ini membahas penerbitan terjemahan bahasa Jawa dari pamflet Dr. Terburgh berjudul *Cara Mengobati dan Mencegah Malaria*, yang kemudian disebarkan kepada pejabat Eropa, pejabat pribumi, administrator perusahaan, dan masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa.¹⁸² Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai persoalan kesehatan sebagai bagian dari agenda kemajuan rakyat, karena malaria dipandang sebagai penyakit yang merusak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa.¹⁸³

Hal penting dari artikel ini adalah penekanan bahwa ketidaktahuan masyarakat Jawa mengenai penggunaan kina menjadi salah satu hambatan utama dalam pencegahan malaria.¹⁸⁴ Dalam kerangka ini, masalah kesehatan tidak hanya dilihat sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai persoalan pendidikan rakyat. Pengetahuan tentang penyebab,

¹⁸² *De Locomotief*, 30 Juni 1909.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

penyebaran, pengobatan, dan pencegahan malaria perlu disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan pamflet ke dalam bahasa Jawa memiliki makna politis dalam konteks *Politik Etis*: pengetahuan modern harus dibuat lebih dekat kepada penduduk pribumi, bukan hanya beredar di kalangan Eropa atau pejabat kolonial.¹⁸⁵

Penyebutan anggota Boedi Oetomo dalam ajakan Dr. Terburgh juga penting. Mereka disebut bersama pejabat Eropa, pejabat pribumi, dokter, guru, dan pengelola perusahaan sebagai pihak yang diharapkan membantu menyebarkan pengetahuan tentang malaria.¹⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Boedi Oetomo mulai dipandang sebagai bagian dari jaringan kaum terdidik yang dapat menjembatani pengetahuan modern dengan masyarakat pribumi. Dalam pemberitaan ini, Boedi Oetomo tidak ditampilkan sebagai organisasi politik yang menantang pemerintah, melainkan sebagai kekuatan sosial yang dapat membantu peningkatan kesehatan dan pengetahuan rakyat. Sikap ini sesuai dengan framing *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo sejak 1908: organisasi tersebut diterima karena bergerak dalam bidang pendidikan, kemajuan sosial, dan kerja sama yang dianggap selaras dengan semangat *Politik Etis*.¹⁸⁷

Namun, artikel ini juga tetap memperlihatkan batas paternalistik dari wacana etis. Rakyat Jawa digambarkan sebagai pihak yang perlu diberi pengetahuan dan dibimbing agar memahami cara melindungi diri dari penyakit. Peran utama tetap diberikan kepada dokter, pejabat, guru, administrator perusahaan, dan kaum terdidik seperti anggota Boedi Oetomo.¹⁸⁸ Dengan kata lain, *De Locomotief* mendukung penyebaran pengetahuan bagi masyarakat pribumi, tetapi proses itu tetap dibayangkan melalui arahan kelompok terdidik dan lembaga kolonial. Meski demikian, sumber ini penting karena menunjukkan bahwa kemajuan pribumi

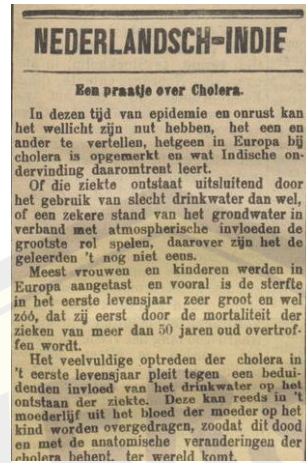
¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

dalam pemberitaan *De Locomotief* tidak hanya mencakup pendidikan sekolah atau administrasi, tetapi juga kesehatan rakyat sebagai bagian dari kesejahteraan sosial.



Gambar 4.25 "Een praatje over Cholera"

Sumber: *De Locomotief* 22 Maret 1910

Pemberitaan *De Locomotief* pada 22 Maret 1910 mengenai kolera memperlihatkan bahwa isu kesehatan masyarakat juga ditempatkan dalam kerangka kemajuan sosial penduduk pribumi. Artikel tersebut tidak hanya membahas kolera sebagai penyakit menular, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi lingkungan kampung, buruknya drainase, rumah yang kurang cahaya dan udara, kebiasaan warung keliling, serta lemahnya pengaturan kebersihan di wilayah perkotaan.¹⁸⁹ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai kolera bukan semata sebagai persoalan medis, melainkan sebagai akibat dari kondisi sosial dan lingkungan yang memerlukan perbaikan terencana. Hal ini sejalan dengan narasi *Politik Etis* yang sebelumnya menekankan bahwa kesejahteraan penduduk pribumi tidak cukup dicapai melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui perbaikan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan hidup.¹⁹⁰

Hal penting dari artikel ini adalah pandangan bahwa penanganan kolera tidak dapat dilakukan hanya dengan paksaan dari pemerintah. Penduduk perlu diberi pengertian

¹⁸⁹ *De Locomotief*, 22 Maret 1910.

¹⁹⁰ *Ibid.*

mengenai kebersihan, pencegahan penyakit, dan perubahan kebiasaan sehari-hari.¹⁹¹ Karena itu, artikel tersebut menyarankan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, seperti pejabat setempat, pemuka agama, perempuan dari keluarga bangsawan, dan Boedi Oetomo. Penyebutan Boedi Oetomo penting karena memperlihatkan bahwa organisasi ini mulai dipandang sebagai bagian dari jaringan sosial yang dapat membantu menyampaikan pengetahuan modern kepada masyarakat kampung. Dalam konteks ini, Boedi Oetomo tidak dilihat sebagai ancaman politik, melainkan sebagai kekuatan edukatif yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan kesehatan rakyat.¹⁹²

Dengan demikian, sumber tahun 1910 ini memperkuat framing *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo sebagai organisasi pribumi terdidik yang moderat dan berguna bagi kemajuan sosial. Setelah sebelumnya Boedi Oetomo diberitakan sebagai gerakan pendidikan dan persatuan kaum muda Jawa, dalam artikel ini organisasi tersebut ditempatkan sebagai perantara antara pengetahuan modern dan kehidupan sehari-hari rakyat.¹⁹³ Sikap *De Locomotief* tetap simpatik karena Boedi Oetomo bergerak dalam bidang yang sesuai dengan batas etis-liberal kolonial: pendidikan, kesehatan, ketertiban sosial, dan kerja sama dengan pemerintah. Namun, framing ini juga menunjukkan batasnya, karena peran Boedi Oetomo masih dibayangkan sebagai pembantu dalam proyek perbaikan kolonial, bukan sebagai kekuatan politik mandiri yang menentukan arah perubahan masyarakat pribumi.¹⁹⁴

Setelah pada 1909 *De Locomotief* menempatkan Boedi Oetomo sebagai salah satu pihak yang dapat membantu menyebarkan pengetahuan tentang malaria, pemberitaan tahun 1910 mengenai kolera memperkuat peran tersebut. Boedi Oetomo kembali dibayangkan sebagai jaringan kaum terdidik pribumi yang mampu menjembatani pengetahuan modern

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

dengan masyarakat kampung.¹⁹⁵ Artikel 22 Maret 1910 menunjukkan bahwa bagi *De Locomotief*, kemajuan pribumi tidak hanya berkaitan dengan pendidikan sekolah dan organisasi, tetapi juga dengan kemampuan kaum terdidik seperti Boedi Oetomo untuk menyebarkan pengetahuan kesehatan kepada rakyat. Dengan demikian, Boedi Oetomo diposisikan sebagai bagian dari proyek sosial *Politik Etis* yang bertujuan membentuk masyarakat pribumi yang lebih sehat, terdidik, dan tertib.



Gambar 4.26 "Boedi Oetomo en het Volksonderwijs"

Sumber: *De Locomotief* 1 Agustus 1910

Pemberitaan *De Locomotief* pada 1 Agustus 1910 mengenai Boedi Oetomo dan pendidikan publik memperlihatkan adanya perubahan nada dalam cara surat kabar ini memandang organisasi tersebut. Jika pada tahun 1908 Boedi Oetomo dibingkai secara positif sebagai tanda munculnya kesadaran intelektual kaum muda Jawa, maka pada 1910 *De Locomotief* mulai menyoroti persoalan internal organisasi, terutama pergeseran dari semangat pendidikan rakyat menuju gagasan "pembangunan dari atas".¹⁹⁶ Artikel ini menilai bahwa pada kongres pertama Boedi Oetomo masih tampak kuat dalam memperjuangkan pendidikan dasar bagi masyarakat umum, tetapi pada kongres kedua mulai muncul perbedaan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *De Locomotief*, 1 Agustus 1910.

pandangan yang menunjukkan melemahnya kesatuan dan kepemimpinan organisasi. Dengan demikian, koran ini mulai membedakan antara Boedi Oetomo sebagai cita-cita awal kaum muda terdidik dengan Boedi Oetomo sebagai organisasi yang mulai dipengaruhi unsur aristokrat dan kepentingan elite.¹⁹⁷

Kritik utama *De Locomotief* diarahkan pada bergesernya dasar gerakan dari pendidikan publik menuju pembangunan yang lebih elitis. Artikel tersebut menilai bahwa Boedi Oetomo pada dasarnya memiliki watak demokratis dan “nasional-Hindia”, karena sejak awal membawa gagasan pembebasan spiritual rakyat melalui pendidikan.¹⁹⁸ Namun, masuknya tokoh-tokoh aristokrat dan pejabat tinggi pribumi dianggap dapat melemahkan arah tersebut. Bagi *De Locomotief*, kaum bangsawan dan pejabat tinggi tidak selalu cocok memimpin gerakan pendidikan rakyat karena posisi sosial mereka justru sering bergantung pada hierarki adat, kepatuhan, dan hak istimewa lama. Dengan kata lain, pendidikan rakyat dipandang berpotensi mengancam tatanan sosial feodal yang selama ini menopang kedudukan elite pribumi.¹⁹⁹

Bagian ini penting karena memperlihatkan bahwa *De Locomotief* masih mempertahankan perhatian etisnya terhadap pendidikan rakyat, tetapi juga mulai waspada terhadap arah politik Boedi Oetomo. Artikel tersebut menyebut bahwa impian masa depan yang bernuansa nasionalis dan politis dapat melemahkan posisi organisasi karena menjauhkannya dari kewajiban praktis. Dalam pandangan koran ini, Boedi Oetomo seharusnya tidak terlalu luas dalam mengambil agenda, melainkan berkonsentrasi pada satu program utama: pendidikan publik.²⁰⁰ Jadi, kritik *De Locomotief* bukan terhadap keberadaan Boedi Oetomo itu sendiri, melainkan terhadap kemungkinan organisasi tersebut kehilangan

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

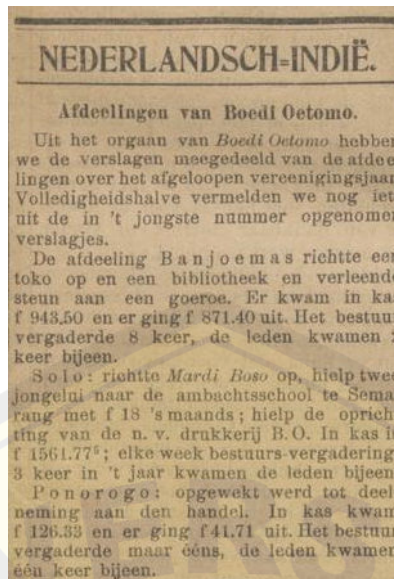
fokus dan berubah dari gerakan pendidikan menjadi gerakan yang terlalu politis atau terlalu elitis.

Dengan demikian, artikel tahun 1910 ini menunjukkan batas dukungan *De Locomotief* terhadap gerakan pribumi. Boedi Oetomo diterima ketika tampil sebagai gerakan pendidikan yang moderat, praktis, dan berguna bagi kemajuan sosial. Namun, ketika organisasi tersebut mulai menunjukkan kecenderungan nasionalis, politis, atau dipengaruhi elite aristokrat, *De Locomotief* mulai memberi kritik. Sikap ini memperlihatkan karakter etis-liberal koran tersebut: mendukung kemajuan pribumi, tetapi menghendaki kemajuan itu tetap berjalan secara tertib, bertahap, dan tidak menantang struktur kolonial secara langsung. Ini nyambung dengan proposal lu yang memang menempatkan Boedi Oetomo dalam pemberitaan *De Locomotief* sebagai bagian dari kemunculan kaum pribumi terpelajar setelah *Politik Etis*.²⁰¹

Setelah dalam pemberitaan kolera Boedi Oetomo ditempatkan sebagai organisasi yang dapat membantu penyebaran pengetahuan kesehatan kepada rakyat, artikel 1 Agustus 1910 memperlihatkan sisi lain dari framing *De Locomotief*: organisasi ini mulai dikritik ketika dianggap menjauh dari agenda pendidikan rakyat dan terlalu dipengaruhi oleh gagasan pembangunan dari atas serta unsur elite pribumi.²⁰²

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*



Gambar 4.27 "Afdeelingen van Boedi Oetomo"

Sumber: *De Locomotief* 25 Oktober 1911

Pemberitaan *De Locomotief* pada 25 Oktober 1911 mengenai seksi-seksi Boedi Oetomo memperlihatkan bahwa organisasi tersebut telah berkembang dari gerakan kaum muda terdidik menjadi jaringan sosial yang memiliki aktivitas konkret di berbagai daerah. Artikel ini memuat laporan sejumlah cabang seperti Banjoemas, Solo, Ponorogo, Karanganyar, Bandung, Pekalongan, Kediri, Yogyakarta, dan Madioen.²⁰³ Kegiatan yang disebutkan meliputi pendirian toko, perpustakaan, perkumpulan membaca, kursus bahasa Belanda, bantuan pendidikan bagi pemuda, perusahaan percetakan, dana bantuan sakit, dana kematian, serta usaha perdagangan kecil. Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai Boedi Oetomo bukan lagi hanya sebagai gagasan kemajuan, tetapi sebagai organisasi yang mulai membangun infrastruktur sosial dan pendidikan bagi masyarakat pribumi.²⁰⁴

Pemberitaan ini juga menunjukkan bahwa perhatian Boedi Oetomo tetap berada pada bidang-bidang yang sejak awal dianggap sesuai dengan semangat *Politik Etis*, yaitu pendidikan, pembacaan, bahasa Belanda, bantuan sosial, dan peningkatan kemampuan

²⁰³ *De Locomotief*, 25 Oktober 1911.

²⁰⁴ *Ibid.*

ekonomi. Cabang Yogyakarta, misalnya, disebut menyelenggarakan kursus bahasa Belanda bagi kaum muda, membentuk perkumpulan membaca, mendirikan dana bantuan sakit dan kematian, serta mengembangkan perpustakaan dan usaha kecil. Aktivitas semacam ini memperlihatkan bahwa Boedi Oetomo berusaha menerjemahkan gagasan kemajuan ke dalam praktik sosial yang lebih nyata. Dalam sudut pandang *De Locomotief*, bentuk kegiatan seperti ini membuat Boedi Oetomo tetap dapat diterima sebagai gerakan pribumi yang tertib, praktis, dan bermanfaat.²⁰⁵

Artikel ini penting karena memperlihatkan kesinambungan sekaligus batas perkembangan Boedi Oetomo dalam framing *De Locomotief*. Kesinambungannya tampak dari tetap kuatnya perhatian pada pendidikan dan pembentukan kaum terdidik. Batasnya tampak dari karakter kegiatan yang masih berada dalam ranah sosial-kultural dan ekonomi kecil, bukan gerakan politik konfrontatif.²⁰⁶ Dengan kata lain, *De Locomotief* melihat Boedi Oetomo sebagai organisasi yang berguna sejauh bergerak dalam bidang pendidikan, bantuan sosial, dan penguatan masyarakat Jawa secara bertahap. Sikap ini sejalan dengan kecenderungan etis koran tersebut: mendukung kemajuan pribumi, tetapi lebih menerima bentuk kemajuan yang moderat, terorganisasi, dan tidak mengganggu tatanan kolonial secara langsung.²⁰⁷

Dengan demikian, artikel tahun 1911 dapat dipakai sebagai penutup awal pemberitaan Boedi Oetomo dalam *De Locomotief*. Setelah sebelumnya organisasi ini diberitakan sebagai hasil kesadaran kaum muda Jawa, sebagai penyelenggara kongres, sebagai jaringan penyebaran pengetahuan kesehatan, dan sebagai gerakan yang mulai dikritik ketika dianggap menjauh dari pendidikan rakyat, laporan seksi-seksi tahun 1911 menunjukkan hasil praktis dari organisasi tersebut.²⁰⁸ Boedi Oetomo diposisikan sebagai

²⁰⁵ *Ibid.*

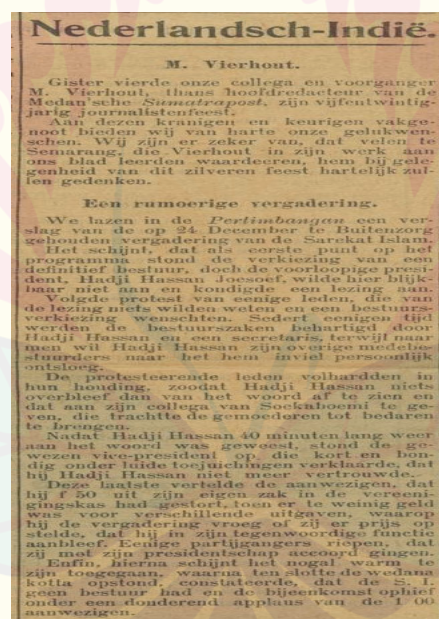
²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

bagian dari proyek kemajuan pribumi yang bekerja melalui pendidikan, literasi, bantuan sosial, dan kegiatan ekonomi. Namun, penerimaan *De Locomotief* terhadap organisasi ini tetap bersyarat: Boedi Oetomo dipandang positif selama tetap berada dalam jalur sosial-edukatif dan tidak berubah menjadi gerakan politik radikal.²⁰⁹

Secara umum, pemberitaan *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo pada 1908-1911 memperlihatkan sikap yang cenderung simpatik tetapi tetap selektif. Koran ini menerima Boedi Oetomo sebagai tanda kemajuan kaum pribumi terdidik dan sebagai kelanjutan dari cita-cita *Politik Etis* dalam bidang pendidikan. Namun, dukungan tersebut memiliki batas, Boedi Oetomo dipuji ketika bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, literasi, dan bantuan sosial, tetapi mulai dikritik ketika dianggap terlalu elitis, terlalu luas dalam cita-cita, atau mendekati arah nasional-politik.²¹⁰ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai Boedi Oetomo sebagai gerakan pribumi yang sah selama tetap moderat, edukatif, dan berguna bagi pembangunan sosial dalam kerangka kolonial



Gambar 4.28 "Een rumoerige vergadering"

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

Sumber: *De Locomotief* 16 November 1912

Sesudah fase awal Boedi Oetomo, perkembangan gerakan pribumi memasuki tahap yang lebih kompleks pada 1912-1916. Jika Boedi Oetomo masih banyak bergerak dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemajuan sosial kaum priyayi Jawa, maka kemunculan Sarekat Islam dan Indische Partij memperlihatkan bentuk gerakan yang lebih luas dan politis.²¹¹ Sarekat Islam berkembang dari Sarekat Dagang Islam dan kemudian mengalami reorganisasi di bawah kepemimpinan R.M. Oemar Said Tjokroaminoto pada 1912. Berbeda dengan Boedi Oetomo yang lebih terbatas pada kalangan priyayi dan terpelajar Jawa, Sarekat Islam memiliki basis massa yang jauh lebih luas, baik di kota maupun pedesaan.²¹² Perubahan ini penting karena memperlihatkan pergeseran gerakan pribumi dari organisasi sosial-edukatif menuju organisasi massa yang mampu menghimpun dukungan rakyat dalam skala besar.

Dalam konteks ini, *De Locomotief* mulai berhadapan dengan bentuk gerakan pribumi yang berbeda dari Boedi Oetomo. Sarekat Islam pada awalnya masih dapat dipahami sebagai gerakan yang bergerak dalam bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Selama organisasi ini menunjukkan sikap loyal dan tidak secara langsung menantang pemerintah kolonial, posisinya belum dipandang sebagai ancaman sebesar gerakan politik radikal.²¹³ Hal ini berbeda dengan Indische Partij yang sejak awal mengusung gagasan nasionalisme politik dengan semboyan “Indie voor de Indiers”. Melalui Indische Partij, tuntutan persamaan hak dan kritik terhadap diskriminasi kolonial mulai mengambil bentuk politik yang lebih terbuka. Perbedaan inilah yang membuat respons terhadap gerakan pribumi tidak lagi sesederhana pada masa Boedi Oetomo.²¹⁴

²¹¹ *De Locomotief*, 16 November 1912.

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *De Locomotief*, 20 Desember 1912.



Gambar 4.29 "De S.I. Leider"

Sumber: *De Locomotief* 20 Desember 1912

Sarekat Islam muncul dari Sarekat Dagang Islam, suatu organisasi dagang Islam yang membela kepentingan saudagar-saudagar Jawa terhadap saudagar Tionghoa di Surakarta. Pada September 1912, R.M. Oemar Said Tjokroaminoto yang merupakan seorang priyayi memimpin untuk reorganisasi dan penyusunan anggaran dasar baru. Sarekat Islam berbeda dengan Boedi Oetomo yang sasarannya adalah kelompok bangsawan atau priyayi Jawa.²¹⁵ Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang memiliki keanggotaan massal di kalangan penduduk Indonesia. Kegiatannya memiliki skala yang lebih luas dibandingkan dengan Boedi Oetomo. Selain menuntut agar pendidikan lebih baik juga bertujuan untuk memajukan agama Islam dan meningkatkan taraf ekonomi anggota.²¹⁶

Perubahan sikap pemerintah kolonial terhadap pers dan organisasi politik mulai tampak sejak 1913. Munculnya Sarekat Islam, Indische Partij, serta surat kabar seperti *Sinar Djawa* dan *Oetoesan Hindia* menimbulkan kekhawatiran baru mengenai tulisan-tulisan yang dianggap menghasut.²¹⁷ Dalam iklim tersebut, pengawasan terhadap barang cetakan dan pers mulai diperketat. Pemerintah kolonial memandang bahwa gerakan politik dan pers pribumi dapat menjadi saluran penyebaran gagasan yang melampaui batas yang dianggap aman.²¹⁸

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 106-107.

²¹⁸ *De Locomotief*, 20 Desember 1912.

Dengan demikian, periode ini menunjukkan bahwa perkembangan organisasi pribumi tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga mengubah cara pemerintah dan pers kolonial memandang kebebasan berbicara.

Kasus Indische Partij memperlihatkan batas dukungan *De Locomotief* terhadap gerakan pribumi. Koran ini pada dasarnya dapat menerima gagasan pencerahan penduduk dan kemajuan Hindia, tetapi tidak sepaham dengan cara politik yang digunakan Douwes Dekker dan kawan-kawan. Brosur Soewardi Soerjaningrat “Als ik eens Nederlander was” memicu respons keras pemerintah karena dianggap bukan hanya radikal, tetapi juga menyerang kehormatan rasial orang Belanda.²¹⁹ *De Locomotief* menilai bahwa tindakan pemerintah terhadap gerakan ini dapat dipahami sebagai upaya mencegah kekerasan yang lebih besar. Namun, pada saat yang sama, koran ini juga menganggap pengerahan aparat dalam jumlah besar untuk menangkap Soewardi dan Tjipto sebagai tindakan yang berlebihan karena keduanya tidak melakukan perlawanan. Sikap ini menunjukkan posisi khas *De Locomotief*: mengkritik ekses pemerintah, tetapi tetap menerima kebutuhan menjaga ketertiban kolonial.²²⁰

Penilaian *De Locomotief* terhadap Douwes Dekker juga memperlihatkan perbedaan antara kemajuan pribumi yang dianggap sah dan radikalisme politik yang dianggap berbahaya. Douwes Dekker dipandang sebagai tokoh yang terlalu keras dan penuh dendam terhadap Belanda, sedangkan tulisan Soewardi dianggap merusak dan menghina.²²¹ Dengan demikian, *De Locomotief* tidak menolak seluruh gagasan kemerdekaan atau pencerahan Hindia, tetapi menolak bentuk kritik yang dianggap provokatif, konfrontatif, dan berpotensi merusak gerakan rakyat yang masih dipandang baik, seperti Sarekat Islam yang loyal dan kaum etis.²²² Ini memperlihatkan bahwa dukungan *De Locomotief* terhadap gerakan pribumi

²¹⁹ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 109.

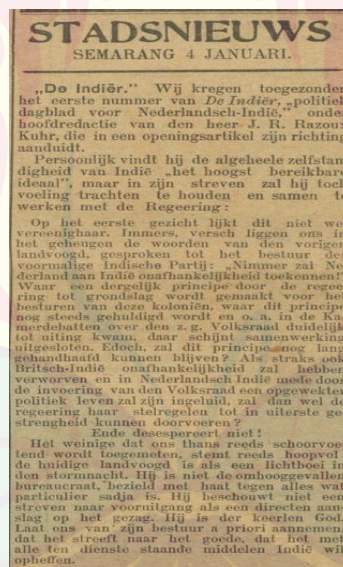
²²⁰ *De Locomotief*, 1 Agustus dan 7 Agustus 1913.

²²¹ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 110.

²²² *Ibid.* hlm. 115.

bersifat selektif: gerakan moderat diterima, sedangkan gerakan politik yang radikal mulai dipandang sebagai ancaman.

Perkembangan tersebut semakin jelas dalam pemberitaan mengenai H. Sneevliet dan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging pada 1915. ISDV, yang didirikan pada 1914, membawa corak sosial-demokrat dan kemudian semakin dekat dengan gagasan Marxisme.²²³ Pertemuan umum yang diselenggarakan Sneevliet di Semarang untuk memprotes penahanan jurnalis Marco²²⁴ menunjukkan bahwa ruang politik dan pers mulai menjadi tempat pertemuan antara sosialisme, aktivisme buruh, dan kritik terhadap pemerintah kolonial. Dalam hal ini, *De Locomotief* bersama beberapa surat kabar Eropa lain bersikap kritis terhadap ISDV dan mendesak agar Sneevliet dibatasi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa *De Locomotief* semakin waspada terhadap gerakan yang dianggap radikal dan dapat mengganggu ketertiban kolonial.



²²³ *Ibid.*

²²⁴ Mas Marco Kartodikromo (1890–1932) adalah seorang jurnalis radikal, sastrawan, dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dari awal abad ke-20. Dikenal sebagai pelopor "bacaan liar" di luar penerbitan resmi Belanda, ia kerap menggunakan penanya untuk mengkritik kolonialisme dan menyuarakan nasionalisme. Lihat Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 126.

Gambar 4.30 "De Indier"**Sumber:** *De Locomotief* 4 Januari 1917

Pemberitaan *De Locomotief* pada 4 Januari 1917 mengenai terbitnya surat kabar *De Indiër* memperlihatkan bahwa ruang politik Hindia Belanda pada akhir periode 1908-1917 telah berkembang lebih jauh dibandingkan masa awal Boedi Oetomo. Dalam artikel tersebut, *De Locomotief* menyoroti arah politik *De Indiër* yang dipimpin J.R. Razoux Kuhr, terutama gagasan mengenai kemerdekaan penuh Hindia Belanda sebagai cita-cita tertinggi. Namun, gagasan tersebut tetap dikaitkan dengan kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah. Di sinilah terlihat bahwa isu kemerdekaan mulai masuk ke dalam wacana pers kolonial, meskipun masih dibicarakan dalam batas yang hati-hati dan penuh pertimbangan.²²⁵ *De Locomotief* sendiri tidak langsung menolak kehadiran surat kabar baru tersebut, tetapi menempatkannya sebagai bagian dari "paduan suara publik Hindia" yang wajar hadir dalam kehidupan politik yang semakin berkembang.

Bagian penting dari artikel ini adalah keterkaitannya dengan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. *De Locomotief* membaca munculnya Volksraad sebagai tanda bahwa kehidupan politik di Hindia Belanda mulai memperoleh bentuk baru, walaupun ruang yang diberikan masih terbatas.²²⁶ Pernyataan bahwa "sedikit yang saat ini dialokasikan kepada kita sudah penuh harapan" menunjukkan bahwa koran ini melihat Volksraad sebagai langkah awal yang dapat membuka kemungkinan perubahan politik lebih lanjut. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak memandang politik sebagai sesuatu yang sepenuhnya harus dihindari, tetapi sebagai kenyataan baru yang harus dikelola dalam perkembangan Hindia Belanda.²²⁷

²²⁵ *De Locomotief*, 4 Januari 1917.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*



Gambar 4.31 "Organisatie"

Sumber: *De Locomotief* 5 Januari 1917

Pemberitaan *De Locomotief* pada 5 Januari 1917 memperlihatkan bahwa perkembangan organisasi pribumi telah menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai masa depan politik Hindia Belanda. Dalam artikel ini, Sarekat Islam disebut sebagai salah satu manifestasi utama dari berbagai sentimen dan aspirasi di dunia pribumi. Berbeda dari Boedi Oetomo yang lebih banyak dikaitkan dengan pendidikan dan kemajuan sosial kaum terdidik Jawa, Sarekat Islam dipahami memiliki tujuan yang lebih luas, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama.²²⁸ Dengan demikian, *De Locomotief* mulai melihat gerakan pribumi bukan lagi sebagai gejala pendidikan semata, tetapi sebagai kekuatan sosial yang membawa tuntutan lebih kompleks dalam kehidupan kolonial.

Dalam aspek politik, artikel tersebut menghubungkan aspirasi organisasi pribumi dengan partisipasi penduduk asli dalam administrasi negara. Langkah awal ke arah tersebut disebut melalui pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. Ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* melihat Volksraad sebagai bentuk awal keterlibatan politik pribumi, meskipun masih terbatas dalam kerangka kolonial.²²⁹ Aspirasi politik pribumi tidak langsung ditolak,

²²⁸ *De Locomotief*, 5 Januari 1917.

²²⁹ *Ibid.*

selama diarahkan melalui lembaga yang sah dan bertahap. Dengan kata lain, koran ini menerima gagasan partisipasi politik pribumi, tetapi tetap membayangkannya dalam bentuk yang teratur, konstitusional, dan tidak revolusioner.

Sikap tersebut tampak jelas dalam pandangan bahwa pemerintah sebaiknya tetap mengambil posisi liberal terhadap gerakan-gerakan pribumi selama gerakan tersebut tidak memiliki watak revolusioner. Artikel ini menekankan perlunya memberi kesempatan kepada berbagai kelompok untuk berkembang dalam lingkungannya masing-masing, sekaligus menangani keluhan yang wajar secepat mungkin.²³⁰ Gagasan ini penting karena menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak mendukung penindasan buta terhadap organisasi pribumi. Sebaliknya, koran ini mendorong pemerintah agar merespons aspirasi yang sah sebelum berubah menjadi tuntutan keras atau ancaman.

Namun, artikel ini juga memperlihatkan batas dukungan *De Locomotief*. Gerakan yang dianggap tidak revolusioner masih dapat diterima, sedangkan organisasi seperti Indische Partij tetap dipandang berbahaya. Hal ini mempertegas pola sikap yang telah muncul sejak pembahasan Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV: *De Locomotief* mendukung kemajuan pribumi, tetapi membedakan secara tegas antara gerakan moderat dan gerakan yang dianggap radikal.²³¹ Sarekat Islam dapat dibaca sebagai gerakan yang masih mungkin diajak masuk dalam jalur perkembangan politik kolonial, sementara Indische Partij dan kemudian ISDV lebih mudah ditempatkan dalam kategori ancaman terhadap stabilitas.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*



Gambar 4.32 "Het Vierde I.S.D.V. congres"

Sumber: *De Locomotief* 29 Mei 1917

Pemberitaan *De Locomotief* pada 29 Mei 1917 mengenai Kongres I.S.D.V. Keempat memperlihatkan bahwa ruang politik Hindia Belanda semakin kompleks menjelang akhir periode 1908-1917. Jika sebelumnya Volksraad dibicarakan sebagai saluran awal partisipasi politik yang masih dapat dikendalikan dalam kerangka kolonial, maka pemberitaan mengenai I.S.D.V. menunjukkan munculnya kekuatan politik yang lebih radikal dan terorganisasi.²³² Kongres tersebut membahas tindakan Sneevliet dan Baars, hubungan dengan S.D.A.P. di Belanda, penerbitan *Het Vrije Woord*, serta kemungkinan pencalonan Westerveld untuk Volksraad. Dengan demikian, politik Hindia tidak lagi hanya diisi oleh organisasi sosial-edukatif seperti Boedi Oetomo atau gerakan massa seperti Sarekat Islam, tetapi juga oleh organisasi kiri yang mulai menghubungkan pers, sosialisme, gerakan buruh, dan representasi politik.²³³

²³² *De Locomotief*, 29 Mei 1917.

²³³ *Ibid.*

Hal penting dalam pemberitaan ini adalah hubungan antara I.S.D.V., *Het Vrije Woord*, Sarekat Islam Semarang, dan Volksraad. Penyebutan Semaun atas nama Sarekat Islam Semarang yang menghargai pencalonan Westerveld menunjukkan adanya titik temu antara kelompok sosialis dan unsur Sarekat Islam. Ini penting karena memperlihatkan bahwa pada 1917 gerakan politik pribumi dan gerakan kiri Eropa tidak sepenuhnya terpisah.²³⁴ Keduanya mulai bersinggungan dalam ruang politik kolonial, terutama melalui isu perwakilan, pers, dan organisasi massa. Dalam konteks ini, *De Locomotief* mencatat perkembangan tersebut sebagai bagian dari perubahan suasana politik Hindia yang semakin terbuka, tetapi juga semakin sulit dikendalikan.

Pemberitaan ini juga memperlihatkan bagaimana I.S.D.V. berusaha membela diri dari tuduhan menghasut perlawanan penduduk pribumi yang dianggap belum waktunya. Pernyataan bahwa organisasi maupun para pemimpinnya tidak bermaksud mendorong perlawanan prematur menunjukkan bahwa tuduhan radikalisme sudah melekat pada I.S.D.V. sejak awal.²³⁵ Dengan demikian, artikel ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa gerakan kiri mulai diposisikan dalam ruang kecurigaan politik kolonial. Bagi *De Locomotief*, perkembangan seperti ini berbeda dari Boedi Oetomo yang masih dapat diterima sebagai gerakan pendidikan dan kemajuan sosial. I.S.D.V. membawa warna baru yang lebih politis, ideologis, dan berpotensi mengganggu batas aman politik kolonial.²³⁶

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*



Gambar 4.33 "Sarikat Islam contra I.S.D.V."

Sumber: *De Locomotief* 14 September 1917

Pemberitaan *De Locomotief* pada 14 September 1917 mengenai pertemuan Sarekat Islam versus I.S.D.V. dapat dibaca sebagai penutup penting bagi fase perkembangan gerakan pribumi tahun 1908-1917. Jika pada awal periode ini *De Locomotief* banyak menampilkan Boedi Oetomo sebagai gerakan kaum muda Jawa yang bergerak dalam pendidikan dan kemajuan sosial, maka pada 1917 perhatian bergeser pada konflik antara organisasi massa dan gerakan kiri.²³⁷ Pertemuan di Surabaya tersebut memperlihatkan ketegangan antara Sarekat Islam Pusat, yang diwakili oleh tokoh seperti Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis, dengan I.S.D.V. yang diwakili oleh Baars dan Hartogh. Konflik ini menunjukkan bahwa gerakan pribumi tidak lagi hanya berkaitan dengan pendidikan, organisasi sosial, atau perbaikan ekonomi, tetapi telah memasuki pertarungan ideologi yang lebih tajam.²³⁸

Dalam pemberitaan tersebut, Sarekat Islam tampil sebagai organisasi massa yang berusaha mempertahankan otoritasnya dari pengaruh I.S.D.V. Abdoel Moeis menuduh I.S.D.V. melakukan serangan terhadap dirinya, Tjokroaminoto, dan Sarekat Islam Pusat,

²³⁷ *De Locomotief*, 14 September 1917.

²³⁸ *Ibid.*

serta berusaha menabur perselisihan dalam tubuh organisasi.²³⁹ Tjokroaminoto kemudian memperingatkan hadirin agar tidak mengikuti pengaruh I.S.D.V. dan menegaskan pilihan antara Sarekat Islam dan I.S.D.V. Seruan hadirin yang memilih mengikuti Sarekat Islam menunjukkan bahwa dalam pertemuan tersebut SI masih memiliki legitimasi kuat di hadapan massa pribumi.²⁴⁰ Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai peristiwa ini sebagai pertanda bahwa hubungan antara Sarekat Islam dan I.S.D.V. tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk kerja sama.

Artikel ini penting karena memperlihatkan batas antara gerakan pribumi moderat dan gerakan radikal dalam pemberitaan *De Locomotief*. Sarekat Islam, meskipun telah menjadi organisasi massa yang luas, masih dapat dibaca sebagai kekuatan pribumi yang memiliki struktur kepemimpinan dan arah politik yang relatif dapat dikenali.²⁴¹ Sebaliknya, I.S.D.V. tampil sebagai organisasi yang membawa unsur sosialisme radikal dan dianggap berusaha memengaruhi gerakan pribumi dari dalam. Konflik ini memperlihatkan bahwa pada akhir periode 1908-1917, gerakan rakyat di Hindia Belanda mulai memasuki fase baru, yaitu fase ketika organisasi massa, pers politik, sosialisme, dan kepentingan representasi mulai saling bertemu dan berbenturan.²⁴²

Pada periode 1908-1917, pemberitaan *De Locomotief* memperlihatkan perubahan penting dalam cara surat kabar ini memandang gerakan pribumi. Jika pada periode 1901-1907 penduduk pribumi lebih sering hadir sebagai objek pembelaan dalam wacana *Politik Etis*, maka sejak kemunculan Boedi Oetomo pada 1908, kaum pribumi terdidik mulai tampil sebagai aktor yang menyusun agenda kemajuannya sendiri. Boedi Oetomo diberitakan sebagai hasil dari tumbuhnya kesadaran baru di kalangan pelajar dan kaum terdidik Jawa, terutama dalam bidang pendidikan, persatuan, kesehatan, literasi, dan bantuan sosial. Dalam

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

hal ini, *De Locomotief* cenderung memberi ruang positif karena Boedi Oetomo masih bergerak dalam batas yang dianggap aman, yaitu kemajuan sosial yang tertib dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah kolonial.

Namun, dukungan *De Locomotief* terhadap Boedi Oetomo tetap bersifat selektif. Koran ini memuji organisasi tersebut ketika bergerak dalam bidang pendidikan rakyat, penyebaran pengetahuan, kesehatan, perpustakaan, kursus bahasa, dan kegiatan sosial-ekonomi. Akan tetapi, ketika Boedi Oetomo mulai dianggap bergeser ke arah pembangunan dari atas, dipengaruhi unsur aristokrat, atau mendekati cita-cita nasional-politik yang lebih luas, *De Locomotief* mulai menunjukkan kritik. Dengan demikian, sikap koran ini terhadap Boedi Oetomo mencerminkan watak etis-liberal kolonial: mendukung kemajuan pribumi, tetapi menghendaki kemajuan itu tetap moderat, bertahap, dan berada dalam kerangka keteraturan kolonial.

Memasuki 1912-1916, perkembangan gerakan pribumi menjadi lebih kompleks. Kemunculan Sarekat Islam menunjukkan perubahan dari organisasi sosial-edukatif terbatas menuju organisasi massa dengan basis yang jauh lebih luas. Berbeda dari Boedi Oetomo yang banyak berakar pada kalangan priyayi dan terdidik Jawa, Sarekat Islam menjangkau masyarakat kota dan desa serta membawa kepentingan ekonomi, sosial, agama, dan politik. Dalam tahap ini, *De Locomotief* mulai menghadapi bentuk gerakan pribumi yang tidak lagi sekadar mendidik rakyat, tetapi juga mampu mengorganisasi massa. Selama gerakan seperti Sarekat Islam masih dipandang loyal dan tidak revolusioner, koran ini masih dapat menempatkannya sebagai bagian dari perkembangan politik yang dapat diarahkan melalui jalur legal.

Di sisi lain, kemunculan Indische Partij dan ISDV memperlihatkan batas toleransi *De Locomotief* terhadap gerakan pribumi dan gerakan radikal. Indische Partij, dengan gagasan “Hindia untuk orang Hindia”, serta tulisan Soewardi Soerjaningrat yang dianggap menyerang kehormatan Belanda, dipandang sebagai bentuk kritik yang terlalu provokatif. *De Locomotief* memang dapat mengkritik tindakan pemerintah yang berlebihan, tetapi tetap menerima perlunya menjaga ketertiban kolonial. Sikap serupa tampak dalam pemberitaan mengenai

Sneevliet dan ISDV, ketika sosialisme, pers politik, dan aktivisme buruh mulai dianggap sebagai unsur yang dapat mengganggu stabilitas politik.

Pada 1917, pemberitaan mengenai *De Indiër*, *Volksraad*, Sarekat Islam, dan ISDV menunjukkan bahwa ruang politik Hindia Belanda semakin terbuka sekaligus semakin rumit. *De Locomotief* mulai menerima bahwa partisipasi politik pribumi merupakan kenyataan baru yang tidak dapat diabaikan. *Volksraad* dipandang sebagai saluran awal yang memungkinkan keterlibatan politik secara bertahap dan legal. Namun, koran ini tetap membedakan antara gerakan yang tidak revolusioner dan gerakan yang dianggap radikal. Sarekat Islam masih dapat dilihat sebagai organisasi massa yang mungkin diarahkan ke jalur politik konstitusional, sedangkan ISDV ditempatkan dalam ruang kecurigaan karena membawa sosialisme, pers radikal, dan hubungan dengan gerakan buruh.

Dengan demikian, periode 1908-1917 menunjukkan pergeseran besar dalam pemberitaan *De Locomotief*: dari penerimaan terhadap gerakan pribumi edukatif seperti Boedi Oetomo menuju kewaspadaan terhadap organisasi massa, nasionalisme politik, sosialisme, dan radikalisme. Sikap koran ini tidak dapat disebut anti-pribumi secara mutlak, karena ia tetap memberi ruang kepada gerakan yang dianggap mendukung kemajuan, pendidikan, dan partisipasi legal. Namun, dukungan tersebut memiliki batas yang jelas. Gerakan pribumi diterima selama bergerak secara moderat, tertib, dan tidak revolusioner; sebaliknya, gerakan yang dianggap konfrontatif, radikal, atau mengancam otoritas kolonial mulai diberitakan dengan nada curiga.

4.2.3 Pemberitaan tentang organisasi komunisme dan radikalisme 1918-1927



Gambar 4.34 "De S.I. en de stakingen"

Sumber: *De Locomotief* 13 April 1918.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 13 April 1918 mengenai Sarekat Islam dan pemogokan memperlihatkan perubahan penting dalam cara koran ini membingkai gerakan pribumi setelah 1917. Jika pada fase Boedi Oetomo gerakan pribumi masih banyak dipahami sebagai gerakan pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial, maka pada 1918 perhatian mulai bergeser pada aksi massa, pemogokan, dan hubungan antara Sarekat Islam Semarang dengan tokoh sosialis seperti Sneevliet. Dalam artikel tersebut, Semaoen menulis kepada redaksi untuk membantah anggapan bahwa pemogokan-pemogokan yang terjadi di Semarang sepenuhnya dikendalikan oleh Sneevliet.²⁴³ Menurut Semaoen, aksi tersebut lahir dari tekanan sosial-ekonomi yang dirasakan rakyat, terutama tingginya biaya hidup dan beratnya kondisi kerja. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa gerakan pribumi mulai

²⁴³ *De Locomotief*, 13 April 1918.

memasuki ranah konflik sosial yang lebih langsung, yaitu hubungan antara buruh, organisasi massa, dan pengusaha.

Dalam pembelaannya, Semaoen menegaskan bahwa Sarekat Islam Semarang sejak 1916 telah berusaha mengajarkan pentingnya organisasi kepada para anggotanya agar mereka dapat bertindak secara kolektif untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Ia juga menyatakan bahwa dewan Sarekat Islam berupaya menjadi perantara antara pekerja yang mogok dan pihak pengusaha, tetapi sering kali tidak memperoleh tanggapan yang layak dari pihak yang berkuasa.²⁴⁴ Bagian ini penting karena memperlihatkan bahwa dari sudut pandang Sarekat Islam Semarang, pemogokan tidak dipahami sebagai tindakan liar semata, melainkan sebagai akibat dari tekanan ekonomi dan kegagalan saluran perundingan yang lebih tertib. Dengan kata lain, Semaoen berusaha mengembalikan sebab pemogokan kepada kondisi rakyat sendiri, bukan semata-mata kepada pengaruh tokoh sosialis Eropa.²⁴⁵

Namun, tanggapan redaksi *De Locomotief* menunjukkan posisi yang berbeda. Meskipun Semaoen membebaskan Sneevliet dari tuduhan sebagai penggerak langsung pemogokan, redaksi tetap menganggap Sneevliet sebagai pelaku utama secara ideologis. Koran ini menyatakan bahwa ajaran Sneevliet telah berpengaruh dan bahwa pemogokan merupakan “buah pahit” dari ajaran tersebut.²⁴⁶ Di sini terlihat bahwa *De Locomotief* mulai membingkai gerakan buruh dan aksi massa bukan hanya sebagai ekspresi penderitaan sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai akibat dari penyebaran gagasan radikal atau “anarkis”. Dengan demikian, koran ini tidak sepenuhnya menerima penjelasan Semaoen bahwa pemogokan lahir dari inisiatif rakyat sendiri.²⁴⁷

Artikel ini juga memperlihatkan batas dukungan *De Locomotief* terhadap Sarekat Islam. Ketika Sarekat Islam bergerak dalam bidang pendidikan, kemajuan sosial, atau

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

representasi politik yang tertib, koran ini masih dapat memahaminya dalam kerangka etis. Namun, ketika Sarekat Islam Semarang terlibat dalam pemogokan dan dekat dengan pengaruh ISDV/Sneevliet, *De Locomotief* mulai menuntut agar para pemimpin SI mengambil sikap lebih bertanggung jawab dan mengarahkan anggotanya pada aksi yang damai serta terorganisasi.²⁴⁸ Redaksi bahkan menilai bahwa dewan SI seharusnya tidak mendukung tindakan hanya karena tindakan itu sudah dimulai. Sikap ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* menerima organisasi pribumi selama mereka dianggap mendidik massa, tetapi menolak ketika organisasi tersebut membenarkan aksi massa yang dinilai tidak rasional atau merugikan ketertiban.²⁴⁹

Artikel ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* mulai memasuki fase pemberitaan yang lebih defensif terhadap gerakan pribumi, terutama ketika gerakan tersebut berhubungan dengan pemogokan, sosialisme, dan radikalisme kiri. Di satu sisi, koran ini masih mengakui adanya masalah sosial-ekonomi seperti tingginya biaya hidup dan buruknya hubungan antara pekerja dan pengusaha. Namun, di sisi lain, penyebab utama aksi massa tetap banyak dikaitkan dengan pengaruh Sneevliet dan ajaran radikal.²⁵⁰ Dengan demikian, framing *De Locomotief* mulai bergeser dari simpati terhadap kemajuan pribumi terdidik menuju kewaspadaan terhadap politik massa dan radikalisasi gerakan rakyat.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*



Gambar 4.35 "Derde Nationale Congres der C.S.I"

Sumber: *De Locomotief* 9 Oktober 1918

Pemberitaan *De Locomotief* pada 9 Oktober 1918 mengenai Kongres Nasional Ketiga C.S.I. memperlihatkan semakin jelasnya arah politik Sarekat Islam sebagai organisasi massa pribumi. Dalam kongres tersebut, Tjokroaminoto menyampaikan pidato mengenai pemerintahan mandiri, yang dipahami sebagai keadaan ketika Hindia Belanda tidak lagi diperlakukan sebagai milik negeri induk yang jauh. Pemerintahan mandiri diposisikan sebagai tuntutan zaman, didasarkan pada hak alamiah, hak asasi manusia, dan ajaran agama yang menuntut partisipasi setiap bangsa dalam pemerintahan negaranya.²⁵¹ Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa Sarekat Islam tidak lagi hanya bergerak dalam ruang sosial, ekonomi, atau keagamaan, tetapi mulai menempatkan tuntutan politik sebagai tujuan utama perjuangannya.²⁵²

Dalam pidato tersebut, pemerintahan mandiri dikaitkan dengan demokrasi dan kesetaraan. Tjokroaminoto menegaskan bahwa pemerintahan sendiri hanya dapat ditegakkan atas dasar persamaan hak, sementara rasa kesetaraan di kalangan penduduk pribumi masih dianggap belum berkembang sepenuhnya.²⁵³ Kritik terhadap kebiasaan sembah, jongkok,

²⁵¹ *De Locomotief*, 9 Oktober 1918.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

dan penggunaan bahasa yang memperkuat hierarki sosial menunjukkan bahwa perjuangan politik juga dipahami sebagai perjuangan mental dan sosial. Sarekat Islam tidak hanya menuntut perubahan kelembagaan, tetapi juga perubahan sikap rakyat agar tidak terus merasa sebagai pihak yang tunduk. Ini penting karena gagasan kebebasan politik dihubungkan dengan pembentukan kesadaran diri masyarakat pribumi.²⁵⁴

Pemberitaan ini juga memperlihatkan kritik terhadap lembaga desentralisasi kolonial, terutama dewan kota dan dewan daerah. Semaoen menilai bahwa dewan-dewan tersebut memberi sangat sedikit manfaat bagi penduduk pribumi karena lebih banyak bekerja untuk kepentingan orang Eropa dan pemerintah.²⁵⁵ Kritik ini menunjukkan bahwa Sarekat Islam tidak puas dengan bentuk representasi kolonial yang tersedia. Dewan-dewan kolonial dianggap belum mewakili penduduk secara adil, baik dari segi pemilihan maupun komposisi. Oleh karena itu, tuntutan hak pilih bagi penduduk laki-laki dewasa menjadi bagian penting dari agenda politik kongres.²⁵⁶

Selain tuntutan politik, kongres ini juga mengaitkan pemerintahan mandiri dengan persoalan sosial-ekonomi. Salah satu pembicara menyalahkan pemerintah atas kemiskinan penduduk karena dianggap tidak cukup melindungi rakyat dari eksploitasi pemilik pabrik dan kaum kapitalis yang menaikkan harga bahan pangan.²⁵⁷ Dengan demikian, sumber ini memperlihatkan bahwa gagasan pemerintahan mandiri tidak dipahami secara abstrak, melainkan dikaitkan dengan penderitaan rakyat, ketimpangan sosial, dan lemahnya perlindungan terhadap kaum kecil. Sarekat Islam mulai menampilkan politik sebagai jalan untuk memperoleh keadilan sosial.

Bagian akhir kongres memperjelas tuntutan politik C.S.I. melalui mosi yang diajukan, yaitu pengenalan pemerintahan mandiri secara cepat, pemberian hak pilih kepada semua

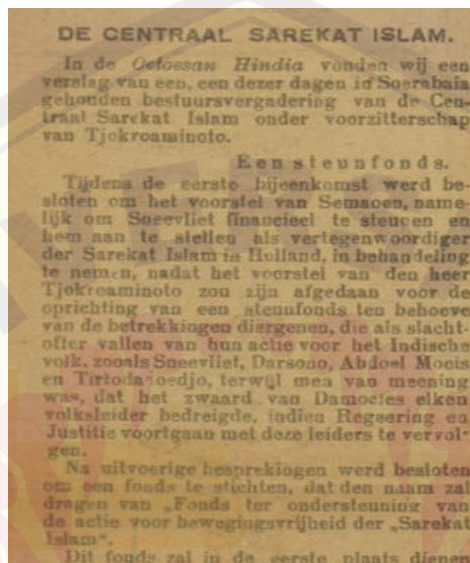
²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

penduduk laki-laki dewasa, penghapusan dewan regional, pemberian hak penyelidikan dan interpelasi kepada anggota Dewan Rakyat, serta perwakilan proporsional bagi kelompok-kelompok penduduk. Mosi ini menunjukkan bahwa Sarekat Islam telah memiliki tuntutan kelembagaan yang konkret. Mereka tidak hanya menyampaikan kritik umum terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga merumuskan agenda reformasi politik yang menysasar struktur representasi dan kekuasaan.²⁵⁸



Gambar 4.36 "De Centraal Sarekat Islam"

Sumber: *De Locomotief* 2 Januari 1919

Pemberitaan *De Locomotief* pada 2 Januari 1919 mengenai rapat dewan Sarekat Islam Sentral memperlihatkan bahwa hubungan antara Sarekat Islam, gerakan kiri, dan isu kebebasan politik semakin kompleks setelah 1918. Dalam rapat tersebut, dibahas usulan Semaoen untuk memberi dukungan kepada Sneevliet dan menunjuknya sebagai perwakilan Sarekat Islam di Belanda.²⁵⁹ Usulan ini muncul dalam konteks tindakan pemerintah terhadap para pemimpin gerakan, termasuk Sneevliet, Darsono, Abdoel Moeis, dan Tirta Adhi Soerjo. Dengan demikian, isu yang dibahas tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *De Locomotief*, 2 Januari 1919.

Sarekat Islam dan Sneevliet, tetapi juga menyangkut pembelaan terhadap ruang gerak politik organisasi pribumi yang dianggap semakin ditekan oleh pemerintah kolonial.²⁶⁰

Artikel ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam Sarekat Islam sendiri. Usulan Semaoen untuk memberi mandat kepada Sneevliet tidak diterima begitu saja, karena sayap kanan menilai bahwa penunjukan Sneevliet sebagai wakil Sarekat Islam di Belanda dapat melemahkan posisi organisasi di Hindia.²⁶¹ Kekhawatiran ini memperlihatkan bahwa di dalam Sarekat Islam terdapat ketegangan antara kelompok yang melihat Sneevliet sebagai sekutu dalam memperjuangkan kebebasan politik dan kelompok yang khawatir hubungan tersebut akan membuat Sarekat Islam semakin dicurigai sebagai organisasi radikal.²⁶² Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat Sarekat Islam bukan sebagai organisasi yang tunggal dan solid, tetapi sebagai arena perdebatan antara kecenderungan moderat dan radikal.

Bagian penting dari artikel ini adalah pembentukan dana yang disebut sebagai dana untuk mendukung aksi kebebasan gerakan Sarekat Islam. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu keluarga korban gerakan masyarakat pribumi tanpa membedakan keanggotaan organisasi maupun ras.²⁶³ Dalam konteks ini, Sarekat Islam tampak mulai membangun solidaritas politik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada anggota organisasi, tetapi juga pada orang-orang yang dianggap menjadi korban tindakan pemerintah kolonial. Hal ini memperlihatkan bahwa gerakan pribumi pada akhir 1910-an mulai mengembangkan jaringan dukungan terhadap aktivis, jurnalis, dan pemimpin politik yang berhadapan dengan represi pemerintah.²⁶⁴

²⁶⁰ *Ibid.*

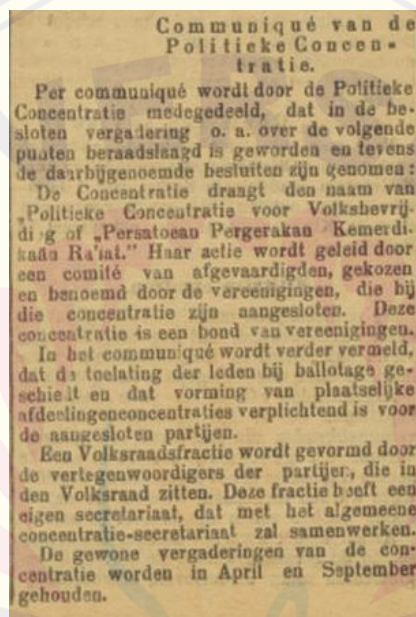
²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ *Ibid.*

Namun, dari sudut framing *De Locomotief*, sumber ini juga memperkuat kesan bahwa Sarekat Islam semakin dekat dengan arus radikal. Nama Sneevliet, Semaoen, Darsono, dan isu “kebebasan bergerak” menempatkan Sarekat Islam dalam lingkaran politik yang lebih keras dibandingkan fase awalnya. Jika pada 1917 *De Locomotief* masih melihat adanya jarak antara Sarekat Islam Pusat dan I.S.D.V., maka pada awal 1919 hubungan itu tampak menjadi lebih rumit. Dukungan terhadap Sneevliet menunjukkan bahwa sebagian unsur Sarekat Islam mulai melihat tokoh sosialis tersebut sebagai korban pembatasan politik kolonial, bukan semata sebagai penghasut radikal.²⁶⁵



Gambar 4.37 "Communiqué van de Politieke Concentratie"

Sumber: *De Locomotief* 31 Desember 1919

Pemberitaan *De Locomotief* pada 31 Desember 1919 mengenai pemogokan dan rapat pendirian Federasi Serikat Buruh memperlihatkan bahwa gerakan buruh mulai menjadi bagian penting dalam dinamika politik Hindia Belanda setelah 1918. Artikel ini membahas perdebatan mengenai bagaimana pemogokan seharusnya dilakukan dan dalam keadaan apa federasi buruh dapat memberikan dukungan. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya

²⁶⁵ *Ibid.*

perbedaan pandangan di antara kelompok radikal, sosialis moderat, dan unsur liberal.²⁶⁶ Kelompok yang lebih radikal menghendaki dukungan luas terhadap pemogokan, sedangkan kelompok yang lebih moderat menolak pemogokan yang dianggap sembrono atau tidak terorganisir. Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan bahwa gerakan buruh tidak bersifat tunggal, melainkan menjadi arena tarik-menarik antara strategi radikal dan kebutuhan organisasi yang lebih disiplin.²⁶⁷

Hal penting dalam pemberitaan ini adalah posisi Semaoen yang justru tampak mengambil jalan tengah. Ia menyarankan agar setiap konflik terlebih dahulu diberitahukan kepada dewan utama atau kepada Federasi Serikat Buruh, serta menegaskan bahwa pemogokan tidak boleh dilakukan pada setiap perselisihan tanpa pertimbangan matang.²⁶⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa di dalam gerakan buruh sendiri terdapat usaha untuk membangun disiplin organisasi. Pemogokan tidak lagi hanya dibayangkan sebagai tindakan spontan, tetapi mulai ditempatkan dalam mekanisme federasi, iuran, hak suara, hubungan antara cabang dan pusat, serta tata kelola organisasi. Dengan kata lain, gerakan buruh mulai memasuki tahap kelembagaan yang lebih jelas.²⁶⁹

Namun, cara *De Locomotief* menyebut tokoh-tokoh seperti Bergsma dan Semaoen sebagai kelompok “Bolshevik garis keras” memperlihatkan bahwa koran ini tetap membingkai gerakan buruh dalam bayang-bayang radikalisme kiri. Walaupun artikel tersebut mencatat adanya perdebatan dan upaya moderasi di dalam federasi, perhatian terhadap unsur Bolshevik menunjukkan kekhawatiran kolonial terhadap penyebaran gagasan revolusioner dalam organisasi buruh.²⁷⁰ Ini menjadi kelanjutan dari pemberitaan sebelumnya, ketika pemogokan dan Sarekat Islam Semarang sering dikaitkan dengan pengaruh Sneevliet

²⁶⁶ *De Locomotief*, 31 Desember 1919.

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

dan ISDV. Dengan demikian, *De Locomotief* melihat gerakan buruh sebagai kekuatan sosial baru yang tidak bisa diabaikan, tetapi juga sebagai ruang yang rentan terhadap pengaruh radikal.²⁷¹

Pembentukan dewan sementara dalam Federasi Serikat Buruh juga memperlihatkan proses institusionalisasi gerakan buruh. Terpilihnya Semaoen sebagai ketua sementara, bersama Bergsma dan Najoan dalam susunan kepengurusan, menunjukkan bahwa unsur kiri memiliki posisi penting dalam organisasi ini.²⁷² Walaupun beberapa keputusan masih bersifat sementara, rapat tersebut memperlihatkan usaha membangun struktur pusat, aturan keanggotaan, iuran, dan organ penerbitan. Dalam konteks ini, gerakan buruh tidak lagi hanya muncul sebagai reaksi terhadap kondisi kerja, tetapi mulai membentuk jaringan organisasi yang dapat mengoordinasikan aksi secara lebih luas.²⁷³

Gerakan buruh mulai tampil sebagai kekuatan yang terorganisasi, memiliki kepemimpinan, aturan, iuran, dan hubungan dengan gagasan sosialisme. Sikap *De Locomotief* terhadap gerakan ini cenderung waspada: di satu sisi koran ini mencatat adanya usaha membangun disiplin dan organisasi dalam pemogokan, tetapi di sisi lain tetap mengaitkannya dengan Bolshevisme dan radikalisme kiri.²⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa framing *De Locomotief* pada fase ini semakin bergerak dari simpati terhadap kemajuan sosial menuju kewaspadaan terhadap politik massa dan gerakan buruh radikal.

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*



Gambar 4.38 "Vakcentrale en staking"

Sumber: *De Locomotief* 4 Maret 1920

Pemberitaan *De Locomotief* pada 4 Maret 1920 mengenai Federasi Serikat Buruh memperlihatkan semakin jelasnya sikap curiga koran ini terhadap gerakan buruh yang berhubungan dengan sosialisme dan komunisme. Jika pada akhir 1919 *De Locomotief* masih mencatat adanya perdebatan internal mengenai cara melakukan pemogokan dan pembentukan organisasi buruh, maka dalam artikel ini koran tersebut secara terbuka menyebut Federasi Serikat Buruh sebagai organisasi yang memiliki tujuan komunis, revolusioner, dan Bolshevik. Perubahan nama dari "Federasi Serikat Buruh Sosialis Revolusioner" menjadi "Federasi Serikat Buruh" dipandang bukan sebagai perubahan arah, melainkan sebagai upaya penyamaran agar organisasi tersebut tampak lebih dapat diterima. Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai federasi buruh bukan sebagai wadah perjuangan ekonomi pekerja semata, tetapi sebagai organisasi politik radikal yang berbahaya bagi masyarakat Hindia Belanda.²⁷⁵

²⁷⁵ *De Locomotief*, 4 Maret 1920.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* menolak membedakan secara tajam antara aksi buruh dan agenda politik kiri. Dalam pandangan koran ini, pemogokan yang dilakukan oleh federasi buruh tidak lagi dipahami sebagai sarana perbaikan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari usaha merebut kekuasaan politik. Hal ini tampak dari cara redaksi mengaitkan federasi tersebut dengan tokoh-tokoh seperti Semaoen, Bergsma, Najoan, serta kelompok lama Sneevliet.²⁷⁶ Pernyataan mengenai komunalisasi alat produksi, kerja sama dengan kaum Bolshevik, dan penggunaan serikat buruh sebagai alat perjuangan politik dipakai *De Locomotief* untuk membuktikan bahwa gerakan buruh telah bergerak melampaui tuntutan ekonomi biasa. Dengan cara ini, pemogokan diposisikan sebagai ancaman terhadap ketertiban, bukan sebagai ekspresi sah dari penderitaan buruh.²⁷⁷

Sikap *De Locomotief* dalam artikel ini memperlihatkan batas yang semakin jelas dari liberalisme kolonialnya. Koran ini masih dapat menerima aksi perdagangan atau serikat buruh yang dianggap “sehat”, teratur, dan berorientasi pada perbaikan kondisi kerja. Namun, ketika gerakan buruh dikaitkan dengan revolusi, komunisme, dan Bolshevisme, koran ini menolak untuk mengakuinya sebagai pihak yang sah dalam pemogokan. Dengan demikian, dukungan terhadap kemajuan sosial dan ekonomi rakyat tidak berarti dukungan terhadap gerakan massa yang menantang struktur politik dan ekonomi kolonial. Di sini terlihat bahwa *De Locomotief* semakin membedakan antara perbaikan sosial yang reformis dan gerakan buruh yang dianggap revolusioner.²⁷⁸

Artikel ini juga penting karena memperlihatkan bagaimana *De Locomotief* menggunakan pengalaman kongres dan pernyataan tokoh-tokoh buruh untuk membangun citra bahwa Federasi Serikat Buruh merupakan organisasi berbahaya. Semaoen digambarkan sebagai tokoh yang mendorong hubungan dengan kaum Bolshevik, sementara Bergsma

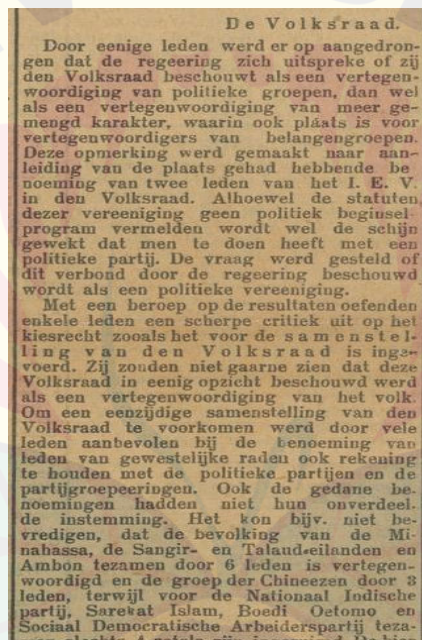
²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

disebut sebagai sosialis Bolshevik ekstrem.²⁷⁹ Susunan kepemimpinan federasi yang melibatkan Semaoen, Bergsma, dan Najoan dipakai sebagai bukti bahwa organisasi ini telah dikuasai unsur kiri radikal. Dengan demikian, redaksi tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga membangun argumentasi untuk meyakinkan pembaca bahwa gerakan buruh tersebut tidak dapat dipercaya sebagai gerakan ekonomi biasa.²⁸⁰

Jika pada masa Boedi Oetomo koran ini masih simpatik terhadap gerakan pribumi yang bergerak dalam pendidikan dan kemajuan sosial, maka pada awal 1920-an gerakan buruh kiri dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang berbahaya. Framing ini menunjukkan perubahan penting: *De Locomotief* tetap mempertahankan sikap reformis terhadap perbaikan sosial, tetapi menjadi semakin keras ketika gerakan rakyat memasuki wilayah pemogokan politik, komunisme, dan perjuangan kelas.²⁸¹



Gambar 4.39 "De Volksraad"

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*

Sumber: *De Locomotief* 19 Mei 1921

Pemberitaan *De Locomotief* pada 19 Mei 1921 mengenai pemerintah dan komunisme memperlihatkan bahwa sikap koran ini terhadap gerakan kiri semakin tegas dan defensif. Artikel tersebut membahas alasan pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap Ir. Baars, yang digambarkan sebagai seorang komunis dan ancaman bagi ketertiban umum.²⁸² *De Locomotief* menilai bahwa keputusan pemerintah memiliki dasar yang kuat karena Baars tidak hanya memiliki kecenderungan politik tertentu, tetapi dianggap menjalankan tindakan politik revolusioner. Dengan demikian, koran ini membedakan antara pandangan politik sebagai keyakinan dan tindakan revolusioner sebagai ancaman terhadap jalannya negara yang tertib.²⁸³

Dalam artikel ini, Baars digambarkan sebagai tokoh komunis yang berusaha membangkitkan kemarahan rakyat dan mengarahkannya untuk menggulingkan otoritas yang dianggap mewakili masyarakat kapitalis. Keterlibatannya dalam pembentukan dewan tentara, propagandanya melalui tulisan, serta hubungannya dengan Internasional Ketiga dipakai sebagai bukti bahwa aktivitasnya telah melampaui batas politik biasa. Dengan cara ini, *De Locomotief* membingkai komunisme bukan sekadar sebagai gagasan politik, tetapi sebagai gerakan internasional yang memiliki program aksi dan berpotensi memengaruhi massa di Hindia Belanda.²⁸⁴

Bagian penting dari pemberitaan ini adalah penekanan bahwa aksi Baars diarahkan kepada massa yang sebagian besar masih buta huruf. Pernyataan ini memperlihatkan corak paternalistik dalam cara *De Locomotief* memahami politik massa.²⁸⁵ Rakyat diposisikan sebagai kelompok yang mudah digerakkan oleh agitasi revolusioner, sementara tokoh komunis seperti Baars dianggap sebagai aktor yang menyebarkan pengaruh berbahaya.

²⁸² *De Locomotief*, 19 Mei 1921.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

Dengan demikian, koran ini tidak melihat radikalisme hanya sebagai ekspresi ketidakpuasan sosial, tetapi sebagai hasil agitasi politik yang dianggap mengancam ketertiban kolonial.²⁸⁶

Pemberitaan ini memperkuat kesinambungan dengan pemberitaan tahun 1919-1920 mengenai pemogokan dan Federasi Serikat Buruh. Jika sebelumnya *De Locomotief* menilai bahwa gerakan buruh telah disusupi unsur Bolshevik dan komunis, maka pada 1921 koran ini mendukung tindakan pemerintah terhadap salah satu tokoh yang dianggap mewakili bahaya tersebut.²⁸⁷ Sikap ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* semakin menerima pembatasan terhadap gerakan kiri ketika gerakan itu dinilai revolusioner. Dengan kata lain, liberalisme koran ini memiliki batas yang jelas: kebebasan politik dapat diterima selama tidak berubah menjadi propaganda revolusioner dan mobilisasi massa.²⁸⁸

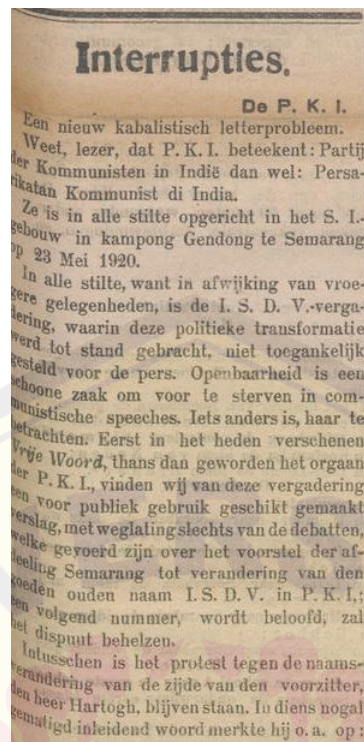
Dengan demikian, artikel 19 Mei 1921 menunjukkan bahwa pada fase 1918-1927 *De Locomotief* semakin membingkai komunisme sebagai ancaman terhadap stabilitas kolonial. Koran ini tidak lagi hanya mengkritik pemogokan atau organisasi buruh yang dianggap tidak tertib, tetapi mulai membenarkan tindakan pemerintah terhadap tokoh kiri yang dinilai berbahaya. Posisi ini memperlihatkan perubahan penting dari fase awal *Politik Etis*: *De Locomotief* tetap mendukung kemajuan sosial dan pendidikan pribumi, tetapi ketika gerakan rakyat berhubungan dengan komunisme, internasionalisme, dan revolusi, koran ini berpihak pada pemulihan ketertiban.²⁸⁹

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*



Gambar 4.40 "De P.K.I."

Sumber: *De Locomotief* 23 Juni 1922

Pemberitaan *De Locomotief* pada 23 Juni 1922 memperlihatkan bahwa koran ini mulai menyoroti pertentangan di dalam gerakan kiri Hindia Belanda, terutama antara demokrasi sosial yang diwakili SDAP Hindia dan komunisme yang dihubungkan dengan PKI. Dalam artikel tersebut, *De Locomotief* menggambarkan adanya persaingan antara "administrator resmi demokrasi sosial" dan kelompok komunis kolonial yang berpusat di Semarang.²⁹⁰ Pertentangan ini penting karena menunjukkan bahwa gerakan kiri tidak dipahami sebagai satu kesatuan, melainkan sebagai medan perebutan pengaruh terhadap gerakan pribumi. SDAP Hindia digambarkan berusaha mengarahkan gerakan rakyat melalui jalan demokrasi sosial, sedangkan kelompok Semaoen dan Bergsma diposisikan sebagai pihak yang menawarkan "kebahagiaan Bolshevik" kepada penduduk pribumi.²⁹¹

²⁹⁰ *De Locomotief*, 23 Juni 1922.

²⁹¹ *Ibid.*

Artikel ini juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* masih memandang gerakan pribumi sebagai pihak yang sedang diperebutkan oleh berbagai ideologi Eropa. Bahasa yang digunakan koran ini memperlihatkan sikap sinis terhadap kedua arus kiri tersebut. SDAP Hindia disebut seolah-olah hendak menggali jalan bagi gerakan pribumi dengan alat Marxis, sementara PKI digambarkan menarik penduduk menuju arah Bolshevik.²⁹² Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya mengkritik komunisme secara langsung, tetapi juga meragukan klaim kelompok sosialis Eropa yang menganggap diri mereka mampu membimbing gerakan pribumi. Koran ini tampak berharap bahwa gerakan pribumi tidak sepenuhnya mengikuti baik sosial-demokrasi maupun komunisme, melainkan menemukan jalannya sendiri di luar pengaruh Marx maupun Lenin.²⁹³

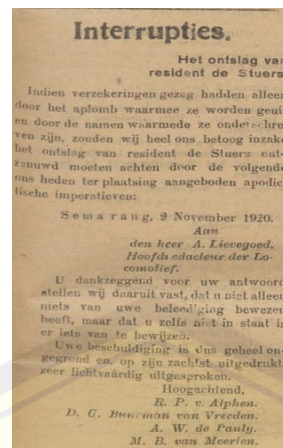
Bagian mengenai *Het Vrije Woord* juga penting karena memperlihatkan perubahan kelembagaan dari ISDV menuju PKI. Surat kabar tersebut disebut sebagai organ Partai Komunis di Hindia, dengan tokoh seperti Baars dan Bergsma dalam redaksi, sementara Semaon ditempatkan sebagai ketua dan Bergsma sebagai sekretaris.²⁹⁴ Pengakuan terhadap cabang seperti Boedi Moelja di Ternate menunjukkan bahwa organisasi komunis mulai membangun jaringan yang lebih luas. Dalam framing *De Locomotief*, perubahan nama dan struktur ini menandai bahwa komunisme bukan lagi sekadar pengaruh dalam serikat buruh atau Sarekat Islam, melainkan telah menjadi partai politik yang lebih jelas identitasnya.²⁹⁵

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*



Gambar 4.41 "Het ontslag van resident de stuers"

Sumber: *De Locomotief* 12 Maret 1923

Pemberitaan *De Locomotief* pada 12 April 1923 menunjukkan bahwa gerakan buruh di Hindia Belanda mulai meluas ke kelompok pekerja yang sebelumnya jarang menjadi pusat perhatian, seperti pekerja rumah tangga, pembantu, pengasuh, juru masak, dan pelayan hotel. Dalam laporan dari Surabaya, disebutkan adanya pertemuan di Standard Park yang bertujuan mendirikan serikat pekerja bagi kelompok-kelompok tersebut.²⁹⁶ Besarnya minat peserta menunjukkan bahwa gagasan berserikat tidak hanya berkembang di kalangan buruh industri, percetakan, pelabuhan, atau pabrik, tetapi juga mulai masuk ke sektor kerja domestik dan jasa. Dengan demikian, sumber ini memperlihatkan bahwa pada awal 1920-an politik massa dan organisasi buruh semakin menjangkau lapisan sosial yang lebih luas.²⁹⁷

Artikel ini juga memperlihatkan bahwa gerakan buruh tidak hanya menghadapi persoalan hubungan kerja, tetapi juga masalah kepercayaan terhadap para pemimpinnya. Jahja, yang memimpin pertemuan tersebut, membantah tuduhan Darsono mengenai penyalahgunaan dana organisasi. Ia juga menegaskan keterlibatannya dalam berbagai serikat pekerja, seperti serikat pekerja pelabuhan, galangan kering, penjahit, dan calon serikat

²⁹⁶ *De Locomotief*, 12 Maret 1923.

²⁹⁷ *Ibid.*

pegawai kantor.²⁹⁸ Bagian ini menunjukkan bahwa dunia serikat buruh mulai memiliki jaringan kepemimpinan yang luas, tetapi sekaligus rentan terhadap konflik internal, tuduhan penyimpangan, dan persoalan akuntabilitas organisasi. Ini penting, karena *De Locomotief* tidak hanya membingkai gerakan buruh sebagai ancaman ideologis, tetapi juga sebagai organisasi yang penuh ketegangan di dalam dirinya sendiri.²⁹⁹

Kehadiran Semaoen dalam pertemuan tersebut memperkuat kaitan antara gerakan buruh dan komunisme dalam framing *De Locomotief*. Setelah membantah kritik Darsono dan menjelaskan hasil penyelidikan mengenai kas serikat pekerja percetakan, pidato Semaoen disebut tidak lebih dari propaganda komunisme.³⁰⁰ Penyebutan ini memperlihatkan bahwa bagi *De Locomotief*, kegiatan serikat pekerja pada 1920-an sulit dilepaskan dari bayangan komunisme. Bahkan ketika isu yang dibahas menyangkut kondisi pekerja hotel dan rumah tangga, redaksi tetap membacanya dalam konteks pengaruh tokoh kiri dan propaganda komunis. Dengan demikian, koran ini semakin menempatkan gerakan buruh sebagai bagian dari radikalisasi politik massa.³⁰¹

Namun, laporan ini juga mencatat suara yang lebih moderat melalui Soekiran, ketua cabang S.I. Surabaya. Ia menekankan bahwa kritik terhadap seorang pemimpin tidak perlu langsung diarahkan kepada seluruh organisasi, serta menilai pentingnya hak anggota untuk mengawasi keuangan serikat. Bagian ini memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam gerakan buruh dan organisasi massa: di satu sisi terdapat propaganda komunis yang dikaitkan dengan Semaoen, di sisi lain ada upaya untuk menekankan tata kelola organisasi dan pengawasan anggota. Dengan demikian, sumber ini memperlihatkan bahwa gerakan

²⁹⁸ *Ibid.*

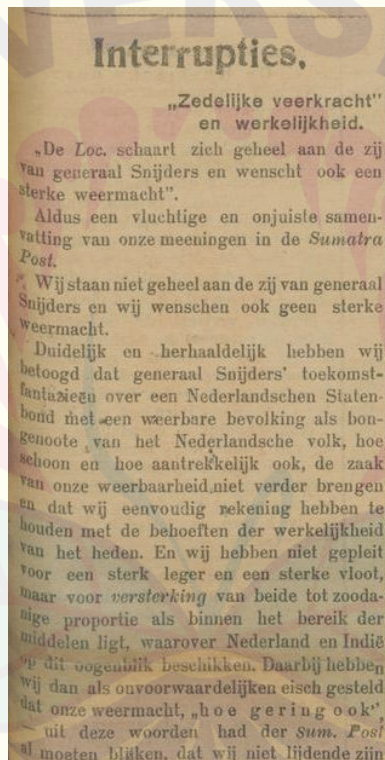
²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

buruh bukan hanya medan propaganda radikal, tetapi juga ruang pembentukan disiplin organisasi dan kesadaran keanggotaan.³⁰²

De Locomotief semakin membingkai gerakan buruh sebagai bagian dari perluasan politik massa dan pengaruh komunisme. Jika pada 1919-1920 perhatian koran ini masih banyak tertuju pada federasi serikat buruh, pemogokan, dan tokoh-tokoh seperti Semaoen, Bergsma, dan Najoan, maka pada 1923 perhatian itu meluas ke serikat pekerja sektor domestik dan jasa.³⁰³ Gerakan buruh tidak lagi terbatas pada buruh industri, melainkan mulai menyentuh kelompok kerja yang lebih beragam. Namun, karena kehadiran Semaoen dan bahasa propaganda komunisme, *De Locomotief* tetap membingkai perkembangan ini dengan nada curiga dan defensif.³⁰⁴



³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ *Ibid.*

Gambar 4.42 ”Zedelijke veerkracht en werkelijkheid”

Sumber: *De Locomotief* 5 Februari 1924

Pemberitaan *De Locomotief* pada 5 Februari 1924 memperlihatkan bahwa kecurigaan terhadap Federasi Serikat Buruh semakin mengeras. Dalam artikel tersebut, koran ini menilai bahwa organisasi tersebut bekerja sesuai dengan tujuan yang sejak awal telah dicurigai, yaitu menjalankan aksi massa, menyebarkan prinsip-prinsip komunis, dan menjadikan pemogokan sebagai alat politik. Pertemuan di Semarang dipahami bukan sekadar sebagai rapat organisasi buruh, tetapi sebagai upaya mempererat hubungan antara Federasi Serikat Buruh, Sarekat Islam, dan kelompok-kelompok lain yang dianggap berada di bawah pengaruh Semarang. Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai gerakan buruh sebagai bagian dari strategi politik komunis, bukan sebagai gerakan ekonomi pekerja semata.³⁰⁵

Artikel ini juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* semakin mendesak pemerintah agar mengawasi organisasi buruh secara lebih serius. Menurut koran ini, pemerintah tidak dapat menunggu sampai tindakan nyata terjadi, karena dalam organisasi massa revolusioner, kata-kata, pidato, dan propaganda sudah merupakan bagian awal dari tindakan politik. Pernyataan ini penting karena memperlihatkan perubahan cara berpikir koran tersebut: propaganda komunis dianggap sama berbahayanya dengan aksi langsung. Dengan demikian, batas antara kebebasan berbicara, organisasi buruh, dan ancaman terhadap ketertiban kolonial semakin dipersempit.³⁰⁶

Dalam pemberitaan ini, tokoh-tokoh seperti Semaoen, Bergsma, Tjokroaminoto, dan Soerjopranoto ditempatkan dalam peta ketegangan antara komunisme, Sarekat Islam, dan gerakan buruh. Pernyataan Tjokroaminoto bahwa dirinya juga seorang komunis, serta penolakan Soerjopranoto terhadap dominasi “Semarang”, menunjukkan adanya tarik-menarik dalam tubuh gerakan massa. Namun, *De Locomotief* menekankan bahwa kendali harian Federasi Serikat Buruh tetap berada di tangan unsur komunis, terutama melalui

³⁰⁵ *De Locomotief*, 5 Februari 1924.

³⁰⁶ *Ibid.*

Semaoen dan Bergsma. Dengan cara ini, koran tersebut membingkai gerakan buruh sebagai organisasi yang tampak luas, tetapi pada dasarnya dikendalikan oleh pusat komunis.³⁰⁷



Gambar 4.43 "Tegen het Communisme"

Sumber: *De Locomotief* 19 Mei 1925

Pemberitaan *De Locomotief* pada 19 Mei 1925 mengenai sikap menentang komunisme memperlihatkan adanya perdebatan dalam pers kolonial tentang cara menghadapi gerakan komunis di Hindia Belanda. Artikel tersebut menanggapi gagasan untuk menahan kaum komunis di sebuah pulau kecil khusus dan mengambil tindakan keras terhadap mereka.³⁰⁸ Gagasan semacam itu dinilai naif dan tidak realistis karena komunisme tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyingkirkan para pemimpinnya. Jika para pemimpin yang ada ditahan, pemimpin baru akan segera muncul. Dengan demikian, sumber ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* memahami komunisme bukan sekadar sebagai

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ *De Locomotief*, 19 Mei 1925.

persoalan tokoh, tetapi sebagai gerakan politik yang memiliki kemampuan untuk terus mereproduksi kepemimpinan.³⁰⁹

Dalam artikel tersebut, komunisme tetap dipandang sebagai unsur yang merusak dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, tindakan yang terlalu keras juga dianggap dapat menimbulkan akibat sebaliknya, yaitu memprovokasi perlawanan. Oleh karena itu, yang ditekankan bukanlah penindasan total, melainkan tindakan pencegahan yang terukur dari pemerintah. Pemerintah dianggap harus mencegah tindakan berlebihan, menjaga agar kendali tetap berada di tangannya, serta melindungi ketertiban dan perdamaian umum. Sikap ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menolak komunisme, tetapi pada saat yang sama tidak sepenuhnya mendukung kebijakan represif yang dianggap gegabah.³¹⁰

Artikel ini juga menilai bahwa gerakan komunis di Hindia Belanda belum memiliki pengaruh dominan. Meskipun komunis dapat memperoleh pengikut di beberapa tempat, gerakan tersebut tidak dipandang mampu menyeret seluruh rakyat ke dalam arusnya. Dalam pandangan ini, komunisme lebih dilihat sebagai gangguan politik lokal yang dapat muncul secara terbatas, bukan sebagai gerakan rakyat yang luas dan menyeluruh. Bahkan disebutkan bahwa gerakan tersebut mengandung kelemahannya sendiri, karena rakyat dapat menarik diri ketika janji atau hasil langsung dari gerakan itu tidak terwujud.³¹¹

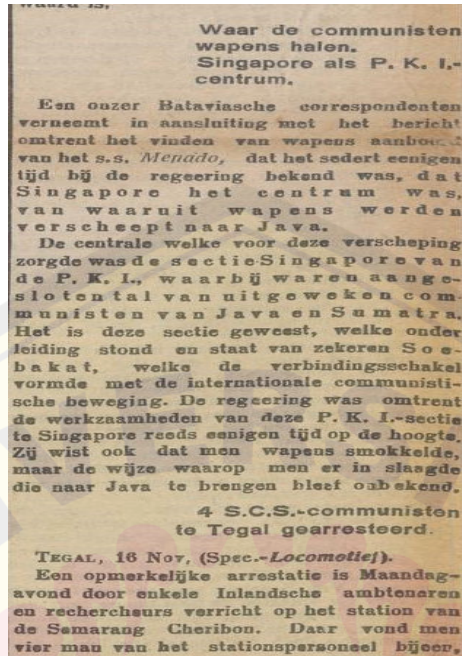
Dengan demikian, artikel 19 Mei 1925 memperlihatkan posisi *De Locomotief* yang anti-komunis tetapi tetap berhati-hati dalam menilai cara penanganannya. Komunisme dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban, namun bukan ancaman yang harus dihadapi dengan tindakan ekstrem seperti penahanan massal di pulau khusus. Yang dianggap lebih tepat adalah pengawasan, pencegahan, dan penegakan otoritas secara terukur. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi *De Locomotief*, tugas utama pemerintah bukan hanya memberantas

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ *Ibid.*

unsur komunis, tetapi menjaga agar tindakan negara tidak justru memperbesar perlawanan yang ingin dicegah.³¹²



Gambar 4.44 "Waar de communisten wapens halen, Singapore als P.K.I, centrum"

Sumber: *De Locomotief* 16 November 1926

Pemberitaan *De Locomotief* pada 16 November 1926 menunjukkan puncak kekhawatiran koran ini terhadap gerakan komunis. Dalam artikel mengenai kerusuhan di Jawa, *De Locomotief* mengutip perhatian surat kabar asing terhadap peristiwa tersebut dan menekankan pentingnya pemerintah kolonial menekan kerusuhan secara cepat dan keras. Bagi koran ini, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan lokal, tetapi juga citra Hindia Belanda di mata dunia.³¹³ Oleh karena itu, pemulihan ketertiban harus dilakukan dengan tegas agar tidak ada keraguan, baik di negeri Belanda maupun di luar negeri, mengenai kekuatan otoritas kolonial di Hindia Belanda.³¹⁴

³¹² *Ibid.*

³¹³ *Ibid.*

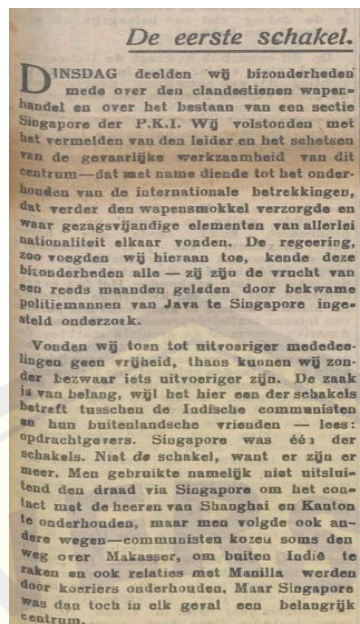
³¹⁴ *Ibid.*

Artikel tersebut juga membingkai kerusuhan sebagai bagian dari intrik komunis internasional. *De Locomotief* mengaitkan peristiwa di Jawa dengan pengaruh Moskow, jaringan komunis di Asia, serta kemungkinan hubungan dengan Singapura sebagai pusat pengiriman senjata dan aktivitas PKI. Dengan demikian, pemberontakan tidak dibaca sebagai akibat lokal dari tekanan sosial-ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari gerakan internasional yang berupaya menggoyahkan otoritas kolonial. Framing ini memperlihatkan bahwa pada 1926 komunisme telah menjadi ancaman utama dalam cara *De Locomotief* membaca politik Hindia.³¹⁵

Pemberitaan mengenai penangkapan anggota komunis di Tegal, termasuk pegawai stasiun dan kondektur, memperkuat gambaran bahwa komunisme dianggap telah menyusup ke jaringan kerja dan transportasi. Penemuan senjata api dalam penangkapan tersebut dipakai untuk menegaskan bahwa gerakan komunis tidak lagi hanya berupa propaganda atau pemogokan, tetapi telah memasuki tahap konspirasi bersenjata. Dengan demikian, *De Locomotief* membenarkan perlunya tindakan keras pemerintah terhadap jaringan komunis yang dianggap mengancam ketertiban umum.³¹⁶

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*



Gambar 4.45 "De eerste schakel"

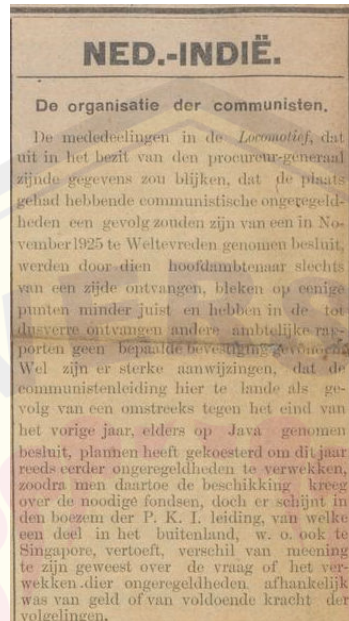
Sumber: *De Locomotief* 20 November 1926

Pemberitaan *De Locomotief* pada 20 November 1926 memperluas narasi mengenai kerusuhan komunis dengan menempatkannya dalam jaringan internasional. Koran ini menghubungkan gerakan di Jawa dengan kebijakan Moskow untuk mendorong pemberontakan di Timur, serta menyebut Singapura sebagai salah satu pusat hubungan antara komunis Hindia dan gerakan komunis internasional. Tokoh-tokoh seperti Sneevliet, Tan Malaka, Alimin, Musso, dan Soebakat ditempatkan dalam jaringan yang menghubungkan Hindia Belanda dengan pusat-pusat komunis di luar negeri.³¹⁷ Dengan cara ini, *De Locomotief* membingkai pemberontakan 1926 bukan sebagai gerakan lokal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari strategi Soviet di Asia.

Artikel ini juga menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk membongkar jaringan organisasi komunis. *De Locomotief* menggambarkan organisasi tersebut sebagai struktur yang disiplin, memiliki seksi, departemen, dan komite, sehingga harus diurai "benang demi benang" hingga hubungan antara komunis Hindia dan luar negeri

³¹⁷ *De Locomotief*, 20 November 1926.

dapat dibuktikan.³¹⁸ Bahasa ini menunjukkan bahwa komunisme dipahami sebagai ancaman sistematis yang memerlukan tindakan negara secara total. Pada titik ini, *De Locomotief* tidak lagi berbicara tentang pendidikan rakyat, kemajuan sosial, atau reformasi kolonial, tetapi tentang pemulihan otoritas dan penghancuran jaringan revolusioner.³¹⁹



Gambar 4.46 "Der organisatie der communisten"

Sumber: *De Locomotief* 1 Desember 1926

Pemberitaan *De Locomotief* pada 1 Desember 1926 mengenai organisasi kaum komunis memperlihatkan bahwa setelah kerusuhan November 1926, perhatian koran ini tidak hanya diarahkan pada peristiwa pemberontakan itu sendiri, tetapi juga pada struktur organisasi yang dianggap berada di baliknya.³²⁰ Artikel tersebut membahas pernyataan Jaksa Agung mengenai dugaan keputusan yang diambil oleh pimpinan komunis sejak akhir 1925, serta kemungkinan adanya pertemuan tertutup pada 7 November 1926 untuk memicu kerusuhan pada malam 12 hingga 13 November. Dengan demikian, *De Locomotief*

³¹⁸ *Ibid.*

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *De Locomotief*, 1 Desember 1926.

membangkai kerusuhan komunis bukan sebagai ledakan spontan, melainkan sebagai tindakan yang memiliki unsur perencanaan, koordinasi, dan jaringan organisasi.³²¹

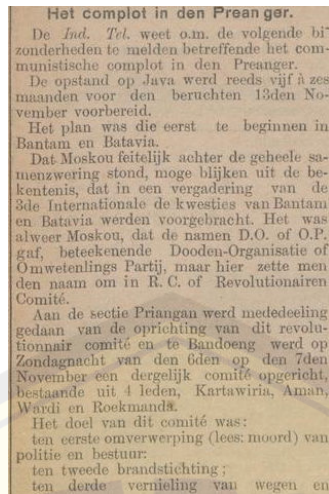
Hal penting dari artikel ini adalah penekanan pada adanya seksi-seksi PKI dan perintah yang disampaikan menjelang kerusuhan. Meskipun artikel tersebut juga mengakui bahwa beberapa informasi awal kurang akurat dan bahwa bukti masih perlu dilengkapi, arah framing-nya tetap jelas: kerusuhan dipahami sebagai bagian dari kerja organisasi komunis. Kegagalan kerusuhan untuk berkembang lebih luas dijelaskan bukan hanya karena tindakan pemerintah, tetapi juga karena lemahnya organisasi dan perkembangan divisi-divisi PKI. Dengan cara ini, *De Locomotief* menampilkan komunisme sebagai ancaman yang serius, tetapi sekaligus sebagai gerakan yang belum sepenuhnya matang dalam pelaksanaan teknisnya.³²²

Artikel ini juga memperlihatkan bagaimana *De Locomotief* mengikuti secara dekat proses penyelidikan pemerintah. Pernyataan Jaksa Agung mengenai pertemuan di berbagai tempat seperti Cirebon, Surabaya, Bandung, Batavia, Kediri, dan daerah lain dipakai untuk memperkuat gambaran bahwa rencana kerusuhan memiliki jaringan yang tersebar.³²³ Namun, koran ini tetap berhati-hati dengan menyatakan bahwa beberapa rincian belum dapat dipublikasikan karena penyelidikan masih berlangsung. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks pemberontakan komunis, *De Locomotief* cenderung menempatkan dirinya sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk membongkar jaringan organisasi dan menjaga ketertiban.

³²¹ *Ibid.*

³²² *Ibid.*

³²³ *Ibid.*



Gambar 4.47 "Het complot in den Preanger"

Sumber: *De Locomotief* 12 Januari 1927

Pemberitaan *De Locomotief* pada 12 Januari 1927 mengenai penangkapan pemimpin komunis dan konspirasi di Preanger memperlihatkan bahwa setelah kerusuhan November 1926, perhatian koran ini bergeser pada pembongkaran jaringan lokal PKI. Artikel tersebut menyebut penangkapan Soetan Abdoellah di Meester Cornelis serta rincian mengenai dugaan rencana pemberontakan di wilayah Preanger. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak lagi hanya membahas kerusuhan sebagai peristiwa sesaat, tetapi sebagai bagian dari konspirasi yang telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya dan melibatkan struktur organisasi yang lebih luas.³²⁴

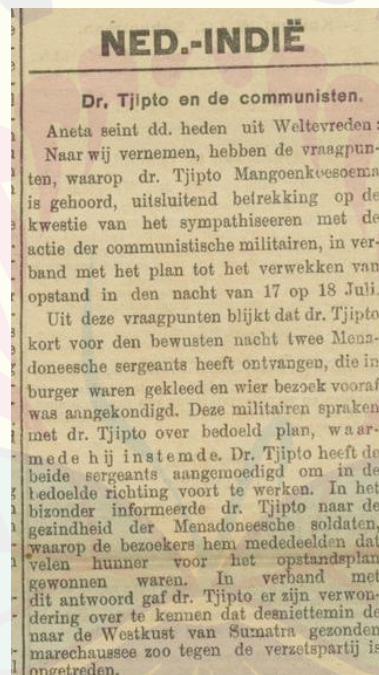
Dalam pemberitaan tersebut, rencana pemberontakan digambarkan mencakup pembentukan komite revolusioner di Bandung pada malam 6 hingga 7 November, dengan tujuan menyerang polisi dan administrasi, melakukan pembakaran, merusak jalan serta rel kereta api, menghancurkan jalur telegraf dan telepon, serta menyita barang.³²⁵ Cara penyajian ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* membingkai komunisme sebagai ancaman langsung terhadap infrastruktur kolonial, keamanan publik, dan otoritas pemerintah.

³²⁴ *De Locomotief*, 12 Januari 1927.

³²⁵ *Ibid.*

Komunisme tidak lagi hanya dipahami sebagai propaganda, pemogokan, atau gerakan buruh, tetapi sebagai gerakan subversif yang menargetkan perangkat negara kolonial.³²⁶

Artikel ini juga memperkuat narasi internasional yang sebelumnya telah muncul dalam pemberitaan November dan Desember 1926. Dugaan bahwa Moskow berada di balik konspirasi tersebut, serta kaitannya dengan Internasional Ketiga, digunakan untuk menempatkan kerusuhan di Jawa dalam konteks gerakan komunis global.³²⁷ Dengan demikian, *De Locomotief* membangun framing bahwa pemberontakan bukan semata-mata lahir dari kondisi lokal, melainkan terhubung dengan strategi revolusioner internasional. Framing ini penting karena membuat tindakan keras pemerintah tampak bukan hanya sebagai respons terhadap gangguan lokal, tetapi sebagai bagian dari pertahanan terhadap ancaman global.³²⁸



Gambar 4.48 "Dr. Tjipto en de communisten"

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*

Sumber: *De Locomotief* 2 November 1927

Pemberitaan *De Locomotief* pada 2 November 1927 mengenai Dr. Tjipto dan komunis memperlihatkan bahwa setelah kerusuhan 1926, kecurigaan terhadap komunisme tidak hanya diarahkan kepada organisasi PKI, tetapi juga kepada tokoh-tokoh nasionalis-radikal yang dianggap memiliki simpati terhadap gerakan tersebut. Dalam artikel ini, Tjipto Mangoenkoesoemo disebut diperiksa terkait dugaan dukungan terhadap rencana pemberontakan yang melibatkan unsur tentara.³²⁹ Tuduhan bahwa ia menerima dua sersan Manado, mendengar rencana mereka, memberikan dorongan, serta memberi sejumlah uang, dipakai untuk menunjukkan bahwa gerakan komunis dianggap tidak berdiri sendiri, melainkan dapat memperoleh dukungan dari kalangan intelektual dan tokoh politik yang lebih luas.³³⁰

Bagian ini penting karena memperlihatkan bagaimana *De Locomotief* membingkai bahaya komunisme sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat organisasi, tetapi juga menyebar melalui simpati politik dan pengaruh moral. Tjipto tidak digambarkan sekadar sebagai tokoh pergerakan lama, tetapi sebagai seseorang yang berpotensi membahayakan ketertiban umum karena sikap dan pernyataannya dianggap mendukung rencana pemberontakan. Dengan demikian, setelah pemberontakan 1926, batas antara nasionalisme radikal, simpati terhadap komunisme, dan ancaman terhadap keamanan kolonial menjadi semakin kabur dalam pemberitaan *De Locomotief*.³³¹

Artikel yang sama juga menyinggung surat Tan Malaka dari Shanghai yang dikirim kepada redaksi *De Locomotief*. Redaksi menolak memuat surat tersebut, tetapi tetap menyebut isinya, terutama koreksi Tan Malaka bahwa ia tidak menolak kekerasan bersenjata.³³² Bagian ini memperkuat framing bahwa tokoh komunis di luar Hindia masih

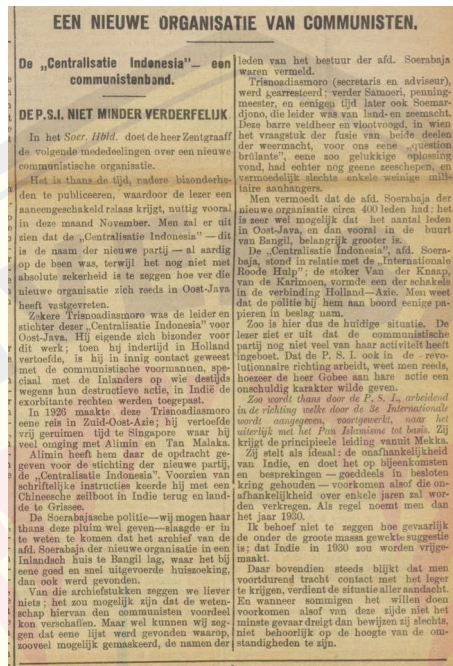
³²⁹ *De Locomotief*, 2 November 1927.

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ *Ibid.*

³³² *Ibid.*

aktif menyebarkan pengaruh dan tetap berupaya berhubungan dengan ruang pers kolonial. Dengan menyebut Tan Malaka sebagai agitator buronan yang masih melanjutkan pekerjaan merusak dari luar Hindia, *De Locomotief* menegaskan bahwa ancaman komunis dipahami sebagai jaringan yang tetap hidup meskipun banyak tokohnya telah ditangkap, diasingkan, atau berada di luar negeri.³³³



Gambar 4.49 "Een Nieuwe Organisatie Van Communisten"

Sumber: *De Locomotief* 9 November 1927

Pemberitaan *De Locomotief* pada 9 November 1927 memperlihatkan bahwa setelah pemberontakan komunis 1926, sikap koran ini tidak hanya diarahkan terhadap PKI dan tokoh-tokoh komunis, tetapi juga terhadap kelompok sosial-demokrat di Belanda yang mengkritik tindakan pemerintah kolonial.³³⁴ Dalam artikel tersebut, J.D.L. Le Fèvre, seorang sosial-demokrat dan spesialis kolonial dari S.D.A.P., dikutip karena menuduh pemerintah kolonial telah melakukan serangkaian kesalahan, melanggar janji, mendorong

³³³ *Ibid.*

³³⁴ *De Locomotief*, 9 November 1927.

penduduk ke ambang pemberontakan, menindas gerakan secara biadab, dan mengasingkan orang-orang yang dianggap komunis ke Boven-Digoel. *De Locomotief* menanggapi tuduhan tersebut dengan sangat keras dan menilainya sebagai bentuk penipuan, hasutan, serta usaha untuk mencurigai otoritas Belanda.³³⁵

Artikel ini penting karena memperlihatkan bahwa bagi *De Locomotief*, kritik terhadap represi kolonial setelah 1926 dianggap berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Boven-Digoel, yang oleh Le Fèbvre dipandang sebagai contoh tindakan kejam dan tidak manusiawi, justru dibela secara tidak langsung oleh *De Locomotief* sebagai bagian dari tindakan yang diperlukan untuk menghadapi unsur-unsur yang dianggap kriminal dan revolusioner. Dengan demikian, koran ini tidak lagi hanya membahas komunisme sebagai ancaman keamanan, tetapi juga menyerang pihak-pihak yang mencoba membaca pemberontakan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan kolonial.³³⁶

Bagian yang menyerang kaum sosialis dan komunis juga menunjukkan bahwa *De Locomotief* mulai menyatukan berbagai kritik kiri dalam satu bingkai ancaman. Kaum komunis dan sosialis digambarkan bernyanyi dalam “paduan suara” yang sama di bawah pengaruh Moskow. Sindiran ini memperlihatkan bahwa koran tersebut tidak banyak memberi ruang bagi perbedaan antara sosial-demokrasi, komunisme, dan kritik kemanusiaan terhadap represi kolonial. Semua kritik yang menyoroti kekerasan pemerintah, eksploitasi kapital, atau kesalahan administrasi cenderung dipahami sebagai bagian dari propaganda yang melemahkan otoritas Belanda.³³⁷

Secara keseluruhan, pemberitaan *De Locomotief* pada periode 1918-1927 memperlihatkan pergeseran penting dalam cara surat kabar ini memandang gerakan pribumi, terutama ketika gerakan tersebut mulai berhubungan dengan pemogokan, sosialisme, komunisme, dan organisasi buruh. Pada awal periode, Sarekat Islam masih tampil sebagai organisasi massa yang membawa tuntutan sosial dan politik, seperti pemerintahan mandiri,

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ *Ibid.*

hak pilih, demokrasi, serta kritik terhadap lembaga perwakilan kolonial. Namun, ketika unsur Sarekat Islam Semarang, tokoh seperti Semaoen, dan pengaruh Sneevliet mulai dikaitkan dengan aksi pemogokan serta ISDV, *De Locomotief* mulai membingkai gerakan massa sebagai ruang yang rentan terhadap radikalisme kiri.

Pemberitaan mengenai pemogokan tahun 1918 menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak sepenuhnya mengabaikan persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi rakyat, seperti tingginya biaya hidup, kondisi kerja yang berat, dan lemahnya posisi buruh terhadap pengusaha. Akan tetapi, koran ini cenderung lebih menekankan pengaruh ideologis tokoh-tokoh sosialis daripada melihat pemogokan semata-mata sebagai akibat dari tekanan ekonomi. Dalam hal ini, gerakan buruh tidak dibaca hanya sebagai tuntutan perbaikan kerja, tetapi mulai dianggap sebagai gejala politik massa yang dapat mengganggu ketertiban kolonial.

Memasuki 1919-1924, kecurigaan itu semakin menguat. Federasi Serikat Buruh, yang mula-mula masih diberitakan sebagai organisasi yang berupaya mengatur pemogokan secara lebih terstruktur, kemudian semakin sering dibingkai sebagai alat politik komunis dan Bolshevik. Tokoh-tokoh seperti Semaoen, Bergsma, Baars, Najoan, dan Sneevliet digunakan dalam pemberitaan untuk menunjukkan bahwa gerakan buruh telah melampaui batas perjuangan ekonomi biasa. Bagi *De Locomotief*, pemogokan, propaganda, dan organisasi serikat buruh mulai dipahami sebagai bagian dari strategi politik revolusioner. Dengan demikian, batas antara aksi sosial-ekonomi dan ancaman politik menjadi semakin sempit dalam pemberitaan koran ini.

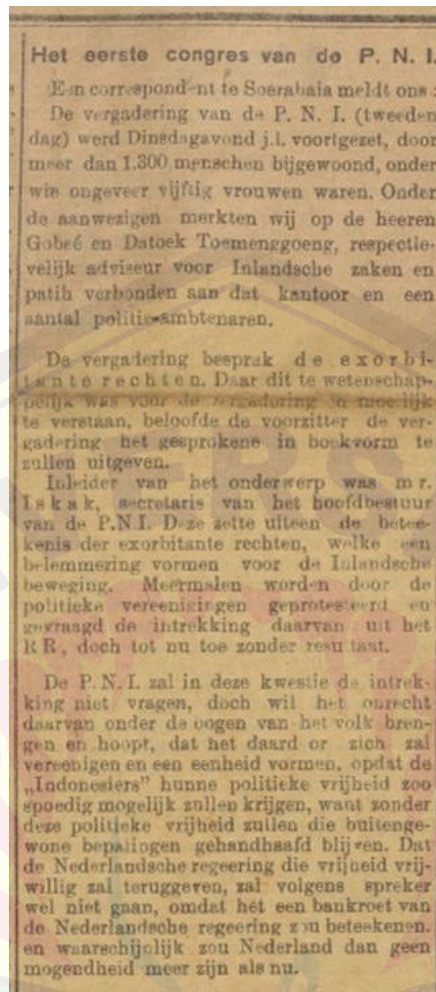
Pada tahun 1925, *De Locomotief* tetap menunjukkan sikap anti-komunis, tetapi masih menolak cara penanganan yang terlalu ekstrem seperti pengasingan semua komunis ke sebuah pulau khusus. Koran ini menilai bahwa komunisme tidak dapat diselesaikan hanya dengan menangkap pemimpinnya, sebab pemimpin baru dapat muncul kembali. Sikap ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* menghendaki tindakan pencegahan yang terukur: pemerintah harus menjaga ketertiban, tetapi tidak bertindak gegabah sampai memprovokasi perlawanan. Jadi, sebelum pemberontakan 1926, koran ini sudah menolak komunisme, tetapi masih melihatnya sebagai ancaman yang perlu dikendalikan secara hati-hati.

Perubahan paling tajam tampak pada pemberitaan tahun 1926-1927. Setelah kerusuhan komunis pecah, *De Locomotief* membingkai komunisme sebagai ancaman besar terhadap otoritas kolonial. Kerusuhan tidak lagi dipahami sebagai gejala lokal, melainkan dikaitkan dengan jaringan internasional, Moskow, Singapura, Tan Malaka, Alimin, Musso, Sneevliet, serta Internasional Ketiga. Dengan framing semacam ini, komunisme ditempatkan sebagai gerakan terorganisasi, transnasional, dan subversif. Pemberitaan mengenai penangkapan, jaringan PKI, rencana pemberontakan, serta kerusakan infrastruktur memperkuat pandangan bahwa komunisme bukan sekadar gagasan, melainkan ancaman langsung terhadap negara kolonial.

Pada akhir periode, terutama tahun 1927, sikap *De Locomotief* menjadi semakin defensif. Kecurigaan tidak hanya diarahkan kepada PKI, tetapi juga kepada tokoh nasionalis-radikal seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan tokoh komunis di luar negeri seperti Tan Malaka. Bahkan kritik dari kalangan sosial-demokrat Belanda terhadap tindakan pemerintah kolonial, termasuk soal Boven-Digoel, ditanggapi dengan keras. Ini menunjukkan bahwa setelah pemberontakan 1926, *De Locomotief* tidak lagi banyak memberi ruang bagi pembacaan sosial-ekonomi terhadap radikalisme. Kritik terhadap represi kolonial justru dipandang sebagai bagian dari propaganda yang melemahkan otoritas Belanda.

Dengan demikian, periode 1918-1927 menunjukkan perubahan penting dalam kecenderungan pemberitaan *De Locomotief*. Jika pada periode sebelumnya koran ini masih dapat menerima gerakan pribumi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemajuan sosial, dan partisipasi politik terbatas, maka pada periode ini gerakan massa semakin dilihat melalui kacamata ketertiban dan keamanan. *De Locomotief* tetap membawa warisan etis-liberal dalam arti masih mengakui adanya persoalan sosial, kemiskinan, dan kebutuhan reformasi. Namun, ketika gerakan tersebut berhubungan dengan pemogokan, sosialisme, komunisme, dan revolusi, koran ini semakin berpihak pada penegakan otoritas kolonial. Jadi, inti periode ini adalah pergeseran dari simpati terhadap kemajuan pribumi menuju kewaspadaan dan pembelaan terhadap stabilitas kolonial.

4.2.4 Pemberitaan tentang Krisis Politik dan Sensor Pers 1928-1940



Gambar 4.50 "Het eerste congres van de P.N.I."

Sumber: *De Locomotief* 1 Juni 1928

Pemberitaan *De Locomotief* pada 1 Juni 1928 mengenai Kongres Pertama PNI memperlihatkan bahwa setelah pemberontakan komunis 1926-1927, ruang politik Hindia Belanda tidak sepenuhnya kosong, melainkan mulai diisi oleh nasionalisme baru yang lebih terorganisasi. Dalam laporan tersebut, Kongres PNI di Surabaya dihadiri lebih dari 1.300 orang, termasuk sejumlah perempuan, pejabat politik, dan wakil dari kalangan

pemerintahan.³³⁸ Kehadiran massa yang besar menunjukkan bahwa PNI sejak awal mampu menarik perhatian publik luas. Berbeda dengan organisasi pemuda yang berusaha menepis kesan rahasia atau subversif, PNI tampil sebagai organisasi politik yang secara terbuka membahas kebebasan politik, hak berserikat, hak berkumpul, dan kebebasan pers.³³⁹

Salah satu isu utama dalam kongres tersebut adalah kritik terhadap aturan-aturan luar biasa yang dianggap menghambat gerakan Indonesia. Iskak, sekretaris dewan utama PNI, menyatakan bahwa ketentuan tersebut menjadi rintangan bagi gerakan nasional karena membatasi kebebasan pribadi dan politik. PNI tidak sekadar meminta pencabutan aturan tersebut kepada pemerintah, tetapi ingin membawa persoalan itu ke hadapan rakyat agar terbentuk kesatuan politik. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat bahwa PNI memandang kebebasan politik bukan sebagai pemberian pemerintah kolonial, melainkan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan sendiri oleh rakyat Indonesia.³⁴⁰

Pidato dalam kongres tersebut juga memperlihatkan bahwa PNI menolak anggapan bahwa pemerintah Belanda secara bertahap akan mendidik rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Menurut pembicara, jika hal itu benar-benar dilakukan, maka sama saja pemerintah Belanda menyiapkan kehancuran kekuasaannya sendiri. Karena itu, kemerdekaan harus diperoleh melalui usaha rakyat Indonesia sendiri. Pandangan ini menunjukkan perbedaan penting antara PNI dan organisasi moderat sebelumnya. Jika Boedi Oetomo masih banyak bergerak dalam pendidikan dan kemajuan sosial, PNI secara lebih tegas menempatkan kemerdekaan dan kebebasan politik sebagai tujuan perjuangan.³⁴¹

Bagian lain yang penting adalah pidato Sartono mengenai hak berorganisasi, hak berkumpul, dan kebebasan pers. Ia menilai bahwa meskipun Pasal 111 R.R (Regeringsreglement). mengakui hak berkumpul dan berserikat, hak tersebut tetap dibatasi

³³⁸ *De Locomotief*, 1 Juni 1928.

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ *Ibid.*

oleh peraturan lain. Ia juga menyoroti bahwa kebebasan pers bagi penduduk pribumi tidak sama dengan kebebasan pers di Belanda. Kritik terhadap pasal-pasal menunjukkan bahwa PNI memandang hukum kolonial sebagai alat untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, *De Locomotief* mencatat bahwa isu kebebasan politik dan kebebasan pers menjadi bagian penting dari agenda nasionalis pada akhir 1920-an.³⁴²

Insiden ketika komisar polisi meminta pintu teater ditutup agar pertemuan tidak berubah menjadi rapat terbuka juga penting secara analitis. Peristiwa kecil ini memperlihatkan bahwa pertemuan politik nasionalis berlangsung dalam pengawasan aparat. Bahkan bentuk ruang rapat pun menjadi persoalan politik: apakah sebuah pertemuan dianggap tertutup atau terbuka dapat menentukan legalitas dan batas toleransi pemerintah. Dengan demikian, pemberitaan ini menunjukkan bahwa pada 1928 gerakan nasionalis bergerak dalam ruang publik yang diawasi ketat, terutama setelah pengalaman pemerintah menghadapi komunisme pada 1926-1927.³⁴³

Pidato penutup Soekarno memperkuat karakter politik PNI. Ia mendesak hadirin untuk bergabung dengan PNI atau partai politik lain, serta menekankan pentingnya pengorbanan bagi pembebasan Indonesia. Kutipan mengenai keberanian hidup dan mati, serta perbandingan dengan Mesir, menunjukkan bahwa nasionalisme PNI tidak lagi bergerak dalam bahasa pendidikan sosial yang lunak, melainkan dalam bahasa mobilisasi politik dan pembebasan nasional. Dengan demikian, *De Locomotief* menghadapi bentuk gerakan pribumi baru: bukan lagi komunisme revolusioner seperti PKI, tetapi nasionalisme politik non-komunis yang tetap menantang dasar kekuasaan kolonial.³⁴⁴

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*



Gambar 4.51 "De Perserikatan Nasional Indonesia"

Sumber: *De Locomotief* 8 Juni 1928

Pemberitaan *De Locomotief* pada 8 Juni 1928 mengenai Asosiasi Nasional Indonesia memperlihatkan bagaimana koran ini mulai membingkai PNI sebagai organisasi nasionalis yang memiliki arah politik jelas dan berbeda dari organisasi moderat sebelumnya. Dalam artikel tersebut, PNI disebut berdiri di Bandung pada 3 Juli 1927 dan gagasannya dianggap dipengaruhi oleh konsep Perhimpunan Indonesia di Den Haag. Tujuan PNI dijelaskan sebagai perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia melalui gerakan nasional yang sadar atas kekuatan sendiri, kerja sama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan sejenis, serta pembangunan bidang pendidikan, ekonomi, koperasi, industri, dan kesehatan secara nasional. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat bahwa PNI tidak hanya bergerak dalam ranah politik sempit, tetapi juga berusaha menyusun program nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.³⁴⁵

Hal paling penting dari pemberitaan ini adalah penekanan terhadap asas non-kooperasi. *De Locomotief* menulis bahwa PNI tidak bekerja sama dengan pemerintah,

³⁴⁵ *De Locomotief*, 8 Juni 1928.

melainkan berusaha menjadikan Indonesia merdeka dari Belanda melalui jalan non-kooperasi. Sikap ini berbeda dari pola organisasi sebelumnya yang masih dapat dibayangkan bekerja dalam kerangka pemerintah kolonial, seperti Boedi Oetomo atau organisasi sosial-edukatif lain. Dalam framing koran ini, PNI tampak lebih tegas karena hanya mengakui sistem pemerintahan yang lahir “dari dan oleh rakyat” serta hanya mungkin terwujud dalam negara merdeka. Dengan demikian, PNI dibaca sebagai organisasi yang mulai menolak dasar legitimasi politik kolonial.³⁴⁶

Artikel ini juga memuat penilaian bahwa PNI berusaha membangun “negara di dalam negara” melalui pembentukan administrasi nasional sendiri di dalam administrasi umum yang sudah ada. Pernyataan ini penting karena memperlihatkan kekhawatiran *De Locomotief* terhadap strategi organisasi PNI. Program pendidikan, ekonomi, koperasi, industri, dan kesehatan tidak dibaca semata-mata sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai bagian dari proyek politik nasional yang berpotensi menyaingi struktur kolonial. Dengan kata lain, kegiatan sosial-ekonomi PNI dipahami sebagai bagian dari pembangunan kekuatan nasional yang berdiri terpisah dari pemerintah Belanda.

Pemberitaan ini juga memperlihatkan perhatian *De Locomotief* terhadap simbol dan bahasa nasionalisme PNI. Kartu anggota berwarna merah-putih dengan gambar kepala banteng serta keinginan untuk memutus hubungan dengan masa lalu kolonial dibaca sebagai tanda kuatnya usaha membangun identitas nasional Indonesia. Koran ini menilai bahwa penolakan terhadap sejarah kolonial dan terhadap apa yang diberikan oleh orang asing dieksploitasi secara sistematis untuk kepentingan cita-cita nasional. Di sini terlihat bahwa *De Locomotief* memahami PNI bukan hanya sebagai organisasi politik, tetapi sebagai gerakan yang membangun memori, simbol, dan identitas nasional tandingan terhadap tatanan kolonial.³⁴⁷

Tokoh Soekarno mendapat perhatian khusus dalam artikel ini. Ia disebut sebagai ketua dewan utama dan tokoh paling menonjol karena kefasihan serta pengaruh

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

kepribadiannya. Selain Soekarno, nama-nama seperti Boediarto, Iskak Tjokrohadisoerjo, Sartono, Soenario, Samsi Sastrowidagdo, dan Anwari juga disebut sebagai bagian dari jajaran tokoh PNI. Penyebutan ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* melihat PNI sebagai organisasi yang dipimpin oleh kelompok intelektual nasionalis baru. Cabang-cabang di Bandung, Batavia, Surabaya, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa gerakan ini mulai memiliki jaringan organisasi yang lebih luas.³⁴⁸

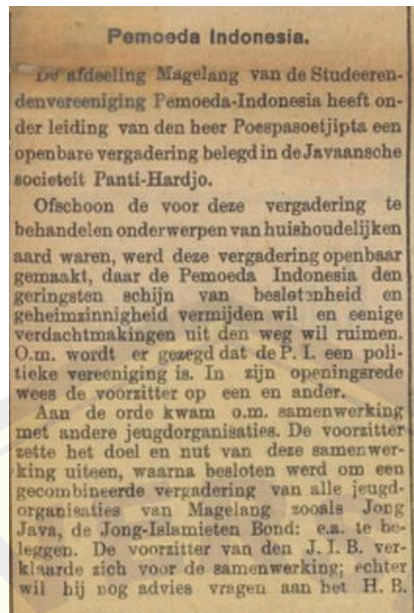
Selain aspek politik, artikel ini juga mencatat aktivitas sosial-ekonomi PNI, seperti pendirian Persatoean Coöperatie Indonesia di Batavia dan penghidupan kembali organisasi pegawai perniagaan Indonesia. Bagian ini memperlihatkan bahwa PNI berusaha membangun basis ekonomi nasional melalui koperasi dan organisasi pekerja. Namun, dalam framing *De Locomotief*, kegiatan tersebut tetap berada dalam kerangka nasionalisme politik yang lebih besar. Artinya, koperasi, serikat pegawai, pendidikan, dan kesehatan tidak dipahami sebagai kegiatan netral, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat bangsa Indonesia di luar kendali pemerintah kolonial.³⁴⁹

Dengan demikian, sumber 8 Juni 1928 memperkuat gambaran bahwa fase 1928-1940 ditandai oleh munculnya nasionalisme non-kooperatif yang berbeda dari radikalisme komunis periode sebelumnya. PNI tidak dibingkai sebagai organisasi komunis, tetapi tetap dipandang menantang tatanan kolonial karena menolak kerja sama dengan pemerintah, menuntut kemerdekaan, membangun identitas nasional, dan berusaha menciptakan struktur sosial-ekonomi sendiri. Bagi *De Locomotief*, PNI menjadi bentuk baru dari gerakan pribumi pasca-1927: bukan pemberontakan bersenjata, tetapi gerakan nasional yang terorganisasi, simbolis, dan ideologis.³⁵⁰

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ *Ibid.*



Gambar 4.52 "Pemoeda Indonesia"

Sumber: *De Locomotief* 15 Agustus 1928

Pemberitaan *De Locomotief* pada 15 Agustus 1928 mengenai Pemoeda Indonesia dapat digunakan sebagai pembuka fase 1928-1940, yaitu fase setelah pemberontakan komunis 1926-1927 ketika gerakan pribumi bergerak dalam iklim politik yang lebih diawasi. Artikel tersebut melaporkan pertemuan terbuka cabang Magelang Pemoeda Indonesia yang dipimpin oleh Poespasoejtijpta di perkumpulan Jawa Panti-Hardjo. Meskipun topik yang dibahas bersifat internal, pertemuan tersebut sengaja diadakan secara terbuka untuk menghindari kesan kerahasiaan dan menepis kecurigaan bahwa Pemoeda Indonesia merupakan organisasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penindakan terhadap komunisme, organisasi pemuda pribumi harus lebih berhati-hati dalam menampilkan diri di ruang publik.³⁵¹

Pemberitaan ini juga memperlihatkan bahwa *De Locomotief* mulai memandang organisasi pemuda dalam konteks kerja sama dan konsolidasi antarperkumpulan. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama dengan organisasi pemuda lain di Magelang,

³⁵¹ *Ibid.*

seperti Jong Java dan organisasi pemuda Muslim. Gagasan untuk mengadakan pertemuan bersama menunjukkan bahwa gerakan pemuda berusaha membangun jaringan yang lebih luas, tetapi tetap dengan cara yang terbuka dan tertib. Dengan demikian, Pemoeda Indonesia dalam artikel ini tidak dibingkai sebagai gerakan radikal, melainkan sebagai organisasi yang sedang berusaha memperluas koordinasi antar pemuda tanpa menimbulkan kesan subversif.³⁵²

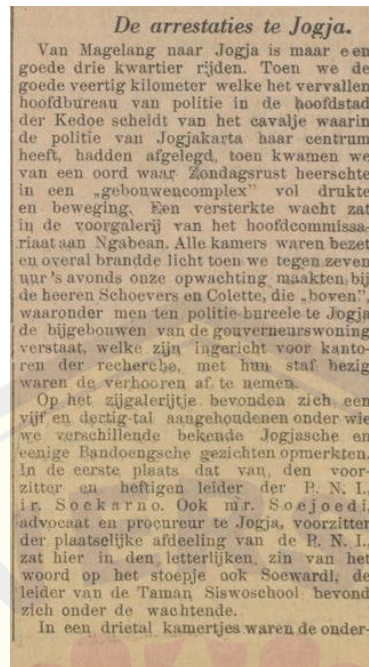
Artikel ini menunjukkan perubahan suasana politik setelah 1927. Jika pada periode sebelumnya *De Locomotief* banyak membingkai gerakan massa melalui ancaman komunisme, maka pada 1928 organisasi seperti Pemoeda Indonesia muncul dalam situasi yang lebih defensif dan berhati-hati. Keterbukaan rapat menjadi strategi untuk menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak bergerak secara rahasia. Dengan kata lain, aktivitas politik atau semi-politik pemuda tidak lagi dapat dilepaskan dari bayang-bayang pengawasan pemerintah kolonial pasca-pemberontakan komunis.³⁵³

Dengan demikian, artikel 15 Agustus 1928 memperlihatkan bahwa *De Locomotief* mulai menghadapi bentuk baru gerakan pribumi setelah fase komunisme: gerakan pemuda yang berusaha tampil terbuka, kooperatif, dan tidak rahasia. Namun, justru kebutuhan untuk menegaskan keterbukaan itu menunjukkan kuatnya iklim kecurigaan politik pada akhir 1920-an. Gerakan pribumi masih dapat hadir di ruang publik, tetapi harus membuktikan bahwa dirinya tidak mengarah pada tindakan radikal atau subversif. Di sinilah terlihat kesinambungan dari periode sebelumnya: setelah komunisme ditekan, stabilitas kolonial menjadi ukuran utama dalam membaca organisasi pribumi.³⁵⁴

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ *Ibid.*



Gambar 4.53 "De arrestaties te Jogja"

Sumber: *De Locomotief* 30 Desember 1929

Pemberitaan *De Locomotief* pada 30 Desember 1929 memperlihatkan meningkatnya pengawasan terhadap gerakan nasionalis non-kooperatif, terutama PNI. Jika pada 1928 PNI diberitakan sebagai organisasi yang secara terbuka membawa gagasan kemerdekaan, non-kooperasi, hak berserikat, dan kebebasan pers, maka pada akhir 1929 pemberitaan bergeser pada tindakan polisi terhadap tokoh-tokoh dan jaringan organisasi tersebut.³⁵⁵ Artikel ini menggambarkan penggeledahan rumah secara luas, pengerahan aparat kepolisian, penyitaan dokumen dalam jumlah besar, serta interogasi terhadap sejumlah tokoh penting seperti Soekarno, Gatot, Mohamed Taib, Soelarno, dan Soejojedi. Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan bahwa PNI telah dipandang sebagai organisasi yang cukup serius untuk diawasi melalui operasi keamanan besar-besaran.³⁵⁶

³⁵⁵ *De Locomotief*, 30 Desember 1929.

³⁵⁶ *Ibid.*

Bagian penting dari sumber ini adalah gambaran mengenai mobilisasi polisi dalam skala luas. Disebutkan bahwa seluruh pasukan polisi dikerahkan untuk melakukan lebih dari tiga puluh penggeledahan rumah, sementara kantor polisi disiapkan untuk menerima tahanan dan tumpukan dokumen hasil penyitaan. Penyajian seperti ini memperlihatkan bahwa tindakan terhadap PNI tidak diperlakukan sebagai kasus kecil, tetapi sebagai operasi politik yang terorganisasi. Dalam konteks ini, *De Locomotief* membingkai nasionalisme PNI bukan lagi hanya sebagai wacana politik dalam kongres, melainkan sebagai gerakan yang memiliki jaringan, anggota, dokumen, dan tokoh-tokoh yang perlu diperiksa oleh aparat kolonial.³⁵⁷

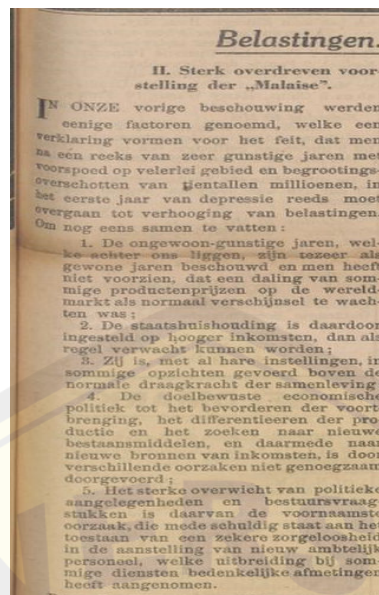
Pemberitaan ini juga memperlihatkan kesinambungan dengan suasana pasca-pemberontakan komunis 1926-1927. Setelah komunisme ditekan, pemerintah kolonial menjadi semakin sensitif terhadap organisasi yang dianggap menolak kerja sama dengan pemerintah atau membangun kekuatan politik sendiri. PNI memang berbeda dari PKI karena tidak dibingkai sebagai gerakan komunis bersenjata, tetapi asas non-kooperasi dan tuntutan kemerdekaannya tetap menempatkan organisasi ini dalam posisi berhadapan dengan negara kolonial. Oleh karena itu, penggeledahan dan penahanan tokoh-tokoh PNI menunjukkan bahwa batas toleransi pemerintah kolonial terhadap gerakan pribumi semakin sempit.³⁵⁸

Dalam pemberitaan ini, *De Locomotief* tidak secara eksplisit membela gagasan PNI, tetapi menampilkan operasi polisi dengan detail administratif dan keamanan. Fokus pada penggeledahan, interogasi, dokumen, dan pemindahan Soekarno serta tokoh lainnya ke Bandung memperlihatkan bahwa koran ini membaca PNI melalui lensa penyelidikan politik. Dengan demikian, framing terhadap PNI berbeda dari framing terhadap Boedi Oetomo pada 1908. Jika Boedi Oetomo dahulu masih dipahami sebagai gerakan pendidikan dan kemajuan sosial yang dapat diterima, maka PNI pada 1929 dipahami sebagai organisasi nasionalis yang harus diawasi karena membawa tuntutan politik yang lebih tegas.³⁵⁹

³⁵⁷ *Ibid.*

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ *Ibid.*



Gambar 4.54 "Sterk overdreven voorstelling der Malaise"

Sumber: *De Locomotief* 10 Mei 1930

Pemberitaan *De Locomotief* pada 10 Mei 1930 mengenai pajak dan “kemerosotan ekonomi” memperlihatkan bagaimana koran ini membaca awal depresi ekonomi di Hindia Belanda. Artikel tersebut menolak gambaran yang terlalu suram mengenai keadaan ekonomi dan menyatakan bahwa istilah “krisis” atau “kemerosotan umum” perlu digunakan dengan hati-hati.³⁶⁰ Menurut artikel ini, kesulitan anggaran tahun 1931 tidak semata-mata menunjukkan keruntuhan ekonomi Hindia, melainkan merupakan akibat dari beberapa faktor, antara lain anggapan berlebihan terhadap tahun-tahun makmur sebelumnya, anggaran negara yang terlalu disesuaikan dengan pendapatan tinggi, perluasan lembaga negara yang melebihi daya dukung normal masyarakat, serta kurangnya kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh mendorong diversifikasi produksi.³⁶¹

Artikel ini juga menyoroti bahwa pemerintah menghadapi pilihan sulit antara penghematan dan peningkatan pajak justru pada saat kondisi ekonomi kurang

³⁶⁰ *De Locomotief*, 10 Mei 1930.

³⁶¹ *Ibid.*

menguntungkan bagi wajib pajak. Kritik ini penting karena *De Locomotief* tidak sepenuhnya membela kebijakan fiskal pemerintah. Koran ini mengakui bahwa penyusunan anggaran menghadapi kesulitan besar, tetapi juga menilai bahwa sebagian masalah tersebut muncul karena kebijakan sebelumnya terlalu bergantung pada masa kemakmuran dan tidak cukup mengantisipasi penurunan harga produk ekspor. Dengan demikian, sumber ini menunjukkan bahwa dalam isu ekonomi, *De Locomotief* tetap mempertahankan sikap kritis terhadap pengelolaan kolonial, meskipun kritik tersebut tidak diarahkan pada dasar kekuasaan kolonial itu sendiri.³⁶²

Dalam penilaian terhadap sektor ekspor, *De Locomotief* menolak pandangan bahwa Hindia Belanda sedang mengalami krisis umum. Harga gula, karet, teh, kopi, kapuk, kina, tembakau, kopra, timah, dan minyak memang mengalami tekanan atau penurunan, tetapi artikel tersebut menekankan bahwa banyak sektor masih memiliki daya tahan karena biaya produksi yang rendah, metode usaha yang efisien, kualitas produk, dan posisi Hindia Belanda yang masih menguntungkan di pasar dunia. Dengan demikian, koran ini membingkai malaise bukan sebagai kehancuran ekonomi, melainkan sebagai masa penyesuaian terhadap harga dunia yang lebih rendah.³⁶³

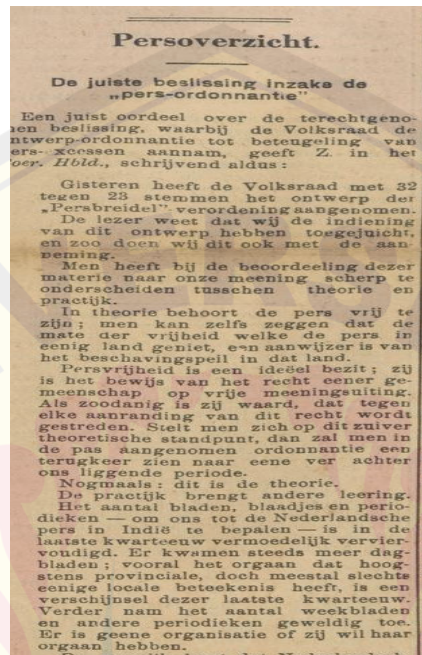
Artikel ini juga membahas kondisi penduduk pribumi. Menurut *De Locomotief*, tahun 1926-1929 memperlihatkan peningkatan kemakmuran masyarakat, yang tampak dari lalu lintas, pembukaan lahan baru, pembangunan rumah, hiburan publik, pakaian, peningkatan penggunaan sepeda, dan kenaikan impor. Namun, penurunan harga produk ekspor pada 1929, kekeringan panjang, gagal panen, serta terganggunya produksi tanaman pangan menyebabkan kemakmuran tersebut menurun di berbagai daerah. Meski demikian, artikel ini tetap menilai bahwa keadaan mulai membaik karena panen padi berikutnya cukup melimpah dan sebagian besar penduduk pertanian dapat melewati kesulitan sebelumnya.³⁶⁴

³⁶² *Ibid.*

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, sumber 10 Mei 1930 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pada awal dekade 1930-an *De Locomotief* berusaha menjaga narasi optimistis terhadap ekonomi Hindia Belanda. Koran ini mengakui adanya depresi, penurunan harga, kesulitan anggaran, dan tekanan terhadap penduduk, tetapi menolak menyebutnya sebagai krisis total.³⁶⁵



Gambar 4.55 "Persoverzicht"

Sumber: *De Locomotief* 8 September 1931

Pemberitaan *De Locomotief* pada 8 September 1931 mengenai rancangan peraturan pers memperlihatkan semakin kuatnya perhatian terhadap kontrol atas ruang opini publik di Hindia Belanda. Artikel tersebut membahas keputusan Dewan Rakyat yang mengadopsi rancangan peraturan untuk membatasi penyimpangan pers dengan 32 suara setuju dan 23 suara menolak.³⁶⁶ Dalam pemberitaan ini, *De Locomotief* mengutip pandangan yang pada dasarnya mendukung pengesahan aturan tersebut. Secara prinsip, kebebasan pers tetap diakui

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ *De Locomotief*, 8 September 1931.

sebagai hak ideal dan ukuran peradaban suatu negara. Namun, artikel tersebut menekankan bahwa penilaian atas kebebasan pers tidak dapat hanya didasarkan pada teori, melainkan juga harus mempertimbangkan praktik pers di Hindia Belanda.³⁶⁷

Bagian penting dari artikel ini adalah cara *De Locomotief* membedakan antara kebebasan pers sebagai prinsip dan kondisi pers sebagai praktik sosial. Secara teoretis, pers memang seharusnya bebas karena kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dalam praktiknya, perkembangan jumlah surat kabar, selebaran, dan majalah di Hindia Belanda dianggap tidak selalu diikuti oleh kualitas kepemimpinan dan tanggung jawab jurnalistik yang memadai.³⁶⁸ Artikel tersebut menyatakan bahwa banyak pemimpin surat kabar tidak memiliki pengetahuan, rasa tanggung jawab, keandalan jurnalistik, maupun kepercayaan bisnis yang cukup. Dengan demikian, pembatasan pers dibingkai bukan sebagai serangan terhadap kebebasan semata, melainkan sebagai tindakan untuk menghadapi penyalahgunaan kebebasan pers.³⁶⁹

Pemberitaan ini memperlihatkan posisi *De Locomotief* yang semakin defensif pada awal 1930-an. Jika pada masa *Politik Etis* awal koran ini sering menggunakan pers sebagai alat kritik terhadap pemerintah kolonial, maka pada 1931 ia justru dapat menerima pembatasan pers ketika pers dianggap tidak bertanggung jawab atau berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat kolonial yang kompleks. Dengan kata lain, kebebasan pers tetap dihargai sebagai prinsip liberal, tetapi prinsip itu dibatasi oleh kebutuhan menjaga stabilitas dan ketertiban. Ini menunjukkan bahwa liberalisme *De Locomotief* bersifat bersyarat: kebebasan dapat diterima selama tidak dipandang merusak tata sosial-politik kolonial.³⁷⁰

Artikel ini juga dapat dibaca sebagai kelanjutan dari suasana politik pasca-1926 dan penindakan terhadap PNI pada 1929. Setelah pengalaman pemberontakan komunis dan

³⁶⁷ *Ibid.*

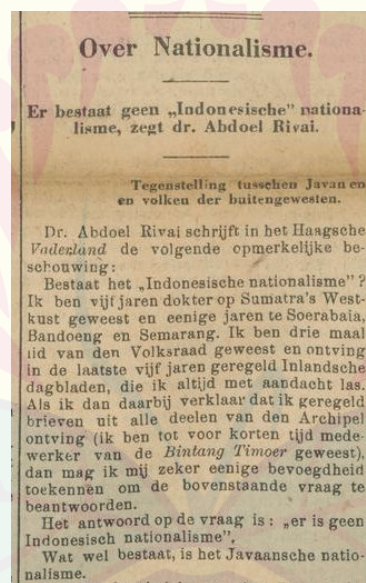
³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ *Ibid.*

³⁷⁰ *Ibid.*

meningkatnya nasionalisme non-kooperatif, pers menjadi salah satu ruang yang dipandang perlu diawasi. Dalam konteks ini, peraturan pers tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kecenderungan kolonial yang lebih luas: membatasi organisasi, mengawasi rapat, menindak tokoh politik, dan mengontrol penyebaran gagasan. Oleh karena itu, pemberitaan tahun 1931 ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* semakin menempatkan stabilitas kolonial sebagai pertimbangan utama dalam menilai kebebasan politik.³⁷¹

De Locomotief tidak menolak kebebasan pers secara prinsip, tetapi mendukung pembatasan ketika kebebasan tersebut dianggap dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab jurnalistik. Sikap ini menunjukkan perubahan penting dalam orientasi koran tersebut: dari pers sebagai alat kritik etis terhadap pemerintah menuju pers sebagai ruang yang harus dikendalikan ketika dianggap berpotensi memperkuat agitasi, radikalisme, atau ketidakstabilan politik.³⁷²



Gambar 4.56 "Over Nationalisme"

Sumber: *De Locomotief* 17 September 1931

³⁷¹ *Ibid.*

³⁷² *Ibid.*

Pemberitaan *De Locomotief* pada 17 September 1931 mengenai nasionalisme memperlihatkan bahwa koran ini tidak hanya menyoroti gerakan nasionalis dari sisi organisasi dan tindakan politik, tetapi juga dari sisi legitimasi gagasan “Indonesia” sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam artikel tersebut, pandangan Dr. Abdoel Rivai yang dimuat dalam *Haagsche Vaderland* dikutip untuk menyatakan bahwa “nasionalisme Indonesia” sebenarnya tidak ada; yang ada hanyalah nasionalisme Jawa. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa gerakan nasionalis yang berkembang lebih banyak berpusat di Jawa dan kurang mampu merangkul masyarakat dari daerah luar Jawa. Dengan demikian, *De Locomotief* menampilkan nasionalisme Indonesia sebagai gagasan yang masih diperdebatkan, belum sepenuhnya mapan, dan masih dibayangi oleh perbedaan regional.³⁷³

Artikel ini menyoroti ketegangan antara tokoh-tokoh dari luar Jawa dengan gerakan politik yang berpusat di Jawa. Abdoel Rivai menyebut contoh Abdoel Moeis, Hadji Agus Salim, dan Mohammad Hatta sebagai tokoh-tokoh non-Jawa yang mengalami hambatan atau ketegangan dalam gerakan politik yang didominasi unsur Jawa. Dalam framing ini, nasionalisme Indonesia tidak dipandang sebagai persatuan yang otomatis terbentuk, melainkan sebagai proyek politik yang masih menghadapi persoalan internal. Perbedaan asal daerah, pengalaman politik, dan basis sosial dianggap memengaruhi posisi seseorang dalam gerakan nasional.³⁷⁴

Pandangan tersebut memperlihatkan salah satu cara *De Locomotief* membaca nasionalisme pada awal 1930-an. Setelah PNI tampil sebagai organisasi nasionalis non-kooperatif yang mengusung kemerdekaan Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa gagasan Indonesia sebagai bangsa masih dapat dipersoalkan melalui argumen regional. Dengan mengutip Abdoel Rivai, *De Locomotief* memberi ruang pada kritik bahwa nasionalisme Indonesia sebenarnya terlalu Jawa-sentris. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk keraguan

³⁷³ *De Locomotief*, 17 September 1931.

³⁷⁴ *Ibid.*

terhadap klaim universal gerakan nasionalis, terutama klaim bahwa organisasi-organisasi seperti PNI atau Partindo benar-benar mewakili seluruh penduduk Hindia Belanda.³⁷⁵

De Locomotief semakin memandang nasionalisme dengan sikap hati-hati dan skeptis. Nasionalisme tidak hanya diawasi karena aktivitas politiknya, tetapi juga diuji dari sisi dasar sosial dan representasinya. Jika nasionalisme Indonesia dianggap belum mampu mengatasi perbedaan Jawa dan luar Jawa, maka klaimnya sebagai gerakan seluruh bangsa dapat dipertanyakan. Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan bahwa *De Locomotief* tidak hanya membingkai nasionalisme sebagai potensi ancaman politik, tetapi juga sebagai proyek identitas yang masih rapuh.³⁷⁶



Gambar 4.57 "Partij Rakjat Indonesia"

Sumber: *De Locomotief* 8 Februari 1932

Pemberitaan *De Locomotief* pada 8 Februari 1932 mengenai rapat umum cabang Semarang Partij Rakjat Indonesia memperlihatkan dinamika nasionalisme setelah penindakan terhadap PNI. Artikel tersebut mencatat bahwa pembentukan partai baru ini diterima secara dingin oleh masyarakat pribumi Semarang. Berbeda dengan rapat organisasi

³⁷⁵ *Ibid.*

³⁷⁶ *Ibid.*

lain seperti Boedi Oetomo, P.B.I., dan Partai Indonesia yang mampu menarik perhatian publik, rapat PRI justru kurang diminati.³⁷⁷ Penekanan terhadap rendahnya minat massa ini penting karena menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak hanya mencatat program politik partai, tetapi juga menilai daya hidup sosial organisasi tersebut di tengah masyarakat.³⁷⁸

Dalam rapat tersebut, tokoh seperti Dr. Soeripto, Tengko Sa Roehoem, dan Tabrani menjelaskan arah dan tujuan PRI. Tabrani menegaskan bahwa “Indonesia Merdeka” harus diwujudkan secepat dan setertib mungkin.³⁷⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa gagasan kemerdekaan tetap menjadi bagian dari bahasa politik nasionalis awal 1930-an, meskipun bentuk organisasi dan strateginya berbeda dari PNI. PRI juga membicarakan isu ekonomi, promosi industri dan manufaktur dalam negeri, gerakan Swadeshi di India Britania, pajak, dan bea transportasi. Dengan demikian, nasionalisme PRI tidak hanya bersifat politik, tetapi juga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian produksi.³⁸⁰

Pemberitaan ini memperlihatkan bagaimana PRI membangun simbol persatuan Indonesia. Bendera merah putih dengan enam bintang dalam lingkaran dijelaskan sebagai lambang persatuan wilayah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, serta Timur Raya yang mencakup Sulawesi dan Maluku. Simbol ini menunjukkan bahwa PRI berusaha menjawab kritik terhadap nasionalisme Indonesia yang sebelumnya dianggap terlalu Jawa-sentris. Jika dalam pemberitaan 1931 gagasan nasionalisme Indonesia dipersoalkan karena dianggap hanya mencerminkan nasionalisme Jawa, maka dalam pemberitaan PRI tampak usaha untuk membayangkan Indonesia sebagai kesatuan wilayah yang lebih luas.³⁸¹

³⁷⁷ *De Locomotief*, 8 Februari 1932.

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ *Ibid.*

³⁸¹ *Ibid.*

Namun, PRI juga tampak mengambil posisi yang berbeda dalam strategi politik. Tabrani mengkritik dewan-dewan kolonial dan sistem pemilihan yang berlaku, bahkan mengutip pandangan Haji Agus Salim bahwa dewan-dewan tersebut hanyalah “komedi”. Akan tetapi, PRI tetap berupaya mengisi sebanyak mungkin kursi dewan dan menggunakan tunjangan sidang perwakilan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi strategi: di satu sisi PRI mengkritik lembaga kolonial sebagai tidak memadai, tetapi di sisi lain tetap ingin memanfaatkannya sebagai ruang perjuangan. Dalam konteks ini, *De Locomotief* mencatat munculnya nasionalisme yang tidak sepenuhnya non-kooperatif seperti PNI, melainkan lebih bersifat taktis dalam menggunakan institusi yang tersedia.³⁸²

Dengan demikian, artikel 8 Februari 1932 memperlihatkan bahwa setelah penindakan terhadap PNI, gerakan nasionalis tidak berhenti, tetapi mengalami perubahan bentuk. PRI membawa gagasan Indonesia merdeka, persatuan wilayah, ekonomi nasional, dan kritik terhadap lembaga kolonial, namun daya tarik massanya tampak tidak sekuat organisasi nasionalis lain. Bagi *De Locomotief*, perkembangan ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tetap hadir, tetapi sedang mengalami fragmentasi, perbedaan strategi, dan pencarian bentuk baru di bawah iklim politik yang semakin diawasi.

³⁸² *Ibid.*



Gambar 4.58 "Openbare Vergadering P.N.I."

Sumber: *De Locomotief* 28 November 1932

Pemberitaan *De Locomotief* pada 28 November 1932 mengenai rapat umum Pendidikan Nasional Indonesia memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia setelah penindakan terhadap PNI lama tetap berkembang dalam bentuk baru yang lebih ideologis. Rapat umum di Semarang tersebut dihadiri banyak orang dan juga diikuti oleh perwakilan berbagai organisasi politik serta sosial. Dalam pembukaan rapat, tujuan seksi Semarang dari Kaoem Marhaën dijelaskan sebagai bagian dari arah organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme pada awal 1930-an tidak hanya bergerak dalam tuntutan kemerdekaan politik, tetapi juga mulai menekankan basis sosial rakyat kecil sebagai dasar perjuangan.³⁸³

Pidato Mas Koen memperlihatkan corak ideologis PNI Baru yang berbeda dari nasionalisme kultural atau nasionalisme yang hanya menekankan kejayaan masa lampau. PNI disebut bukan nasionalisme buta, melainkan nasionalisme yang lahir dari "perut

³⁸³ *De Locomotief*, 28 November 1932.

kerontjong”, yaitu dari penderitaan sosial-ekonomi rakyat. Organisasi ini menentang kapitalisme, termasuk kapitalisme bangsa sendiri, serta imperialisme.³⁸⁴ Pernyataan bahwa kaum intelektual harus melayani rakyat dan tunduk kepada rakyat menunjukkan bahwa PNI Baru berusaha membalik hubungan antara elite terdidik dan massa. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat munculnya nasionalisme yang lebih populis dan anti-kapitalis, bukan sekadar nasionalisme elite atau nasionalisme simbolik.

Sumber ini juga penting karena memperlihatkan sikap PNI Baru terhadap demokrasi, kapitalisme, dan kolektivisme.³⁸⁵

PNI dinyatakan tidak menginginkan demokrasi yang berjalan bersama kapitalisme dan tidak menghendaki dominasi borjuasi, tetapi mengarah pada kolektivisme. Di sini tampak bahwa PNI Baru bergerak dalam bahasa politik yang lebih radikal dibandingkan organisasi nasionalis yang sekadar menuntut tempat dalam dewan kolonial. Walaupun tidak disebut sebagai komunisme secara langsung, corak anti-kapitalis dan anti-imperialisnya jelas membuat organisasi ini berada dalam wilayah politik yang sensitif bagi pemerintah kolonial dan pers kolonial.³⁸⁶

Pidato Sjahrir dari Bandung memperkuat karakter kritis tersebut, terutama dalam pembahasan mengenai gerakan serikat pekerja. Ia menganjurkan serikat pekerja yang murni dan tidak menjadi alat partai politik tertentu. Pandangan ini penting karena memperlihatkan perbedaan PNI Baru dengan gerakan kiri-komunis sebelumnya. Sjahrir tidak menolak serikat pekerja, tetapi menolak serikat pekerja yang dijadikan mainan partai. Dengan demikian, PNI Baru berusaha membangun gerakan rakyat yang terorganisasi, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti model subordinasi serikat buruh kepada partai politik. Ini menarik sekali, karena

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ *Ibid.*

³⁸⁶ *Ibid.*

di sini nasionalisme PNI Baru tampak anti-kapitalis tetapi juga tidak otomatis identik dengan komunisme.³⁸⁷

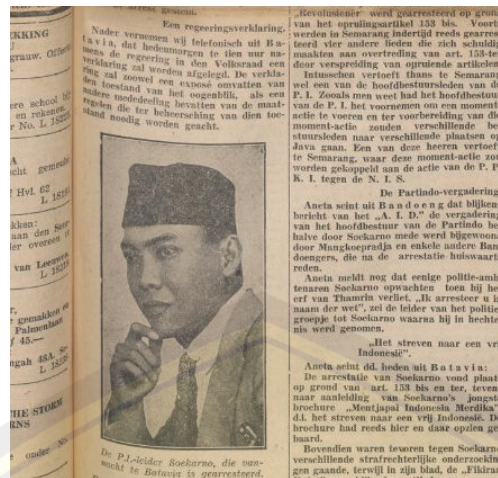
Artikel ini juga menunjukkan bahwa ruang politik tetap berada di bawah pengawasan aparat. Beberapa pembicara mendapat peringatan dari polisi, termasuk Ibu Soenarjati ketika berbicara mengenai perempuan dalam politik, serta Ismoe yang diperingatkan dua kali. Delegasi dari Cimahi bahkan dibungkam setelah beberapa peringatan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa rapat politik nasionalis pada awal 1930-an berlangsung dalam batas-batas yang diawasi ketat. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya melaporkan isi gagasan PNI Baru, tetapi juga menunjukkan bahwa aktivitas politik nasionalis tetap berada dalam kontrol aparat kolonial.³⁸⁸

Dengan demikian, artikel 28 November 1932 memperlihatkan bahwa setelah PNI lama ditekan, nasionalisme Indonesia tidak menghilang, tetapi mengalami pergeseran menuju bentuk yang lebih populis, anti-kapitalis, dan berorientasi pada rakyat kecil. Partai Nasional Indonesia membawa bahasa “kaum marhaen”, anti-imperialisme, kritik terhadap kapitalisme, serta perhatian pada serikat pekerja dan perempuan dalam politik. Namun, pemberitaan ini juga memperlihatkan bahwa nasionalisme baru tersebut tetap diawasi oleh pemerintah kolonial.³⁸⁹

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ *Ibid.*

³⁸⁹ *Ibid.*



Gambar 4.59 "Soekarno"

Sumber: *De Locomotief* 1 Agustus 1933

Pemberitaan *De Locomotief* pada 1 Agustus 1933 memperlihatkan semakin kerasnya tindakan pemerintah kolonial terhadap organisasi nasionalis yang dianggap melakukan penghasutan. Artikel ini melaporkan bahwa di Surabaya, kalangan pemerintahan dan pimpinan politik menerima dengan lega tindakan tegas yang diambil terhadap aktivitas organisasi ekstremis di Jawa Timur, terutama Partindo dan PNI.³⁹⁰ Dalam laporan tersebut, Gubernur Jawa Timur disebut telah melakukan pengamatan serius terhadap kondisi organisasi-organisasi tersebut dan mengirimkan laporan kepada Jaksa Agung agar tindakan setengah hati terhadap penghasutan segera diakhiri. Dengan demikian, *De Locomotief* membingkai situasi politik 1933 sebagai kondisi yang menuntut intervensi negara secara lebih tegas demi menjaga ketertiban dan keamanan.³⁹¹

Artikel ini juga menunjukkan bahwa pasal-pasal hukum kolonial seperti 153 bis digunakan sebagai alat penting untuk menindak tulisan atau aktivitas yang dianggap menghasut. Di Semarang, beberapa penangkapan telah terjadi sebelumnya, termasuk terhadap Soetomo, sekretaris Dewan Provinsi, karena menulis artikel dalam surat kabar

³⁹⁰ *De Locomotief*, 1 Agustus 1933.

³⁹¹ *Ibid.*

Revolusic yang dianggap melanggar pasal penghasutan.³⁹² Selain itu, empat orang lainnya juga ditangkap karena menyebarkan artikel yang dipandang menghasut. Bagian ini penting karena memperlihatkan bahwa kontrol politik tidak hanya diarahkan kepada rapat dan organisasi, tetapi juga kepada tulisan, brosur, surat kabar, dan sirkulasi gagasan. Dengan kata lain, sensor pers dan hukum penghasutan menjadi bagian dari perangkat utama pengawasan kolonial pada awal 1930-an.³⁹³

Pemberitaan mengenai penangkapan Soekarno menjadi bagian paling penting dari sumber ini. Soekarno ditangkap setelah rapat dewan utama Partindo, dan penangkapannya dikaitkan dengan brosur “Mentjapai Indonesia Merdeka”, surat kabar *Fikiran Ra'jat*, serta sejumlah penyelidikan kriminal sebelumnya. Dalam framing *De Locomotief*, Soekarno tidak hanya dipandang sebagai tokoh politik biasa, tetapi sebagai pusat dari kegiatan nasionalis yang dianggap menimbulkan keresahan. Penyitaan peredaran *Fikiran Ra'jat* memperkuat gambaran bahwa pemerintah kolonial menganggap pers nasionalis sebagai sarana penting penyebaran gagasan radikal.³⁹⁴

Artikel ini juga memperlihatkan kesinambungan dengan pemberitaan tahun 1928-1929 mengenai PNI. Jika pada 1928 PNI tampil sebagai organisasi nasionalis non-kooperatif yang menuntut kemerdekaan, dan pada 1929 pemerintah melakukan penggeledahan serta penahanan terhadap tokoh-tokohnya, maka pada 1933 pola serupa muncul kembali terhadap Partindo dan PNI Baru. Perbedaannya, pada 1933 bahasa yang digunakan semakin tegas: organisasi-organisasi ini ditempatkan dalam kategori “ekstremis” dan aktivitasnya dibaca sebagai “penghasutan”. Dengan demikian, nasionalisme non-komunis tetap dipandang sebagai ancaman ketika bergerak melampaui batas kritik yang dapat diterima pemerintah kolonial.³⁹⁵

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ *Ibid.*

³⁹⁵ *Ibid.*

De Locomotief tidak lagi hanya mencatat munculnya nasionalisme Indonesia, tetapi juga menampilkan tindakan pemerintah untuk membatasi, menangkap, dan membungkam tokoh serta media yang dianggap radikal. Stabilitas kolonial menjadi alasan utama untuk membenarkan tindakan terhadap organisasi politik, pers, dan brosur nasionalis. Pada titik ini, nasionalisme Indonesia, meskipun berbeda dari komunisme, tetap dibingkai sebagai ancaman apabila menuntut kemerdekaan secara terbuka dan menggerakkan massa melalui tulisan serta rapat politik.³⁹⁶



Gambar 4.60 "De Politieke Toestand"

Sumber: *De Locomotief* 31 Juli 1934

Pemberitaan *De Locomotief* pada 31 Juli 1934 mengenai situasi politik memperlihatkan bagaimana pemerintah kolonial membenarkan tindakan keras terhadap organisasi dan tokoh nasionalis dengan alasan menjaga ketertiban umum. Dalam artikel tersebut, Komisaris Pemerintah untuk Urusan Umum, Peekema, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh dijadikan kambing hitam atas ketegangan politik yang terjadi.³⁹⁷

³⁹⁶ *Ibid.*

³⁹⁷ *Ibid.*

Pemerintah mengakui adanya berbagai kepentingan rasial, regional, dan sosial dalam komposisi Dewan Rakyat, tetapi menekankan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah kepentingan bersama seluruh penduduk. Dengan demikian, tindakan terhadap organisasi politik tidak digambarkan sebagai pembatasan kebebasan semata, melainkan sebagai upaya mencegah ketegangan yang dapat menimbulkan penderitaan lebih luas.³⁹⁸

Hal penting dari sumber ini adalah perbedaan yang dibuat pemerintah antara kebebasan berekspresi dan “kebebasan untuk menghasut”. Pemerintah menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan dimaksudkan untuk membatasi hak berkumpul atau kebebasan berbicara, tetapi untuk menghentikan propaganda agitator politik yang dianggap berbahaya. Dengan demikian, *De Locomotief* menampilkan argumen resmi bahwa kebebasan tetap dilindungi selama tidak berubah menjadi hasutan. Namun, batas antara kritik politik dan hasutan ditentukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Di sinilah terlihat penyempitan ruang politik: kebebasan diakui secara prinsip, tetapi praktiknya dibatasi oleh pertimbangan keamanan dan stabilitas.³⁹⁹

Artikel ini juga menjelaskan alasan pemerintah mengambil tindakan terhadap organisasi seperti PNI. Pemerintah melihat adanya kemungkinan penggulingan kekuasaan melalui aksi massa. Tindakan polisi yang semakin keras disebut justru dapat meningkatkan nilai propaganda pertemuan-pertemuan politik, sehingga pemerintah kemudian memilih langkah lain seperti pembatasan perjalanan, penahanan individu, dan pembatasan hak berkumpul bagi PNI serta cabang-cabangnya. Dalam konteks ini, tindakan terhadap Soekarno dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk “mengeliminasi” pemimpin utama gerakan agar pengaruhnya terhadap massa dapat dihentikan.⁴⁰⁰

Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pemerintah membedakan antara unsur “konstruktif” dan “ekstremis” dalam masyarakat pribumi. Pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap pengaduan, tetap melindungi kebebasan berekspresi, dan memandang

³⁹⁸ *Ibid.*

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ *Ibid.*

positif organisasi yang melakukan pekerjaan konstruktif. Namun, organisasi yang dianggap menjalankan propaganda ekstremis harus dibatasi. Dengan demikian, *De Locomotief* menunjukkan bahwa pada pertengahan 1930-an, dukungan terhadap kemajuan pribumi hanya diberikan kepada organisasi yang bekerja dalam batas aman kolonial. Nasionalisme yang mobilisatoris, non-kooperatif, atau berbasis aksi massa ditempatkan sebagai ancaman terhadap ketertiban.⁴⁰¹

Koran ini menampilkan pandangan pemerintah bahwa kebebasan politik masih dapat diterima selama bersifat konstruktif, tetapi harus dibatasi ketika dianggap berubah menjadi hasutan atau aksi ekstremis. Melalui artikel ini, terlihat bahwa tindakan terhadap Soekarno bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari kebijakan kolonial yang lebih luas untuk membatasi nasionalisme radikal non-kooperatif dan memberi ruang hanya kepada unsur pribumi yang dianggap aman serta konstruktif.⁴⁰²



Gambar 4.61 "Haat Gevoelens"

Sumber: *De Locomotief* 26 Oktober 1934

Pemberitaan *De Locomotief* pada 26 Oktober 1934 mengenai penahanan Soekarno memperlihatkan semakin kerasnya tindakan pemerintah kolonial terhadap nasionalisme

⁴⁰¹ *Ibid.*

⁴⁰² *Ibid.*

radikal non-kooperatif. Artikel tersebut memuat teks dekrit resmi pemerintah yang menetapkan Flores sebagai tempat kediaman Soekarno.⁴⁰³ Dalam dekrit itu, Soekarno digambarkan tetap melanjutkan aktivitas politiknya setelah bebas dari hukuman pada 31 Desember 1931, bahkan disebut tidak menunjukkan tanda-tanda “bertobat” dari jalan politik yang telah dipilihnya. Dengan demikian, *De Locomotief* menampilkan tindakan terhadap Soekarno bukan sebagai tindakan sesaat, melainkan sebagai hasil dari penilaian pemerintah terhadap aktivitas politiknya yang dianggap terus-menerus mengganggu ketertiban umum.⁴⁰⁴

Dalam dekrit tersebut, aktivitas Soekarno di Partindo ditempatkan sebagai bukti utama bahaya politiknya. Ia disebut menduduki posisi penting dalam cabang Bandung dan dewan utama Partindo, serta menjalankan aksi massa berdasarkan prinsip non-kooperasi. Pemerintah menilai bahwa melalui gerakan tersebut Soekarno berusaha menempatkan otoritas negara di tangan kaum Marhaen dan memutuskan ikatan kenegaraan dengan Belanda untuk mencapai Republik Indonesia. Framing ini menunjukkan bahwa nasionalisme Soekarno tidak lagi dibaca sebagai tuntutan politik biasa, tetapi sebagai upaya sistematis untuk melemahkan otoritas kolonial dan mengganti dasar kekuasaan negara.

Artikel ini juga memperlihatkan pentingnya pers dan tulisan dalam penilaian pemerintah terhadap Soekarno. Majalah *Fikiran Ra'jat* dan *Soeloeh Indonesia Moeda*, serta brosur “Mentjapai Indonesia Merdeka”, dipakai sebagai bukti bahwa Soekarno menyebarkan kebencian terhadap pemerintah dan mendorong kaum Marhaen untuk merebut kekuasaan negara. Dengan demikian, tindakan pemerintah terhadap Soekarno tidak hanya berkaitan dengan pidato dan organisasi, tetapi juga dengan produksi gagasan melalui media cetak. Ini memperkuat pola 1930-an bahwa pers nasionalis, brosur, dan propaganda politik diperlakukan sebagai ancaman terhadap ketertiban kolonial.⁴⁰⁵

Pemberitaan ini menunjukkan bagaimana hukum kolonial digunakan untuk membatasi nasionalisme. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Negara Hindia, Soekarno

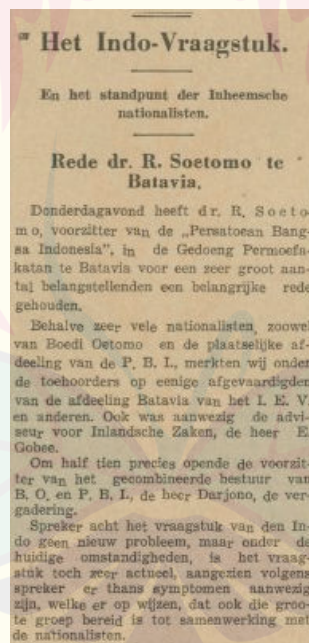
⁴⁰³ *De Locomotief*, 26 Oktober 1934.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

⁴⁰⁵ *Ibid.*

ditetapkan untuk tinggal di Flores demi kepentingan ketertiban umum. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak selalu membutuhkan proses pidana biasa untuk menyingkirkan tokoh politik yang dianggap berbahaya. Dengan dasar administratif, seseorang dapat dipindahkan jauh dari pusat aktivitas politiknya. Dalam kasus Soekarno, Flores berfungsi sebagai ruang isolasi politik yang memutus hubungan langsungnya dengan jaringan Partindo dan massa pendukungnya.⁴⁰⁶

Jika pada 1928 PNI masih tampil sebagai organisasi yang menyuarakan kemerdekaan, non-kooperasi, dan kebebasan politik, maka pada 1933-1934 negara kolonial mulai menindak tokoh-tokohnya melalui penangkapan, penyitaan pers, larangan berkumpul, dan pembuangan. *De Locomotief* dalam hal ini mengikuti bahasa resmi pemerintah yang menempatkan Soekarno sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Nasionalisme non-komunis pun, ketika menuntut Republik Indonesia dan menggerakkan massa Marhaen, dibingkai sebagai bahaya politik yang harus dipisahkan dari ruang publik kolonial.⁴⁰⁷



Gambar 4.62 "Het Indo Vraagstuk"

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ *Ibid.*

Sumber: *De Locomotief* 26 Oktober 1935

Pemberitaan *De Locomotief* pada 26 Oktober 1935 mengenai perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang RUU sanksi memperlihatkan bahwa isu kolonial pada pertengahan 1930-an mulai ditempatkan dalam konteks politik internasional. Perdebatan tersebut berkaitan dengan sikap Belanda terhadap konflik Abyssinia, Liga Bangsa-Bangsa, dan sanksi terhadap negara agresor. Dalam artikel ini, tokoh kiri seperti H.J.F.M. Sneevliet dan Roestam Effendi menyoroti perang kolonial dari sudut pandang anti-imperialisme. Sneevliet menyatakan harapannya agar Abyssinia menang karena kemenangan tersebut akan memiliki arti bagi bangsa-bangsa berwarna, sedangkan Roestam Effendi menilai penolakan terhadap sanksi dapat berarti dukungan terhadap perang kolonial.⁴⁰⁸

Artikel ini menunjukkan bahwa wacana kolonial tidak lagi hanya berkisar pada hubungan Hindia Belanda dan Negeri Belanda, tetapi juga terkait dengan perkembangan global seperti fasisme, imperialisme, dan posisi bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pertanyaan Roestam Effendi tentang apa yang akan dilakukan jika suatu negara fasis di Asia menaklukkan Indonesia memperlihatkan bahwa isu internasional dapat dipakai untuk membayangkan nasib Hindia Belanda sendiri. Dengan demikian, perdebatan mengenai Abyssinia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi cermin bagi persoalan kolonialisme, pertahanan, dan masa depan Indonesia.⁴⁰⁹

Dalam pemberitaan ini, *De Locomotief* mencatat perbedaan posisi antara kelompok kiri dan pemerintah Belanda. Sneevliet mengkritik Liga Bangsa-Bangsa sebagai instrumen kapitalis dan imperialistik, sementara Menteri Luar Negeri De Graeff menegaskan bahwa Belanda harus menghormati kewajibannya sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pemerintah Belanda dan Belgia disebut sepakat untuk berhati-hati dalam menerapkan sanksi. Dengan demikian, artikel ini memperlihatkan bagaimana politik kolonial dan internasional

⁴⁰⁸ *De Locomotief*, 26 Oktober 1935.

⁴⁰⁹ *Ibid.*

Setelah nasionalisme non-kooperatif di Hindia dibatasi melalui penangkapan, pengasingan, sensor pers, dan larangan berkumpul, isu luar negeri seperti Abyssinia menunjukkan bahwa kritik terhadap kolonialisme tetap muncul melalui jalur lain, terutama lewat tokoh kiri di parlemen Belanda. Dengan demikian, *De Locomotief* tidak hanya memberitakan kontrol terhadap nasionalisme di Hindia, tetapi juga mencatat bagaimana anti-imperialisme dibicarakan dalam arena internasional dan parlemen Belanda.⁴¹¹



Pemberitaan *De Locomotief* pada 30 Desember 1935 mengenai Kongres Penggabungan Boedi Oetomo dan Persatoean Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raja atau Parindra memperlihatkan arah baru dalam perkembangan nasionalisme Indonesia pada pertengahan 1930-an. Jika pada 1933-1934 pemberitaan banyak menyoroti tindakan keras terhadap Partindo, PNI Baru, dan Soekarno, maka sumber ini menampilkan bentuk organisasi nasionalis yang lebih tertib, terbuka, dan diterima dalam ruang sosial-politik

411 *Ibid.*

kolonial.⁴¹² Kongres penggabungan yang diadakan di Habiprojo, Solo, digambarkan berlangsung sukses dan meriah, dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah, pejabat, tamu undangan, serta tokoh-tokoh penting masyarakat pribumi.⁴¹³

Kehadiran pejabat dan tokoh terkemuka dalam kongres tersebut menunjukkan bahwa Parindra sejak awal tampil berbeda dari organisasi nasionalis radikal non-kooperatif. Dalam acara pembukaan, hadir perwakilan Susuhunan, pejabat kolonial, anggota Volksraad seperti M.H. Thamrin, R.P. Soeroso, R. Prawoto, R. Soekardjo Wirjopranoto, I.J. Kasimo, serta tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Kehadiran unsur elite pribumi, pejabat, dan tokoh masyarakat ini memperlihatkan bahwa Parindra ditempatkan sebagai organisasi yang memiliki legitimasi sosial lebih luas dan tidak langsung dibingkai sebagai ancaman keamanan. Dengan demikian, *De Locomotief* menampilkan Parindra sebagai organisasi nasionalis yang lebih dapat diterima dalam batas politik kolonial dibandingkan Partindo atau PNI Baru.⁴¹⁴

Simbolisme penggabungan juga penting. Dalam kongres tersebut, bendera Boedi Oetomo dan Persatoean Bangsa Indonesia digulung, lalu bendera hijau-merah-putih Parindra dikibarkan sebagai tanda lahirnya partai baru. Peristiwa ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan dalam sejarah organisasi pribumi. Boedi Oetomo sebagai organisasi nasional tertua dan Persatoean Bangsa Indonesia sebagai organisasi yang lebih baru dilebur ke dalam wadah baru yang diharapkan mampu menampung aspirasi politik yang lebih luas. Dengan cara ini, Parindra dapat dibaca sebagai usaha menyatukan tradisi organisasi lama yang moderat dengan semangat nasionalisme baru yang lebih terorganisasi.⁴¹⁵

⁴¹² *De Locomotief*, 30 Desember 1935.

⁴¹³ *Ibid.*

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*

Terpilihnya Dr. Soetomo sebagai ketua Parindra juga memiliki makna penting. Soetomo adalah tokoh yang memiliki hubungan historis dengan Boedi Oetomo dan dikenal sebagai figur yang lebih moderat dibandingkan tokoh nasionalis radikal seperti Soekarno. Dalam framing *De Locomotief*, kepemimpinan Soetomo membuat Parindra tampak sebagai organisasi nasionalis yang lebih konstruktif dan tidak konfrontatif. Hal ini sesuai dengan pola pemberitaan 1930-an, ketika pemerintah kolonial dan pers kolonial lebih dapat menerima organisasi pribumi yang bekerja dalam jalur legal, sosial, pendidikan, dan perwakilan, sementara gerakan yang menekankan aksi massa, non-kooperasi, atau Republik Indonesia dipandang lebih berbahaya.⁴¹⁶ Parindra muncul sebagai model nasionalisme yang lebih terorganisasi, lebih terbuka terhadap kerja kelembagaan, dan lebih mudah diterima oleh kalangan elite serta pemerintah.



Gambar 4.64 "Parindra"

Sumber: *De Locomotief* 12 Maret 1936.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 12 Maret 1936 mengenai kegiatan propaganda publik Parindra memperlihatkan bahwa organisasi nasionalis moderat masih memperoleh ruang bergerak dalam batas legal kolonial. Cabang Semarang Parindra diberitakan akan mengadakan pertemuan publik di Gedong Rajat Indonesia, didahului oleh rapat tertutup

⁴¹⁶ *Ibid.*

anggota. Informasi mengenai pembicara, susunan pengurus sementara, serta perjalanan Dr. Soetomo dan R. Soekardjo Wirjopranoto ke Jepang menunjukkan bahwa Parindra tampil sebagai organisasi yang tertib, terstruktur, dan terbuka. Dalam framing *De Locomotief*, Parindra tidak ditempatkan sebagai organisasi ekstremis, melainkan sebagai partai yang menjalankan propaganda politik secara resmi dan terorganisasi.⁴¹⁷

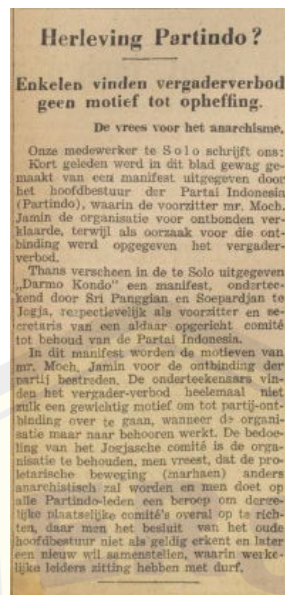
Artikel ini memperlihatkan bahwa Parindra memiliki jaringan kepemimpinan yang jelas. Ketika Dr. Soetomo melakukan perjalanan studi ke luar negeri, organisasi membentuk pengurus utama sementara dengan Woerjaningrat sebagai ketua, Soedirman sebagai wakil ketua, dan Roeslan Wongso Koesoemo sebagai sekretaris jenderal. Penekanan pada struktur organisasi ini penting karena memperlihatkan bahwa Parindra dibaca sebagai partai yang stabil dan administratif, berbeda dari organisasi yang sebelumnya dibingkai sebagai ekstremis atau menghasut. Dengan demikian, *De Locomotief* cenderung menempatkan Parindra sebagai bentuk nasionalisme yang lebih dapat diterima dalam ruang politik kolonial.⁴¹⁸

Pemberitaan ini juga menarik karena menyebut perjalanan Dr. Soetomo dan Soekardjo Wirjopranoto ke Jepang dan Manila. Walaupun tidak dijelaskan panjang, informasi ini menunjukkan bahwa nasionalisme moderat Indonesia pada pertengahan 1930-an tidak sepenuhnya lokal, tetapi juga memperhatikan perkembangan Asia. Namun, berbeda dari framing terhadap komunisme internasional yang selalu dibaca sebagai ancaman Moskow, perjalanan tokoh Parindra ke Jepang diberitakan dengan nada administratif dan tidak langsung dicurigai sebagai subversi. Ini menunjukkan perbedaan perlakuan *De Locomotief* terhadap jaringan luar negeri: hubungan internasional komunis dibaca sebagai bahaya, sedangkan aktivitas studi tokoh moderat masih dapat diberitakan secara wajar.⁴¹⁹

⁴¹⁷ *De Locomotief*, 12 Maret 1936.

⁴¹⁸ *Ibid.*

⁴¹⁹ *Ibid.*



Gambar 4.65 "Herleving Partindo?"

Sumber: *De Locomotief* 8 Desember 1936.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 8 Desember 1936 mengenai kemungkinan “kebangkitan Partindo” menunjukkan kondisi berbeda dari nasionalisme radikal non-kooperatif. Artikel tersebut membahas manifesto dari komite di Yogyakarta yang ingin mempertahankan Partindo setelah dewan utama lama menyatakan pembubaran organisasi.⁴²⁰ Alasan pembubaran yang dikaitkan dengan larangan rapat dipertanyakan oleh komite tersebut. Mereka menilai bahwa larangan rapat tidak cukup kuat untuk membubarkan partai selama organisasi masih berfungsi dengan baik. Dengan demikian, sumber ini memperlihatkan adanya perpecahan internal dalam Partindo setelah tekanan pemerintah kolonial.⁴²¹

Bagian penting dari artikel ini adalah kekhawatiran bahwa gerakan proletar atau Marhaen akan berubah menjadi anarkis apabila Partindo tidak dipertahankan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Partindo masih dipandang sebagai wadah yang dapat mengarahkan massa radikal agar tetap berada dalam organisasi. Jika partai dibubarkan, dikhawatirkan

⁴²⁰ *De Locomotief*, 8 Desember 1936.

⁴²¹ *Ibid.*

energi politik Marhaen justru menjadi tidak terkendali. Dalam framing *De Locomotief*, kekhawatiran tersebut memperkuat citra Partindo sebagai organisasi yang berada di dekat batas antara nasionalisme radikal dan potensi anarkisme. Ini berbeda tajam dari Parindra yang dibingkai lebih tertib, legal, dan administratif.⁴²²

Pemberitaan juga memperlihatkan bahwa setelah penangkapan dan pembuangan Soekarno, Partindo mengalami krisis kepemimpinan dan arah. Komite Yogyakarta menyerukan agar anggota membentuk komite lokal di berbagai tempat, tidak lagi mengakui keputusan dewan utama lama, dan kelak membentuk dewan baru yang diisi oleh “pemimpin sejati yang berani”. Bahasa semacam ini menunjukkan bahwa Partindo masih memiliki sisa semangat radikal, tetapi tidak lagi memiliki kepemimpinan terpusat yang kuat. Dengan demikian, artikel ini dapat dibaca sebagai bukti melemahnya nasionalisme non-kooperatif setelah represi kolonial pada 1933-1934.⁴²³



Gambar 4.66 ” Eerste Ledenvergadering Gerindo”

Sumber: *De Locomotief* 6 Agustus 1937.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 6 Agustus 1937 mengenai pertemuan anggota pertama Gerindo menunjukkan bahwa setelah pembubaran Partindo, nasionalisme Indonesia tidak menghilang, tetapi berusaha menyesuaikan diri dengan iklim politik kolonial yang

⁴²² *Ibid.*

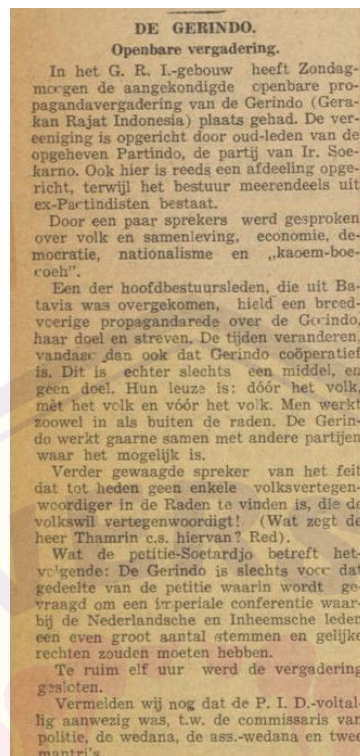
⁴²³ *Ibid.*

semakin ketat. Gerindo disebut sebagai organisasi baru yang menggantikan Partindo yang telah dibubarkan. Pertemuan anggota pertamanya di Batavia dihadiri sekitar 500 orang, termasuk 50 perempuan. Jumlah kehadiran ini menunjukkan bahwa basis politik bekas Partindo masih memiliki daya tarik, meskipun organisasi tersebut kini hadir dalam bentuk baru.⁴²⁴

Hal penting dari sumber ini adalah keterangan bahwa Gerindo menganjurkan kerja sama, berbeda dengan Partindo. Perubahan ini memperlihatkan pergeseran strategi dari nasionalisme non-kooperatif menuju bentuk politik yang lebih kooperatif. Dalam konteks pasca-penangkapan dan pembuangan Soekarno, pilihan Gerindo untuk menempuh kerja sama dapat dibaca sebagai usaha agar gerakan nasionalis tetap hidup tanpa langsung berhadapan secara frontal dengan pemerintah kolonial. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat perubahan penting dalam strategi gerakan nasionalis: bukan meninggalkan cita-cita politik, tetapi menyesuaikan cara perjuangan agar tetap dapat bergerak di ruang publik.⁴²⁵

⁴²⁴ *De Locomotief*, 6 Agustus 1937.

⁴²⁵ *Ibid.*



Gambar 4.67 "De Gerindo"

Sumber: *De Locomotief* 1 November 1937.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 1 November 1937 mengenai pertemuan publik Gerindo di Semarang memperjelas arah politik organisasi tersebut. Gerindo disebut didirikan oleh mantan anggota Partindo, sementara pengurus cabangnya sebagian besar juga terdiri dari bekas anggota Partindo. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan personal dan politik antara Partindo dan Gerindo, meskipun strategi yang dipilih berbeda. Jika Partindo sebelumnya identik dengan nasionalisme radikal dan non-kooperatif, Gerindo tampil dengan sikap yang lebih kooperatif serta menyatakan kesediaan bekerja baik di dalam maupun di luar dewan.⁴²⁶

Dalam pertemuan tersebut, para pembicara membahas tema rakyat dan masyarakat, ekonomi, demokrasi, nasionalisme, serta kaum buruh. Salah satu anggota pengurus utama menjelaskan bahwa zaman telah berubah, sehingga Gerindo memilih sikap kooperatif.

⁴²⁶ *De Locomotief*, 1 November 1937.

Namun, kerja sama itu ditegaskan hanya sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Motto “oleh rakyat, bersama rakyat, untuk rakyat” menunjukkan bahwa Gerindo tetap mempertahankan bahasa politik kerakyatan. Dengan demikian, kerja sama yang ditempuh Gerindo bukan berarti meninggalkan nasionalisme, melainkan menjadi strategi baru dalam kondisi politik yang lebih represif.⁴²⁷

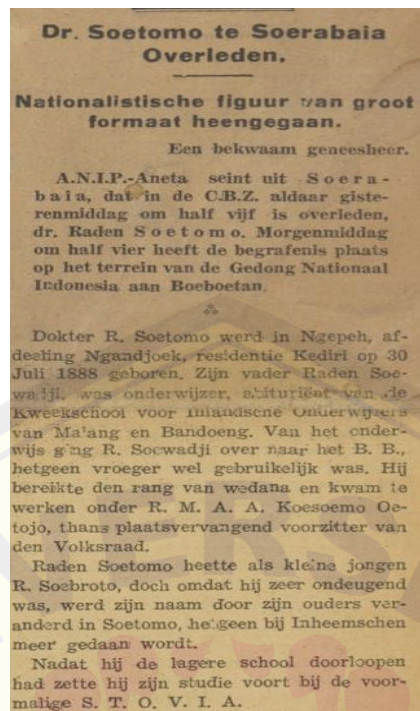
Dalam artikel ini Gerindo masih mengkritik representasi kolonial. Pernyataan bahwa belum ada wakil rakyat di dewan yang benar-benar mewakili kehendak rakyat menunjukkan bahwa Gerindo tetap memandang lembaga kolonial belum demokratis. Namun, berbeda dari Partindo yang menolak kerja sama, Gerindo memilih bekerja di dalam dan di luar dewan. Sikap ini memperlihatkan bentuk nasionalisme yang lebih taktis: memanfaatkan ruang legal kolonial tanpa sepenuhnya menerima legitimasi politik kolonial.⁴²⁸

Pemberitaan ini juga menunjukkan bahwa aktivitas Gerindo tetap berada dalam pengawasan ketat. Disebutkan bahwa seluruh unsur P.I.D. hadir, termasuk komisarisi polisi, wedana, asisten wedana, dan dua mantri. Kehadiran aparat ini memperlihatkan bahwa meskipun Gerindo mengambil sikap kooperatif, pemerintah kolonial tetap mengawasi organisasi yang berasal dari bekas jaringan Partindo.⁴²⁹

⁴²⁷ *Ibid.*

⁴²⁸ *Ibid.*

⁴²⁹ *Ibid.*



Gambar 4.68 "Dr. Soetomo te Soerabaia Overleden"

Sumber: *De Locomotief* 31 Mei 1938.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 31 Mei 1938 mengenai wafatnya Dr. Soetomo memperlihatkan bahwa koran ini membingkai tokoh nasionalis moderat dengan nada penghormatan. Artikel tersebut menyebut Soetomo sebagai tokoh nasionalis terkemuka yang telah tiada, sekaligus menekankan latar belakangnya sebagai dokter yang terampil. Riwayat hidupnya dijelaskan cukup panjang, mulai dari kelahiran di Nganjuk, pendidikan di STOVIA, pengabdian sebagai dokter pemerintah, penugasan di berbagai daerah, hingga studi lanjut di Belanda dan Eropa. Dengan demikian, *De Locomotief* menampilkan Soetomo bukan sebagai agitator politik, melainkan sebagai tokoh pribumi terdidik yang memiliki jasa dalam bidang kedokteran, pendidikan, dan organisasi.⁴³⁰

Artikel ini memperlihatkan perbedaan framing *De Locomotief* terhadap tokoh nasionalis. Berbeda dari Soekarno yang dalam pemberitaan 1933-1934 dibingkai sebagai

⁴³⁰ *De Locomotief*, 31 Mei 1938.

tokoh non-kooperatif yang menghasut massa dan membahayakan ketertiban umum, Soetomo ditampilkan sebagai figur nasionalis yang lebih dapat diterima. Ia memiliki jejak pendidikan Barat, bekerja dalam sistem kesehatan kolonial, mengajar di NIAS, serta aktif dalam organisasi dengan corak yang lebih moderat. Dengan demikian, wafatnya Soetomo diberitakan sebagai kehilangan seorang tokoh penting, bukan sebagai hilangnya ancaman politik.⁴³¹

Artikel ini juga menegaskan peran Soetomo dalam sejarah organisasi pribumi. Ia disebut sebagai salah satu pendiri Boedi Oetomo ketika masih menjadi mahasiswa STOVIA, dan juga dikaitkan dengan Perhimpunan Indonesia ketika berada di Belanda. Penyebutan ini menunjukkan bahwa Soetomo dipahami sebagai tokoh yang menjembatani fase awal gerakan pribumi dengan perkembangan nasionalisme yang lebih matang. Namun, karena pada pertengahan 1930-an ia juga menjadi figur penting dalam Parindra, pemberitaan ini dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap jalur nasionalisme moderat yang lebih konstruktif dan legal.⁴³²

Dalam konteks periode 1928-1940, sumber ini memperkuat pola bahwa *De Locomotief* tidak menolak semua bentuk nasionalisme. Nasionalisme yang radikal, non-kooperatif, atau berbasis aksi massa keras dibingkai sebagai ancaman, sedangkan nasionalisme yang bergerak melalui pendidikan, kesehatan, organisasi legal, dan kerja sosial-politik moderat masih dapat dihormati. Soetomo menjadi contoh figur nasionalis yang dapat diterima dalam batas politik kolonial karena aktivitasnya tidak diposisikan sebagai usaha langsung menggulingkan otoritas negara.⁴³³

Setelah tahun-tahun sebelumnya koran ini memberitakan penangkapan Soekarno, sensor pers, pembatasan Partindo, serta pengawasan Gerindo, wafatnya Soetomo diberitakan dengan nada biografis dan apresiatif. Ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* membedakan antara nasionalisme yang dianggap ekstrem dan nasionalisme yang dianggap konstruktif.

⁴³¹ *Ibid.*

⁴³² *Ibid.*

⁴³³ *Ibid.*

Dalam kerangka ini, Soetomo ditempatkan sebagai simbol nasionalisme moderat yang berakar pada pendidikan, pelayanan, dan organisasi legal.⁴³⁴



Gambar 4.69 "Nationale Concentratie"

Sumber: *De Locomotief* 22 Mei 1939.

Pemberitaan *De Locomotief* pada 22 Mei 1939 mengenai pendirian Gaboengan Politik Indonesia memperlihatkan perkembangan penting dalam gerakan nasionalis menjelang akhir 1930-an. Artikel tersebut melaporkan bahwa di Batavia, di bawah pimpinan M.H. Thamrin, dilakukan diskusi antara delegasi berbagai partai politik pribumi mengenai pembentukan lembaga Konsentrasi Nasional. Pertemuan itu dihadiri oleh wakil dari P.S.I.I., P.I.I., Pasoendan, Partij Sarekat Minahassa, Gerindo, dan Parindra, sementara P.K.K.I. menyatakan persetujuan secara prinsip. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat adanya usaha menyatukan berbagai kekuatan politik pribumi dalam satu wadah bersama.⁴³⁵

Pemberitaan ini menunjukkan bahwa setelah masa penindakan terhadap PNI, Partindo, dan tokoh-tokoh nasionalis radikal, gerakan politik Indonesia tidak berhenti, tetapi mengambil bentuk yang lebih terkoordinasi. GAPI tidak muncul sebagai organisasi tunggal

⁴³⁴ *Ibid.*

⁴³⁵ *De Locomotief*, 22 Mei 1939.

yang menggantikan partai-partai lama, melainkan sebagai federasi atau konsentrasi politik yang menghubungkan berbagai organisasi dengan latar belakang berbeda. Kehadiran Parindra dan Gerindo dalam satu forum juga memperlihatkan bahwa unsur nasionalis moderat dan bekas arus Partindo dapat bertemu dalam strategi bersama. Ini menunjukkan perubahan dari fragmentasi menuju konsolidasi politik.⁴³⁶

Pemilihan tokoh-tokoh seperti M.H. Thamrin dari Parindra sebagai bendahara, Amir Sjarifuddin dari Gerindo sebagai komisaris, dan Abikoesno Tjokrosoejoso dari P.S.I.I. sebagai sekretaris jenderal memperlihatkan bahwa GAPI dibangun oleh tokoh lintas organisasi. Susunan ini penting karena menunjukkan bahwa gerakan nasionalis akhir 1930-an tidak hanya bertumpu pada satu figur seperti Soekarno atau Soetomo, tetapi mulai bergerak melalui kepemimpinan kolektif. Dalam konteks ini, GAPI dapat dibaca sebagai bentuk baru nasionalisme legal yang lebih pragmatis dan terorganisasi.⁴³⁷

Artikel ini juga menunjukkan bahwa GAPI sejak awal menyiapkan program kerja dan aksi, serta merencanakan Kongres Indonesia pertama pada bulan Desember. Hal ini memperlihatkan bahwa konsentrasi politik tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diarahkan untuk membangun agenda bersama. Dalam konteks politik kolonial yang semakin ketat sejak awal 1930-an, pembentukan GAPI menunjukkan kemampuan organisasi-organisasi pribumi untuk menyesuaikan strategi: tidak lagi mengandalkan aksi massa radikal atau non-kooperasi keras, tetapi membangun tekanan politik melalui persatuan organisasi, program bersama, dan jalur legal.⁴³⁸

Dengan demikian, artikel 22 Mei 1939 memperkuat gambaran bahwa fase 1928-1940 tidak hanya ditandai oleh represi dan pengawasan, tetapi juga oleh konsolidasi nasionalisme yang semakin matang. Jika pada 1928 PNI tampil dengan nasionalisme non-kooperatif, pada 1933-1934 pemerintah menindas Partindo dan Soekarno, lalu pada 1935-1937 muncul Parindra dan Gerindo sebagai bentuk nasionalisme yang lebih kooperatif, maka pada 1939

⁴³⁶ *Ibid.*

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ *Ibid.*

GAPI menunjukkan tahap baru: penyatuan berbagai partai politik Indonesia dalam wadah bersama. Dalam framing *De Locomotief*, perkembangan ini menunjukkan bahwa politik pribumi tetap bergerak, tetapi dengan bentuk yang lebih legal, kolektif, dan terstruktur.⁴³⁹

Menjelang akhir tahun 1939, pemberitaan *De Locomotief* mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan politik internasional, terutama meningkatnya ketegangan di Eropa akibat ekspansi Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler. Pergerakan militer dan politik Jerman dipandang sebagai faktor penting yang dapat memicu pecahnya perang besar di Eropa.⁴⁴⁰



Gambar 4.70 "De Koningin en de Prinses te Amsterdam"

Sumber : *De Locomotief*, 19 Maret 1940.

Dalam konteks tersebut, penerbitan terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah edisi 19 Maret 1940. Edisi ini menjadi penting karena bertepatan dengan semakin ketatnya kontrol pemerintah kolonial terhadap arus informasi.⁴⁴¹ Pemerintah Hindia Belanda mengumumkan berlakunya keadaan perang pada tahun 1940, yang berdampak langsung pada pengawasan terhadap surat kabar, pos, telegraf, dan telepon. Dengan demikian, ruang

⁴³⁹ *Ibid.*

⁴⁴⁰ *De Locomotief*, 29 Januari 1940.

⁴⁴¹ *Ibid.*

pemberitaan menjadi semakin terbatas karena informasi yang dianggap berkaitan dengan keamanan negara berada di bawah sensor pemerintah.⁴⁴²

Secara keseluruhan, pemberitaan *De Locomotief* pada periode 1928-1940 memperlihatkan perubahan fokus dari ancaman komunisme menuju nasionalisme non-kooperatif, pengawasan politik, sensor pers, dan akhirnya kontrol informasi dalam situasi perang. Setelah pemberontakan komunis 1926-1927, ruang politik Hindia Belanda tidak menjadi kosong, tetapi diisi oleh bentuk gerakan baru, terutama PNI yang tampil dengan bahasa kemerdekaan, non-kooperasi, hak berserikat, hak berkumpul, dan kebebasan pers. Dalam pemberitaan tahun 1928, PNI tidak dibingkai sebagai gerakan komunis, tetapi tetap dipandang sebagai organisasi yang menantang tatanan kolonial karena menolak kerja sama dengan pemerintah dan berusaha membangun kekuatan nasional di luar struktur kolonial.

Pemberitaan mengenai PNI pada 1928-1929 menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia mulai tampil sebagai kekuatan politik yang terorganisasi, memiliki simbol, jaringan, tokoh, serta program sosial-ekonomi. Namun, justru karena kekuatan tersebut, pemerintah kolonial mulai memperlakukannya sebagai objek pengawasan keamanan. Penggeledahan, penyitaan dokumen, pemeriksaan tokoh, dan pemindahan Soekarno serta para pemimpin PNI menunjukkan bahwa nasionalisme non-kooperatif telah memasuki kategori ancaman politik. Dengan demikian, *De Locomotief* mencatat bahwa setelah komunisme, negara kolonial mulai mengarahkan perhatian pada gerakan nasionalis yang tidak memakai bahasa revolusi komunis, tetapi tetap menolak legitimasi kolonial.

Pada awal 1930-an, tekanan politik tersebut berlangsung bersamaan dengan malaise ekonomi. Dalam pemberitaan 1930, *De Locomotief* mengakui adanya penurunan harga ekspor, kesulitan anggaran, tekanan terhadap penduduk, dan kebutuhan penghematan, tetapi menolak menyebut keadaan Hindia Belanda sebagai krisis total. Sikap ini memperlihatkan bahwa koran tersebut berusaha mempertahankan narasi stabilitas ekonomi kolonial. Dengan kata lain, pada saat gerakan nasionalis semakin diawasi, kondisi ekonomi juga dibingkai agar tidak menimbulkan kepanikan sosial-politik yang lebih besar.

⁴⁴² *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 582, 1939.

Pemberitaan tahun 1931 mengenai peraturan pers menunjukkan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers mulai ditempatkan di bawah pertimbangan ketertiban. *De Locomotief* tetap mengakui kebebasan pers sebagai prinsip liberal, tetapi mendukung pembatasan ketika pers dianggap tidak bertanggung jawab atau berpotensi menyebarkan agitasi. Di sini tampak perubahan penting: pers yang pada masa *Politik Etis* dapat menjadi alat kritik terhadap pemerintah, pada awal 1930-an mulai dilihat sebagai ruang yang perlu dikendalikan. Sensor dan peraturan pers menjadi bagian dari usaha kolonial untuk mengontrol organisasi, rapat, tulisan, brosur, dan sirkulasi gagasan nasionalis.

Pemberitaan tahun 1932-1934 memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak berhenti setelah penindakan terhadap PNI, tetapi mengalami fragmentasi dan perubahan bentuk. PRI, PNI Baru, Partindo, dan kelompok Marhaen menunjukkan bahwa gagasan kemerdekaan, anti-imperialisme, ekonomi nasional, serta politik kerakyatan tetap hidup dalam berbagai jalur. Namun, semakin organisasi tersebut memakai bahasa aksi massa, non-kooperasi, Republik Indonesia, atau pengambilalihan kekuasaan oleh rakyat, semakin kuat pula kecenderungan pemerintah dan *De Locomotief* untuk membingkainya sebagai ancaman. Penangkapan Soekarno, penyitaan *Fikiran Ra'jat*, pembatasan rapat, dan pembuangan ke Flores memperlihatkan penyempitan ruang nasionalisme radikal non-kooperatif.

Namun, periode ini tidak hanya berisi represi. Pada pertengahan 1930-an, *De Locomotief* juga memberitakan munculnya organisasi nasionalis yang lebih moderat dan legal, terutama Parindra. Penggabungan Boedi Oetomo dan Persatoean Bangsa Indonesia menjadi Parindra diberitakan dengan nada lebih positif karena organisasi ini tampil tertib, terbuka, memiliki kepemimpinan jelas, serta diterima oleh elite pribumi dan pejabat. Wafatnya Dr. Soetomo pada 1938 juga diberitakan secara hormat sebagai kehilangan tokoh nasionalis terkemuka, dokter, pendidik, dan organisator. Hal ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak menolak seluruh bentuk nasionalisme, tetapi membedakan antara nasionalisme yang dianggap konstruktif dan nasionalisme yang dianggap ekstrem.

Gerindo dan GAPI memperlihatkan perkembangan lebih lanjut dari nasionalisme legal pada akhir 1930-an. Gerindo, yang berasal dari bekas unsur Partindo, memilih jalan kooperatif agar tetap dapat bergerak dalam ruang politik yang terbatas. Walaupun demikian,

aktivitasnya tetap diawasi aparat, yang menunjukkan bahwa asal-usul radikal organisasi tetap menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, pendirian GAPI pada 1939 menunjukkan bahwa gerakan politik Indonesia memasuki tahap konsolidasi lintas organisasi. Parindra, Gerindo, PSII, PII, Psoendan, dan Sarekat Minahasa bergabung dalam satu konsentrasi politik yang lebih legal, kolektif, dan terstruktur. Dengan demikian, nasionalisme akhir 1930-an tidak hilang, melainkan menyesuaikan strategi dari konfrontasi langsung menuju konsolidasi organisasi dan tekanan politik legal.

Akhir periode 1939-1940 memperlihatkan perubahan konteks yang lebih luas, yaitu masuknya Hindia Belanda ke dalam bayang-bayang perang dunia. Meningkatnya ketegangan di Eropa akibat ekspansi Nazi Jerman membuat perhatian pemberitaan bergeser dari dinamika internal gerakan pribumi menuju keamanan kolonial dan kontrol informasi. Edisi terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu 19 Maret 1940, menunjukkan semakin ketatnya pengawasan pemerintah terhadap surat kabar, pos, telegraf, dan telepon. Dengan berlakunya keadaan perang, ruang pers semakin dibatasi oleh kepentingan keamanan negara.

Dengan demikian, periode 1928-1940 memperlihatkan bahwa *De Locomotief* semakin menempatkan stabilitas kolonial sebagai ukuran utama dalam menilai gerakan politik dan kebebasan pers. Nasionalisme non-kooperatif seperti PNI dan Partindo dibingkai sebagai ancaman karena menuntut kemerdekaan, menolak kerja sama, menggerakkan massa, dan menggunakan pers sebagai alat propaganda. Sebaliknya, organisasi yang lebih legal dan kooperatif seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI masih dapat diberitakan dengan nada lebih wajar, meskipun tetap berada dalam pengawasan. Pada akhir periode, kontrol atas pers mencapai bentuk paling kuat melalui sensor perang. Maka, 1928-1940 dapat dilihat sebagai fase ketika ruang politik pribumi tetap bergerak, tetapi semakin dibatasi oleh pengawasan, hukum penghasutan, sensor pers, dan kepentingan keamanan kolonial.

4.3 Dampak Pemberitaan Surat Kabar *De Locomotief* dalam Bidang Sosial dan Politik

4.3.1 Dampak Politik

Pemberitaan surat kabar *De Locomotief* tidak hanya memperlihatkan isi berita dan pandangan redaksional, tetapi juga memiliki dampak dalam bidang sosial dan politik di Hindia Belanda. Dampak yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak dipahami sebagai dampak langsung terhadap pembaca secara individual, melainkan sebagai dampak wacana, yaitu bagaimana pemberitaan *De Locomotief* ikut membentuk cara pandang kolonial terhadap kebijakan pemerintah, gerakan pribumi, komunisme, nasionalisme, dan ketertiban politik. Dalam hal ini, dampak pemberitaan *De Locomotief* dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu dampak eksternal dan dampak internal.

Dampak eksternal berkaitan dengan posisi *De Locomotief* sebagai bagian dari ruang pers kolonial yang ikut membentuk opini dan perdebatan politik di Hindia Belanda. Melalui pemberitaannya, *De Locomotief* turut memperkuat wacana mengenai perlunya perbaikan kebijakan kolonial, pengawasan terhadap gerakan politik pribumi, serta pembatasan terhadap gerakan yang dianggap mengancam ketertiban. Sementara itu, dampak internal berkaitan dengan perubahan orientasi politik di dalam tubuh redaksi *De Locomotief* sendiri. Pergantian pemimpin redaksi membawa perbedaan karakter, latar belakang, dan kecenderungan politik yang berpengaruh terhadap cara surat kabar ini membingkai kebijakan kolonial, gerakan pribumi, komunisme, nasionalisme, dan sensor pers.

Dampak eksternal pemberitaan *De Locomotief* dalam bidang politik dapat dilihat dari perannya sebagai bagian dari ruang pers kolonial yang ikut membentuk wacana politik di Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, *De Locomotief* dikenal memiliki kecenderungan etis. Surat kabar ini mendukung gagasan Politik Etis yang menekankan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya boleh memanfaatkan sumber daya Hindia Belanda, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kemakmuran, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk pribumi.⁴⁴³ Pada masa pengaruh Pieter Brooshooft, *De Locomotief* gencar mengkritik kebijakan kolonial yang dianggap merugikan Hindia Belanda. Gagasan seperti Hutang Kehormatan, Politik Etis, dan Balas Budi sering digunakan dalam artikel-artikel yang

⁴⁴³ *De Locomotief*, 17 Juni 1901.

mengkritik kinerja pemerintah kolonial. Setelah Politik Etis diberlakukan, kritik Brooshooft juga menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan gagasan awalnya, karena masih banyak persoalan pribumi yang belum diselesaikan secara nyata.⁴⁴⁴

Perkembangan pers dan organisasi pribumi pada awal abad ke-20 turut memperluas ruang politik di Hindia Belanda. Munculnya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij menunjukkan bahwa pendidikan dan pers telah mendorong lahirnya kesadaran politik baru di kalangan pribumi. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial mulai memandang pers sebagai ruang yang perlu diawasi karena dapat menjadi sarana kritik, penyebaran gagasan, dan mobilisasi politik. Oleh karena itu, pembatasan dan pengawasan pers pada tahun 1913 dapat dipahami sebagai bagian dari respons pemerintah kolonial terhadap berkembangnya ruang publik politik di Hindia Belanda.⁴⁴⁵ *De Locomotief* tidak berdiri sebagai satu-satunya penyebab munculnya kebijakan tersebut, tetapi menjadi bagian dari dinamika pers kolonial yang menunjukkan bahwa media telah menjadi unsur penting dalam perdebatan politik kolonial.

Setelah munculnya ISDV dan tokoh-tokoh sosialis seperti Henk Sneevliet, *De Locomotief* mulai memperlihatkan sikap yang lebih curiga terhadap gerakan politik yang dianggap membawa pengaruh revolusioner.⁴⁴⁶ Sneevliet dan kelompok sosialis dipandang bukan hanya sebagai bagian dari perdebatan politik biasa, melainkan sebagai unsur yang dapat mendorong agitasi massa, pemogokan, dan perlawanan terhadap ketertiban kolonial. Dengan demikian, pemberitaan *De Locomotief* ikut membentuk pandangan bahwa sosialisme radikal dan komunisme merupakan ancaman terhadap stabilitas politik di Hindia Belanda.

Sikap *De Locomotief* terhadap komunisme memperlihatkan batas dukungan surat kabar ini terhadap kritik sosial. Di satu sisi, *De Locomotief* masih dapat mengakui adanya persoalan sosial-ekonomi seperti rendahnya upah, buruknya kondisi kerja, dan lemahnya

⁴⁴⁴ *De Locomotief*, 7 Agustus 1901.

⁴⁴⁵ *De Locomotief*, 7 Agustus 1913.

⁴⁴⁶ *De Locomotief*, 4 Januari 1917.

posisi buruh pribumi. Akan tetapi, ketika persoalan buruh tersebut dikaitkan dengan ISDV, Sneevliet, Bolshevisme, dan kemudian PKI, surat kabar ini mulai menempatkannya sebagai persoalan keamanan politik.⁴⁴⁷ Dengan kata lain, tuntutan buruh yang semula dapat dipahami sebagai persoalan sosial berubah menjadi ancaman ketika dibingkai dalam ideologi komunisme dan perjuangan kelas.

Pemberitaan semacam ini berdampak pada terbentuknya batas antara gerakan sosial yang dianggap sah dan gerakan politik yang dianggap berbahaya. Gerakan yang menuntut perbaikan kesejahteraan masih dapat diterima selama berada dalam jalur legal dan tidak menantang otoritas kolonial secara langsung. Sebaliknya, gerakan yang menggunakan mobilisasi massa, pemogokan, propaganda revolusioner, atau hubungan dengan jaringan komunis internasional ditempatkan sebagai gerakan radikal yang perlu diawasi. Dalam konteks ini, *De Locomotief* berperan dalam memperkuat wacana kolonial yang membedakan antara kritik sosial yang dapat ditoleransi dan gerakan politik yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Penolakan *De Locomotief* terhadap Sneevliet dan komunisme juga memperlihatkan kekhawatiran pers kolonial terhadap masuknya ideologi transnasional ke dalam politik Hindia Belanda. Komunisme tidak hanya dipandang sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari arus revolusioner internasional yang dapat memengaruhi kaum buruh, organisasi pribumi, dan gerakan massa. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai ISDV, PKI, pemogokan, dan pemberontakan 1926 cenderung menempatkan komunisme sebagai bahaya politik yang melampaui persoalan ekonomi semata.⁴⁴⁸ Dampaknya, gerakan radikal semakin dipahami sebagai ancaman terhadap keamanan kolonial, bukan semata-mata sebagai ekspresi ketidakpuasan sosial yang lahir dari keadaan masyarakat jajahan. Melalui pemberitaan tersebut, *De Locomotief* tidak hanya melaporkan perkembangan gerakan radikal, tetapi juga membantu membangun legitimasi bagi pengawasan dan penindakan pemerintah kolonial terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya.

⁴⁴⁷ *De Locomotief*, 19 Mei 1921.

⁴⁴⁸ *De Locomotief*, 1 Desember 1926.

Perkembangan dari pemberontakan 1926 menuju pengawasan pers pada akhir 1920-an dan awal 1930-an menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak hanya memandang organisasi politik sebagai ancaman, tetapi juga pers sebagai ruang penyebaran gagasan politik. Dalam situasi tersebut, pers dapat menjadi sarana pembentukan opini, kritik terhadap pemerintah, sekaligus penyebaran gagasan yang dianggap mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pembatasan terhadap pers menjadi bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk mengendalikan ruang publik politik di Hindia Belanda.

Sikap *De Locomotief* terhadap isu pembatasan pers memperlihatkan perubahan penting dalam orientasi politik surat kabar ini. Ketika muncul rancangan ordonansi pemberangusan pers pada periode 1927-1931, pers Eropa memberikan reaksi yang keras, tetapi tidak seragam.⁴⁴⁹ Dalam perdebatan tersebut, *De Locomotief* yang sebelumnya dikenal beraliran etis justru menyatakan persetujuan terhadap ordonansi pemberangusan pers. Sikap ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak selalu menempatkan kebebasan pers sebagai prinsip utama, terutama ketika kebebasan tersebut dianggap berpotensi mengganggu keamanan negara dan ketertiban masyarakat kolonial.

Persetujuan *De Locomotief* terhadap pembatasan pers semakin tampak ketika surat kabar ini sejak tahun 1927 menuntut tindakan yang lebih keras terhadap pemberitaan pers. Pada 8 Januari 1930, redaksi *De Locomotief* bahkan meminta diberlakukannya sensor terhadap pemberitaan pers Eropa karena khawatir bahwa gambaran yang keliru dan berita yang tidak benar dapat merugikan negara dan masyarakat.⁴⁵⁰ Sikap ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan *De Locomotief*, pers tetap harus tunduk pada kepentingan stabilitas kolonial. Kebebasan pers dapat diterima selama tidak dianggap mengancam ketertiban politik dan keamanan negara.

Sikap *De Locomotief* tersebut tidak diterima secara bulat oleh pers Eropa lainnya. *Java-Bode*, misalnya, mengecam sikap *De Locomotief* dan menganggap usulan pembatasan

⁴⁴⁹ Mirjam Maters, *op.cit.*, hlm. 299.

⁴⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 300.

terhadap kebebasan pers sebagai bentuk pengkhianatan dari lingkungan pers sendiri.⁴⁵¹ Kritik tersebut memperlihatkan bahwa di antara pers kolonial Eropa pun terdapat perbedaan pandangan mengenai batas kebebasan pers dan kepentingan ketertiban kolonial. Dalam konteks ini, *De Locomotief* berdiri pada posisi yang lebih dekat dengan gagasan pengendalian pers, sedangkan sebagian pers lain masih memandang pembatasan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan media.

Dengan demikian, dampak eksternal pemberitaan dan posisi politik *De Locomotief* terlihat pada penguatan wacana mengenai perlunya pengendalian terhadap ruang politik kolonial. Pada awal abad ke-20, surat kabar ini dapat tampil sebagai pendukung Politik Etis dan pengkritik kebijakan kolonial yang merugikan penduduk pribumi. Namun, ketika gerakan politik berkembang menjadi lebih radikal, baik melalui komunisme, pemogokan, pemberontakan, nasionalisme non-kooperatif, maupun pers yang dianggap menyebarkan berita berbahaya, *De Locomotief* cenderung mendukung pengawasan yang lebih keras. Perubahan ini menunjukkan bahwa kritik dan kebebasan dalam pandangan *De Locomotief* tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh melampaui kepentingan ketertiban dan otoritas kolonial.

Dampak internal pemberitaan *De Locomotief* dalam bidang politik dapat dilihat dari perubahan orientasi redaksional surat kabar tersebut dari masa ke masa. Pergantian pemimpin redaksi tidak hanya menunjukkan perubahan personal dalam struktur redaksi, tetapi juga memengaruhi cara *De Locomotief* membingkai isu-isu politik di Hindia Belanda. Setiap redaktur memiliki kecenderungan pandangan yang berbeda sesuai dengan latar belakang, situasi politik, dan perkembangan zaman yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberitaan politik *De Locomotief* tidak bersifat tetap, melainkan berubah mengikuti kepemimpinan redaksi dan konteks politik kolonial.

Pada masa Pieter Brooshooft, *De Locomotief* memperlihatkan kecenderungan etis-liberal yang kuat. Surat kabar ini menggunakan gagasan Politik Etis, Hutang Kehormatan, dan Balas Budi sebagai dasar untuk mengkritik kebijakan kolonial yang dianggap merugikan

⁴⁵¹ *Java Bode*, 1 Maret 1930.

penduduk pribumi.⁴⁵² Kritik terhadap sewa tanah, pajak, kerja paksa, opium, pegadaian, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja menunjukkan bahwa Brooshooft menempatkan persoalan pribumi sebagai masalah struktural dalam pemerintahan kolonial.⁴⁵³ Namun, kritik tersebut tetap berada dalam batas kolonial. *De Locomotief* tidak menolak kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, melainkan menuntut agar kekuasaan tersebut dijalankan secara lebih adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dampak internal pada masa Brooshooft tampak pada terbentuknya dasar etis-reformis dalam orientasi politik *De Locomotief*.

Pada masa M. Vierhout, arah etis yang dibangun Brooshooft masih berlanjut, tetapi mulai meluas pada persoalan industri kolonial, anggaran negara, pendidikan, dan kemunculan kaum pribumi terdidik.⁴⁵⁴ *De Locomotief* masih mengkritik kebijakan kolonial yang mengabaikan kesejahteraan penduduk, seperti rendahnya upah, lemahnya perlindungan tenaga kerja, penghematan anggaran sosial, dan kurangnya perhatian pada pendidikan serta kesehatan.⁴⁵⁵ Akan tetapi, pada masa ini mulai terlihat perhatian terhadap munculnya aktor pribumi baru, terutama melalui Boedi Oetomo. Organisasi tersebut diberitakan secara simpatik karena dianggap bergerak dalam pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial.⁴⁵⁶ Dengan demikian, masa Vierhout memperlihatkan dampak internal berupa kesinambungan etisisme Brooshooft sekaligus peralihan perhatian dari pribumi sebagai korban eksploitasi menuju pribumi sebagai kelompok terdidik yang mulai berorganisasi.

Pada masa J.E. Stokvis, orientasi politik *De Locomotief* mulai lebih selektif. Gerakan pribumi tidak lagi hanya hadir sebagai objek pembelaan Politik Etis, tetapi mulai muncul

⁴⁵² *De Locomotief*, 6,7,8,9 Agustus 1901.

⁴⁵³ *De Locomotief*, 12 Juni 1902.

⁴⁵⁴ *De Locomotief*, 13 Mei 1904.

⁴⁵⁵ *De Locomotief*, 3 Juni 1905.

⁴⁵⁶ *De Locomotief*, 30 Oktober 1905.

sebagai organisasi massa dan kekuatan politik.⁴⁵⁷ Boedi Oetomo masih dapat diterima karena bergerak dalam bidang sosial-edukatif, sedangkan Sarekat Islam mulai dipandang lebih hati-hati karena memiliki basis massa yang luas. Batas toleransi *De Locomotief* semakin jelas ketika berhadapan dengan Indische Partij dan ISDV.⁴⁵⁸ Gerakan yang dianggap edukatif, tertib, dan legal masih dapat diterima, tetapi gerakan yang dianggap terlalu politis, radikal, atau menantang otoritas kolonial mulai dicurigai. Dengan demikian, dampak internal pada masa Stokvis tampak pada perubahan dari etisisme sosial-edukatif menuju liberalisme kolonial yang lebih selektif terhadap politik massa.

Pada masa A.J. Lievegoed, *De Locomotief* masih memperlihatkan corak liberal, tetapi liberalisme tersebut menjadi semakin defensif ketika berhadapan dengan gerakan buruh, sosialisme, dan komunisme. Surat kabar ini masih dapat memberi ruang bagi tuntutan politik seperti demokrasi, hak pilih, pemerintahan mandiri, organisasi buruh, dan kritik terhadap lembaga kolonial.⁴⁵⁹ Namun, ketika tuntutan tersebut dikaitkan dengan ISDV, Sneevliet, Bolshevisme, pemogokan politik, dan PKI, *De Locomotief* mulai menempatkannya sebagai ancaman terhadap ketertiban kolonial.⁴⁶⁰ Masa Lievegoed menunjukkan bahwa kebebasan politik masih dapat diterima selama tidak dianggap membuka jalan bagi revolusi. Dengan demikian, dampak internal pada masa ini terlihat dalam pergeseran dari liberalisme etis menuju liberalisme kolonial yang defensif terhadap komunisme.

Pada masa W.G.N. de Keizer, orientasi politik *De Locomotief* bergeser lebih kuat ke arah kanan-konservatif. Perubahan ini tampak dalam pemberitaan terhadap PNI, Partindo, Soekarno, dan nasionalisme non-kooperatif. Berbeda dengan masa Lievegoed yang masih memberi ruang bagi tuntutan reformasi politik, masa De Keizer lebih menekankan ketertiban,

⁴⁵⁷ *De Locomotief*, 22 Maret 1910.

⁴⁵⁸ *De Locomotief*, 7 Agustus 1913.

⁴⁵⁹ *De Locomotief*, 13 April 1918.

⁴⁶⁰ *De Locomotief*, 2 Januari 1919.

keamanan, pengawasan, dan pembelaan terhadap otoritas kolonial.⁴⁶¹ PNI tidak dibingkai sebagai gerakan komunis, tetapi tetap dipandang berbahaya karena menuntut kemerdekaan, menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial, dan membangun kekuatan politik di luar kendali negara kolonial.⁴⁶² Penangkapan Soekarno, pengawasan organisasi, pembatasan pers, dan pembuangan tokoh nasionalis dipahami sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas.⁴⁶³ Dengan demikian, dampak internal pada masa De Keizer adalah menguatnya orientasi konservatif dan anti-nasionalisme non-kooperatif dalam pemberitaan *De Locomotief*.

Pada masa W.A. van Goudoever, *De Locomotief* memperlihatkan sebagian kembalinya corak etis-liberal, tetapi dalam bentuk yang lebih terbatas. Surat kabar ini tampak lebih dapat menerima nasionalisme yang legal, kolektif, dan terorganisasi seperti GAPI.⁴⁶⁴ Berbeda dengan PNI dan Partindo yang diberitakan sebagai ancaman karena bersifat non-kooperatif, GAPI dipandang lebih wajar karena bergerak melalui jalur organisasi yang lebih terstruktur dan tidak langsung menampilkan bentuk agitasi massa. Namun, keterbukaan tersebut tetap dibatasi oleh situasi akhir 1930-an yang berada dalam bayang-bayang Perang Dunia II. Ancaman perang membuat ruang politik dan pers semakin tunduk pada kepentingan keamanan kolonial.⁴⁶⁵ Dengan demikian, masa Van Goudoever menunjukkan dampak internal berupa pengakuan terbatas terhadap nasionalisme legal, tetapi tetap berada dalam batas pengawasan kolonial dan sensor perang.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak internal pemberitaan *De Locomotief* tampak pada perubahan orientasi politik surat kabar ini sesuai dengan pergantian redaktur dan perkembangan zaman. Pada masa Brooshooft dan Vierhout, *De Locomotief* lebih

⁴⁶¹ *De Locomotief*, 2 November 1927.

⁴⁶² *De Locomotief*, 1 Juni 1928.

⁴⁶³ *De Locomotief*, 30 Desember 1929.

⁴⁶⁴ *De Locomotief*, 22 Mei 1939.

⁴⁶⁵ *De Locomotief*, 19 Maret 1940.

menonjolkan kritik etis terhadap kebijakan kolonial. Pada masa Stokvis, surat kabar ini mulai selektif terhadap politik massa. Pada masa Lievegoed, corak liberal masih tampak, tetapi menjadi defensif terhadap komunisme. Pada masa De Keizer, sikapnya semakin konservatif terhadap nasionalisme non-kooperatif. Sementara pada masa Van Goudoever, sebagian unsur etis-liberal kembali terlihat melalui penerimaan terhadap nasionalisme legal seperti GAPI, meskipun tetap dibatasi oleh kepentingan keamanan dan sensor perang. Dengan demikian, perbedaan redaktur memberikan dampak internal terhadap cara *De Locomotief* menulis, menilai, dan membingkai isu-isu politik di Hindia Belanda.

4.3.2 Dampak Sosial

Sebagai surat kabar kolonial berbahasa Belanda, *De Locomotief* terutama dibaca oleh kalangan Eropa, seperti pejabat kolonial, pegawai pemerintah, pengusaha, kaum profesional, dan masyarakat perkotaan yang memiliki kemampuan membaca bahasa Belanda. Di luar kelompok Eropa, pembacanya kemungkinan besar terbatas pada kalangan pribumi terdidik, elite birokrasi, dan bangsawan Jawa yang memiliki kemampuan bahasa Belanda serta akses ekonomi untuk memperoleh surat kabar tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak sosial *De Locomotief* tidak dapat dipahami sebagai pengaruh langsung terhadap seluruh masyarakat pribumi. Penduduk pribumi memang sering menjadi objek pemberitaan, terutama dalam isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, administrasi desa, dan kesejahteraan sosial. Namun, mereka tidak selalu menjadi pembaca utama dari pemberitaan tersebut. Dengan demikian, dampak sosial *De Locomotief* lebih tepat dipahami sebagai dampak wacana dalam ruang publik kolonial, yaitu bagaimana persoalan sosial pribumi dibicarakan, ditafsirkan, dan diperdebatkan oleh kalangan Eropa serta sebagian kecil elite pribumi terdidik.

Selain pembaca, dampak sosial *De Locomotief* juga dapat dilihat dari jaringan penulis dan koresponden yang terlibat dalam surat kabar tersebut. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker sebagai penulis atau koresponden menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai berita, tetapi juga sebagai ruang bagi kalangan terdidik untuk menyampaikan pandangan sosial dan politiknya. Melalui tulisan para

koresponden, isu-isu mengenai masyarakat Hindia Belanda dapat masuk ke dalam ruang baca kolonial dan menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas. Dengan demikian, koresponden memiliki peran penting dalam memperluas tema sosial yang dibahas oleh *De Locomotief*, meskipun ruang tersebut tetap dibatasi oleh bahasa Belanda, struktur redaksi kolonial, dan karakter pembacanya.

Tabel 4.1
Daftar harga surat kabar *De Locomotief* tahun 1901 hingga 1940.

No.	Harga	Tahun
1.	f 20	1901-1906
2.	f 7.50	1907-1911
3.	f 7.80	1912-1917
4.	f 9	1918-1921
5.	f 12	1922-1932
6.	f 10	1933-1940

Sumber: Diolah dari data surat kabar *De Locomotief* per edisi 1901-1940.

Tabel di atas menunjukkan bahwa *De Locomotief* merupakan surat kabar yang memiliki keterbatasan jangkauan sosial. Sebagai surat kabar berbahasa Belanda, pembaca utama *De Locomotief* bukanlah masyarakat pribumi secara umum, melainkan kalangan Eropa di Hindia Belanda, seperti pejabat kolonial, pegawai, pengusaha, kaum profesional, dan masyarakat perkotaan yang terbiasa menggunakan bahasa Belanda.⁴⁶⁶ Di luar kelompok Eropa, hanya sebagian kecil kalangan pribumi terdidik, elite birokrasi, dan bangsawan Jawa yang memiliki kemampuan bahasa Belanda serta akses ekonomi untuk membaca atau berlangganan surat kabar tersebut.

Harga langganan *De Locomotief* juga memperlihatkan bahwa surat kabar ini tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pribumi biasa. Pada periode 1901-1906, harga langganannya mencapai f 20. Setelah tahun 1906, harga tersebut memang turun dan relatif lebih stabil, yaitu f 7,50 pada 1907-1911, f 7,80 pada 1912-1917, f 9 pada 1918-1921, f 12

⁴⁶⁶ *De Locomotief*, 8 Agustus 1901.

pada 1922-1932, dan f 10 pada 1933-1940. Jika dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang menurut lamanya periode, harga langganannya *De Locomotief* pada 1907-1940 berada sekitar f 9,8. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun harga langganannya tidak selalu tinggi seperti periode awal, akses terhadap *De Locomotief* tetap membutuhkan kemampuan ekonomi tertentu.

Kondisi tersebut penting untuk memahami dampak sosial pemberitaan *De Locomotief*. Bagi kalangan Eropa yang bekerja dalam pemerintahan, perusahaan swasta, perkebunan, perdagangan, atau profesi terdidik, harga langganannya tersebut relatif lebih mungkin dijangkau karena mereka berada dalam struktur ekonomi kolonial yang lebih mapan. Akan tetapi, bagi masyarakat pribumi biasa seperti petani, buruh, dan penduduk desa, harga tersebut bukan pengeluaran yang mudah. Dengan demikian, meskipun *De Locomotief* banyak membahas persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, desa, dan kesejahteraan pribumi, masyarakat pribumi secara luas tidak dapat dianggap sebagai pembaca utama surat kabar ini.⁴⁶⁷

Dampak sosial *De Locomotief* karena itu lebih tepat dipahami sebagai dampak wacana dalam ruang publik kolonial. Surat kabar ini membawa persoalan sosial masyarakat pribumi ke hadapan pembaca Eropa dan elite terdidik. Isu-isu seperti rendahnya upah, beban pajak, buruknya pelayanan kesehatan, terbatasnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan terhadap penduduk desa dibicarakan dalam ruang baca kolonial. Dengan cara ini, *De Locomotief* ikut membentuk cara pandang kalangan kolonial terhadap persoalan sosial pribumi, meskipun suara masyarakat pribumi sendiri tidak selalu hadir secara langsung sebagai subjek utama dalam pemberitaan.

Hal ini memperlihatkan adanya jarak sosial antara pihak yang diberitakan dan pihak yang membaca pemberitaan. Penduduk pribumi sering menjadi objek pembahasan dalam *De Locomotief*, tetapi tidak selalu menjadi pembaca utama surat kabar tersebut. Kaum pribumi yang mungkin mengaksesnya umumnya berasal dari kelompok terdidik, elite birokrasi, atau bangsawan Jawa yang memiliki kemampuan bahasa Belanda dan kedudukan ekonomi lebih

⁴⁶⁷ *De Locomotief*, 9 Agustus 1901.

baik. Oleh karena itu, dampak sosial *De Locomotief* bersifat terbatas dan tidak merata. Surat kabar ini memang ikut memperluas pembahasan mengenai penderitaan dan kesejahteraan pribumi, tetapi pembahasan tersebut berlangsung terutama dalam ruang sosial kolonial yang didominasi oleh kalangan Eropa dan elite terdidik.⁴⁶⁸

Dengan demikian, dampak sosial pemberitaan *De Locomotief* tidak dapat dipahami sebagai pengaruh langsung terhadap seluruh masyarakat Hindia Belanda. Dampaknya lebih tampak pada pembentukan opini dan wacana sosial di kalangan pembaca kolonial mengenai bagaimana masyarakat pribumi harus dipahami, dibantu, dididik, dan disejahterakan. Namun, wacana tersebut tetap memiliki sifat paternalistik karena masyarakat pribumi lebih sering ditempatkan sebagai kelompok yang dibicarakan, bukan sebagai kelompok yang sepenuhnya berbicara atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, *De Locomotief* berperan dalam memperkuat perhatian terhadap persoalan sosial pribumi, tetapi perhatian tersebut tetap berada dalam batas struktur sosial kolonial.

⁴⁶⁸ *De Locomotief*, 31 Oktober 1905.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *De Locomotief* merupakan salah satu surat kabar kolonial berbahasa Belanda yang memiliki posisi penting dalam perkembangan pers di Hindia Belanda. Surat kabar ini terbit di Semarang dan berkembang dari media iklan serta berita umum menjadi surat kabar yang ikut membentuk wacana politik kolonial. Sebelum tahun 1901, *De Locomotief* telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan kolonial seperti tenaga kerja, upah, administrasi desa, kemiskinan, eksploitasi ekonomi, dan tanggung jawab moral Belanda terhadap Hindia Belanda. Pemberitaan sebelum tahun 1901 ini menjadi dasar penting untuk memahami kecenderungan etis-liberal *De Locomotief* pada awal abad ke-20.

Isi pemberitaan politik *De Locomotief* selama periode 1901-1940 memperlihatkan perubahan sesuai dengan perkembangan politik di Hindia Belanda. Pada periode 1901-1907, surat kabar ini menampilkan corak etis-liberal melalui dukungan terhadap gagasan Politik Etis dan kritik terhadap kebijakan kolonial yang merugikan penduduk pribumi. Pada masa pengaruh Pieter Brooshooft, *De Locomotief* menggunakan gagasan Hutang Kehormatan, Politik Etis, dan Balas Budi sebagai dasar untuk menuntut perbaikan kesejahteraan pribumi. Namun, kritik tersebut tetap berada dalam batas kolonial karena tidak menolak keberadaan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda.

Pada periode 1908-1917, *De Locomotief* mulai menyoroti munculnya organisasi pribumi modern. Boedi Oetomo diberitakan secara relatif simpatik karena bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, literasi, dan kemajuan sosial. Namun, ketika muncul Sarekat Islam, Indische Partij, dan ISDV, sikap surat kabar ini menjadi lebih selektif. Gerakan pribumi dapat diterima selama bergerak secara legal, tertib, edukatif, dan tidak menantang otoritas kolonial secara langsung. Sebaliknya, gerakan yang membawa politik massa, kritik konfrontatif, sosialisme, atau radikalisme mulai dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban kolonial. Pada periode 1918-1927, pemberitaan *De Locomotief* banyak berkaitan dengan gerakan buruh, pemogokan, sosialisme, komunisme, ISDV, PKI, dan pemberontakan 1926.

Surat kabar ini masih dapat mengakui adanya persoalan sosial-ekonomi seperti rendahnya upah, buruknya kondisi kerja, dan lemahnya perlindungan terhadap buruh. Akan tetapi, ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan komunisme, Bolshevisme, pemogokan politik, dan jaringan revolusioner internasional, *De Locomotief* mulai menempatkannya sebagai persoalan keamanan politik. Pemberontakan 1926 menjadi titik penting yang memperkuat pandangan surat kabar ini bahwa komunisme merupakan ancaman terhadap stabilitas kolonial. Pada periode 1928-1940, pemberitaan *De Locomotief* semakin diarahkan pada nasionalisme non-kooperatif, pengawasan pers, dan stabilitas kolonial menjelang Perang Dunia II. PNI, Partindo, dan gerakan yang berkaitan dengan Soekarno dipandang berbahaya karena menuntut kemerdekaan, menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial, menggerakkan massa, dan membangun kekuatan politik di luar kendali negara kolonial. Penangkapan Soekarno, pengawasan organisasi, pembatasan pers, dan sensor diberitakan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban. Namun, *De Locomotief* tidak menolak semua bentuk nasionalisme. Organisasi seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI masih dapat diberitakan dengan nada lebih wajar karena bergerak secara legal, kolektif, dan lebih moderat.

Dampak politik pemberitaan *De Locomotief* terlihat dalam pembentukan wacana kolonial mengenai batas antara gerakan politik yang dianggap sah dan gerakan yang dianggap berbahaya. Surat kabar ini ikut memperkuat pandangan bahwa kritik sosial dan kemajuan pribumi masih dapat diterima selama berada dalam jalur legal dan tidak menantang

otoritas kolonial. Sebaliknya, gerakan yang berkaitan dengan komunisme, pemogokan politik, propaganda revolusioner, nasionalisme non-kooperatif, dan tuntutan kemerdekaan dibingkai sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Dalam isu pembatasan pers, *De Locomotief* juga menunjukkan bahwa kebebasan pers tetap diletakkan di bawah kepentingan stabilitas kolonial. Dampak sosial pemberitaan *De Locomotief* terlihat dalam cara surat kabar ini membawa persoalan sosial pribumi ke dalam ruang publik kolonial. Isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, administrasi desa, dan kesejahteraan pribumi dibicarakan melalui sudut pandang pers kolonial. Namun, dampak sosial tersebut bersifat terbatas karena *De Locomotief* merupakan surat kabar berbahasa Belanda yang pembaca utamanya berasal dari kalangan Eropa, pegawai kolonial, pengusaha, kaum profesional, serta sebagian kecil pribumi terdidik dan bangsawan Jawa. Dengan demikian, penduduk pribumi lebih sering menjadi objek pemberitaan daripada pembaca utama surat kabar tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *De Locomotief* tidak dapat disebut sepenuhnya pro-pribumi atau sepenuhnya pro-pemerintah kolonial. Posisinya lebih kompleks. Di satu sisi, surat kabar ini mendukung perbaikan nasib penduduk pribumi, pendidikan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan kritik terhadap eksploitasi kolonial. Di sisi lain, dukungan tersebut tetap berada dalam kerangka kekuasaan Belanda. *De Locomotief* mendukung kemajuan pribumi selama kemajuan tersebut legal, moderat, tertib, dan tidak mengancam otoritas kolonial. Ketika gerakan pribumi berkembang menjadi politik massa, komunisme, nasionalisme non-kooperatif, dan tuntutan kemerdekaan, surat kabar ini cenderung menjadi defensif dan lebih menekankan ketertiban kolonial.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Reglement Op de Drukwerken, pasal 13 tahun 1856

Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 582, 1939

Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 79, 1940

Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 134, 1940

Surat Kabar

Bataviase Nouvelles, 29 Agustus 1744.

Java government gazette, 29 Februari 1812.

Java Bode, 1 Maret 1930.

De Locomotief, 4 Februari 1888.

_____, 17 Maret 1887.

_____, 23 Maret 1887.

_____, 10 Mei 1887.

_____, 25 Mei 1887.

_____, 19 Januari 1897.

_____, 29 Desember 1897.

_____, 31 Januari 1898.

_____, 1 Februari 1898.

_____, 30 Agustus 1899.

_____, 17 Juni 1901.

_____, 6 Agustus 1901.

_____, 7 Agustus 1901.

_____, 8 Agustus 1901.

_____, 9 Agustus 1901.

_____, 31 Mei 1902.

_____, 12 Juni 1902.

_____, 26 November 1903.

_____, 13 Mei 1904.
_____, 3 Juni 1905.
_____, 30 Oktober 1905.
_____, 31 Oktober 1905.
_____, 15 Januari 1906.
_____, 26 Agustus 1907.
_____, 24 Juli 1908.
_____, 8 September 1908.
_____, 3 Oktober 1908.
_____, 4 Juni 1909.
_____, 30 Juni 1909.
_____, 22 Maret 1910.
_____, 1 Agustus 1910.
_____, 25 Oktober 1911.
_____, 16 November 1912.
_____, 20 Desember 1912.
_____, 1 Agustus 1913.
_____, 7 Agustus 1913.
_____, 4 Januari 1917.
_____, 5 Januari 1917.
_____, 29 Mei 1917.
_____, 14 September 1917.
_____, 13 April 1918.
_____, 9 Oktober 1918.
_____, 2 Januari 1919.
_____, 31 Desember 1919.
_____, 4 Maret 1920.
_____, 19 Mei 1921.
_____, 23 Juni 1922.

_____, 12 Maret 1923.
 _____, 5 Februari 1924.
 _____, 19 Mei 1925.
 _____, 16 November 1926.
 _____, 20 November 1926.
 _____, 1 Desember 1926.
 _____, 12 Januari 1927.
 _____, 2 November 1927.
 _____, 9 November 1927.
 _____, 1 Juni 1928.
 _____, 8 Juni 1928.
 _____, 15 Agustus 1928.
 _____, 30 Desember 1929.
 _____, 10 Mei 1930.
 _____, 8 September 1931.
 _____, 17 September 1931.
 _____, 8 Februari 1932.
 _____, 28 November 1932.
 _____, 1 Agustus 1933.
 _____, 31 Juli 1934.
 _____, 26 Oktober 1934.
 _____, 26 Oktober 1935.
 _____, 30 Desember 1935.
 _____, 12 Maret 1936.
 _____, 8 Desember 1936.
 _____, 6 Agustus 1937.
 _____, 1 November 1937.
 _____, 31 Mei 1938.
 _____, 22 Mei 1939.

_____, 29 Januari 1940.

_____, 19 Maret 1940.

Buku

Darwis, Yuliandre, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Faber, von, *A Short History of Journalism in the Dutch East Indies*, (Surabaya: G.Kolff & Co, 1930).

Harahap, Akhir Matua, *Sejarah Pers di Indonesia: Awal Kebangkitan Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, Tahun 2023).

Herlina, Nina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011).

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Tirta Wacana, 2018

Maters, Mirjam, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, (Terj. Mien Joebhaar) (Jakarta: Hasta Mitra KITLV, 2003).

Sunarlan, *et.al.*, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018).

Surjomihardjo, Abdurrachman, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

Artikel, Skripsi, Disertasi, Jurnal, Tesis

Aprilia, Alfa Tirza, *et.al.*, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870", dalam *JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES "ESTORIA"*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Chaniago, Danil Mahmud dan Umi Rusmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial di Indonesia", dalam *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. VIII, No. 16, Juli-Desember 2018.

Fachrurozi, Miftahul Habib, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra", dalam *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 2, No. 1, 2019.

- Habib, Miftahul F, "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX", dalam *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol. 12, No. 2, Maret 2017.
- Putri, Hermalian, " Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669", dalam *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Narendra, Rama "Solidaritas Islam dalam Surat Kabar Oetoesan Hindia pada Perang Dunia I Tahun 1914-1918", dalam *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Surabaya.
- Kasijanto, "Media dan Monopoli Dagang ; Percetakan dan Penerbitan di Indonesia pada masa VOC", dalam *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2008.
- Larasaty, Dhiana Putri, Afiliasi Ilafi, "Berita Koran Belanda Pada Masa Kolonial Tentang Desa Widuri di Kabupaten Pemalang", dalam *Jurnal Siginjai (Journal of History Studies Universitas Jambi)*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Locher-Scholten, E. B., "MR. P. Brooshooft, Een Biografische Schets In Koloniaal-Ethisch Perspektief", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 1976.
- Prayogi, Arditya dan Ardiyan Darutama, "Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia: Respon Politis atas Isu Pergerakan Nasional 1927-1930" , dalam *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 12, No. 2, Juli 2022.
- Qursyah, Karen Nisrina, Achmad Sunjayadi, " Penerapan *Hormat Circulaire* 1904 dalam Pandangan Surat Kabar di Hindia Belanda (1904-1906)", dalam *Multikultura Jurnal Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 3, 2025.
- Sinaga, Rosmaida, *et.al.*, "Masa Pemerintahan VOC di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC", dalam *AR RUMMAN Journal of Education and Learning Evaluation*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Siswati, Endah, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci", dalam *Jurnal Translitera*, Vol. 5, 2017.

Sugiarnik, Ira, ” Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya Pada Tahun 1900-1945 Serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi”, dalam *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2022.

Triyanta, Agus, “Fajar Pers Muslim Bumi Putra di Masa Hindia Belanda: Wacana Anti Kapitalisme dalam Majalah Medan Moeslimin (1915-1926)”, dalam *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* ,Vol. 7, No. 1, Januari-Juli 2023.

Yuliati, Dewi, ”Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia”, dalam *ANUVA* Vol. 2, No. 3, 2018.

Zaki , Ahmad dan Nabillah Nur, ”Analisis Kritik Sosial dalam Novel *Max Havelaar* Karya Multatuli”, dalam *APPISI Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024.

Foto dan Gambar

Koleksi KITLV Leiden No. 4516

Koleksi KITLV Leiden No. 4540

Koleksi KITLV Leiden No. 43683

LAMPIRAN

Lampiran A

Perpisahan pemimpin redaksi *De Locomotief* P. Brooshooft di Semarang Tahun 1904.



Sumber: Koleksi KITLV Leiden No. 4540

Lampiran B

Paviliun surat kabar harian *De Locomotief* di Gedung Handel Semarang tahun 1914.



Sumber: Koleksi KITLV Leiden No. 43683